JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ISBN : 978-602-14314-8-1

PROSIDING

SEMINAR DAN TEMU AKADEMISI PLS TINGKAT NASIONAL

Peran dan Ekspektasi Pendidikan Nonformal
Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

9 Mei 2015

ISBN: 978-602-14314-8-1

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROSIDING

SEMINAR DAN TEMU AKADEMISI PLS TINGKAT NASIONAL

Peran dan Ekspektasi Pendidikan Nonformal
Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

9 Mei 2015

ISBN 000-000-00000-0-0

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

 ISBN 000-000-00000-0-0

PROSIDING

SEMINAR DAN TEMU AKADEMISI PLS TINGKAT NASIONAL

Peran dan Ekspektasi Pendidikan Nonformal
Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

PROSIDING SEMINAR DAN TEMU AKADEMISI PLS TINGKAT NASIONAL

Peran dan Ekspektasi Pendidikan Nonformal
Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

9 Mei 2015

ISBN 000-000-00000-0-0

©2015, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Unnes
Alamat : Gedung A2 Lantai 2 FIP Unnes Kampus Sekaran
Telepon/Fax : (024) 8508025
E-mail : pnfunnes@yahoo.com

PROSIDING SEMINAR DAN TEMU AKADEMISI PLS TINGKAT NASIONAL

Peran dan Ekspektasi Pendidikan Nonformal
Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Editor:

Prof. Dr. Rasdi Ekosiswoyo, M.Sc
Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd
Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd
Dr. Achmad Rifa'i RC, M.Pd
Dr. Amin Yusuf, M.Si

Layouter:

Mu'arifuddin, S.Pd

 ISBN 000-000-00000-0-0

PRAKATA

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penyusunan prosiding ini dapat diselesaikan. Panitia merasa bersyukur dan berterimakasih banyak atas kerjasama dengan begitu prosiding ini dapat hadir di hadapan para pembaca yang budiman. Prosiding makalah seminar dan temu akademisi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tingkat nasional merupakan rasa tanggung jawab akademik dalam mengembangkan atmosfir akademik pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah terutama di Universitas Negeri Semarang.

Seminar dan temu akademisi PLS tingkat nasional yang bertemakan "Peran dan Ekspektasi Pendidikan Nonformal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bertujuan dalam publikasi ilmiah. Seminar ini sebagai media mengkomunikasikan dan memfasilitasi pertukaran informasi yang ada kaitannya dengan pengembangan dunia pendidikan luar sekolah.

Prosiding ini memuat 23 judul makalah. Sebagai pemakalah utama adalah Ir. Khairul Anwar, MM (direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang menyampaikan orasi ilmiahnya dengan judul "Prospektus Pendidikan Nonformal dalam Peningkatan SDM". Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan judul "Profesionalisme PTK PNF dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". Kegiatan seminar ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2015.

Kami menyadari dalam penyusunan prosiding ini tentu ada keterbatasannya. Oleh karenanya, dimohon saran dan kritik demi penyempurnaan pada waktu mendatang. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman paling terutama bagi penulis yang ada di prosiding ini. Amien, terima kasih.

Hormat Kami,
Panitia

 ISBN 000-000-00000-0-0

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Editor v
Kata Pengantar vii
Daftar Isi ix

PROSPEKTUS PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PENINGKATAN SDM
Ir. Khairul Anwar, MM 1

PROFESIONALISME PTK PNF DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 5

PELUANG DAN TANTANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PTK PNF) DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Juwandi 11

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA
Supriyono 25

KEPROFESIONALAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENDIDIKAN NONFORMAL
Sofino 43

MENGHADAPI MEA: INDONESIA PERLU BELAJAR DARI CINA?
Yoyon Suryono 53

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS PENDIDIKAN NONFORMAL UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL
Ari Tri Winarno 57

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NONFORMAL MELALUI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR
Syamsul Bakhri Gaffar 69

STRATEGI PEMBELAJARAN PARTISIPASI DALAM MENINGKATKAN HASIL PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN KARAWANG
Dayat Hidayat 75

PERAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Tri Joko Raharjo 89

MODEL PELATIHAN BERBASIS NILAI KEAGAMAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER GENERASI MUDA
Jajat S. Ardiwinata, Viena Rusmiati Hasanah, Elih Sudiapermana 99

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN NONFORMAL MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Joko Sutarto 113

STRATEGI PENDIDIKAN NONFORMAL MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Sungkowo Edy Mulyono 125

EVALUASI POTENSI KELOMPOK BELAJAR PAKET B UNTUK MENUNJANG WAJIB BELAJAR 9 TAHUN (STUDI PADA BEBERAPA DAERAH TINGKAT II DI JAWA TENGAH)
Utsman 133

PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Puji Yanti Fauziah 149

KEPROFESIONALAN SDM PNF MENGHADAPI MEA
Abednego 155

DAMPAK IMPLEMENTASI METODE PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH PADA TUTORIAL PROGRAM PAKET B BINAAN PKBM AL ISHLAH JAKARTA TIMUR
Durotul Yatimah 161

MENCARI MODEL PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI YANG IDEAL GUNA MEMPERSIAPKAN SDM HANDAL INDONESIA DALAM MERAIH SUKSES DI ERA KOMPETENSI GLOBALISASI
Muhammad Ilham Abdullah 179

EVALUASI PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
Gatot Margono 189

DESAIN PROGRAM PENGUATAN DESA LABSITE PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL MELALUI KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
Zulkarnain 195

MEMBANGUN MASYARAKAT PEMBERDAYA (HOW TO BUILD EMPOWERING SOCIETY)
Ansori 209

PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Bagus Kisworo 219

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MAMPU BERSAING DALAM MEA MELALUI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN
Azizah Husin 227

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN NONFORMAL
Yuli Utanto 239

PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KETENAGAKERJAAN MASYARAKAT DESA YANG BERDAYA SAING DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Tri Suminar 261

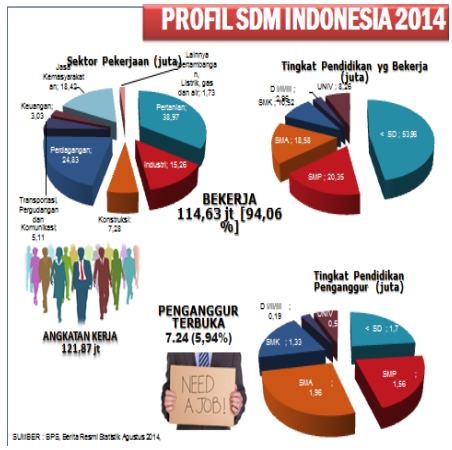

TANTANGAN DAN PELUANG BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL HANYA DAPAT DIHADAPI DENGAN PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA

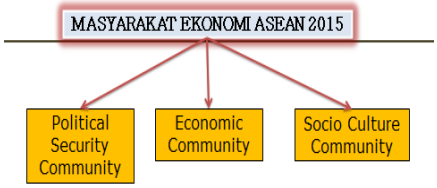

PELUANG	TANTANGAN
Perluasan pasar bagi produk dan jasa Indonesia	Masuknya produk dan jasa luar negeri/ASEAN ke Indonesia
Terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja terampil Indonesia	Masuknya tenaga kerja terampil LN/ ASEAN ke Indonesia, bersaing dengan tenaga kerja lokal
	Emigrasi tenaga kerja terampil berkualitas dari Indonesia ke negara-negara ASEAN/LN

 ISBN 978-602-14314-8-1

KONDISI PASAR KERJA

Dasar Hukum: KURSUS dan PELATIHAN

[UU No. 20/2003 pasal 26]

(2) Pedidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada *penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional*

(3) Pendidikan nonformal meliputi *pendidikan kecakapan hidup*, pendidikan anak usia dini, *pendidikan kepemudaan*, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, *pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja*, pendidikan kesetaraan, pendidikan lain yg ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM KERANGKA AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KESATU (NAWA CITA) :

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran.

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KEENAM (NAWA CITA) :

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

9

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 2015-2019

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015-2019

- AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
- AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN LINTAS BIDANG
- AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH

NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

NAWA KERJA KETENAGA KERJAAN

1. PENGUATAN PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL;
2. PERCEPATAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA;
3. PERCEPATAN SERTIFIKASI PROFESI;
4. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA FORMAL;
5. PENGUATAN WIRAUSAHA PRODUKTIF;
6. PENCIPTAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG SEHAT DAN PRODUKTIF;
7. PENEGAKKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN;
8. PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN;
9. PELAYANAN KETENAGAKERJAAN SEDERHANA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

11

KEBIJAKAN KEMNAKER MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

1. Percepatan Peningkatan kompetensi tenaga kerja
2. Percepatan Sertifikasi Kompetensi
3. Pengendalian Tenaga Kerja Asing

MEMBANGUN SDM BERBASIS KOMPETENSI YANG BERDAYA SAING

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM YANG BERDAYA SAING

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KKNI

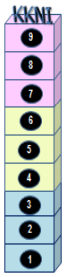

- **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat **menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan** antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- **KKNI** merupakan **perwujudan mutu dan jati diri** Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia
- KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KKNI

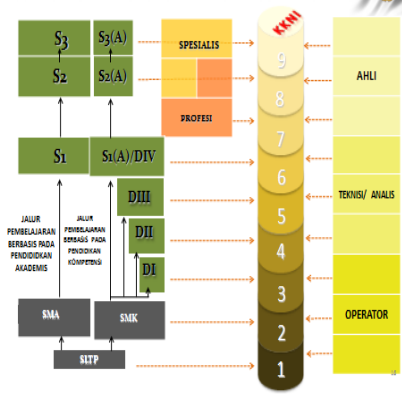

PERAN STRATEGIS KKNI

1. PEMBERIAN PENGAKUAN NASIONAL SECARA KONSISTEN TERHADAP LUARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
   - Alat pengelompokan tenaga kerja berdasarkan kompetensinya
   - Pengaturan pola karier pegawai yang Berbasis kompetensi
2. INTEGRASI DAN KORELASI ANTARA JENJANG KARIER DAN JENJANG KUALIFIKASI
   - Belum ada sistem efektif yang dapat dijadikan acuan secara nasional mengenai integrasi dan korelasi antara jenjang karier tenaga kerja dengan kualifikasi yang dimiliki
3. MEMBERI ARAH YANG JELAS KEPADA SETIAP INDIVIDU UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSINYA BAIK DALAM BIDANG PENDIDIKAN MAUPUN PELATIHAN
4. MENDORONG OPTIMALISASI SUMBER DAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5. MENDORONG TERCAPAINYA PENGAKUAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP SETIAP KUALIFIKASI YANG DIKEMBANGKAN DI INDONESIA

PERAN KKNI DALAM KERJASAMA REGIONAL ASEAN

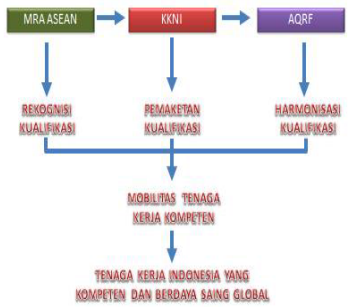

 ISBN 978-602-14314-8-1

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam penerapan KKNI

- Sosialisasi/diseminasi kebijakan KKNI kepada pemangku kepentingan khususnya industri dan asosiasi profesi.
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga diklat dan industri
- Mendorong lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dalam mendisain program diklat berbasis KKNI
- Mendorong sektor, kementerian teknis/lembaga untuk menfasilitasi :
  a. Pengembangan standar kompetensi kerja.
  b. Pengembangan program dan kurikulum diklat berbasis KKNI
  c. Pelaksanaan sertifikasi berbasis KKNI
- Mendorong industri dan asosiasi profesi untuk pengakuan terhadap KKNI

TERIMA KASIH

PROFESIONALISME PTK PNF DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Disajikan pada Seminar Nasional
"PERAN DAN EKSPEKTASI PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENGAHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)"
Tanggal 9 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah

SISTIMATIKA

- PENDAHULUAN
- PASAR BEBAS ASEAN (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN/MEA)
- KONDISI DAN MASALAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
- PROFESIONALISME PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- KEBIJAKAN DAN PROGRAM
- PENUTUP DAN REKOMENDASI

PENDAHULUAN

- MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) merupakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Satu negara menjual barang/jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehinggi kompetisi akan semakin ketat, yang akan diberlakukan awal tahun 2016.
- Empat pilar MEA : (1) pasar tunggal dan basis regional; (2) kawasan berdaya saing tinggi; (3) kawasan dengan membangun ekonomi yang merata; dan (4) kawasan dengan integrasi penuh terhadap perekonomian global (dunia)
- Empat pilar MEA dijalankan melalui 5 (lima) elemen utama : (1) aliran bebas barang; (2) aliran bebas jasa; (3) aliran bebas envestasi; (4) aliran bebastenaga kerja terampil.

- Pasar bebas ASEAN 2015 dan pasar bebas dunia 2020 menuntut semua negara **menyiapkan kualitas sumber daya manusianya** agar mampu bersaing dalam kompetisi regional dan global.
- Pendidikan diharapkan mampu **efektif sebagai instrumen pokok peningkatan kualitas SDM**. Secara internal pembangunan pendidikan harus mampu mengatasi masalah **perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi serta memperbaiki tata layanan yang semakin transparan dan akuntabel**.
- Tantangannya, memanfaatkan **peluang kerjasama regional** untuk meningkatkan **daya saing SDM** menghadapi kompetisi global, membangun **komitmen regional** untuk penguatan kapasitas sistem, kebijakan, kelembagaan dan infrastruktur pendidikan dan **menciptakan sinergitas program** pendidikan di kawasan ASEAN terstandar.

- Diperlukan **kebijakan, strategi dan program** pembangunan pendidikan yang **mampu mengatasi problema internal sekaligus tantangan eksternal** agar pendidikan menjadi pilar kemajuan bangsa.
- Kebijakan, strategi dan program dimaksud sesuai dengan **kerangka sistem pendidikan nasional, kebijakan pembangunan daerah (RPJMD), sesuai dengan kerangka sistim pemerintahan, karakteristik masyarakat Jawa Tengah dan kemampuan pemerintah daerah** serta aspek-aspek lainnya.
- Sebagai **bahan masukan** bagi kebijakan pembangunan daerah di bidang pendidikan melalui **mekanisme perencanaan** yang terpadu dan berkelanjutan.

 ISBN 978-602-14314-8-1

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

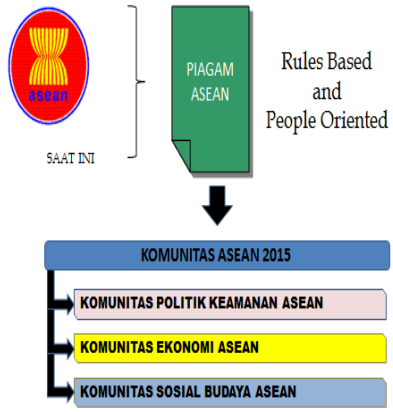

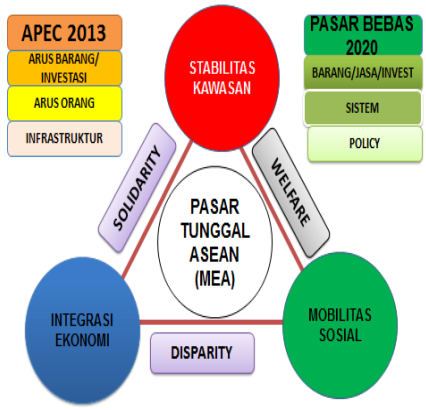

DINAMIKA ASEAN

- Pembangunan ASEAN terfokus pada 3 hal. **Penciptaan stabilitas** politik dan keamanan kawasan, upaya **mengintegrasikan ekonomi** berbasis ASEAN dan **pengaturan mobilitas** manusia, tenaga kerja termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi, sosial budaya dan transformasi sosial.
- Dalam kerangka itu masalah **stabilitas, kesenjangan/disparitas dan kesejahteraan** merupakan **isu pokok kawasan** ini.
- Kebijakan APEC 2013 yang **mendorong arus barang, orang dan infrastruktur** memberi kesempatan bagi kebijakan yang semakin terbuka antar negara ASEAN. **Kerjasama dengan China** merupakan tantangan baru dan kesiapan **menghadapi Pasar Bebas Dunia 2020** merupakan "pekerjaan rumah" yang harus disiapkan oleh masing-masing negara anggota ASEAN.

POSISI SDM PADA PASAR BEBAS

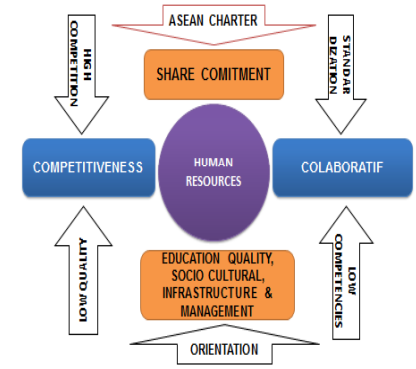

BEKERJA SAMA DAN BERSAING

- Posisi Sumber Daya Manusia dalam pasar bebas ASEAN adalah **bekerja sama dan bersaing** dalam konteks *competitiveness*. Aspek ini menghadapi tantangan berupa **persaingan tinggi** sekaligus **kualitas yang kurang**. Dalam konteks kerja sama pengembangan SDM tantangannya adalah **standardisasi kompetensi** sekaligus dihadapkan pada **tenaga kerja** yang rendah kompetensinya.
- Upaya membangun komitmen bersama komunitas ASEAN sesuai Piagam ASEAN memerlukan **energi bersama** dan **orientasi baru** agar peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sosial budaya, perbaikan infrastruktur dan manajemen mampu menciptakan nilai tambah kapasitas SDM Asean.

KONDISI DAN MASALAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

DATA PENDIDIKAN DI JAWA TENGAH

No	Jenjang	JUMLAH		
		Sekolah	Siswa	Guru
1.	TK/RA	17.118	623.917	44.667
2.	SD/MI	23.526	3.707.095	228.779
3.	SMP/MTs	4.296	1.486.978	110.318
4.	SMA/MA	1.314	498.918	42.025
5.	SMK	1.274	519.474	37.369
6.	SLB	141	10.561	1.475
Jumlah		47.669	6.846.943	464.633

HAMBATAN PENGELOLAAN PTK PNF

- Adanya dikotomi antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- Jumlah PTK PNF yang tidak merata pada setiap satuan lembaga PNF di Kabupaten/Kota
- Kompetensi PTK PNF sebagian besar belum terpenuhi dengan tuntutan kebutuhan program.
- Masih banyak pengelola lembaga kursus yang kualifikasinya tidak relevan dengan kebutuhan/ tuntutan program.
- Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap keberadaan, peran dan tugas pokok PTK PNF.

PERMASALAHAN POKOK PENDIDIKAN

PEMERATAAN	MUTU & RELEVANSI	TATA KELOLA
AKSES MEMPEROLEH PENDIDIKAN BERMUTU	PENDIDIKAN BERKUALITAS	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
↓	↓	↓
MERATA MURAH TERJANGKAU	LULUSAN BERKUALITAS BERKARAKTER	LAYANAN PENDIDIKAN BERMUTU

 ISBN 978-602-14314-8-1

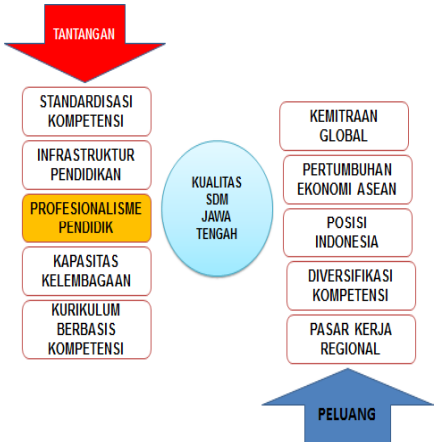

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidipan bangsa,

Bertujuan, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab

SISTEM PENDIDIKAN

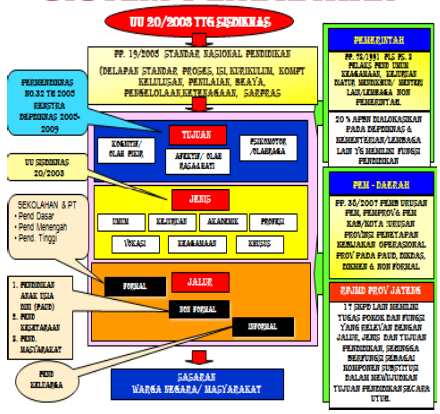

PP 23/2014
PEMERINTAHAN DAERAH

1. PROVINSI
   A. PENDIDIKAN MENENGAH
   B. PENDIDIKAN KHUSUS
2. KABUPATEN/KOTA
   A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
   B. PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
   C. PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

PENGELOLAAN SEKOLAH PTK PNF MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

PROVINSI MEMFASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SARAN :
PERLU KOORDINASI DAN SINERGITAS PROGRAM PENGEMBANGAN PTK PNF

PERMASALAHAN GURU DI JAWA TENGAH

UU NO 14/2005
PP NO 74/2008

=

Profesi guru yg sehat, kuat dan terhormat
Guru sbg faktor kunci keberhasilan Pem Dik

STANDARISASI PROFESI GURU	JML GURU 391.014
KUALIFIKASI PENDIDIKAN	26,99 % BLM S1
KOMPETENSI (PROFESIONAL PEDAGOGIK, KEPRIB & SOS)	PED (54,33%), KEP (52,37 %), PROF (64,36 %), SOS (53,92 %)
SERTIFIKASI	55,71 % BLM SERTIFIKASI
KESRA	KEMAMPUAN DAERAH YG BERBEDA
HARLINDUNG	BLM ADA FORMULASI
PENGEMB PROFESI GURU	SISTEM BELUM SIAP
PERSEBARAN GURU	SKB 5 MENTERI TDK JALAN

KENDALA : OTONOMI DAERAH

HAL-HAL YANG HARUS SEGERA DILAKUKAN

PENDATAAN DAN PEMETAAN PTK PNF UNTUK MEWUJUDKAN DATA DASAR YANG VALID

- PENGUATAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
- MEWUJUDKAN SINERGITAS PERAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PTK-PNF
- MENINGKATKAN KUALITAS LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL YANG TERTUMPU PADA TIGA PILAR : STANDAR KOMPETENSI KERJA, PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
- PENYIAPAN SDM YANG KOMPETITIF DAN BERKUALITAS GLOBAL
- MENYADARKAN PENGELOLA LKP UNTUK MENGUJIKAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI

FORMAT PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PTK PNF

STRATEGI PENGEMBANGAN PTK PNF

1. Memperkuat pelaku pendidikan, mulai dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua.
2. Memperkuat dan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, lembaga kursus dan pelatihan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja, *link and match*.
3. Memastikan birokrasi berjalan dengan efektif dan bisa memfasilitasi secara baik peran serta masyarakat.

STRATEGI PEMBANGUNAN PNFI

1. Bekerja sama dengan BSNP dalam memperkaya dan mengembangkan berbagai dan tingkatan, dengan mengadopsi standar kecakapan atau keahlian yang telah berkembang dan digunakan di beberapa negara maju, sehinga hasil-hasil belajarnya mengarah pada penguatan persaingan pekerja profesional dalam lingkup dunia.
2. Mendorong berbagai institusi dalam masyarakat agar berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan (*education and training provider*) yang bermutu dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan untuk bekerja dan berusaha sendiri.

Lanjutan

3. Menumbuhkan iklim ketenagakerjaan yang sehat melalui perwujudan sistem merit yang lebih mementingkan kecakapan dan keahlian daripada ijazah atau gelar akademik, dengan kerjasama Kementrans dan Du/Di.
4. Mendorong semua perguruan tinggi untuk menawarkan mata kuliah bagi mahasisa paruh waktu (*part time student*), agar PT berfungsi sebagai *training provider*, hanya menambah kecakapan atau keahlian yang dibutuhkan.
5. Mendorong terbentuknya berbagai lembaga sertifikasi profesi/Keahlian (LSK) dalam berbagai bidang kecakapan/ keahlian sesuai Dengan standar yang telah ada dan tekah dikembangkan. *Recognition Of prior learning*, strategi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja.

 ISBN 978-602-14314-8-1

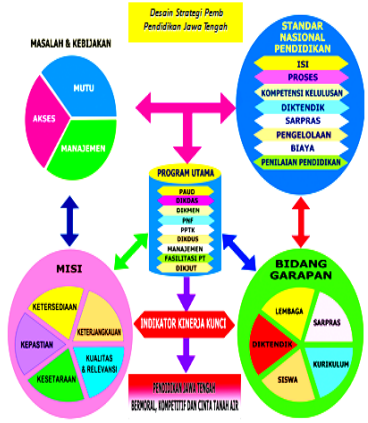

FORMAT PENDIDIKAN

1. Kerangka sistem dan kebijakan pendidikan nasional
2. Prioritas pembangunan daerah, kemampuan Keuangan daerah dan sesuai potensi daerah. Perkuat kerjasama regional bidang pendidikan
3. Fokus pada penguatan kapasitas sistem, kelembagaan dan SDM guna penyiapan kompetensi, kualitas dan daya saing SDM
4. Penajaman strategi dan program pembangunan kebijakan di daerah yang responsif
5. Akselerasi capaian target pembangunan pendidikan dan Sinergitas dengan stakeholder pendidikan terkait

PENUTUP DAN REKOMENDASI

PENDIDIKAN MERUPAKAN INSTRUMEN PENTING PENYIAPAN SDM BERKUALITAS. DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING PENDIDIKAN PERLU DIMANTAPKAN

DAYA SAING SDM JAWA TENGAH HARUS MAMPU MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI DAN MEMANFAATKAN **PELUANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN** YANG TERBUKA MELALUI PERSAINGAN DAN KERJASAMA

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH DILAKSANAKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN MEMPERTAJAM PROGRAM DAN STRATEGI CAPAIAN SERTA MANFAATKAN PELUANG SESUAI DENGAN POTENSI DAERAH

REKOMENDASI

JAJAGI DAN BANGUN **KERJASAMA JAWA TENGAH - ASEAN** DI BIDANG PENDIDIKAN MELALUI FASILITASI KEMDIKBUD

MANFAATKAN PELUANG PASAR KERJA DAN INDUSTRI LINGKUP ASEAN UNTUK **PENYIAPAN KOMPETENSI LULUSAN** DAN **PERLUASAN PASAR KERJA REGIONAL**

SUSUN **GRAND DESAIN DAN STRATEGI** PENGUATAN KAPASITAS PENDIDIKAN UNTUK OPTIMALISASI PENDIDIKAN PADA MEA DAN LIBATKAN STAKEHOLDER TERKAIT

PELUANG DAN TANTANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PTK PNF) DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

oleh:
Drs. Juwandi, M.Si

Kepala Bidang Mutasi
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah tujuan dari ASEAN untuk menjadi lebih terintegrasi secara ekonomi pada tahun 2015, mencapai pasar tunggal dan tujuan lainnya. MEA sendiri terdiri dari anggota negara-negara ASEAN,yaitu:

- Indonesia
- Malaysia
- Thailand
- Filipina
- Singapura
- Brunei Darusalam
- Vietnam
- Laos
- Myanmar (Burma)
- Kamboja

MEA Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

B. Dasar Pembentukan

Latar Belakang Pembentukan MEA:

1. KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997, menghasilkan kesepakan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020);
2. KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN

 ISBN 978-602-14314-8-1

3. (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020;
4. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan; dan
5. KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015.

C. Bentuk Kerjasama

Bentuk Kerjasamanya adalah :

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
2. Pengakuan kualifikasi profesional;
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;
5. Meningkatkan infrastruktur
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk Komunitas ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):

1. Pasar dan basis produksi tunggal,
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif,
3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata, dan
4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights* (IPR), *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil, terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang

efisien, aman, dan terintegrasi, menghilangkan sistem *Double Taxation* dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Kondisi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan jumlah angkatan kerja juga terus meningkat setiap tahunnya di tengah kesempatan kerja yang terbatas karena pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja tersebut masuk ke dalam pasar kerja. MEA yang dimulai tahun 2015, tentu akan memberikan dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Dampak positifnya dengan adanya MEA, tentu akan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia akan dapat mencari pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan lebih mudah dengan adanya MEA ini.Terlambatnya perekonomian nasional saat ini dan didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per februari 2014 dibandingkan Februari 2013 hanya berkurang 50.000 orang. Padahal bila melihat jumlah pengguran tiga tahun terakhir, per Februari 2013 pengangguran berkurang 440.000 orang, sementara pada Februari 2012 berkurang 510.000 orang, dan per Februari 2011 berkurang sebanyak 410.000 orang (Koran Sindo, Selasa, 6 Mei 2014). Dengan demikian, hadirnya MEA diharapkan akan mengurangi pengangguran karena akan membuka lapangan kerja baru dan menyerap angkatan kerja yang ada saat ini untuk masuk ke dalam pasar kerja.

Adapun dampak negatif dari MEA, yaitu dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan

 ISBN 978-602-14314-8-1

mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. Saat MEA berlaku, di bidang ketenagakerjaan ada 8 (delapan) profesi yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan (Media Indonesia, Kamis, 27 Maret 2014).

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau catatan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia sebelum saatnya negara kita benar-benar akan memasuki MEA.

Pertama,dari sisi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara menyeluruh dan komprehensif di bidang ketenagakerjaan. Dengan banyaknya perusahaan dan tenaga kerja asing yang akan masuk nanti, apakah Undang-Undang ini juga akan melindungi pekerja Indonesia? Sehingga untuk menghadapi MEA, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan diharapkan segera disempurnakan untuk memenuhi tiga syarat menurut teori Radbruch yaitu secara filosofis dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat, dan secara yuridis dapat menciptakan kepastian (Satjipto Rahardjo, 1980). Karena pekerja Indonesia adalah salah satu komponen yang berpengaruh terhadap bidang ekonomi, politik, dan sosial di negara ini.

Kedua, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja Indonesia. Kompetisi SDM antarnegara ASEAN merupakan hal yang pasti terjadi saat terbukanya gerbang MEA nanti. Bila pekerja Indonesia tidak siap menghadapi persaingan terbuka ini, MEA akan menjadi momok bagi pekerja Indonesia karena akan kalah bersaing dengan pekerja dari negara ASEAN lainnya. Bagaimana kesiapan SDM Indonesia menyambut MEA 2015 nanti? Berdasar data BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia per-Februari 2014 telah mencapai 125,3 juta orang atau bertambah 1,7 juta dibanding Februari 2013. Namun, jumlah angkatan kerja masih **didominasi oleh lulusan SD kebawah yakni 55,31 juta**, disusul **lulusan sekolah menengah pertama 21,06 juta**, **sekolah menengah atas 18,91 juta**, **sekolah menengah kejuruan 10,91 juta**, **Diploma I/II/II 3,13 juta** dan **universitas hanya 8,85%** (Koran Sindo, 6 Mei 2014). Salah satu terobosan dan cara singkat untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi kerja bagi SDM bisa dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada baik dengan sering mengadakan *workshop* ataupun seminar bagi angkatankerja baru maupun pelatihan peningkatan kualitas *skill* bagi angkatan kerja yang sudah ada. Selain itu, kebutuhan akan penguasaan atas teknologi bagi tenaga kerja merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi karena perkembangan teknologi berkembang sangat cepat.

Ketiga, dari penegak hukum khususnya pengawas ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya persiapan yang harus segera dibenahi adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan. Dari sisi kualitas, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang awalnya sentaralistik menjadi desentralistik mengakibatkan kewenangan pemerintahan saat ini lebih banyak bertumpu pada pemerintahan kabupaten/kota. Sehingga pemerintah Kab/Kota melalui Dinas Ketenagakerjaan harus terus mengembangkan inovasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan baik *hard* maupun *soft sklill* dari tenaga kerja di daerahnya. Dari sisi kuantitas, berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), jumlah pengawas ketenagakerjaan pada tahun 2013 tercatat sekitar kurang lebih 2.400 orang di Indonesia, dan para pengawas itu harus mengawasi sekitar 216.000 perusahaan di Indonesia. Sebaran pengawas ketenagakerjaan itupun hingga saat ini baru menjangkau kurang lebih 300 kabupaten/kota dari kurang lebih sebanyak 500 jumlah kabupaten/kota yang ada. Hal ini sangat kurang ideal mengingat disparitas yang terlalu jauh antara jumlah penegak hukum dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Untuk mengatasi hal ini sudah seharusnya Pemerintah segera melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan serta menginventarisasi kebutuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota sehingga dapat mengantisipasi derasnya investasi yang akan masuk ke Indonesia saat berlakunya MEA nanti.

Mutu pendidikan baik pendidikan formal, nonformal dan pendidikan informal, salah satunya akan dipengaruhi oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya bahwa peran pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor yang signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan segala yang dimiliki, mereka berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan proses pendidikan dengan peran antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, pemberi inspirasi belajar maupun sebagai pelayanan administrasi pendidikan.

Berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2005 pasal 65, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF (PTK-PNF), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Direktorat Jenderal PMPTK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dibidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal.

Layanan pendidikan nonformal dan informal bertujuan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal, mengatasi dari kemunduran pendidikan sebelumnya, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian

 ISBN 978-602-14314-8-1

atau untuk beberapa tujuan lainnya (Cropley, 1972).

Dengan pemaknaan seperti itu maka keberadaan pendidikan nonformal dan informal dapat memainkan peran sebagai pengganti (substitute), pelengkap (complement), dan/atau penambah (suplement) dan yang diselenggarakan pendidikan formal. Pendidikan informal merupakan pendidikan dikeluarga dan di lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Adapun penjelasan secara rinci mengenai tenaga pendidik dan kependidikan di Indoneisa adalah sebagai berikut ini:

1. Pengertian
   - Pendidik PNF

Merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

   - Tenaga Kependidikan PNF

Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan nonformal. Tenaga kependidikan PNF bertugas melaksanakan administrasi kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sarana dan prasarana, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

   - PTK-PNF

Adalah pendidik yang dididik dan dihasilkan oleh program studi Pendidikan Non-Formal di Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

2. Pendidik PNF meliputi:
   a. Pendidik PAUD, yaitu tenaga honorer yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk membimbing kegiatan pendidikan bagi anak usia dini.
   b. Penilik PNF, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya ditingkat PLS yang meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini.
   c. Tutor Keaksaraan Fungsional, yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat yang diberi wewenang dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan keaksaraan fungsional.
   d. Tutor Kesetaraan (Paket A, B, C) yaitu tenaga yang berasal dari masyarakatyang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan.
   e. Instruktur Kursus, yaitu tenaga yang memiliki kompetensi dan bertugas menjadi pendidik pada lembaga kursus sperti tentor.
3. Tenaga Kependidikan PNF meliputi:
   a. Penilik
   b. Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), yaitu tenaga dengan latar belakang pendidikan Sarjana, berstatus sebagai tenaga kontrak yang diberi

tugas membantu Penilik dan berkedudukan di Kecamatan.

4. Tugas Pendidik PNF
   1) Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
   2) Menilai hasil pembelajaran.
   3) Melakukan pembimbingan dan pelatihan pada institusi PNF.
5. Tugas Tenaga Kependidikan PNF
   1) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan belajar mengajar.
   2) pengelolaan sarana dan prasarana.
   3) Pengelola kegiatan belajar mengajar.
   4) Pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada institusi PNF.

Dalam membina dan meningkatkan kualitas PTK-PNF, para PTK-PNF hendaknya diberi kesempatan untuk memperbaharui kemampuan dan keterampilannya, sehingga PTK-PNF dalam melaksanakan tugasnya dapat menyesuaikan antara kebutuhan warga belajar dan cara PTK-PNF dalam memberikan pelayanan yang tepat.Maka untuk mewujudkan kualitas PTK-PNF tersebut, salah satunya dapat dilakukan dengan menetapkan persyaratan jenjang pendidikan minimal dan standar kompetensi minimal yang harus dimiliki PTK-PNF.

B. <u>Rekruitmen PTK-PNF</u>

Untuk mendapatkan Tim Akademisi yang kompeten dan memahami bidang pendidikan nonformal, maka perlu adanya proses rekrutmen yang selektif dari SKB, BPKB, BP-PNFI maupun Dit. PTK-PNF. Untuk itu ada beberapa persyaratan untuk yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Tim Akademisi. Persyaratan tersebut adalah:

1. Persyaratan umum
   1) Memahami pendidikan nonformal baik karakteristik maupun jenisnya;
   2) Mempunyai kemampuan di bidang peningkatan mutu PTK-PNF sesuai latar belakang pekerjaan/keahliannya dan berasal dari penrguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya;
   3) Bersedia menjadi anggota tim akademisi PTK-PNF yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan kesediaan menjadi Tim Akademisi.
2. Persyaratan khusus

Secara Khusus calon anggota tim akademisi harus mempunyai syarat sebagaiberikut:

1) Calon anggota Tim akademisi Pusat
   (a) Pendidikan terakhir diutamakan S3;
   (b) Pengalaman sebagai tenaga akademis di perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya;
   (c) Mempunyai hubungan baik dengan pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan PTK-PNF pada khususnya;
   (d) Sehat jasmani dan rohani ;
   (e) Dapat bekerja mandiri dan/atau bersama tim;
   (f) Memiliki komitmen dan dapat menyediakan waktu untuk mengembangkan programprogram yang terkait dengan peningkatan mutu PTK-PNF dan;

 ISBN 978-602-14314-8-1

(g) Mendapat persetujuan / rekomendasi dari lembaga dimana Tim Akademisi bertugas

2) Calon anggota tim akademisi di regional, provinsi dan Kabupaten/Kota pada umumnya persyaratannya sama, namun yang membedakan adalah pendidikan terakhir (Contohnya di regional/ provinsi diutamakan S2 dan di Kabupaten/kota minimal S1).

Kriteria lain yang bersifat pengembangan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah kerja masing-masing.

C. Pendataan PTK-PNF

Langkah-langkah Pendataan PTK-PNF: Koordinasi awal dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan peran dari Ditjen PMPTK, Ditjen PNFI dan Balitbang dan UU Nomor.14 tahun 2005 dengan hasil dokumentasi terintegrasi dengan baik. Adapun langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Mendesain kegiatan pendataan.
2. Sosialisasi dan ujicoba instrumen pendataan.
3. Penjaringan data PTK-PNF di tingkat provinsi, kabupaten/kota.
4. Pengolahan data PTK-PNF.
5. Verifikasi data PTK-PNF.
6. Publikasi data PTK-PNF.

Mekanisme Pendataan PTK-PNF

Mekanisme pendataan secara garis besar menjelaskan tentang :

1. Penggandaan dan pendistribusian instrumen.
2. Strategi penyampaian instrumen ke BPPNFI/BPKB/UPTD SKB Kab/Kota.
3. Pengambilan instrumen dari BPPNFI/BPKB/UPTD SKB Kab/Kota oleh masing-masing petugas pendataan.
4. Input , validasi dan kompilasi data ketenagaan PTK-PNF di BPKB dan UPTD SKB Kab/Kota.

5. Pengiriman data PTK-PNF oleh BPPNFI ke Dit.PTK-PNF.

D. Standar Kompetensi

Dalam kerangka pedoman ini, penyusunan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal terutama merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PNF meliputi empat komponen yaitu:

1) kompetensi pedagogi (andragogi), kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik/warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
2) kompetensi kepribadian, kemampuan personal yang mencerminkan *kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik/warga belajar, dan berakhlak mulia*.
3) kompetensi social, kemampuan pendidik sebagai bagiandari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik/warga belajar, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik/warga belajar, dan masyarakat sekitar.
4) kompetensi professional, kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di satuan PNF dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai PTK-PNF.

BAB III
PELUANG DAN TANTANGAN PENDIDIK DAN TENAGA PTK PNF DALAM MENGHADAPI MEA

Banyak kalangan yang merasa ragu dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Fakta lain menunjukkan bahwa kualitas SDM di Indonesia masih menempati urutan 121 dari 187 negara yang dikomparasikan oleh lembaga dibawah PBB, UNDP (United Nations Development Programme). Indonesia memiliki PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar, namun PDB per kapita kalah dengan Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Indonesia juga mengalami defisit neraca perdagangan, sedangkan Singapura surplus paling besar. Perekonomian Indonesia saat ini didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Faktanya, HDI (Human Development Index) menunjukkan bahwa SDM Indonesia menempati peringkat ke-6 dibawah Negara-negara Asean lainnya, seperti Malaysia, Thiland, Brunei, Philipina, dan Singapore. Sementara itu, dari data Asian Productivity Organization (APO) mencatat, dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia pada tahun 2012, hanya ada sekitar 4,3% tenaga kerja yang terampil. Jumlah itu kalah jauh dibandingkan dengan Filipina yang mencapai 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%. Data Kementerian Pendidikan

 ISBN 978-602-14314-8-1

dan Kebudayaan menyebutkan, hingga akhir tahun 2013, masih ada 3,6 juta penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang buta huruf. Angka putus sekolah juga masih sangat tinggi. Anggaran pendidikan Indonesia masih terbilang terendah di dunia: anggaran pendidikan kita masih berkisar 3,41% dari PDB. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand masing-masing punya anggaran pendidikan sebesar 7,9% dan 5,0% dari PDB-nya.

Satu hal yang digadang-gadangkan pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah lewat jalur pendidikan dan pelatihan kerja.

Dalam sektor tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi pekerja, meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataannya dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kita akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak pertanyaan, hambatan dan tantangan yang membayang di benak para pelaku usaha pertanian dalam menghadapi kerjasama ini. Minimnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah menimbulkan keragu-raguan bahkan pesimisme dalam menghadapi MEA. Ketidaksiapan sumber daya manusia, infrastruktur maupun regulasi yang tegas merupakan alasan bagi sebagian besar pelaku usaha untuk merasa tidak siap untuk bersaing secara terbuka dalam era pasar bebas ASEAN tersebut. Untuk lebih meyakinkan diri, ada baiknya kita bahas peluang dan tantangan di MEA 2015:

A. Peluang MEA 2015

Beberapa potensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Nonformal Indonesia untuk merebut persaingan MEA 2015, antara lain:

1. Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN). Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.
2. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 38:100, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga negara Indonesia. Bonus ini diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya sampai dengan 2035, yang diharapkan dengan jumlah penduduk yang produktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Sektor pendidikan yang menjadi ranah MEA, di mana informasi dan komunikasi yang berkembang pesat seirama dengan kemajuan teknologi yang

mengakibatkan persaingan ketat. Guna mewujudkan hal tersebut maka pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, berkualitas dan profesional serta mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.

Pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK-PNF) harus segera dilakukan. Agar tolok ukur mutu akademik dan keterampilan yang merupakan output pendidikan nonformal seperti yang diharapkan, serta capaian layanan pendidikan nonformal sebanding dengan jumlah kelompok sasaran yang harus dilayani diperlukan adanya kompetensi minimal bagi PTK-PNF yang dirumuskan secara baku. Sehingga tenaga pendidik dan pendidikan di bidang nonformal dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan soft skill maupun hard skill terutama pada keterampilan berwirausaha, penggunaan bahasa internasional dan tata krama dalam beretika di lingkungan bilateral lintas negara. Peluangnya, akhirnya tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia mampu menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan mampu bekerja serta TPK–PNF Indonesia dapat merajai kawasan ASEAN dalam mengembangkan kerjanya.

B. Tantangan AEC 2015

Untuk dapat menangkap keuntungan dari AEC 2015 tantangan yang dihadapi Indonesia adalah meningkatkan daya saing. Faktor-faktor untuk meningkatkan daya saing, yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia, yakni:

- Regulasi

Revisi undang-undang untuk memperkuat keberadaan pendidikan non formal dan untuk memberikan keadilan kepada tenaga pendidik dan kependidikan sehingga terdapat kepastian kerja, kepastian upah, bahkan kepastian tunjangan kesejahteraan untuk tenaga kerja di pendidikan non formal. Pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi dengan memberikan perlindungan khususnya kepada pekerja Indonesia dan bukan menjadi takluk bagi kepentingan para pemilik modal. Sehingga diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan non formal siap untuk menghadapi MEA 2015, guna memberikan kemampuan pendidikan kepada tenaga kerja indonesia.

Untuk menghadapi MEA, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan diharapkan segera disempurnakan karena pekerja Indonesia adalah salah satu komponen yang berpengaruh terhadap bidang ekonomi, politik, dan sosial di negara ini.

- Infrastruktur

Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2013/2014 yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-38. Sementara itu kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-82 dari 148 negara atau berada pada peringkat ke-5 diantara negara-negara inti ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal.

 ISBN 978-602-14314-8-1

Beberapa infrastruktur yang harus disiapkan Indonesia menjelang MEA 2015 untuk pendidikan non formal kepada tenaga pendidik dan kependidikan, antara lain: perbaikan fasilitas pendidikan, bangunan sekolah, kelengkapan media pendidikan sekolah non formal dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan non formal yang di sokong pemerintah untuk memberikan pembinaan bagi tenaga kerja Indonesia

Pembangunan infrastruktur yang rendah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yakni:

1. Anggaran infrastruktur yang rendah, hanya 2,5% dari pdb, dimana jumlah ini tidak dapat mengakomodir biaya pembebasan lahan dan biaya feasibility study serta amdal yang kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur.
2. Konflik kepentingan, seperti politik, bisnis, atau pesanan pihak-pihak tertentu dalam pembangunan infrastruktur.
3. Koordinasi yang sulit, jika merujuk area pembangunan infrastruktur terkait dengan hutan lindung atau pertanian dimana koordinasi antara lintas kementerian dan lintas otoritas sulit dilakukan.

- Sumber Daya Manusia

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia, tidak akan memberikan keuntungan apa pun tanpa adanya perbaikan kualitas SDM. Data dari ASEAN Productivity Organization (APO) menunjukkan dari 1000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%.

Berdasarkan struktur pasar, tenaga kerja didominasi oleh pekerja lulusan SD (80%) sementara lulusan Perguruan Tinggi hanya 7%, dimana saat ini sebagian dunia kerja mensyaratkan lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Malaysia yang sebagian besar penduduknya lulusan S1.

Kesempatan memperoleh pendidikan secara merata di seluruh Indonesia sulit dilakukan sehingga kesadaran untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangat rendah. Kondisi ini mengakibatkan tenaga kerja Indonesia hanya dilirik sebagai buruh atau tenaga kerja kasar di pasar tenaga kerja internasional.

- Teknologi

Pendidikan non formal melalui pelatihan ketenaga kerjaan. Dengan adanya MEA, akan memunculkan permasalaha terutama pada komunikasi dan teknologi sebagai wujud kerjasama anggota MEA. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan minimal penguatan bahasa Internasional seperti bahasa Inggris kepada pekerja atau masyarakat kita bisa dijadikan terobosan sebagai upaya persiapan menghadapi MEA.

Selain itu, di era digital seperti saat ini, kebutuhan akan penguasaan atas teknologi bagi tenaga kerja merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi karena perkembangan teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi pekerja Indonesia untuk belajar memahami dan terus meng-*update* teknologi terkini yang mendukung setiap pekerjaannya. Hal ini

jelas akan meningkatkan keahlian mereka sehingga akan meningkatkan daya saing mereka dengan pekerja dari negara ASEAN lainnya.

BAB IV
KESIMPULAN

Fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah:

1. Pasar dan basis produksi tunggal,
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif,
3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata, dan
4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Beberapa potensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Nonformal Indonesia untuk merebut persaingan MEA 2015, antara lain:

1. Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN). Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.
2. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 38:100, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga negara Indonesia. Bonus ini diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya sampai dengan 2035, yang diharapkan dengan jumlah penduduk yang produktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Untuk dapat menangkap keuntungan dari AEC 2015 tantangan yang dihadapi Indonesia adalah meningkatkan daya saing. Faktor-faktor untuk meningkatkan daya saing, yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia terdiri dari:

1. Perbaikan Regulasi untuk melindungi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Indonesia dalam menyambut MEA;
2. Beberapa infrastruktur yang harus disiapkan Indonesia menjelang MEA 2015 untuk pendidikan non formal kepada tenaga pendidik dan kependidikan, antara lain: perbaikan fasilitas pendidikan, bangunan sekolah, kelengkapan media pendidikan sekolah non formal dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan non formal yang di sokong pemerintah untuk memberikan pembinaan bagi tenaga kerja Indonesia;
3. Selanutnya perbaikan Sumber Daya Manusia dan Teknologi untuk menunjang kemampuan bersaing SDM di Lingkup ASEAN untuk mampu berkompetisi dengan tenaga kerja terutama pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memberikan modal pengetahuan dan keterampilan pada ketenagakerjaan Indonesia.

 ISBN 978-602-14314-8-1

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA*

oleh:
Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

PENGANTAR

Untuk yang kesekian kali pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah mengalami perubahan label (baca: nama) pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Perpres tersebut dibuat menyusul telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Yang terkait dengan pendidikan luar sekolah akan dikelola melalui *Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat* sebagai metamorfosis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. Dengan hadirnya ditjen baru ini maka bisa diprediksi akan terjadi pula perubahan pada struktur tata kelola, kebijakan, dan hal teknis di tataran kordinasi dan implementasi di tataran lapangan. Perubahan tersebut juga memiliki implikasi pada aspek-aspek strategis seperti regulasi dan kelembagaan. Yang segera nampak dari perubahan itu adalah berubahnya lebel medan garap pendidikan di luar sekolah, yaitu tidak lagi digunakan istilah Pendidikan Luar Sekolah (PLS), pendidikan nonformal dan pendidikan informal, dan m unculnya istilah baru yaitu ***pendidikan masyarakat***. Meskipun tidak terlalu tepat makna dan sama arti , namun dapatlah dikatakan bahwa PLS yang telah bermetamorfosa (lagi) menjadi pendidikan nonformal dan informal (pada era Kabinet Indonesia Bersatu), bermetamorfosis lagi menj adi pendidikan masyarakat (pada era Kabinet Kerja).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada struktur organisasi Kemendikbud yang baru ini terdapat sejumlah perubahan jika dibandingkan dengan struktur sebelumnya. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah digabung kembali menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Lahirlah di direktorat jenderal baru bernama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

* Disampaikan pada Seminar Nasional dan Temu Kolegial Akademisi PNF se Indonesia di Universitas Negeri Semarang, dengan tema "Peran dan Ekspektasi Pendidikan Nonformal Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", tanggal 09 Mei 2015, berdasarkan Surat Dekan FIP UNNES Nomor 1716/UN37.1.1/TU/2015, tanggal 08 April 2015. * Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. adalah dosen (Guru Besar) pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Ketua Umum Ikatan Akademisi Pendidikan Nonformal dan Informal Indonesia (I KAPENFI).

 ISBN 978-602-14314-8-1

Dengan adanya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sudah tidak ada lagi dalam struktur organisasi Kemendikbud yang baru. Bagaimanakah tata kelola dan program pendidikan luar sekolah akan dilakukan pada era Kabinet Kerja dan bagaimana implikasinya pada komponen sistem pendidikan luar sekolah ke depan, kita masih harus menunggu beberapa saat lagi sampai seluruh struktur kelembagaan dan program kerja disusun.

PERUBAHAN LABEL DAN PROGRAM

Perubahan label untuk pendidikan di luar sekolah menjadi pendidikan masyarakat bukanlah hal yang pertama kali terjadi . Secara legal formal dalam sejarah kependidikan di Indonesia telah dikenal adanya empat istilah yang saling dipertukarkan yaitu: pendidikan rakyat, pendidikan masyarakat, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan luar sekolah. Empat istilah tersebut saling dipertukarpakaikan baik dalam khasanah kebijakan, keilmuan, maupun praktikal .

Dalam catatan sejarah kependidikan di Indonesia, Mestoko (1986:241) menulis bahwa pada tahun 1946 adalah untuk pertama kalinya digunakan istilah pendidi kan masyarakat sebagai salah satu bentuk pendidikan di luar sekolah secara resmi diakui dalam dunia pendidi kan di Indonesia. Istilah pendidikan masyarakat itu ditetapkan oleh Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) berdasarkan mosi K. Mangunsarkoro (Mestoko, 1986:241). Mulai saat itu dunia pendidikan di Indonesia mengenal adanya dua macam bentuk pendidikan yaitu pendidikan persekolahan dan pendidikan di luar persekolahan yang disebut sebagai Pendidikan Masyarakat. Untuk mengurus masalah pendidikan masyarakat itu pada Kementerian PP dan K (Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan) dibentuk Badan Pendidikan Masyarakat. Pada tahun 1949 Badan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian PP dan K diubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat. Sehingga pada saat itu terdapat dua jawatan dalam Kementerian PP dan K, yaitu Jawatan Pengajaran yang mengurusi bidang pendidikan persekolahan dan Jawatan Pendidikan Masyarakat yang mengurusi pendidikan di luar sekolah.

Terma pendidikan luar sekolah dikenal secara yuridis saat terbitnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebut adanya dua jalur pendidikan, yaitu: jalur sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah (Pasal 10 ayat [1]) . Dalam bahasa yang berbeda namun dengan kandungan makna yang sama, U U Nomor 20 Tahun 2003 menyebut adanya tiga j alur pendidikan, yaitu: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (pasal 26, ayat 1). Pada prinsipnya jalur pendidikan luar sekolah (menurut UU No. 2 tahun 1989) dan jalur pendidikan nonformal dan pendidikan informal (menurut UU Nomor 20 tahun 2003) menunj uk pada substansi yang sama yaitu kebutuhan bangsa Indonesia akan layanan pendidikan sistematis di luar sistem persekolahan. Layanan pendidikan sistematis di luar sistem persekolahan itulah yang bisa disebut sebagai pendidikan nonformal. Sedangkan peristiwa pendidikan yang kurang sistematis dan/atau tidak sistematis di l uar sistem persekolahan dimasukkan ke dalam kelompok j alur pendidikan informal.

Sejak semula telah disadari oleh para pendiri bangsa ini bahwa sistem pedidikan di Indonesia terdiri atas beberapa jalur yang saling mengisi, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur

pendidikan luar sekolah atau juga disebut sebagai jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. UUD 1945 secara jelas telah menghendaki adanya suatu sistem penyelenggaraan pendidikan nasional melalui pasal 31 ayat (3). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional , yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang.. Yang disebut sebagai suatu sistem harus pula dimaknai sebagai penyelenggaraan jalur-jalur pendidikan yang harus dikelola sebagai sebuah sistem.

Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut adanya dua jal ur pendidikan, yaitu: jalur sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Dalam bahasa yang berbeda, namun dengan kandungan makna yang sama, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut adanya tiga jalur pendidikan, yaitu: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Bahkan jauh sebelum itu, Ki Hajar Dewantara (1956) telah memikirkan bahwa ada tiga tempat berlangsungnya pendidikan yang disebut sebagai Tri Pusat Pendidikan, yaitu alam keluarga, alam sekolah, dan alam kepemudaan. Pusat pendidikan dalam kepemudaan itulah hakekat dari pengakuan adanya peristiwa pendidikan secara informal dan nonformal di masyarakat.

Pada prinsipnya pilar pendidikan alam kepemudaan (menurut Ki Hajar Dewantara), jalur pendidikan luar sekolah (menurut UU No. 2 tahun 1989), dan jalur pendidikan nonformal (menurut UU Nomor 20 tahun 2003) menunjuk pada substansi yang sama yaitu kebutuhan bangsa Indonesia akan layanan pendidikan sistematis di luar sistem persekolahan. Demikian j uga pada era sebelumnya dengan apa yang disebut sebagai "pendidikan rakyat", dan "pendidikan masyarakat" menunjuk pada kebutuhan akan layanan pendidikan di luar sub-sistem sekolah.

Bagan: Peta Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia
(Dimodifikasi dari Supriadi , 1997 dan Mestoko, 1986)

<table>
<tr><td rowspan="2">UMUR</td><td colspan="8">SEKOLAH</td><td colspan="3">LUAR SEKOLAH</td></tr>
<tr><td>Tahun</td><td>Jenjang</td><td colspan="4">Satuan</td><td>Prodi</td><td colspan="3">Satuan-satuan dan Forum Belajar</td></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td><td colspan="11">Pendidikan Berkelanjutan bagi Orang Dewasa melalui :</td></tr>
<tr><td>...</td><td>....</td><td rowspan="8">Pendidikan Tinggi</td><td rowspan="8">Universitas</td><td rowspan="8">Sekolah Tinggi</td><td rowspan="8">Institut</td><td rowspan="8">Akademi</td><td rowspan="4">Pol</td><td rowspan="2">S3/Sp2</td><td colspan="3" rowspan="4">BERBAGAI FORUM BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PLS:
Penataran/Up grading
Kursus dinas
Pelatihan
Diklat
Kursus</td></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>27</td><td>21</td><td rowspan="2">Te</td><td rowspan="2">S2 Sp1</td></tr>
<tr><td>26</td><td>20</td></tr>
<tr><td>25</td><td>19</td><td rowspan="8">knik</td><td rowspan="8">S1</td><td rowspan="2">D4</td><td rowspan="8">Universitas Terbuka</td><td rowspan="8">Pondok pesantren
Kelompok belajar (kejar, klompen-capir,</td></tr>
<tr><td>24</td><td>18</td></tr>
<tr><td>23</td><td>17</td></tr>
<tr><td>22</td><td>16</td><td rowspan="2">D3</td></tr>
<tr><td>21</td><td>15</td></tr>
<tr><td>20</td><td>14</td><td rowspan="2">D2</td></tr>
<tr><td>19</td><td>13</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>D1</td><td></td><td></td></tr>
</table>

 ISBN 978-602-14314-8-1

<table>
<tr><td>18</td><td>12</td><td rowspan="3">Pendi- -
dikan
Menengah</td><td rowspan="3">S
M
U</td><td rowspan="3">S
M
K</td><td rowspan="3">M
A/
K</td><td rowspan="3">S
M
Kd</td><td rowspan="3">SMU
LB</td><td rowspan="3">Program
Paket C</td><td rowspan="6">KSM, Pokmas, dsb.)
M agang
Korespondensi
Les Privat
Home schooling
Jaringan Cyber-school
Taman Pendidikan
Pola Pembelajaran alamiah lainnya
- - kelompok hoby
-padepokan/sanggar</td></tr>
<tr><td>17</td><td>11</td></tr>
<tr><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>15</td><td>9</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">SL
TP</td><td rowspan="3">MTs</td><td rowspan="9">S
L
B</td><td rowspan="3">SMP
LB</td><td rowspan="3">Program
Paket B</td></tr>
<tr><td>14</td><td>8</td></tr>
<tr><td>13</td><td>7</td></tr>
<tr><td>12</td><td>6</td><td rowspan="6">Pendidik-
an Dasar</td><td rowspan="6">SD</td><td rowspan="6">MI</td><td rowspan="6">SD
LB</td><td rowspan="6">Program
Paket A</td></tr>
<tr><td>11</td><td>5</td></tr>
<tr><td>10</td><td>4</td></tr>
<tr><td>9</td><td>3</td></tr>
<tr><td>8</td><td>2</td></tr>
<tr><td>7</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td rowspan="5"></td><td>Pendidika</td><td colspan="3">OA</td><td colspan="2" rowspan="2">KB,
TPA& SKS</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>n
Prasekolah</td><td colspan="3">OB</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="8" rowspan="4">PENDIDIKAN KELUARGA, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PIF LAINNYA</td></tr>
<tr><td>3</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
<tr><td>1</td></tr>
</table>

Setelah sekian lama dibangun dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan lokal, regional, nasional, dan internasional; maka sistem pendidikan nasional dari sisi kelembagaan dapat digambarkan sebagai bagan di atas.

Pendidikan luar sekolah telah memiliki artikulasi, pemaknaan, nilai, bahkan telah berkembang menjadi sebuah pranata dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan luar sekolah seringkali dipertukar-artikan dengan konsep-konsep yang memang saling berhubungan, beririsan, dan/atau memiliki kesamaan makna, yaitu pendidikan nonformal, pendidikan masyarakat (*community education*), pembelajaran masyarakat (*community learning*), masyarakat belajar (*learning community*), pendidikan berkelanjutan (*continuing education*), pendidikan masa (*mass education*), penyuluhan pembangunan,penyuluhan masyarakat, pendidikan orang dewasa (POD), pendidikan dasar bagi orang dewasa, perubahan sosial, pembangunan masyarakat,pengorganisasian masyarakat, dan banyak lagi terminologi sejenis yang menunjuk pada substansi pendidikan nonformal. Masing-masing istilah tersebut memiliki makna dan relevansinya sesuai dengan program pendidikan yang dimaksudkan, termasuk pendidikan luar sekolah itu sendiri. Ada terminologi yang terikat dengan satuan pendidikan, terma perundangan, terma kebijakan, peristiwa pendidikan, *setting* tempat, sasaran didik, agensi pendidikan, tujuan pendidikan/pembelajaran, dan yang paling sering terjadi adalah yang menunjuk pada program pendidikan spesifik bagi orang dewasa atau kelompok masyarakat.

Mispersepsi dan duplikasi pemaknaan terhadap pendidikan luar sekolah telah lama terjadi sebagaimana pernah ditulis oleh Apps (1979) tentang pendidikan berkelanjutan yang maknanya juga dekat dengan pendidikan luar sekolah dan pendidikan nonformal. Daftar istilah yang

dikumpulkan oleh Apps (1979:60) untuk menunjukkan keberagaman istilah yang terkait dengan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) sebagai salah satu *genre* pendidikan nonformal dalam istilah aslinya yaitu: *lifelong education, lifelong learning, continuous learning, continuous education, continuing education, adult education, adult learning, permanent education, postsecondary education, recurrent education, informal education, nonformal study, andragogy,* dan *nontraditional study.* Bahkan Apps juga masih menambahkan cukup banyak istilah lain yang terkait dengan program pendidikan berkelanjutan bagi orang dewasa yang dikenal di seluruh dunia, di mana terdapat lebih dari dua puluh istilah yang terkait dengan pendidikan nonformal untuk orang dewasa.

Pengertian dan pemaknaan terhadap pendidikan luar sekolah mengalami perubahan konsep dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada tahap awal kelahirannya, pendidikan luar sekolah di Indonesia identik dengan pendidikan buta huruf dan pendidikan orang dewasa. Setelah filsafat pendidikan sepanjang hayat diangkat pada tahun 1970an, makna dan cakupan pendidikan luar sekolah menjadi lebih luas. Setelah beredarnya tulisan *"The World Educational Crisis"* oleh Phillips Coombs (1984), pendidikan luar sekolah dianggap menjadi solusi terhadap keterbatasan pendidikan formal yang ternyata tidak memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bahkan pada tahun 2010 muncul terminologi baru yang makin memperkaya khasanah peristilahan pendidikan luar sekolah yaitu PAUDNI (baca: paudni), singkatan dari kata Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. Istilah paudni muncul pertama kali secara resmi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Pada Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa salah satu direktorat jenderal yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal dan Informal, disingkat Ditjen PAUDNI. Sejak inilah dikenal adanya istilah paudni dalam khasanah pendidikan di Indonesia.

Ditjen PAUDNI bertugas dan berfungsi menetapkan kebij akan dan program pendidikan anak usia dini (paud), pendidikan masyarakat, kursus dan pelatihan, pendidik dan tenaga kependidikan paudni , serta program pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan, serta program dukungan manajemen dan pelaksana teknis lainnya. Kebij akan dan program Ditjen PAUDNI diarahkan untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan dengan tetap berupaya terus mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan yang semakin luas.

Dengan demikian dapat dikatakan munculnya isti lah paudni merupakan dimensi kebij akan pendidikan yang dituj ukan untuk memberikan dukungan manaj emen dan pelaksanaan program dan pembinaan satuan penyelenggara pada pendidikan anak usia dini , pendidikan nonformal, dan pendidikan informal; yang mana masing-masing nomenklatur memiliki karakteristik yang berbeda; agar mampu memberikan sumbangan efektif bagi upaya pencerdasan kehidupan bangsa.

 ISBN 978-602-14314-8-1

KEMBALI KE PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pendidikan nonformal dan pendidikan informal memiliki peran yang sangat penting dalam sej arah pendidikan nasional di Indonesia, terutama dalam pemberantasan buta aksara dan pendidikan bagi kaum tak beruntung. Bahkan peran itu akan semakin penti ng pada masa yang akan datang sei ring dengan dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , terutama teknologi komunikasi, teknologi informasi, dan teknologi transportasi yang mengakibatkan terj adi nya globalisasi dunia. Salah satu peran pendidikan nonformal dan informal adalah mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan dan kemampuan seseorang agar tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai pribadi, sebagai sumber daya manusia (tenaga kerj a), maupun sebagai warga negara.

Kelahiran jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan bangsa Indonesia akan layanan pendidi kan yang lengkap pada jalur non-konvensional (di luar sistem persekolahan). Dengan keterbatasan daya jangkau sekolah dan keketatan prasyarat input maupun proses pendidikan di persekolahan, maka kehadiran PLS sebagai sebuah institusi adalah sebuah keniscayaan.

Pada jaman penjajahan Belanda, para tokoh pergerakan nasional dan pejuang kemerdekaan sering mengadakan kursus-kursus khusus bagi wanita, kursus pengetahuan umum atau politik bagi warga masyarakat, dan juga pendidikan kepanduan dan keolahragaan bagi para pemuda (Mestoko, 1986; Hamidjojo, 1956). Apa yang dilakukan para tokoh pergerakan dan pej uang kemerdekaan itu pada dasarnya adalah aktivitas pendidikan luar sekolah. Pada jaman pendudukan Jepang, pendidikan masyarakat disebutnya "pendidikan rakyat" (Mestoko, 986:240). Tujuan Pendidikan Rakyat pada masa tersebut diarahkan untuk penanaman semangat kemerdekaan dan penanaman rasa anti-pati terhadap penjajahan Barat.

Para pemimpin pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia menyadari betapa pentingnya pendidikan masyarakat yang pada waktu itu disebut pendidikan rakyat. Berdasarkan pemikiran itu, Sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritzu Zyunbi Tyosakai) dalam penyusunan program pendidikan dan pengajaran merumuskan: "Selain sekolah-sekolah, harus dipentingkan juga pendidikan rakyat dengan jalan: (1) latihan keprajuritan untuk pemuda-pemudi, (2) pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa, (3) pendidikan khusus untuk kaum ibu, dan (4) memperbanyak bacaan dengan memajukan perpustakaan, penerbitan surat kabar, dan majalah (Mestoko, 1986:241).

Kita masih menunggu apa dan bagaimana makna terma Pendidikan Masyarakat yang dimaksudkan oleh struktur organisasi Kemendikbud pada era Kabinet Kerja. Akankah pemaknaan kebijakan pendidikan masyarakat dalam kordinasi Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas "kembali" ke pemaknaan Jawatan Pendidikan Masyarakat tahun 1949, kembali kepemaknaan Kabinet Pembangunan jaman Pak Harto, atau kabinet pasca reformasi. Dalam perjalanan sejarahnya terma "pendidikan masyarakat" selalu ada pada organ kementerian pendidikan di Indonesia. Sepanj ang masa pemerintahan era Orde Baru isu pendidikan luar sekolah diurus di tingkat direktorat jenderal di mana

pendidikan masyarakat menjadi salah satu bagian direktorat dengan nama Direktorat Pendidikan Masyarakat dengan cakupan garapan masalah pemerantasan buta huruf, kursus, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, pendidikan anak usia dini, dan pengarusutamaan jender. Pada masa reformasi isu pendidikan luar sekolah tetap diurus pada tingkat direktorat jenderal, namun D irektorat Pendidi kan Masyarakat mengalami pengurangan luas li ngkup garapan, yaitu hanya mencakup pendidikan keaksaraan dan program pendukung seperti kelembagaan PKBM dan TBM; adapun pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini, dan kursus berdiri sendiri sebagai sebuat direktorat.

Jawatan Pendidikan Masyarakat dibentuk melalui Keputusan Menteri PP dan K Nomor 423/A tanggal 24 Nopember 1949 dengan tugas pokok membangunkan, menyadarkan, menginsafkan dan mendidik masyarakat di luar sistem persekolahan, agar tiap warga negara menjadi anggota masyarakatyang sadar, hidup berguna dan berharga bagi negara, nusa, bangsa, dan dunia. Dibentuknya Jawatan Pendidikan Masyarakat, disebabkan oleh karena pada saat itu sekitar 90% penduduk Indoensia masih menyandang buta huruf dan/atau tidak pernah sekolah (Sihombing, 1999:1).

Kehidupan Jawatan Pendidikan Masyarakat terus berlanjut, sampai tahun 1975 berubah menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat sampai sekarang, dan sampai sekarang masih tetap eksis walaupun dengan cakupan bidang layanan yang berubah-ubah. Sihombing (1999:2-3) menulis bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/O/1975 Direktorat Pendidikan Masyarakat memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan segenap potensi insaniah seluruh warga masyarakat di luar sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Dikmas memiliki aparat teknis sampai di tingkat kecamatan yaitu Penilik Dikmas. Tahun 1980 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222d/O/1980 tugas pokok Direktorat Pendidikan Masyarakat ialah menyelenggarakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga di bidang pendidikan masyarakat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional keberadaan D irektorat Pendidikan Masyarakat masih tetap ada sampai era sekarang. Berdasarkan urai an tugas yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73/1991 Dikmas melaksanakan tuj uh program utama, yaitu: program pengembangan anak usia dini , program pemberantasan buta huruf, program kej ar paket A setara SD, program pendidikan dasar, program magang, program kewanitaan, dan program pembinaan kursus Diklusemas. Sedangkan program lainnya yaitu program pendidikan mata pencaharian (kej ar usaha) dan program taman bacaan masyarakat sebagai program pendukung yang bersifat sebagai ragi belajar.

Dari seluruh program tersebut yang menjadi prioritasnya adalah program pemberantasan buta huruf. Pada Pelita VI (tahun 1990-an) hampir seluruh kemampuan Dikmas dicurahkan untuk melaksanakan program pemberantasan buta huruf dengan label program pemberantasan buta huruf (PBH) yang pada akhirnya bermetamorfosa menjadi pendidikan keaksaraan fungsional (KF). Untuk melaksanakan tugas tersebut

 ISBN 978-602-14314-8-1

Direktorat Dikmas bekerjasama dengan hampir semua kelembagaan pemerintah dan nonpemerintah. Kerjasama dengan Dapartemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan dengan ABRI dikemas dengan nama Operasi Bhakti anunggal Aksara disingkat OBHAMA. Hal ini dilakukan untuk mengejar target yang ditetapkan Pemerintah bahwa sampai akhir Pelita VI penduduk Indonesia harus sudah bebas tiga buta (buta aksara latin dan angka, bahasa Indonesia, dan pendidikan dasar). Adanya kebijakan ini menjadikan program lain, selain pemerantasan buta huruf menj adi kurang mendapat perhatian, akibatnya Drektorat Dikmas lebih terkenal sebagai instansi yang menangani pemberantasan buta huruf.

Mulai tahun 1994 dengan dicanangkannya program Wajib Belajar 9 Tahun, Dikmas dipercaya untuk ikut mensukseskan program nasional melalui jalur pendidikan luar sekolah dengan melahirkan Program Kejar Paket B setara SLTP. Demikian selanjutnya pada tahun 1998 diluncurkan program lanjutannya yaitu program Kejar Paket C setara SLTA.

Ketika pemerintah mulai melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Pendidikan Luar Sekolah meluncurkan Program Paket A Setara SD dan Program Paket B Setara SLTP. Kedua program itu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Mulai tahun 2000 masyarakat yang telah menyelesaikan Paket B Setara SLTP kembali diberikan peluang belajar lanjutan pada rintisan Program Paket C. "Pada tahun 2001 Paket C pertama kali dan ujian nasional dilakukan, yang kemudian pengakuan pengesahannya pada tahun 2004" (Dit Pendidikan Kesetaraan, Ditjen PLS: 2006).

Desain awal Program Paket (yang kemudian disebut sebagai Program Pendidikan Kesetaraan) disediakan bagi anak/orang yang karena berbagai situasi, kondisi dan alasan tidak bisa menempuh pendidikan melalui jalur sekolah. Cikal bakal dari program Paket adalah program pemberantasan buta huruf (PBH) yang kemudian dikembangkan menadi program Kejar Paket A dengan buku paket yang berlabel "Aksara dan Angka" pada tahun 1980an. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, melalui Keputusan Mendiknas Nomor 0131/U/1994, program Paket A dan ditambah program Paket B ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai jalur alternatif dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam status baru ini derajad kelulusan program paket diakui setara dengan lulusan sekolah SD/MI dan SM P/MTs. Akhirnya program ini disebut sebagai program pendidikan kesetaraan (dengan sekolah). Pada tingkat SMTA diluncurkan program Paket C dengan payung hukum berupa Keputusan Mendiknas Nomor 132/U/2004.

Peran program Paket semakin penting dan strategis ketika Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan surat edaran No. 3633/C/MN/2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Penghapusan Program Ujian Persamaan (UPERS). Policy ini dikuatkan oleh Keputusan Mendiknas Nomor 086/U/2003 tentang Penghapusan Ujian Persamaan. Dengan ditiadakanya jalur Upers, Program Kejar Paket merupakan satu-satunya sarana bagi masyarakat yang karena alasan tertentu tidak dapat menempuh pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Program Kejar Paket atau yang juga disebut sebagai Program Pendidikan Kesetaraan mengalami "kesulitan"

serius pada era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dimana pengelolaan program ini tidak lagi berada di bawah kordinasi Ditjen PAUDNI, namun diletakkan di Ditjen Pebinaan Sekolah Dasar (untuk Program Kejar Paket A dan Paket B) dan Ditjen Pembinaan Sekolah Menengah (untuk Program Kejar Paket C). Implementasi dan aktualisasi di lapangan sangat kesulitan terkait budaya kerja dan kewenangan. Sudah sejak diluncurkan Program Kejar Paket ditangani oleh Ditjen PLS atau nama sejenis sehingga sudah tercipta budaya, bioritme, dan prosedur kerja yang membudaya, ketika diserahkan kepada Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen maka belum ada kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengurus program kejar yang memiliki norma dan budaya kerja yang sangat berbeda. Akhirnya, berdasarkan kabar mutakhir program kejar akan dikembalikan diurus oleh Ditjen PAUD Dikmas.

Kebijakan manajemen tidak selalu seiring, searah, dan sebangun dengan dimensi kajian konseptual teoritik pendidikan. Secara konseptual teoritik dan filosofis antara ke tiga katagori program/satuan pendidikan yang tergabung dalam istilah paudni yaitu paud, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal memiliki landasan berpijak yang berbeda. Dengan demikian menyatukan tiga jenis program/satuan pendidikan ini dalam satu kesatuan pembahasan akan banyak mengalami kesulitan. Untuk memperoleh pemahaman yang sedekat mungkin dengan konsep denotatifnya perlu diuraikan artikulasi, substansi, dan signifikansi masing-masing nomenklatur itu secara terpisah.

Istilah paudni sering dikaitkan dengan istilah pendidikan luar sekolah (PLS), pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Hal ini terjadi semata-mata karena sejak diinisiasi pada tahun 1997 program paud secara kebijakan dan manajerial di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diurus oleh Direktorat Jenderal yang dahulu mengurus pendidikan luar sekolah, yaitu Ditjen PLSPO (Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga), kemudian menjadi Ditjen PLSP (Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda), kemudian menjadi Ditjen PNFI (Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal), dan akhirnya tahun 2010 menjadi Ditjen PAUDNI (Pendidikan Anak Uisia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal). Pada tahun 2000 dibentuk direktorat khusus yang mengurusi paud yaitu Direktorat PAUD.

PROBLEMATIKA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bisa dimaknai urusan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan informal akan diurus oleh Ditjen PAUD dan Dikmas. Bagaimanakah struktur lengkap, program utama, dan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan program PAUD dan Dikmas masih harus menunggu terbitnya peraturan/keputusan menteri terkait. Harapan semua pihak tentu kebijakan yang diambil adalah yang seiring dan sinergis dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Dalam pengelolaan program PAUDNI potensi yang mendukung ada dua komponen, yaitu instansi pemerintah dan kelembagaan swasta. Kelembagaan atau instansi pemerintah penyelenggaraan program Dikmas dan

 ISBN 978-602-14314-8-1

PAUD ada di tingkat pusat sampai dengan tingkat pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk pembinaan manajemennya diurus oleh struktur pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten kota melalui struktur kementerian dan dinas terkait.

Pada tingkat pusat, ada dua jenjang unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud untuk pembinaan dan penyelenggaraan program PAUDNI yaitu Pusat Pengembangan dan Balai Pengembangan. Terdapat dua lembaga pusat pengembangan PAUDNI (PP PAUDNI) dan terdapat 8 Balai Pengembangan PAUDNI (BP PAUDNI). Sedangkan di tingkat propinsi tercatat ada 28 Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau nama lain yang sejenis dan di tingkat kabupaten/kota program PAUDNI. Di tingkat kabupaten/kota unit pelaksana teknisnya disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dimana di seluruh Indonesia terdapat 420 SKB.

Dasar hukum keberadaan UPT PP PAUDNI adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. Dasar hukum keberadaan UPT BP PAUDNI adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. Dasar hukum keberadaan BPKB atau nama sejenis di tingkat propinsi dan SKB di tingkat kabupaten kota adalah peraturan/keputusan gubernur atau bupati/walikota masing-masing.

Kelembagaan PP-PAUDNI, BP-PAUDNI, BPKB, dan SKB memiliki permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Masalah yang bersifat umum adalah tidak sinkronnya tupoksi institusi dengan tupoksi Pamong Belajar sebagai pejabat fungsional tertentu. Tenaga pendidik dan kependidikan PAUDNI yang berstatus PNS di bawah binaan Kemendikbud hanya ada dua jenis yaitu Pamong Belajar dan Penilik. Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang secara yuridis diatur melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Sedangkan jabatan Penilik diatur melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

Uniknya, hanya ada satu Permenpan & RB yang mengatur tentang jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya untuk menglingkupi empat tingkat UPT PAUDNI yang berbeda jenjang dan tupoksinya. Pada janjang PP PAUDNI dan BP PAUDNI sesuai dengan tupoksi kelembagaannya semestinya tugas fungsional Pamong Belajarnya lebih banyak pada tugas pengembangan model. Sedangkan pada BPKB dan SKB sesuai dengan tupoksi kelembagaannya semestinya tugas fungsional Pamong Belajarnya lebih banyak pada tugas pembelajaran (PBM) atau teaching daripada tugas pengembangan model. Pada sisi lain, masih banyak Pamong Belajar yang diberi tugas dan mengerjakan tugas-tugas di luar tupoksi institusi maupun tupoksi jabatang fungsionalnya, akibatnya kenaikan pangkat untuk membina jenjang karirnya menjadi terhambat.

Komponen lembaga swasta yang dikelola oleh masyarakat ada berbagai

jenis, yang paling dikenal adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pendidikan dan pelatihan, dan berbagai nama generik lainnya. Jumlah lembaga PKBM dan lembaga kursus yang terdata di kemendikbud sebagaimana grafil berikut.

Grafik: Jumlah PKBM dan Lembaga Kursus

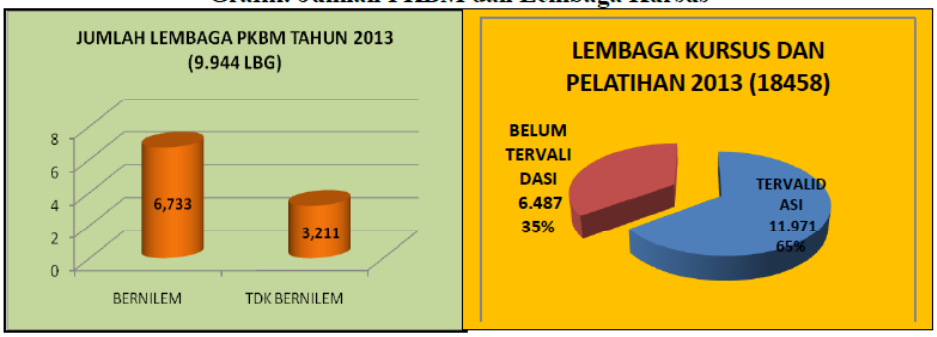

Sumber: Ditjen PAUDNI 2013

Program PAUDNI juga didukung oleh berbagai organisasi mitra yaitu lembaga swasta yang dikelola oleh masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pendidikan anak usia dini. Ini merupakan potensi besar dalam penyelenggaraan maupun penjaminan/ pengendalian mutu program-program PAUDNI di lapangan, antara lain: Bunda PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, GOPTKI, HIPKI, HISPPI, Asosiasi Profesi, Forum PKBM, Forum Tutor, Forum TBM, serta dunia usaha dan dunia industri.

Bila ditengok kebijakan program Ditjen PAUDNI pada Kabinet Indonesia Bersatu II, program Dikmas menjadi salah satu sub-program saja dari progran PAUDNI, bagaimanakah program ke depan dengan memilih nama PAUD & Dikmas pada era pemerintahan sekarang. Kebijakan dan program Ditjen PAUD & Dikmas perlu diarahkan dengan belajar pada problematika yang telah terjadi pada tataran program, kelembagaan, dan sumberdaya manusia yang terpadu. Program Ditjen PAUDNI (2011) diarahkan untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan dengan tetap berupaya terus mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan yang semakin luas. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PAUDNI (2011) menyelenggarakan fungsi:

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang memenuhi standar pelayanan minimal PAUD dan mendorong peningkatan mutu layanan secara simultan, holistik-integratif dan berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik, pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga memiliki kesiapan fisik serta mental untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan usia 15 tahun ke atas yang berbasis pemberdayaan, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat dalam kerangka *Literacy Initiative For Empowerment /LIFE*.
3. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan

 ISBN 978-602-14314-8-1

pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang, sehingga dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.

4. Meningkatkan ketersediaan, mutu serta profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi serta pemberian penghargaan dan perlindungan yang bermutu, merata, berkelanjutan, dan berkedilan.
5. Mengembangkan layanan pembelajaran untuk menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan layanan Taman Bacaan Masyarakat, penyediaan bahan-bahan bacaan yang berguna untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan produktifitas baik untuk aksarawan baru maupun untuk masyarakat umum lainnya.
6. Mengembangkan pendidikan pemberdayaan perempuan, lanjut usia, dan pengarustumaan gender, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan, dan menghapuskan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan, mendukung upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), serta pendidikan keorangtuaan.
7. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepramukaan dalam rangka membangun karakter bangsa melalui pembinaan gugus depan, peningkatan mutu pembina dan pelatih pramuka serta jambore pramuka.
8. Meningkatkan mutu pelayanan program PAUDNI melalui pengembangan model dan program percontohan yang dilakukan oleh UPT Pusat dan Daerah.
9. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan program PAUDNI melalui penyelenggaraan program PAUDNI oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan lembaga PAUDNI yang dikelola oleh masyarakat.
10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PAUDNI, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui perbaikan sistem manajemen informasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar lembaga PAUDNI mampu memberikan pelayanan prima bagi semua warga dan terjamin kepastian dan keberlangsungannya.

Perlu ada evaluasi, apakah seluruh fungsi tersebut telah mampu diperankan dan dijalankan dengan baik oleh Ditjen PAUDNI, sebagai refleksi penyusunan struktur, kebijakan, dan program kerja ditjen yang baru. Yang segera tampak kekurangannya adalah pembinaan kepramukaan yang belum banyak ada jejaknya, peningkatan kelembagaan pendidikan nonformal dan informal yang belum tumbuh, dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Satu program yang nampak sangat kuat karena didukung oleh banyak kalangan adalah peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD.

Apabila pada awal mulanya gerakan

Pendidikan Masyarakat atau PLS atau pendidikan nonformal hanya ditujukan untuk memberantas buta huruf dan pendidikan politik akan perlunya perj uangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka pada perkembangan terakhir pendidi kan luar sekolah telah berkembang menj adi sebuah *enterprise* yang sangat luas wilayah garapnya dan bervariasi j enj angnya seiri ng dengan prinsip belaj ar dan pendidikan seumur hidup.

Ditinjau dari faktor tujuan belajar/pendidikan, pendidikan nonformal bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tuj uan-tuj uan yang sangat luas jenis, level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul ciri pendidikan nonformal yang bersifat *multi purposes*. Ada tuj uan-tuj uan pendidikan nonformal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belaj ar tingkat dasar (*basic education*) semacam pendidi kan keaksaraan, pengetahuan alam (*natural knowledge*), keterampilan vokasional (*social economic well-being*), pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat (*positive attitude, household, and social relationship*), pengetahuan umum dan kewarganegaraan (*functional knowledge and skill for civic participation*), serta citra diri dan nilai hidup (*self esteem and meaning of life*).

Ada juga pendidikan nonformal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanj utan (*continuing education*) setelah terlewati nya pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. Contoh program pendidikan nonformal yang dituj ukan untuk mendapatkan dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, "manajemen qalbu", latihan pencarian makna hidup, kelompok hoby, pendidikan kesenian, dan sebagai nya. Dengan program pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan, etika, dan makna hidup. Dalam kapasitas ini lah pendidikan nonformal memiliki sifat *multi purposes*.

Ditinjau dari faktor agensi atau *provider* (penyedia layanan), pendidikan nonformal memiliki variabilitas agensi yang besar dan beragam, baik yang berada di bawah koordinasi pemerintah, swasta, LSM , atau masyarakat luas lai nnya. Dalam kapasitas inilah pendidikan nonformal memi l iki sifat *multi agencies*. Perkembangan agensi ini telah diikuti pula oleh perkembangan "profesi" pendidik pendidikan nonformal dengan variasi jenis dan tingkat pekerjaan dari yang setara "tukang" sampai dengan tenaga professional, dan tenaga ahli.

Problema koordinasi lintas sektor juga menjadi permasalahan dalam manaj emen PLS. Mudah untuk menemukan contoh dan ilustrasi betapa penyelenggaraan program dan pembinaan satuan PLS belum menunj ukkan sinergi , kerj asama yang terkordinasi, dan simplifikasi. Masing-masing instansi dan institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat menggelar dan memiliki program pendidikan luar sekolah, namun sayangnya di antara program tersebut kurang terjalin kerjasama dan koneksitas.

Di tingkat Kementerian atau Departemen adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang paling banyak menyelenggarakan program PLS, antara lain pemberantasan buta huruf, kursus dan pelatihan, pendidikan keterampilan hidup, taman bacaan masyarakat atau perpustakaan, pendidikan perempuan, dan program PAUD. Kementerian dalam negeri menyelenggarakan program pembinaan kesejahteraan keluarga, Pos Paud,

 ISBN 978-602-14314-8-1

Posyandu, berbagai program pendidikan perempuan dan pendidikan keluarga. Kementerian kesehatan menyelenggarakan berbagai program penyuluhan kesehatan dan gizi, kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, dan lain-lain. Kementerian Agama menyelenggarakan taman pendidikan Al'Quran, kursus da'ai, penyuluhan undang-undang perkawinan, dan sebagainya. Kementerian pertanian menyelenggarakan kursus pertanian bagi calon transmigran, mobile training unit, penyuluhan lapangan pertanian, dan sebagainya. Kementerian Sosial menyelenggarakan kursus pekerja sosial, kursus kesejahteraan keluarga, kebencanaan, tanggap darurat, dan sebagainya. Bahkan pada saat ini program-program tersebut masih ada dan berkembang lebih luas. Dengan begitu banyaknya departemen dan instansi yang menyelenggarakan PLS maka, beberapa situasi berikut seringkali terjadi:

1. Seringkali peserta didik yang sama harus mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaaan.
2. Dalam program pendidikan yang berbeda itu disajikan materi pendidikan yang kurang lebih sama.
3. Tenaga instruktur atau pendidiknya amat terbatas, dipergunakan oleh berbagai program menurut pentingnya masing-masing, secara tidak terkoordinasi, sehingga menimbulkan penambahan beban dan kurang mengenanya materi pendidikan pada kebutuhan sasaran.
4. Adakalanya materi yang berbeda justru tidak berkeserasian satu dengan yang lainnya.
5. Kerapkali tujuan suatu program pendidikan tidak dapat tercapai karena tidak didukung oleh program-program lain yang seharusnya ada.

Untuk melakukan koordinasi dengan baik memang sangat diperlukan langkah inventarisasi lembaga-lembaga Pendidikan Luar Sekolah, identifikasi kegiatan, program, tata kerja, penyaluran lulusan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya serta bagaimana semuanya itu terjalin satu sama lainnya sebagai suatu sistim layanan pendidikan kepada masyarakat.

Perkembangan pendidikan luar sekolah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para personel atau orang-orang yang bertindak sebagai pembina, penyelenggara, pengelola, dan pelaksaana pendidikan yang bergelut di dalamnya sebagai awak sistem yang menggerakan organisasi penyelenggaraan pendidikan. Pembina adalah personel yang karena jabatannya di instansi pemerintah dan/atau lembaga atau badan yang bertugas mengarahkan, memfasilitasi, menyediakan regulasi, dan mensupervisi penyelenggaraan pendidikan di wilayah tanggung jawabnya. Penyelenggara adalah personel yang karena jabatannya dan/atau kehendaknya bertindak sebagai penanggung jawab formal terhadap institusi pendidikan. Pengelola adalah personel yang karena jabatannya bertugas menjalankan program kerja institusi pendidikan. Sedangkan pelaksana adalah personel yang bertindak sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi belajar dan pembelajaran atau proses belajar mengajar di institusi pendidikan.

Mereka yang bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada medan PLS berbeda spektrumnya dengan mereka yang berkerja sebagai pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Bila aktivitas itu bersifat formal di persekolahan maka sudah sangat jelas istilah yang biasa digunakan untuk

menyebut jabatan pendidik dan tenaga kependidikan, mereka adalah guru, kepala sekolah, pustakawan, laboran, dan guru bimbingan dan konseling; spektrum itu sangat konvergen, istilah yang digunakan mudah untuk mendapatkan kesamaan persepsi dan pemahaman. Tidak demikian yang terjadi pada latar paudni. Spektrum istilah yang digunakan sangat divergen atau beragam.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal meliput yang dikenal dalam terminologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah: pamong belajar, penilik, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), Fasilitator Desa Intensif (FDI), Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), dan tutor. Di samping itu terdapat pula PTK Paudni yang berada di bawah pembinaan kementerian lain selain Kemendikbud, dalam hal ini yang tersebut adalah penyuluh lapangan pertanian, penyuluh kesehatan, dan fasilitator berbagai program pengembangan masyarakat. Ada pula sekelompok jabatan dan peran yang berfungsi mengambil keputusan, menajalankan regulasi, dan mengambil kebijaksanaan terkait dengan program dan satuan paudni, mereka adalah para pejabat Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi yang membina dan mengatur paudni. Seringkali di antara para pelaku paudni tersebut tidak terjadi kordinasi dan sikronisasi program dan gerak langkah. Sehingga program kerja yang mereka jalannya menjadi tidak sinkron, tidak sambung, dan terpisah-pisah. Koordinasi Pendidikan Luar Sekolah di Indonesia walaupun mungkin sudah ada badan koordinasi di tingkat nasional, belum cukup, karena yang lebih penting lagi adalah adanya koordinasi pada tingkat pelaksana yang lebih rendah lagi, yaitu berhubungan langsung dengan masyarakat. Akan lebih baik bila di antara para pembina, pengelola, penyelenggaran, dan praktisi PLS tersebut terhadi sali ng kerj asama dan kordinasi yang sinkron.

Pengelolaan kelembagaan PAUD dan Dikmas perlu juga memperhatikan ketimpangan yang terj adi pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 2010 mengatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan baik jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Isi peraturan pemerintah ini berbeda dengan pola lama dimana peraturan pemerintah mengatur setiap jenjang pendidikan sekolah yang meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan jalur pendidikan luar sekolah. Pada PP nomor 17 tahun 2010 semuanya diatur menjadi satu dalam bingkai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dimaksud dalam peraturan pemerintah ini ada dua hal pokok yaitu pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi , pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional . Sedangkan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional .

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal

 ISBN 978-602-14314-8-1

diatur dalam Bab IV, yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan nonformal. Aturan dituangkan dalam 16 pasal mulai dari pasal 100 sampai dengan pasal 115. Pada pasal 100 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal. Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:

1. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
2. kelompok belajar;
3. pusat kegiatan belajar masyarakat;
4. majelis taklim; dan
5. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.

Sedangkan penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. pendidikan kecakapan hidup;
2. pendidikan anak usia dini ;
3. pendidikan kepemudaan;
4. pendidikan pemberdayaan perempuan;
5. pendidikan keaksaraan;
6. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
7. pendidikan kesetaraan.

Sampai di sini dapat dipahami bahwa posisi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu penyelenggara program pendidikan nonformal sama sekali tidak diakomodasi oleh peraturan pemerintah ini. Jangankan diatur, disebut-sebut pun tidak. Walaupun fakta di lapangan SKB menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

Ditemukan hal menarik dalam salah satu pasal pada peraturan pemerintah ini yang barangkali bisa menjelaskan prespektif peraturan pemerintah ini terhadap SKB. Pada pasal 102 ayat (3) yang berbunyi, "Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat". Inikah alasan mengapa SK B tidak perlu diatur dalam peraturan pemerintah ini karena tidak sesuai dengan nafas ayat tersebut. Lain kata bahwa semua penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal adalah yang diselenggarakan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Memang demikiankah yang dikehendaki Bangsa Indonesia?

Jika kita memperhatikan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 bahwa Pemerintah dan pemeri ntah daerah waj ib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskrimi nasi . A rtinya ayat tersebut menj amin bahwa pemerintah daerah waj ib memberikan layanan pendidikan yang bermutu, termasuk layanan pendidikan nonformal. Pengertian memberikan layanan disini tidak sekedar memberikan bantuan kepada lembaga atau satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, namun juga menyelenggarakan layanan pendidikan nonformal sebagaimana memberikan layanan pendidikan formal.

Layanan pendidikan formal oleh pemerintah daerah diwuj udkan melalui layanan sekolah mulai dari SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri. Kemudian dimana layanan pendidikan nonformal dan informal oleh pemerintah daerah, jika tidak melalui program pendidikan nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar, BPKB, BP PAUDNI, dan PP PAUDNI?

Kemudian apa yang bisa dilakukan? Paling tidak harus diupayakan adanya peraturan menteri yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaran SKB atau semacam peraturan tentang

pelayanan minimal SKB. Dengan demikian SKB akan memiliki payung hukum secara nasional dan bisa menutupi kekosongan hukum pada undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sebenarnya masih terbuka untuk melakukan perubahan peraturan pemerintah tersebut, karena PP 17 Tahun 2010 pun sudah diubah sebagaimana diatur dalam PP nomor 66 Tahun 2010. Walaupun kita sadar bahwa ketika melakukan amandemen untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan nonformal adalah suatu hal yang sulit dilakukan, berbeda jika yang diubah adalah ketentuan tentang pendidikan formal. Namun amandemen atau perubahan tidaklah hal yang mustahil j ika hal tersebut menyangkut kepentingan nasional dan kebenaran.

PENUTUP

Di tengah situasi demikian pesat praktek PLS di masyarakat seiring dengan semakin meluapnya kebutuhan masyarakat akan layanan program PLS, perubahan label dari pendidikan rakyat, pendidikan masyarakat, pendidikan luar sekolah, pendidikan nonformal dan informal, PAU DN I, dan akhirnya kembali menj adi pendidikan masyarakat (dan PAUD) hendaknya mampu memberikan hikmah akan ketajaman dan sinkronisasi regulasi, kecermatan kebijakan, dan keefektifan program, ketinggian mutu, dan keampuhan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perubahan label ini mau tidak mau akan berimplikasi pada aspek regulasi, kebij akan, dan koordinasi penyelenggaraan. Kebij akan untuk tetap mengembangkan pendidikan nonformal dan informal sebagai suatu usaha sadar dan terencana di dalam Sistem Pendidikan Nasional menuntut kebij akan penting yang perlu mendapat perhatian. Pertama, mengembalikan konsep pendidikan masyarakat yang sesuai dengan makna yang sesungguhnya sehingga dapat mewuj udkan amanat U U D 1945 pasal 31 ayat (3) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional , yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Konsep "mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional" bermakna adanya suatu sinkronisasi antar undang-undang, antar jalur, antar program, dan antar institusi , serta antar j alur.

Kedua, perlu adanya ketentuan-ketentuan turunan dari U U no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pendidikan nonformal dan informal dalam label pendidikan masyarakat, yang dapat dij adikan landasan operasional pengembangan dan pelembagaannya. Ketiga, adanya lembaga (setidaknya setingkat direktorat) yang secara teknis mengelola program-program pengembangan pendidikan nonfromal dan informal dalam label pendidikan masyarakat sesuai dengan keragaman nomenklatur pendidikan masyarakat yang tumbuh di masyarakat. Tugas pemerintah adalah "mengusahakan dan menyelenggarakan" bukan semata-mata mengatur dan membuat regulasi sebagaimana negara liberal.

Keempat, perlu peningkatan layanan pendidikan nonformal dan informal yang dapat menciptakan li ngkungan mendidik di keluarga dan di masyarakat. Isu pendidikan informal dengan paradigma "*learning withaut teaching*" harus menjadi acuan dalam membangun subsistem pendidikan informal. Demikian juga maraknya fenomena

 ISBN 978-602-14314-8-1

"*public paedagogy*" terutama yang terj adi melalui media massa dan media sosial harus menj adi perhatian dalam pengusahaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Kelima, perlu pengembangan dan peningkatan kompetensi dasar pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan karakteristik pendidikan nonformal dan informal dalam sebuah payung kordinasi yang terhubung dan integrasi khususnya pada tingkat regulasi dan kebij akan.

Keenam, dalam rangka mendukung implikasi-implikasi kebij akan di atas perlu adanya petataan kelembagaan UPT tingkat pusat, regional, dan daerah yang saling terhubung dan terpil ah karena aras relevansi j enis layanannya berbeda. Dan ketujuh, perlu ada kaj ian-kaj ian yang mendalam tentang potensi dan aktualisasi pendidikan nonformal dan informal dalam Sistem Pendidikan Nasional melalui penelitian dan pengembangan yang terarah, kontributif, dan produktif dalam pengembangan kebij akan dan peningnatan mutu pendidikan nonfromal dan informal.

KEPUSTAKAAN

Evans, David R. 1981. *The Planning of Nonformal Education*, Paris:Unesco.

Fasli Jalal, 2004, "*Kontribusi Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Terhadap Pembangunan Bangsa"*, makalah kunci disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) V di Surabaya, 6 Oktober 2004.

Faure, Edgar, et al. (1972), *Learning to Be: the World of Education Today and Tomorrow*. Paris: U nesco.

Freire, Paulo, 1984, *Education of The Oppresed*, Center for International Education University of Massachusetts.

Hamidjojo. Santoso 1956. *Pendidikan Masjarakat (Djilid III): Tjara[2] Penjelenggaraan dan Perkembangan Usaha Chusus di Indonesia*. Bandung: Ganaco, N.V.

Havelock, Ronald G., (1975). *The Change Agent's Guide to Innovation in Education*. New Jersey: Education Technology Publications Englewood Cliffs.

Ki Hadjar Dewantara (1938). "*Sistem Trisentra",* dalam buku *Karya Ki Hadjar Dewantara*, bagian pertama, cetakan ke dua (1977), Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Mestoko, dkk. 1986. *Pendidikan Nasional dari Jaman ke Jaman.* Jakarta: Balai Purtaka.

KEPROFESIONALAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENDIDIKAN NONFORMAL

Sofino
Universitas Bengkulu, Indonesia, email: sofino1962@gmail.com

Abstrak

Pendidikan nonformal mempunyai peranan yang sama penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang akan menciptakan mutu sumber daya manusia yang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Salah satu indikator mutu pendidikan nonformal adalah tingkat keprofessionalan PTK PNF. Tolak ukur keprofessionalan PTK PNF adalah tingkat standar kompetensi yang dimiliki PTK PNF. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan profesionalisme PTK PNF adalah dengan adanya lisensi sertifikasi PTK PNF profesional. Lisensi sertifikasi PTK PNF profesional di adakan melalui bentuk pelatihan terpusat sesuai dengan kompetensi PTK PNF. Dengan adanya lisensi sertifikasi PTK PNF diharapkan akan meningkatnya mutu pendidikan PNF yang imbasnya pada lulusan mutu SDM PNF yang siap bersaing dalam menghadapi MEA.

Kesimpulan makalah ini adalah bahwa untuk menciptakan SDM yang dapat bersaing menghadapi MEA diperlukan kesiapan dan kemantapan dari dalam sistem pendidikan, artinya pendidikan nonformal akan mampu menghasilkan SDM yang siap bersaing, bila mutu sistem pendidikan nonformal profesional. Strategi pendidikan nonformal dalam menciptakan SDM PNF dalam menghadapi MEA adalah (1) peningkatan keprofesionalan PTK PNF melalui lisensi sertifikasi, (2) pemberdayaan sertifikasi SKKNI lulusan PNF dalam dunia kerja.

Kata Kunci: Pendidikan Nonformal, Profesional

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Menjelang diberlakukanya pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bursa tenaga kerja akan semakin meningkat, ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Kualitas produk, baik itu barang atau jasa merupakan salah satu faktor penting yang harus dipenuhi.

Ada beberapa dampak dari konsekuensi bila diberlakukannya MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Tidak hanya dampak, ada beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi MEA. Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia.

Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor

 ISBN 978-602-14314-8-1

infrastuktur, dan sektor industri. (*Sumber:http://nationalgeographic.co.id)*

Berdasarkan hambatan tersebut salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di kalangan masyarakat. Kehadiran Pendidikan Nonformal (PNF) di Indonesia telah memberikan manfaat yang sangat luas dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan Nonformal muncul dari konsep pendidikan seumur hidup, dimana kebutuhan pendidikan tidak hanya dapat diperoleh pendidikan di sekolah umum atau pendidikan formal.

Pendidikan Nonformal menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal tersebut berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Ruang lingkup Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sedangkan satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Akan tetapi pada kenyataan di lapangan menurut Sudjana (2007: 27) mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan nonformal sampai saat ini sebagian terbesar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan nonformal. Hal tersebut mempengaruhi prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan nonformal, sehingga belum idealnya penyelenggaraan pendidikan tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak pada *output* pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah yang kurang memiliki keterampilan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya upaya peningkatan mutu pendidikan nonformal. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa pendidik PNF merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Selanjutnya, selain dari peningkatan kemampuan profesionalisme tenaga pendidik PNF/PLS untuk menghadi MEA, mutu peserta didik lulusan PNF juga harus diperhatikan. Karena akan bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri. Standarisasi tenaga kerja ahli merupakan alat ukur penting untuk menghadapi pasar bebas ASEAN atau **Masyarakat Ekonomi ASEAN**. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Euis Saedah mengungkapkan, standarisasi tenaga ahli berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perlu diberdayakan. Hal itu supaya Indonesia tak kebanjiran oleh tenaga ahli asing (sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2165470/cara-pemerintah-hadapi-serbuan-tenaga-asing-saat-mea-2015).

2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka, rumusan masalah dalam makalah ini adalah "Bagaimanakah Upaya Keprofesionalan Pendidikan Non Formal dalam Menciptakan Lulusan yang Siap Menghadapi MEA.

3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari makalah ini adalah mendeskripsikan upaya strategis keprofesionalan pendidik PNF dalam mencipatakan lulusan yang siap menghadapi MEA.

4. Manfaat

a. Makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pendidikan non formal.
b. Makalah ini merupakan salah satu momen bagi kalangan akademisi untuk menuangkan ide-ide dan gagasan-gagasan di bidang pendidikan non formal dalam menghadapi pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
c. Makalah ini sebagai bahan informasi sekaligus sebagai bahan perbandingan antara konsep dan implementasi terhadap profesionalisme pendidik PNF.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pendidikan Non Formal (PNF)

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu proses pendidikan. Proses pendidikan tersebut berlangsung seumur hidup, dimulai dari anak-anak sampai akhir hayat. Hal tersebut sering disebut pendidikan sepanjang hayat.

Jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia terdapat 3 (tiga) jalur, yaitu: pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf denganya; termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang

 ISBN 978-602-14314-8-1

dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Pendidikan informal adalah proses yang berlagsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetanga, lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media masa. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakanbagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya.

Salah satu jalur pendidikan tersebut adalah jalur pendidikan nonformal, menurut unesco dalam Sudjana (2010: 15) menjelaskan bahwa pendidikan nonformal mempunyai perbedaan dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal mempunyai derajat keketatan dan keseragaman yang lebih longggar dibanding dengan keketatan pendidikan formal.

Menurut Sihombing (2000: 12) mengatakan bahwa pendidikan nonformal adalah usaha sadar yang diarahkan untuk menyiapkan, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, agar memiliki pengetahuan, keterampilan sikap dan daya saing untuk merebut peluang yang tumbuh dan berkembang dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada dilingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal sangat berperan serta dalam peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi pertumbuhan zaman saat ini, untuk itu diharapkan pendidikan nonformal dapat berperan secara optimal. Untuk mengoptimalkan peranan pendidikan diperlukana adanya mutu pendidikan. Salah satu yang sangat mempengaruhi mutu pendidikan adalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan proses pendidikan dengan peran antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, pemberi inspirasi belajar maupun sebagai pelayanan administrasi pendidikan.

Berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2005 pasal 65, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF (PTK-PNF), Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dibidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal.

Menurut Undang-undang SISDIKNAS NO 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 mengatakan pendidik PNF Merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Selanjutnya, Pendidik PNF meliputi: (1) Pendidik PAUD, (2) Penilik PNF, (3) Tutor Keaksaraan Fungsional, yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat yang diberi wewenang dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan keaksaraan fungsional. (4) Tutor Kesetaraan (Paket A, B, C) yaitu tenaga yang berasal dari masyarakatbyang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan.(5) Instruktur Kursus, yaitu tenaga yang memiliki kompetensi dan bertugas menjadi pendidik pada lembaga kursus sperti tentor.

Menurut Undang-undang SISDIKNAS NO 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 Tenaga Kependidikan PNF adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan nonformal. Tenaga kependidikan PNF bertugas melaksanakan administrasi kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sarana dan prasarana, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Tenaga Kependidikan PNF meliputi: (1) Penilik (2) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), yaitu tenaga dengan latar belakang pendidikan Sarjana, berstatus sebagai tenaga kontrak yang diberi tugas membantu Penilik dan berkedudukan di Kecamatan.

2. Keprofesionalan Pendidikan Non Formal dalam Menciptakan Lulusan yang Siap Menghadapi MEA

Menjelang diberlakukannya era pasar bebas di Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean tantangan daya saing SDM akan menjadi lebih kuat, untuk itu sumber daya manusia sangatlah berperan dalam menghadapi era tersebut. Di Indonesia untuk meningkatkan SDM dapat melalui jalur-jalur pendidikan, salah satunya adalah jalur pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal mempunyai peranan yang sama penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang akan menciptakan mutu sumber daya manusia. Pendidikan adalah satu satu kunci dalam menciptakan mutu SDM yang siap menghadapi MEA. Dengan mengenyam pendidikan akan tercipta SDM yang bisa menghadapi tantangan globalisasi. Akan tetapi dunia pendidikan di Indonesia masih dihadapkan beberapa masalah.

Menurut Djazifah ER dan Hiryanto (2011) permasalahan dunia pendidikan di Indonesia yang menonjol antara lain (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan akademis. Seperti halnya dengan pendidikan nonformal di Indonesia masih terdapat kelemahan, yaitu *pertama*, kurangnya koordinasi, disebabkan keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. *Kedua*, tenaga pendidik atau sumber belajar profesional masih

 ISBN 978-602-14314-8-1

kurang. *Ketiga* motivasi belajar peserta didik relatif rendah (Sudjana, 2007: 26).

Berdasarkan dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan. Khususnya pada pendidikan nonformal belum adanya standar nasional pendidikan nonformal. Mutu pendidikan merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pendidikan di Indonesia, begitu juga halnya dengan mutu pendidikan nonformal yang mempunyai peranan penting dalam rangka menciptakan mutu sumber daya manusia.

Salah satu indikator mutu pendidikan non formal adalah tingkat keprofessionalan PTK PNF. Tolak ukur keprofessionalan PTK PNF adalah tingkat standar kompetensi yang dimiliki PTK PNF. Menurut Depdiknas (2006: 7) standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal terutama merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PNF meliputi empat komponen yaitu: 1) kompetensi pedagogi (andragogi), 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi social dan 4) kompetensi professional.Berikut adalah tabel Standar Kompetensi PTK PNF.

Tabel 1. Standar Kompetensi PTK PNF

PTK PNF	STANDAR kOMPETENSI	SUB STANDAR kOMPETENSI
Pendidik	Kompetensi pedagogik (andragogi	Memahami peserta didik/warga belajar
		Merancang pembelajaran
		Melaksanakan pembelajaran
		Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran
		Mengembangkan peserta didik/warga belajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
	Kompetensi kepribadian	Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil
		Memiliki kepribadian yang dewasa
		Memiliki kepribadian yang arif
		Memiliki kepribadian yang berwibawa
		Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan
	Kompetensi profesional	Menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait bidang studi

		Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi pembelajaran.
Tenaga Kependidikan (Penilik)	Memahami tugas, peran dan fungsi satuan PNF	
	Memahami konsep manajemen satuan PNF	
	Mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input satuan PNF	
	Meningkatkan output satuan PNF (kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi)	
	Memahami dan menghayati Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
	Memahami konsep manajemen mutu satuan PNF	
	Merencanakan sistem mutu satuan PNF	
	Merencanakan sistem mutu satuan PNF	
	Mengevaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF	
	Memperbaiki dan menindaklanjuti hasil evaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF	

sumber: Depdiknas (2006: 7-12)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan kompetensi pedagogik (andragogi) merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik/warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.(1) Memahami peserta didik/warga belajar, (2) Merancang pembelajaran, (3) Melaksanakan pembelajaran, (4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, (5) Mengembangkan peserta didik/warga belajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Selanjutnya, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik/warga belajar, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.(1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. (2) Memiliki kepribadian yang dewasa. (3) Memiliki kepribadian yang arif. (4) Memiliki kepribadian yang berwibawa. (5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik/warga belajar, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik/warga belajar, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. (1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik/warga belajar, baik lisan maupun tulisan. (2) Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. (3) Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik/warga belajar dan masyarakat

 ISBN 978-602-14314-8-1

sekitar, sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di satuan PNF dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai PTK-PNF. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. (1) Menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait bidang studi. (2) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi pembelajaran.

Khusus untuk tenaga kependidikan, standar kompetensi profesionalnya berbeda dengan pendidik. Standar kompetensi tenaga kependidikan pada satuan PNF, khususnya penilik adalah sebagai berikut: (1) Memahami tugas, peran dan fungsi satuan PNF. (2) Memahami konsep manajemen satuan PNF. (3) Mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input satuan PNF. (4) Meningkatkan output satuan PNF (kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi). (5) Memahami dan menghayati Standar Pelayanan Minimal (SPM). (6) Memahami konsep manajemen mutu satuan PNF. (7) Merencanakan sistem mutu satuan PNF. (8) Merencanakan sistem mutu satuan PNF. (9) Mengevaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF. (10) Memperbaiki dan menindaklanjuti hasil evaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF.

Berdasarkan standar kompetensi di atas, salah satu upaya peningkatan profesionalisme PTK PNF adalah dengan adanya lisensi sertifikasi PTK PNF profesional. Lisensi sertifikasi PTK PNF profesional di adakan melalui bentuk pelatihan terpusat sesuai dengan kompetensi PTK PNF. Dengan adanya lisensi sertifikasi PTK PNF diharapkan akan meningkatnya mutu pendidikan PNF yang imbasnya pada lulusan mutu SDM PNF yang siap bersaing dalam menghadapi MEA.

Kemudian, untuk menciptakan SDM lulusan PNF yang siap bersaing dalam dunia kerja di era pasar bebas Asean, diperlukan juga adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam standar kompetensi kelulusan PNF. Menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 ayat 1 mengatakan Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. berdasarkan peraturan tersebut jika, SKKNI ditetapkan sebagai pedoman penilaian penentuan kelulusan peserta didik PNF khususnya di lembaga-lembaga kursus dan balai latihan kerja akan menjadi nilai tambah siap berdaya saing bagi peserta didik dalam menghadapi pasar bebas.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permentakertrans No 5 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2). Dengan adanya sertifikasi SKKNI bagi peserta didik lulusan PNF, akan mampu bersaing di era pasar bebas.

KESIMPULAN

Berdasarkan makalah yang berjudul "Keprofesionalan Sumber Daya Manusia

(SDM) Pendidikan Nonformal" yang telah dikemukakan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan SDM yang dapat bersaing menghadapi MEA diperlukan kesiapan dan kematapan dari dalam sistem pendidikan, artinya pendidikan nonformal akan mampu menghasilkan SDM yang siap bersaing, bila mutu sistem pendidikan nonformal profesional. Strategi pendidikan nonformal dalam menciptakan SDM PNF dalam menghadapi MEA adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keprofesionalan PTK PNF melalui lisensi sertifikasi.
2. Pemberdayaan sertifikasi SKKNI lulusan PNF dalam dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Kompetensi PTK-PNF dan Sistem Penilaian. Jakarta: Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Djazifah ER dan Hiryanto (2011) Model Pengembangan Profesionalisme Penilik. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Volume 04, Nomor 1, Maret 2011.*

http://bisnis.liputan6.com/read/2165470/cara-pemerintah-hadapi-serbuan-tenaga-asing-saat-mea-2015

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sihombing, Umberto. (2000). Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi. Jakarta: PD. Mahkota.

Sudjana, D. (2007). Pendidikan Nonformal. Dalam Ali, M., Ibrahim, R., Sukmadinata, N.S., Sudjana, D., dan Rasjidin, W (Penyunting) *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press.

Sudjana. D. (2010). *Pendidikan Nonformal (Wawasan, Sejarah, Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas).* Bandung: Falah Production.

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 TentangSistem Pendidikan Nasional.

 ISBN 978-602-14314-8-1

MENGHADAPI MEA: INDONESIA PERLU BELAJAR DARI CINA?

Yoyon Suryono
Universitas Negeri Yogyakarta
ysuryo@uny.ac.id

Untuk menghadapi gelombang globalisasi, Cina paling beberapa tahun yang lalu, paling tidak sejak 2007, telah menyiapkan suatu rancangan strategi pendidikan untuk meningkatkan kemampuan daya saing negaranya dalam hal meningkatkan keunggulan tenaga kerja yang mendukung pembangunan ekonomi dalam kancah persaingan global agar bisa bertahan hidup dalam persaingan antarnegara yang semakin tajam. Bagaimana strategi pendidikan yang dilakukan oleh Cina tersebut dan apakah kita (Indonesia) perlu belajar dari strategi pengembangan pendidikan yang dilaksanakan oleh Cina dalam kaitan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan salah satu ciri utama terbukanya pasar tenaga kerja dan perdagangan yang mengglobal di kawasan Asia Tenggara. Tulisan singkat ini akan mencoba memapar strategi pendidikan yang dilakukan oleh Cina dan kemungkinan Indonesia dapat belajar dari strategi pendidikan yang dilaksanakan oleh Cina itu dengan suatu harapan agar pengalaman belajar yang diperoleh, dapat lebih menyiapkan Indonesia dalam menghadapi tantangan MEA.

Kondisi kependudukan

Dalam hal jumlah, tantangan kependudukan Cina dapat dikatakan lebih berat dari Indonesia dan Indonesia memiliki tantangan kependudukan hampir serupa dengan Cina. Cina memiliki jumlah penduduk sangat besar, tidak kurang dari 1,3 milyar orang dengan komposisi sekitar 260 juta mengikuti pendidikan formal baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Tentu dari jumlah ini terdapat sejumlah orang yang tergolong putus sekolah karena berbagai sebab. Angkatan kerja Cina mendekati angka 770 juta orang dengan sekitar 68 juta memerlukan layanan pendidikan dan pelatihan untuk orang dewasa (antara lain melalu reedukasi) ditambah dengan penduduk yang tidak memiliki keterampilan tertentu tetapi memerlukan pelatihan. Sebagaimana Negara lain Cina juga memiliki sejumlah penduduk yang berada pada usia lanjut. Dengan gambaran kependudukan seperti ini, dilihat dari sudut pendidikan maka Cina mengembangkan layanan pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan untuk orang dewasa, orang tidak memiliki keterampilan tertenau serta orang yang mengalami putus sekolah serta lanjut usia. Kelompok yang terakhir ini memerlukan layanan pendidikan nonformal dan informal.

Dari sudut pandang ini, meskipun jumlah penduduk Indonesia tidak sebesar Cina, penduduk Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 240an juta orang, namun memiliki komposisi kependudukan yang hampir serupa. Indonesia memiliki penduduk yang memerlukan pendidikan formal: dasar, menengah, dan tinggi dengan terus

 ISBN 978-602-14314-8-1

menggenjot kenaikan APKnya, penduduk orang dewasa yang memerlukan layanan pendidikan orang dewasa dan lansia, penduduk muda, angkatan kerja, serta penduduk yang karena sebab tertentu harus putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sama halnya dengan Cina, Indonesia memerlukan pengembangan layanan pendidikan formal, nonformal, dan Informal. Malah lebih khusus, layanan pendidikan berkelanjutan dan layanan pendidikan orang dewasa. Pertanyaanya bagaimana Cina memecahkan permasalahan tersebut dan bagaimana Indonesia harus belajar dari Cina dalam meningkatkan layanan pendidikannya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusianya?

Revolusi Pengetahuan Global

Dalam konteks global, Cina mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi berupa munculnya gerakan revolusi pengetahuan yang memunculkan pengetahuan baru yang berdampak pada proses pembangunan ekonomi, pendidikan dan pelatihan dalam perspektif *knowledge economy* dan *knowledge society*. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi hal tersebut dan berdampak luas pada peningkatan kemampuan pengetahuan baik dalam konteks ekonomi maupun masyarakat. Beberapa dampak yang dimaksud antara lain makin murahnya biaya proses dan pengiriman informasi sehingga berpengaruh pada proses produksi dan distribusi barang dan jasa, interaksi kehidupan manusia dan mengorganisasi kehidupan pada umumnya. Selain itu, berdampak pula pada percepatan riset dan pengembangan, pendidikan, pelatihan perangkar lunak, pemasaran, distribusi, organisasi, dan jaringan disertai dengan dampak berikutnya terhadap makin pendeknya jarak waktu penemuan dan aplikasi pengetahuan. Murahnya biaya transport dan komunikasi menjadikan biaya ekonomi lebih murah dalam konteks pasar ekonomi global-besar-dan terintegrasi, disertai kompeteisi yang semakin kuat dan tajam serta mengakibatkan perlunya secara terus menerus melakukan inovasi dan di sinilah peran penting perguruan tinggi.

Peran dan Strategi Pendidikan

Cina meletakan peran strategis pendidikan dalam menghadapi tantangan global tersebut. Mengapa demikian? Sejumlah arah baru perlu dilakukan oleh pendidikan yang meliputi beberapa hal yaitu: pendidikan merupakan sumber kekuatan kompetisi dan partisipasi sosial, terjadinya penaikan jumlah pendaftar siswa baru, khususnya di pendidikan tinggi (APK), banyaknya usia di atas usia PT masuk pendidikan tinggi, banyaknya partisipasi angkatan kerja mengikuti pendidikan berkelanjutan, meningkatnya penyedia pendidikan dan pelatihan swasta, meningkatkan kompetisi dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan, terjadinya internasionalisasi pendidikan tinggi dan pelatihan serta banyak diterapkannya IT dalam proses pendidikan dan pelatihan.

Strategi Pembelajaran Sepanjang Hayat

Strategi pendidikan dalam menghadapi perubahan dan tantangan global dijawab dengan perlunya pembelajaran sepanjang hayat yang diartikan sebagai proses pembelajaran dalam keseluruhan siklus kehidupan, terdapat di dalamnya pendidikan formal sebagai program yang terstruktur yang mengutakaman perolehan sertifikat/ ijazah, pendidikan nonformal dan pelatihan yang tidak terstruktur secara formal dalam system pendidikan, dicontohkan di sini adalah program pelatihan magang dan pelatihan dalam jabatan/pekerjaan yang terstukrur, pendidikan informal dan pelatihan yang berupa belajar yang tidak terstruktur, di manapun dilaksanakan, baik di rumah, komunitas, maupun tempat kerja.

Sementara itu, pembelajaran sepanjang hayat dicirikan sebagai bersifat komprehensif dalam seluruh siklus kehidupan, diperlukan untuk mempelajari keterampilan baru yang tidak sekedar "calistung" tetapi juga keterampilan keilmuan dan teknologi, kemampuan berbahasa asing, kemampuan memecahkan masalah, berpikir kreatif, kemampuan komunikasi, dan kecakapan untuk bekerja dalam tim dan belajar bersama orang lain, mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal, mempercayai keragaman penyedia pembelajaran baik privat maupun public, asing maupun domestic, menggunakan teknologi baru dalam pembelajaran, dan menggunakan bentuk baru dalam pembiayaan, penjaminan mutu, sertifikasi, dan perolehan pengakuan.

Beberapa butir penting yang dilaksanakan oleh Cina dalam menerapkan pembelajaran sepanjang hayat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan:

1. Pengaturan dan pengelolaan system pembelajaran sepanjang hayat: peran baru pemerintah, kerjasama dengan mitra nonpemerintah, penjaminan mutu, akreditasi, sertifikasi, kualifikasi vokasional, informasi, dan pembiayaan.
2. Pendidikan formal: K-12 dan pebelajar orang dewasa, publik, privat, nonpemerintah.
3. Kebutuhan sosial: identitas nasional dan barang public.
4. Sisi suplai (pelatihan): orang dewasa, privat (kredensial dan kualifikasi), pelatihan industri (sertifikasi), pengembangan karir, nonformal, dan lainnya.
5. Sisi deman (kebutuhan): literasi dan numerasi, ilmu, teknologi, dan bahasa, keterampilan umum baru yang mencakup: memecahkan masalah, komunikasi, kerja-kelompok, kreativitas, belajar untuk belajar, dan persyaratan kemampuan fungsional dan okuvasional yang baru.

Implikasi Pedagogis

Cina mengakui pentingnya mutu pendidikan secara internasional. Mereka telah membandingkan bagaimana mutu pendidikan Cina dibandingkan secara internasional melalui PISA (Program for International Student Assessment), TIMSS (Trend in International

 ISBN 978-602-14314-8-1

Mathematics and Science Study), dan IALS (International adult literacy survey). Masalah mutu disebutnya kritis, karena pertentangan antara perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu diperlukan untuk kompetisi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mensyaratkan pentingnya mutu pendidikan.

Pembelajaran sepanjang hayat berimplikasi secara pedagogis. Pedagogi lama perlu diperbaharui dengan pedagogi baru untuk melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Bagaimana implikasi pedagogisnya itu? Perubahan latar pedagogi lama (trdisional) ke pedagogi baru mencakup empat hal penting yaitu berpusat pada pebelajar, pengayaan pengetahuan, diarahkan oleh asesmen dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Dalam menghadapi tantangan global, China merevitalisasi pendidikannya melalui penerapan strategi pembelajaran sepanjang hayat. Indonesia pada tahun 2015 ini menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perlukah belajar dari China untuk merevitalisasi pendidikan melalui penerapan strategi pendidikan pembelajaran sepanjang hayat? Beberapa uraian singkat di atas memandu kita untuk dapat menerapkan pembelajaran sepanjang hayat dengan penguatan pendidikan formal, nonformal, dan informal secara komprehensif

Daftar Pustaka

Dahlman, Zeng, & Wang. 2007. Enhancing China's competitiveness through life long learning. The Word Bank, Washington D.C.

European Communities. 2007. Key competencies for Lifelong learning European reference framework. Belgium.

UNESCO. 2013. Education policies to make the economy work. A case study of life long learning and employment prospect in Hong Kong SAR, China. Bangkok.

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pendidikan Nonformal Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional

oleh :
Ari Tri Winarno (Great Teacher Ary senpai)
UNNES, Indonesia
aryistimewa@gmail.com

Abstrak. Pendidikan nonformal adalah sebuah usaha yang dilakukan diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal, yang bertujuan untuk memberi hal-hal yang tidak diajarkan dalam sistem pendidikan formal. Hal-hal yang diberikan dalam pendidikan non formal berupa keterampilan yang nantinya akan digunakan oleh individu dalam masyarakat. Pendidikan non formal memiliki banyak manfaat pada masyarakat karena dalam pendidikan non formal diajarkan hal-hal yang tidak didapat dalam pendidikan formal seperti pemberian keterampilan khusus . Dengan adanya pendidikan nonfromal juga akan menambah keterampilan yang dimiliki oleh individu ataupun masyarakat, sehingga secara tidak langsung sumber daya manusia maupun tingkat perekonomian dari masyarakat akan semakin baik.

Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, Pendidikan NonFormal, Sumber Daya Manusia, Keterampilan

I. Pendahuluan

Pendidikan adalah sarana untuk menjadikan seseorang menuju ke arah yang lebih baik. Pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan pengetahuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara umum terdapat 3 jalur pendidikan, Pendidikan informal merupakan sebuah proses pendidikan yang dialami seorang individu dalam lingkungan keluarga untuk mempelajari nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan pengalaman sehari-hari. Pendididikan formal adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam struktur dan lembaga pendidikan formal, pendidikan formal tersusun dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh lembaga pendidikan formal secara berjenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan non formal adalah sebuah usaha yang dilakukan diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal, yang bertujuan untuk memberi hal-hal yang tidak diajarkan dalam sistem pendidikan formal. Hal-hal yang diberikan dalam pendidikan non formal berupa keterampilan yang nantinya akan digunakan oleh individu dalam masyarakat. Pendidikan nonformal memiliki banyak manfaat pada masyarakat karena biasanya dalam pendidikan nonformal diajarkan hal-hal yang tidak didapat dalam pendidikan formal.

Pada faktanya pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan pengetahuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pendidikan nonformal memiliki pengaruh besar dalam hal pemberdayaan maupun peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam hal ini kita

 ISBN 978-602-14314-8-1

mengetahui bahwa pendidikan nonformal memiliki relevansi terhadapat peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan ekonomi berupa pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presdien Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sasaran Pengembangan ekonomi kreatif sebagai berikut : (1) periklanan; (2) arsitektur; (3) pasar seni dan barang antik; (4) kerajinan; (5) desain; (6) fashion (mode); (7) film, video, dan fotografi; (8) permainan interaktif; (9)musik; (10) seni pertunjukan; (11) penerbitan dan percetakan; (12) layanan komputer dan piranti lunak; (13) radio dan televisi; dan (14) riset dan pengembangan.

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pendidikan nonformal dapat dilaksanakan berupa pendidikan keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada seorang individu atau kelompok yang nantinya akan digunakan seorang individu atau kelompok tersebut dikemudian hari. Pendidikan keterampilan hidup menjadi suatu sarana untuk mengembangkan potensi ataupun kemampuan sesorang dalam hal tertentu yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut/dimaksimalkan. Contoh lembaga yang berhubungan dengan pendidikan keterampilan hidup adalah lembaga kursus. Lembaga kursus mengajarkan keterampilan kepada seorang individu atau kelompok agar memiliki keterampilan, bahkan untuk mengembangkan keterampilan dari individu atau kelompok tersebut. Keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh lemabaga pendidikan non formal bersifat aplikatif serta inovatif karena bertujuan untuk memberikan bekal terhadap individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pendidikan keterampilan hidup lebih mengedepankan kemampuan praktik bukan teori. Pendidikan keterampilan hidup juga dapat dijadikan sebagai sarana memberikan keterampilan baru, contoh nyata dari hal ini adalah pengadaan suatu pelatihan kerja, dalam bentuk pelatihan kerja, dalam pelatihan kerja keterampilan yang sudah didapatkan dapat digunakan untuk bekal mata pencaharian. Pelatihan kerja tidak hanya ditujukan untuk mereka yang masih belum bekerja, tapi pelatihan keterampilan kerja juga dapat diberikan kepada orang yang sudah bekerja untuk meningkatkan kemampuan kinerjanya dalam pekerjaannya.

Pendidikan keterampilan hidup yang berupa kursus atau pelatihan mampu memberikan hal baru dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pendidikan nonformal saat ini mulai diusahakan oleh berbagai pihak, seperti pendirian *incubator bussines center* di kota Semarang, *Jogja Digital Valley* maupun pengembangan produk kreatif lokal.

II. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Dasar Pendidikan NonFormal

Pendidikan adalah suatu upaya yang disengaja untuk membentuk manusia menjadi lebih baik. Pendidikan tidak

hanya mencakup masalah akademik ataupun pekerjaan yang akan dicapai seseorang. Pendidikan hendaknya mampu membuat seorang individu menjadi lebih baik lagi. Pendidikan bisa juga diguanakan sebagai bekal untuk seorang individu dalam menghadapi tantangan-tantangan kedepan.

Dalam jalur pendidikan kita mengenal 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal.

Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah sebuah proses pendidikan yang dialami seorang individu dalam lingkungan keluarga untuk mempelajari nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan pengalaman sehari-hari. Pendidikan informal berlangsung pada keluarga, dimana seorang individu akan belajar tentang nilai maupun sosialisasi pertama kali dalam hidupnya. Proses pembelajaran didalam keluarga sangat penting bagi seorang individu. Karena hal ini mempengaruhi bagaimana seorang individu akan beraktivitas (seperti sossialisasi) setelah individu tersebut memasuki dunia di luar lingkungan kelurga. Secara umum hal-hal yang dipelajari dan diperoleh dalam pendidikan informal berupa norma dalam keluarga yang nantinya dapat diaplikasikan dalam sosialisasi seorang individu setelah memasuki dunia baru misalnya sekolah formal, pergaulan/teman bermain.

Pendidikan Formal

Pendididikan formal adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam struktur dan lembaga pendidikan formal, pendidikan formal tersusun dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh lembaga pendidikan formal secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan NonFormal

Pendidikan nonformal adalah sebuah usaha yang dilakukan diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal, yang bertujuan untuk memberi hal-hal yang tidak diajarkan dalam sistem pendidikan formal. Hal-hal yang diberikan dalam pendidikan non formal berupa keterampilan yang nantinya akan digunakan oleh individu dalam masyarakat. Pendidikan non formal memiliki banyak manfaat pada masyarakat karena biasanya dalam pendidikan non formal diajarkan hal-hal yang tidak didapat dalam pendidikan formal. karena hal itu pendidikan non formal juga sangatlah penting. Ciri-ciri dari pendidikan non formal adalah; (1) Sistem kurikulum maupun pembelajaran diluar sistem persekolahan/pendidikan formal; (2) Hal yang diberikan berupa keterampilan serta kreativitas yang tidak diajarkan dalam pendidikan non formal; (3)Bersifat aplikatif, karena lebih mengutamakan keterampilan; (4)Jangka waktu bebas, karena bisa diikuti oleh siapapun; (5)Memiliki manfaat dalam memberikan keterampilan kepada individu atau masyarakat.

Secara umum Pendidikan non formal mencakup :

Pendidikan keterampilan hidup

Pendidikan keterampilan hidup bertujuan untuk memberikan

 ISBN 978-602-14314-8-1

keterampilan kepada seorang individu atau kelompok yang nantinya akan digunakan seorang individu atau kelompok tersebut dikemudian hari. Pendidikan keterampilan hidup dapat menjadi suatu sarana untuk mengembangkan potensi ataupun kemampuan sesorang dalam hal tertentu yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut/dimaksimalkan. Contoh lembaga yang berhubungan dengan pendidikan keterampilan hidup adalah lembaga kursus. Lembaga kursus mengajarkan keterampilan kepada seorang individu atau kelompok agar memiliki keterampilan, bahkan untuk mengembangkan keterampilan dari individu atau kelompok tersebut.

Keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh lembaga pendidikan non formal bersifat aplikatif serta inovatif karena bertujuan untuk memberikan bekal terhadap individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pendidikan keterampilan hidup lebih mengedepankan kemampuan praktik bukan teori. Pendidikan keterampilan hidup juga dapat dijadikan sebagai sarana memberikan keterampilan dalam bentuk pelatihan kerja sehingga keterampilan yang sudah didapatkan dapat digunakan untuk bekal mata pencaharian. Pelatihan kerja tidak hanya ditujukan untuk mereka yang masih belum bekerja, tapi pelatihan keterampilan kerja juga dapat diberikan kepada orang yang sudah bekerja untuk meningkatkan kemampuan kinerjanya dalam pekerjaannya.

Pendidikan anak usia dini

Pendidikan anak usia dini dalam arti sederhana dapat dartikan sebagai suatu kegiatan pendidikan yang ditujukan kepada usia pra sekolah dengan tujuan memaksimalkan usia emas dari seorang anak. Mengapa pendidikan anak usia dini itu penting? Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi untuk membentukanak berkembang sesuai tingkat perkembangannya. Kenapa pendidikan usia dini begitu penting? Dalam taraf perkembangannya anak usia dini atau istilah kerennya adalah usia emas (*Golden Age*) memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan anak usia dini tersebut dalam hal memaksimalkan kemampuan anak usia dini tentunya dengan pembelajaran yang sesuai dengan taraf perkembangan (PAUD).

Pemberdayaan masyarakat

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk mengembangkan kemampuan serta kemandirian masyarakat agar mampu mengembangkan potensi masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah: meningkatkan potensi daerah,memberdayakan daerah sesuai potensi yang telah ada, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memiliki semangat dalam pembangunan daerah

Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah satuan dari pendidikan non formal yang meliputi kelompok belajar program paket

A, paket B dan paket C yang dapat diselenggarakan melalui sanggar kegiatan belajar (SKB), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau satuan lainnya. Pendidikan kesetaraan dalam ranah dunia pendidikan non formal bukanlah hal yang sepele. Kebanyakan masyarakat jaman sekarang menganggap bahwa pendidikan lewat jalur kesetaraan adalah pendidikan yang kurang bermutu. Padahal pendidikan jalur kesetaraan misalnya SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) menurut penulis adalah lembaga pendidikan yang mampu mengasah kreativitas bagi warga belajar.

Pendidikan keaksaraan

Pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahn membaca, menulis dan berhitung. Pada zaman dahulu pendidikan keaksaraan begitu dilakukan dengan cara yang masih terhitung tradisional, akan tetapi pada zaman sekarang hal tersebut dapat dikombinasikan dengan berbagai trik. Misalnya dengan pengenalan keaksaraan yang didalamnya terdapat unsur-unsur aktivitas warga sehari-hari.

Konsep Dasar Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas. Departemen Perdagangan Republik Indonesia merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan.Berdasarkan Instruksi Presdien Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sasaran Pengembangan ekonomi kreatif sebagai berikut : (1) periklanan; (2) arsitektur; (3) pasar seni dan barang antik; (4) kerajinan; (5) desain; (6) fashion (mode); (7) film, video, dan fotografi; (8) permainan interaktif; (9) musik; (10) seni pertunjukan; (11) penerbitan dan percetakan; (12) layanan komputer dan piranti lunak; (13) radio dan televisi; dan (14) riset dan pengembangan.

Dalam Jurnal kajian LEMHANNAS RI tahun 2012, disebutkan bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintah yang merupakan syarat mendasar. Secara umum terdapat 5 pokok permasalahn dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk pencapaian tahun 2015, yaitu : (1) Kuantitas dan kualitas sumber daya insani sebagai pelaku dalam industri kreatif yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan serta pendidikan bagi insan kreatif indonesia; (2) Iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha di industri kreatif, yang meliputi sistem administrasi negara, kebijakan dan peraturan serta infrastruktur yang diharapkan dapat dibuat kondusif bagi perkembangan industri kreatif;(3) Kurangnya penghargaan/ apresiasi terhadap insan kreatif indonesia dan karya kreatif yang dihasilkan terutama

 ISBN 978-602-14314-8-1

untuk menumbuhkan rangsangan berkarya bagi insan kreatif Indonesia dalam bentuk dukungan baik finansial maupun nonfinansial;(4)Belum adanya sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha dan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan pasar dalam pengembangan industri kreatif;(5) Masih lemahnya dukungan lembaga pembiayaan konvensional dan masih sulitnya akses bagi entrepreneur kreatif untuk mendapatkaan sumber dana alternatif, seperti modal ventura atau dana *Corporate Social Responsibility.*

III. PEMBAHASAN

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pendidikan NonFormal.

Pendidikan NonFormal dan Berkembangnya Ekonomi Kreatif.

Pendidikan nonformal erat kaitannya dengan pembentukan industri kreatif, hal ini berkaitan satu sama lain. Pada perkembangannya pendidikan nonformal tidak hanya berupa sanggar kegiatan belajar saja, tapi pendidikan nonformal akan menjadi tempat dimana inovasi dalam peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing internasional. Berdasarkan Instruksi Presdien Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sasaran Pengembangan ekonomi kreatif sebagai berikut : (1) periklanan; (2) arsitektur; (3) pasar seni dan barang antik; (4) kerajinan; (5) desain; (6) fashion (mode); (7) film, video, dan fotografi; (8) permainan interaktif; (9) musik; (10) seni pertunjukan; (11) penerbitan dan percetakan; (12) layanan komputer dan piranti lunak; (13) radio dan televisi; dan (14) riset dan pengembangan.

Dalam Jurnal kajian LEMHANNAS RI tahun 2012, disebutkan bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintah yang merupakan syarat mendasar. Secara umum terdapat 5 pokok permasalahn dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk pencapaian tahun 2015, yaitu : (1) Kuantitas dan kualitas sumber daya insani sebagai pelaku dalam industri kreatif yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan serta pendidikan bagi insan kreatif indonesia; (2) Iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha di industri kreatif, yang meliputi sistem administrasi negara, kebijakan dan peraturan serta infrastruktur yang diharapkan dapat dibuat kondusif bagi perkembangan industri kreatif; (3) Kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap insan kreatif indonesia dan karya kreatif yang dihasilkan terutama untuk menumbuhkan rangsangan berkarya bagi insan kreatif Indonesia dalam bentuk dukungan baik finansial maupun nonfinansial; (4) Belum adanya sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha dan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan pasar dalam pengembangan industri kreatif; (5) Masih lemahnya dukungan lembaga

pembiayaan konvensional dan masih sulitnya akses bagi entrepreneur kreatif untuk mendapatkaan sumber dana alternatif, seperti modal ventura atau dana *Corporate Social Responsibility.*

Pendidikan keterampilan hidup memiliki pengaruh besar dalam perkembangan industri kreatif sebagai bagian dari berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia. Perkembangan industri kreatif dipengaruhi oleh lembaga yang mengajarkan tentang keterampilan hidup seperti kursus maupun pelatihan. Dalam proses pembelajaran di lembaga kursus maupun pelatihan, setiap warga belajar akan diajarkan keterampilan yang digunakan bekal dalam hal peningkatan sumber daya manusia atau dalam bahasa sederhananya sebagai bekal mata pencaharian, sebagai pekerja ataupun wirausaha. Pendidikan nonformal berupa kursus maupun pelatihan berperan penting dalam pengembangan keterampilan untuk daya saing dalam hal ekonomi kreatif. Potensi lokal, kemampuan dasar maupun kreativitas anak bangsa merupakan kekuatan utama dalam membentuk indutri kreatif untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di negeri ini.

Inkubator Bisnis, Komunitas Belajar, Kursus dan Pelatihan Sebagai Upaya dalam Peningkatkan Munculnya Industri Kreatif di Indonesia.

Pada dasarnya pendidikan nonformal dapat berkembang lebih *up to date* daripada pendidikan formal. Hal ini bisa dilihat dengan kebutuhan pasar tentang keterampilan khusus yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Dalam penelitian sederhana yang penyusun lakukan pada Mei 2014 di sebuah studio game dan animasi bernama KNT Jakarta. Permintaan pasar tentang animasi dan game bukan lagi merupakan masalah utama dari studio tersebut jika dikerjakan dengan waktu 1-2 hari. Idealnya sebuah animasi yang bagus dikerjakan dalam waktu lama karena software yang digunakan masih berupa *software* umum untuk membuat animasi. Melalui wawancara yang telah dilakukan dengan 4 subjek yang merupakan mahasiswa desain animasi, ternyata *software* baru yang digunakan oleh studio KNT Jakarta tidak diajarkan dalam bangku perkuliahan. Bisa dilihat dari hal ini bahwa pentingnya pendidikan nonformal yang dilaksanakan juga bisa lebih *up to date* dan harus lebih *up to date* daripada pendidikan formal. Dari hal tersebut penyusun akan menjelaskan tentang konsep inovasi sederhana dalam pendidikan nonformal yang berhubungan langsung dengan akar ekonomi kreatif di Indonesia.

Inkubator Bisnis

Inkubator bisnis adalah sebuah wadah untuk membina dan mengembangkan industri kreatif berbasis komunitas. Inkubator bisnis ini bertujuan membentuk industri kreatif yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Dalam observasi partisipatif yang telah penyusun lakukan pada tahun 2012-2014 di Inkubator Bisnis bernama IKITAS (http://www.ikitas.com). Penyusun ingin mendeskripsikan secara singkat tentang Inkubator bisnis ini dalam hal pengembangan ekonomi kreatif.

 ISBN 978-602-14314-8-1

Inkubator bisnis IKITAS, mengadakan proses latihan rutin pada setiap awal tahun dan akhir tahun. Pelatihan yang diselenggarakan berupa pelatihan animasi yang bekerja sama dengan studio animasi semarang, pelatihan game digital dan pembuatan aplikasi sederhana. Pelatihan industri kreatif yang dilaksanakan ditujukan untuk semua yang berminat mengembangkan kemampuan dalam hal yang ingin ditekuni dalam bisang industri kreatif tersebut. Output dari kegiatan tersebut dapat menjadi sebuah perekrutan industri kreatif digital, mengembangkan dengan berbaur melalui komunitas. Secara sederhana kita bisa melihat proses pembelajaran dalam inkubator bisnis seperti berikut :

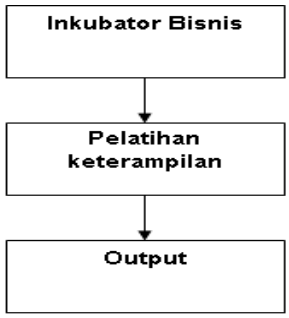

Komunitas Belajar

Komunitas belajar merupakan tempat saling belajar –mengajar satu sama lain untuk saling memberi informasi yang akan digunakan untuk mengembangkan keterampilan. Pada observasi partisipatif tahun 2013-2014 di komunitas Blender Army Semarang (komunitas animasi 3D). Terdapat kecenderungan positif untuk pengembangan ekonomi kreatif. Saling bertukarnya informasi, akan membuat ide dan kreativitas semakin berkembang. Kita bisa membuat konsep sederhana dari komunitas belajar ini.

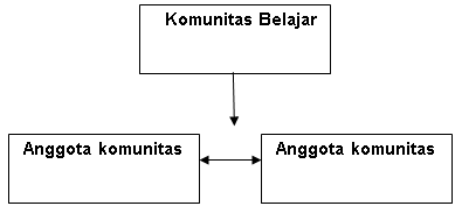

Komunitas belajar membuat anggota komunitas akan bertukar pikiran satu sama lain, sehingga hal ini akan membuat ide dan kreativitas semakin berkembang.

Kursus dan Pelatihan

Sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasa 26 ayat 5, maka kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada masyarakat yang membutuhkan. Kursus merupakan proses pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan kurikulum yang berasal dari dasar hingga mahir *(Basic-Average-Expert)*. Sedangkan pelatihan merupakan proses pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat

atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan tetapi materi yang diajarkan merupakan hal-hal yang sedang *up to date.*

Pada observasi partisipatif yang penyusun lakukan pada tahun 2013-2015 di sebuah sekolah animasi 3D bernama Flip Edukasi (http://www.flip-studio.com/). Lembaga tersebut mengadakan kegiatan kursus dan pelatihan. Kursus yang dilaksanakan di flip edukasi berupa kursus *online* dan pelatihan secara *offline*. Kursus *online* ini dilakukan dengan mengajar melaui *web, BBM, FB, dan DVD* tutorial pembelajaran animasi. Sedangkan pelatihan yang dilakukan dilakukan secara *offline* dengan bekerja sama dengan IKITAS Semarang.

Kursus dan pelatihan mampu memberikan bekal kepada warga belajar untuk mengembangkan keterampilan yang ditekuni. Secara sederhana kita bisa memiliki konsep seperti berikut :

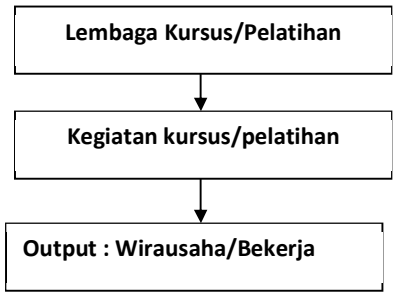

Ekonomi Kreatif dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Ketahanan Nasional dalam bidang Ekonomi itu sendiri dapat terlihat dalam berbagai kondisi kehidupan pereknomian bangsa yang mana dalam bangsa tersebut dapat memelihara kemandirian Ekonomi Nasional. Hal ini berkaitan dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk nyata tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan. karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); (1) Pasar dan basis produksi tunggal;(2)Kawasan ekonomi yang kompetitif;(3) Wilayah pembangunan ekonomi yang merata;(4)Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Dari konsep pendidikan nonformal, kita mengetahui pengaruh positif pendidikan nonformal dan berkembangnya ekonomi kreatif. Jika ekonomi kreatif berkembang pesat dikalangan masyarakat, hal ini akan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing internasional. Dari hal tersebut kita tahu bahwa pendidikan nonformal berpengaruh dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Secara tidak tidak langsung sumber daya manusia yang berkaitan dengan ekonomi kreatif yang dipengaruhi oleh pendidikan nonformal,

 ISBN 978-602-14314-8-1

akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu pengembangan ekonomi kreatif dalam jalur pendidikan nonformal harus lebih ditekankan lagi.

Pentingnya pendidikan nonformal dalam membangun ekonomi kreatif perlu dimaksimalkan. Selain dukungan pemerintah, pihak masyarakat pun juga harus mengapresiasi karya anak bangsa agar ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pendidikan nonformal haruslah diperbarui dengan adanya inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan nonformal seperti ; (1) Model Pembelajaran. Model pembelajaran dalam inovasi pendidikan nonformal dapat dikombinasikan dengan pemanfaatan media tertentu seperti teknologi informasi ataupun permainan edukatif sederhana dalam sebuah kursus atau pelatihan, pelatihan/kursus yang biasanya dilakukan secara konvensional kini bisa dipadukan dengan media berupa pemanfaatan teknologi informasi baik murni pemanfaatan teknologi informasi maupun kombinasi antara teknologi informasi dengan tutor (Great Teacher Ary senpai :2015); (2) Media edukasi pendidikan nonformal. Media edukasi dalam pendidikan nonformal memiliki peran sebagai pesan penyampai untuk warga belajar/peserta didik, inovasi penggunaan media edukasi dapat dikombinasikan dengan pesatnya teknologi maupun identifikasi kebutuhan warga belajar/peserta didik; (3) Kurikulum yang lebih *up to date*. Ketika berbicara mengenai pendidikan nonformal dalam *image* kita pasti yang ada hanyalah materi kesetaraan atau buta aksara saja. Padalah seperti yang kita ketahui pendidikan nonformal erat kaitannya dengan kecakapan hidup, kurikulum yang lebih *up to date* tentang permasalahan pendidikan nonformal hendaknya menjadi sebuah solusi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis pendidikan nonformal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

III. KESIMPULAN

Pendidikan nonformal memiliki pengaruh besar dalam ketahanan ekonomi nasional. Pendidikan nonformal memiliki pengaruh positif terhadap berkembangnya ekonomi kreatif. Jika ekonomi kreatif berkembang pesat dikalangan masyarakat, hal ini akan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing internasional. Dari hal tersebut kita tahu bahwa pendidikan nonformal berpengaruh dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Secara tidak tidak langsung sumber daya manusia yang berkaitan dengan ekonomi kreatif yang dipengaruhi oleh pendidikan nonformal, akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu pengembangan ekonomi kreatif dalam jalur pendidikan nonformal harus lebih ditekankan lagi. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pendidikan nonformal haruslah diperbarui dengan adanya inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan nonformal seperti ; (1) Model Pembelajaran; 2) Media edukasi pendidikan nonformal; 3) Kurikulum

yang lebih *up to date*. Dalam konsep sederhana dapat dilihat sebagai berikut :

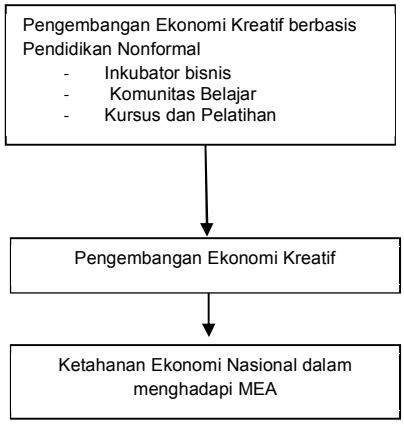

Daftar Pustaka (Referensi)

Great Teacher Ary Senpai. 2015. *Blended Learning and Cyber Non Formal Education*. Jakarta. Nulisbuku.com.

Husamah, 2014. *Pembelajaran Blended Learning*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Marzuki, Saleh. 2010. *Pendidikan Non Formal*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Siswanto. 2011. Pengantar *Pengembangan Kurikulum Pelatihan Pendidikan*. NonFormal.Semarang : UNNES Press.

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Jurnal kajian LEMHANNAS RI tahun 2012.

Instruksi Presdien Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

(http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2014/10/24/ekonomi-kreatif-permasalahan-tantangan-dan-prospeknya-697796.html/diakses pada 2 Maret 2015 Pukul 05.30)

(https://hotgantina11sinaga.wordpress.com/2014/02/26/konsep-dan-definisi-ekonomi-kreatif-dalam-perspektif-indonesia/diakses pada 1 Maret 2015 pukul 12.30)

(http://arifh.blogdetik.com/ekonomi-kreatif/diakses pada 2 Maret 2015 pukul 09.30)

(http://www.ikitas.com/profil/diakses pada 28 Februari 2015 Pukul 02.30)

(http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/08/Pengertian-karakteristik-masyarakat-ekonomi-asean.html/diakses pada 1 Maret 2015 pukul 08.35)

(http://www.flip-studio.com/diakses pada Desember 2014 Pukul 08.43)

 ISBN 978-602-14314-8-1

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NONFORMAL MELALUI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR

oleh:
Syamsul Bakhri Gaffar
Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Makassar

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Visi Pendidikan Nasional menghendaki terwujudnya Sistem Pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan itu, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2025 bertekad menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis serta mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain. Kualitas manusia Indonesia seperti itu hanya dapat dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Dalam upaya mencapai sasaran pendidikan bermutu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengharuskan disusunnya standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Standar Pamong belajar adalah kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pamong belajar yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pamong belajar mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam mencapai pendidikan yang bermutu untuk semua warga Indonesia melalui jalur pendidikan nonformal. Hal ini disebabkan karena pamong belajar selain sebagai pendidik, juga sebagai tenaga kependidikan. Pamong belajar sebagai pendidik mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa "pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai

 ISBN 978-602-14314-8-1

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan". Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sebagai tenaga kependidikan pamong belajar bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini mengacu pada penjelasan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 1 yang berbunyi "Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran , dan teknisi sumber belajar"

KOMPETENSI PAMONG BELAJAR

Kompetensi pamong belajar dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik/andragogik, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi itu terintegrasi dalam kinerja pamong belajar.

Kompetensi pamong belajar mencakup kompetensi inti pamong belajar yang dikembangkan menjadi kompetensi pamong belajar pada Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI), Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Kompetensi pamong belajar mencakup kompetensi *pedagogik/andragogik,* kepribadian dan sosial berlaku untuk semua pamong belajar baik di P2PNFI, BPPNFI, BPKB maupun SKB, yang berbeda adalah kompetensi profesional. *Kompetensi pedagogik/andragogik* berkaitan dengan kemampuan memahami karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan warga belajar; menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogik/andragogik; mengelola program pembelajaran, pembimbingan, dan/atau pelatihan; dan menguasai strategi pembelajaran, pembimbingan, dan/atau pelatihan. *Kompetensi Kepribadian* berkaitan dengan kemampuan berakhlak mulia dan menjadi panutan bagi warga belajar dan masyarakat; menampilkan sikap terbuka, akrab, empati, dan simpati terhadap warga belajar dan masyarakat; menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; dan menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, percaya diri, dan bangga terhadap profesi. *Kempetensi sosial* berkaitan dengan kemampuan memahami warga belajar sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat secara tidak terpisahkan; membina kemitraan dalam mendukung program pendidikan nonformal; melakukan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun; berpartisipasi dan berperan aktif pada penyelenggaraan pendidikan nonformal; dan memahami, mengakui, serta menghargai budaya masyarakat setempat. *Kompetensi profesional* berkaitan dengan kemampuan

memahami kebutuhan belajar, sumber belajar, dan permasalahan warga belajar dan lingkungannya; menguasai konsep keilmuan yang relevan untuk pengembangan program (kurikulum), pembelajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan; menguasai pengetahuan dan keterampilan fungsional; manguasai kelembagaan, ketenagaan, sistem, satuan, dan jenis pendidikan nonformal; mengembangkan kegiatan saling membimbing dan saling belajar; memberikan pertimbangan akademik untuk meningkatkan kualitas program pembelajaran, pembimbingan, dan/atau pelatihan; dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi terapan; menguasai prinsip-prinsip, metode dan teknik penelitian; memiliki kemampuan manajerial tentang kelembagaan dan pengembangan program; mengembangkan model program pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan; mengembangkan model sumber belajar, peningkatan mutu, dan pelatihan; dan mendifusikan hasil pengembangan model program, pembelajaran, pembimbingan, dan/atau pelatihan; serta mengimplementasikan model program, peningkatan mutu, pembelajaran, bimbingan dan/atau pelatihan. Pamong belajar yang telah memiliki kompetensi tersebut di atas, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pada umumnya dan peserta didik pada khususnya dalam mengikuti berbagai kegiatan pendidikan nonformal yang sedang dan yang akan dilaksanakan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR

Kompetensi pamong belajar dikembangkan berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan kondisi pamong belajar di lapangan.

Landasan Filosofis. Pendidikan bermutu adalah investasi masa depan bangsa yang menghasilkan warga negara seutuhnya yang terdidik dan cerdas dan merupakan aset yang menentukan eksistensi dan kemajuan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pendidikan bermutu dilandasi oleh filsafat yang mencakup enam hakikat. *Pertama*, hakikat kehidupan manusia yang baik adalah adanya interaksi antarmanusia baik secara individu maupun kelompok, sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan. *Kedua*, hakikat masyarakat Indonesia adalah kelompok individu yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan masyarakat madani dengan ciri penghargaan terhadap hak asasi manusia, keekaan dalam kebhinekaan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, dan kesetaraan gender. *Ketiga*, hakikat warga belajar adalah individu yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan. *Keempat*, hakikat pamong belajar adalah agen pembelajaran dan pembaharuan untuk membudayakan manusia dalam mewujudkan tujuan pendidikan. *Kelima*, hakikat proses pendidikan adalah bantuan pamong belajar kepada warga belajar dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, dan pelatihan yang dilakukan secara sadar dan terencana. *Keenam,* hakikat kebenaran adalah

 ISBN 978-602-14314-8-1

realitas yang didasarkan pada rasio, pengalaman, manfaat, dan pilihan nilai.

Sejalan dengan keenam hakikat tersebut, proses pengembangan manusia yang terdidik dan cerdas memerlukan pamong belajar yang mampu mengembangkan potensi warga belajar melalui olah qolbu, olah cipta/pikir olah karsa, olah karya, olah rasa, dan olah raga.

*Landasan Yuridis.*Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 tentang Pendidikan Nasional mengamanatkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi warga belajar agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pamong belajar adalah pendidik dan tenaga kependidikan profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran serta mampu mengelola program dan kelembagaan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal. Pamong belajar berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa pendidik termasuk ”pamong belajar” harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pamong belajar profesional bertugas melaksanakan pembelajaran yang mendidik melalui perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar, pelaksanaan bimbingan dan pelatihan

serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai individu yang bertugas memberi layanan ahli, pamong belajar profesional harus mampu membuat keputusan-keputusan yang nonrutin baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap implementasi yang terjadi dalam setting yang wajar antara pamong belajar, warga belajar, dan lingkungannya.

Untuk mengemban tugas-tugas sebagai pamong belajar profesional, pamong belajar harus menguasai seperangkat kompetensi. Oleh karena itu kompetensi tersebut perlu dikembangkan untuk menjadi acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kondisi Pamong Belajar di Lapangan. Kondisi pamong belajar di lapangan sangat beragam, baik dari jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi.

Masalah lain yang berkaitan dengan kondisi di lapangan adalah masih adanya disparitas dalam ketersediaan pamong belajar baik pada jenjang SKB, BPKB, maupun BPPNFI/P2PNFI. Masalah pamong belajar lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan bidang keahlian pamong belajar dengan mata pelajaran yang diampunya.

Pamong belajar adalah pendidik profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran serta mampu mengelola program dan kelembagaan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal. Pamong belajar sebagai pendidik yang bekerja pada jalur pendidikan nonformal memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas dari guru atau pendidik pada jalur pendidikan formal. Pamong belajar menghadapi warga belajar yang sangat beraneka ragam dalam usia, lingkungan, budaya, geografis, aktivitas kerja, keterlibatan dalam kehidupan, dan kekurangan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal. Pamong belajar dituntut untuk mampu menyusun program belajar, melakukan proses pembelajaran, mengelola program pembelajaran, mengevaluasi, dan mengembangkan model program dan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar yang berkembang di masyarakat. Pamong belajar juga dituntut untuk mampu memberikan bimbingan dan pelatihan pada warga belajar.

KESIMPULAN

Pamong belajar mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam mencapai pendidikan yang bermutu untuk masyarakat Indonesia melalui jalur pendidikan nonformal. Hal ini disebabkan karena pamong belajar selain sebagai pendidik, juga sebagai tenaga kependidikan. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan profesional harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran serta mampu mengelola program dan kelembagaan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal. Pamong belajar berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta (c)

 ISBN 978-602-14314-8-1

memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu kompetensi pamong belajar seyogyanya dikembangkan berdasarkan landasan filosofis, konseptual, yuridis dan kondisi di lapangan, dan secara utuh dikembangkan dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik/andragogik, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi itu terintegrasi dalam kinerja pamong belajar pada berbagai level, dan yang berbeda adalah kompetensi profesional pamong belajar pada masing-masing unit kerja.

Dengan berkembangnya kompetensi pamong belajar dapat menjadi pendorong meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya peserta didik pada pendidikan nonformal.

DAFTAR PUSTAKA

Kebijakan dan Program, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional 2004

Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-undang Dasar Repubiik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Repuliik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

STRATEGI PEMBELAJARAN PARTISIPATIF DALAM MENINGKATKAN HASIL PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN KARAWANG

Dr. Dayat Hidayat, SPd., MPd.
Prodi Pendidikan Luar Sekolah, FKIP
Universitas Singaperbangsa Karawang
dayathidayat194@yahoo.com

Abstrak. Strategi pembelajaran partisipatif dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan program pendidikan nonformal di PKBM. Pengelolaan program pendidikan nonformal di PKBM, sesuai dengan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, dan penilaian. Sedangkan pengembangan merupakan upaya memantapkan, memperluas, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan program-program pendidikan nonformal di PKBM. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan data tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang. Untuk mencapai tujuan penelitian tentang bagaimana pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang ini digunakan pendekatan kualtitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam *(indepth interview),* analisis dokumentasi. Untuk menganalis data hasil penelitian dilakukan sesuai dengan model analisis Miles dan Huberman (1992 : 20), yaitu model analisis interaktif. Langkah-langkah analisis tersebut meliputi : 1) koleksi data *(data collection),* 2) penyederhanaan data *(data reductionaI),* 3) penyajian data *(data display)* dan 4) pengambilan kesimpulan, serta verifikasi *(conclusion: drawing verying).*

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan sumber belajar bersama warga belajar mengidentifikasi kebutuhan belajar yang akan dipenuhi melalui kegiatan belajar. Pada tahap pelaksanaan sumber belajar memotivasi warga belajar apabila diketahui bahwa kegiatan dan kemajuan belajar itu lamban. Sumber belajar membantu warga belajar apar memperhatikan keterkaitan antara pengalaman yang telah dimiliki dengan kepentingan warga belajar lainnya. Sumber belajar merespon secara edukatif terhadap usaha para warga belajar untuk menerapkan pengalaman dan keterampilan baru yang mereka miliki dan membantu mereka untuk menggunakan respon tersebut terhadap stimulus serupa dari pihak lain dalam situasi kehidupan nyata. Sumber belajar mendorong warga belajar untuk mencari dan menemukan sendiri alternatif jawaban terhadap masalah yang timbul walaupun masalah itu mudah untuk dipeoleh sumber belajar. Pada tahap penilaian, sumber belajar memotivasi warga belajar untuk melakukan evaluasi terhadap pengalaman terutama terhadap keterampilan yang telah dimiliki di dalam tugas sebenarnya atau dalam dunia kehidupamya.

Kata Kunci : ***Pembelajaran, Partisipatif, Hasil Program PNF***

 ISBN 978-602-14314-8-1

A. *Pendahuluan*

Program pendidikan nonformal mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan program-program lain dalam pembangunan. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal, regional, maupun nasional terdapat kebijakan dan program pendidikan luar sekolah yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Sebagai pendekatan dasar dalam pembangunan, pendidikan nonformal mempunyai fungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam berbagai sektor pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan akan berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan dikembangkan melalui kegiatan pendidikan yang relevan dengan pembangunan. Pendidikan nonformal tersebut diselenggarakan dalam berbagai satuan, yaitu : lembaga pelatihan, kursus, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan pendidikan sejenis.

Strategi pengelolaan dan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berorientasi masa depan adalah suatu rencana untuk melakukan tindakan atau kegiatan dalam pengelolaan dan pengembangan PKBM. Pengelolaan menurut *Hersey* dan *Blanchard* (1982) dalam Djudju Sudjana (2004) mengemukakan bahwa : *management as working together with or through other people, individuals orgroups, to accomplish* or*ganiational goals* (kegiatan bekerja bersama atau melalui orang lain, baik perorangan maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi tersebut yang dimaksud di sini adalah lembaga PKBM dan/atau lembaga pendamping PKBM.

Strategi ini diterapkan pada fungsi-fungsi pengelolaan program pendidikan nonformal di PKBM. Pengelolaan program pendidikan nonformal di PKBM, sesuai dengan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, dan penilaian. Sedangkan pengembangan merupakan upaya memantapkan, memperluas, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan program-program pendidikan nonformal di PKBM.

Dilihat dari segi pengelolaannya, PKBM yang baik mengenali dan mendayagunakan lingkungan, mampu mensosialisasikan program, dan mampu memodifikasi masyarakat dan pihak lain, untuk mendukung kegiatan PKBM. Dengan pendekatan kolaboratif dapat dilakukan perencanaan inovatif. Perencanaan ini ditandai dengan munculnya gagasan dan komitmen baru untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti di bidang pendidikan luar sekolah. Perencanaan ini mencankup tiga unsur pokok yaitu berorientasi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan atau pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, kornitmen terhadap keberadaan dan kegiatan lembaga baru, dan pengerahan sumber daya manusia yang, dimiliki instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan gerakan pelayanan secara sinergik kepada masyarakat. Dengan pendekatan

partisipatif PKBM mampu mempartisipasikan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran berbagai kegiatan pendidikan nonformal.

Penyusunan rencana strategik dan pelaksanaan pengembangan program pendidikan nonformal di PKBM diawali dengan pengumpulan informasi tentang isu-isu internal dilakukan melalui kajian kepustakaan dan empirik yang kemudian dideskripsikan berdasarkan : (1) latar belakang berdirinya PKBM, (2) organisasi dan manajemen PKBM, (3) program-program pembelajaran yang diselenggarakan berdasarkan lingkup, satuan, dan jenis pendidikan luar sekolah, (4) komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, perusahaan, dan tokoh-tokoh masyarakat, (5) ketersediaan tutor, nara sumber teknis dan warga belajar, fasilitas serta alat-alat pendukung, (6) kurikulum dan pelaksanaannya, (7) keunggulan dan kelemahan baik PKBM maupun program-programnya.

Informasi tentang isu-isu dari lingkungan eksternal yang dikaji adalah: (1) kemanfaatan yang dirasakan masyarakat dengan adanya PKBM, (2) kebutuhan belajar masyarakat yang ter-penuhi dan tidak terpenuhi yang dilakukan oleh PKBM, (3) harapan pihak luar terhadap masa depan PKBM, (4) pe-rubahan lingkungan yang mungkin terjadi dan kemungkinan pengaruhnya terhadap PKBM, dan (5) peluang dan tantangan yang harus dihadapi PKBM dan lain sebagainya.

Isu-isu yang dikumpulkan dari lingkungan dalam dari lingkungan luar PKBM dinilai untuk mengetahui; perbedaan setiap isu, kaitan antara satu isu dengan isu lainnya, dan untuk menyusun tingkatan *(ranking)* isu-isu tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan demikian partisipasi masyarakat dan lintas sektoral sangat diperlukan bagi pengembangan berbagai penyelenggaraan program pendidikan nonformal di PKBM.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana penilaian pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang?

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dikemukakan di atas, ternyata faktor-faktor partisipasi masyarakat yang dapat menentukan peningkatan hasil penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal di PKBM sangat luas. Karena itu, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di Kabupaten Karawang".

 ISBN 978-602-14314-8-1

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ”bagaimana pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang?”.

C. *Tujuan Penelitian*

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan data tentang perencanaan pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengungkapkan data tentang pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengungkapkan data tentang penilaian pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang.

D. *Kajian Pustaka*

Belajar dapat diartikan sebagai suatu perubahan disposisi atau kemampuan seseorang yang dicapai melalui usaha orang itu. Perubahan itu bukan diperoleh secara langsung melainkan dari proses pertumbuhan dirinya secara alamiah (Djudju Sudjana, 2004). Kegiatan belajar merupakan usaha yang disengaja oleh seseorang untuk mencapai tujuan belajarnya, tujuan belajar belajar tersebut meliputi perubahan tingkah laku. Oleh karena itu, belajar dapat dikatakan sebagai suatu perubahan yang dilakukan meningkatkan disposisi dan kemampuan. Disposisi yang dimaksudkan disini adalah perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan dan nilai atau aspirasi.

Adapun yang dimaksud dengan kemampuan adalah wujud penampilan seseorang dalam lingkungan tertentu, misal dalam lingkungan pekerjaan atau kehidupannya pada umumnya. Dengan demikian hasil kegiatan belajar harus dapat dibandingkan dalam perubahan tingkah laku sebelum memasuki kegiatan belajar dan setelah melalukan kegiatan belajar.

Pembelajaran adalah upaya yang sistematis dan disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Partisipatif adalah terlibatnya warga belajar mulal dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pembelajaran partisipatif dapat diartikan sebagai upaya sumber belajar untuk mengikutsertakan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran (Djudju Sudjana, 2004). Keikutsertaan warga belajar mulai dari :

1. Perencanaan program pembelajaran,
2. Pelaksanaan program pembelajaran, dan
3. Penilaian program pembelajaran.

Proses kegiatan belajar parisipatif berakar pada tradisi yang telah tumbuh di rnasyarakat sejak zaman dulu yang berasal dan norma-norma agama dan nilai-nilai sosial. Secara singkat dapat diemukakan bahwa wawasan dan makna proses kegiatan belajar partisipatif pada dasarnya bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang positif di masyarakat yang telah memberi dorongan

keterlibatan warganya untuk memecahkan masalah bersama. (Djudju Sudjana, 2004).

Negara-negara yang sedang berkembang meningkatkan usaha penerapan nilai-nilai positif vang tumbuh di masyarakat untuk rnengembangkan kegiatan belajar partisipatif. Beberapa negara yang sedang melakukan usaha pengembangan ini antara lain adalah Thailand di Asia, Tanzania di Afrika, dan Brazilia di Amerika Latin. Di Tanzania, negara di kawasan Afrika, pendekatan yang dilakukan dalam proses belajar partisipatif bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat pedesaan telah diterapkan oleh kepala Negara (Nyrere).

Melalui kegiatan belajar partisipatif itulah masyarakat harus percaya kepada kemampuan dirinya. Salah satu nilai yang digunakan dalam proses belajar partisipatif ialah bahwa anggota masyarakat tidak bisa diubah oleh orang yang datang dari luar masyarakatnya, tetapi masyarakat itu sendiri yang harus dan dapat mengembangkan diinya sendiri. Pengembangan diri akan dicapai melalui proses berfikir untuk memecahkan masalah yang kemudian diikuti dengan tindakan atau kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh mereka sendiri.

Di Indonesia, kegiatan belajar partisipatif, itu berakar pada nilai-nilai positif masyarakat dan budaya, nilai-nilai positif itu diangkat dan makna manusia dalam kehidupan di masyarakat. Manusia sebagai mahluk individu dan mahkluk sosial, misalnya ; norma agama kita kenal dengan musyawarah, mufakat dan diskusi nilai-nilal sosial seperti gotong royong, tolong menolong, dan saling membantu.

Djudju Sudjana (2004) mengemukakan bahwa landasan teoritis pembelajaran partisipatif adalah sebagai berikut :

1. **Teori Asosiasi *(Assosiaciation theory)***. Teori asosiasi dikembangkan oleh Thorndike, kemudian James Watson dan William James. Menurut teori ini kegiatan belajar akan efektif apabila interaksi antara sumber belajar dan warga belajar dilakukan melalui stimulus dan respon (S-R). Kegiatan pembelajaran adalah proses menghubungkan stimulus dan respon. Makin giat warga belajar dan makin tinggi kemampuannya dalam menghubungkan stimulus dan respon maka akan lebih efektif kegiatan belajarnya. Prinsip yang digunakan adalah kesiapan *(readiness)*, latihan *(exercise)* dan pengaruh *(effect)*. Ketiga prinsip tersebut adalah berikut :
   1) Prinsip Kesiapan. Prinsip kesiapan menekankan perlunya motivasi yang tinggi pada warga belajar untuk menghubungkan stimulus dari respon.
   2) Prinsip Latihan. Prinsip latihan mengandung makna bahwa warga belajar sendiri yang melakukan kegiatan belajar secara berulang-ulang dalam menghubungkan stimulus dan respon yang dipelajari.
   3) Prinsip Pengaruh. Prinsip pengaruh adalah prinsip yang paling penting dalam teori

 ISBN 978-602-14314-8-1

asosiasi. Prinsip ini berhubungan dengan hasil kegiatan belajar dan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga belajar dalam dunia kehidupannya.

2. **Teori behaviorism (Lingkungan)**. Menurut pandangan aliran psikologi behavioristik, belajar dilaksanakan dengan kontrol intrumental dari lingkungan. Sumber belajar mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajar mau belajar. Proses pembelajaran, dengan demikian dilaksanakan dengan kondisioning, pembiasaan, dan peniruan. Hadiah dan hukuman sering ditawarkan dalam pembelajaran yang demikian. Kedaulatan sumber belajar dalam proses pembelajaran relatif tinggi, sementara kedaulatan peserta didik sebaliknya, relatif rendah.
3. **Teori Gestalt**. Menurut pandangan psikologi gestalt, belajar adalah usaha yang bersifat total dari individu, oleh karena totalitas lebih bermakna dibandingkan dengan sebagian-sebagian.
4. **Teori Medan *(Field theory)***. Teori Medan dikembangkan oleh Kurt Lewin. Teori lapangan yang mengutamakan pentingnya pengalaman warga belajar, dan berorientasi pada pemecahan masalah serta motivasi memegang peranan penting. Prinsip *topological psycology* yang digunakan Lewin menekankan pada pentingnya wilayah kehidupan warga belajar *(life space)*. Berdasarkan teori ini, warga belajar dipandang sebagai subjek yang memiliki kemampuan berpikir aktif dan kreatif, dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis dan mencari akernatif pemecahan masalah, serta, mampu untuk melakukan kegiatan pemecahan masalah.

Djudju Sudjana (2004) mengemukakan bahwa filsafat pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah sebagai berikut :

1. **Berdasarkan Kebutuhan Belajar *(Learning Needs Based).*** Kegiatan belajar partisipatif didasarkan atas kebutuhan belajar. Kata Kebutuhan belajar adalah setiap keinginan atau kehendak yang dirasakan dan dinyatakan oleh seseorang unhik memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan/atau sikap tertentu melalui kegiatan belajar. Sumber informasi tentang kebutuhan belajar adalah warga belajar atau calon warga belajar. Pentingnya kebutuhan belajar ini didasarkan atas asumsi bahwa warga belajar akan belajar secara efektif apabila semua komponen program belajar dapat membantu warga belajar untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar inilah yang menjadi titiktolak penyusunan dan pengembangan program kegiatan belajar partisipatif.
2. **Berorientasi pada Tujuan Belajar *(Learning Needs Based).*** Proses kegiatan belajar direncanakan, dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan belajar yang telah

ditapkan sebelumnya. Pada tahap perencanam tujuan belajar disusun dan dirumuskan berdasarkan kebutuhan belajar. Tujuan belajar itupun disusun dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman warga belajar, potensi yang dimilikinya dan sumber belajar yang tersedia pada lingkungan kehidupan mereka. Untuk itu, kebutuhan belajar, potensi dan sumber-sumber perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar tujuan belajar (tujuan umum dan tujuan khusus) bisa dirumuskan secara akurat dan proses kegiatan belajar dapat dirancang dan dilaksanakan dengan efektif.

3. **Berpusat pada Warga Belajar *(Participant Needs).*** Proses kegiatan belajar partisifatif yang. berpusat pada peserta didik disebut pula ***learner centered***. Kegiatan belajar yang dilakukan itu didasarkan dan disesuaikan dengan latar belakang kehidupan warga belajar. Latar belakang kehidupan ini menjadi perhatian utama untuk dijadikan dasar penyusunan rencana proses kegiatan belajar baik untuk merumuskan langkah kegiatan, materi, fasilitas dan evaluasi belajar. Latar belakang kehidupan itu dapat meliputi latar belakang pendidikan tugas atau pekerjaan, pergaulan dan agama. Dalam penyusunan proses kegiatan belajar ini warga belajar memegang peranan utama sehingga mereka dapat merasakan bahwa kegiatan belajar itu menjadi milik mereka dan merekapun berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan proses yang ditetapkan oleh mereka sendiri.
4. **Belajar Berdasarkan Pengalaman *(Experiental Learning).*** Kegiatan belajar partisipatif disusun dan dilaksanakan atas hasil pengungkapan pengalaman peserta. Hal ini berkaitan dengan pengalaman dalam melaksanakan atau mengerjakan usaha dan pengalaman tentang cara-cara belajar yang telah dimiliki warga belajar. Dalam hal ini, proses kegiatan belajar merupakan kegiatan warga belajar yang dilakukan secara bersama di dalam situasi pengalaman nyata baik pengalaman dalam tugas yang dilakukan sehari-hari maupun dengan menggunakan pengalaman yang diangkat dari pekerjaan atau pengelolaan usaha mereka sehari-hari. Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam proses belajar harus diutamakan tipe kegiatan belajar pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu metode yang lebih banyak menumbuhkan partisipasi para warga belajar. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan belajar partisipatif dilakukan atas dasar pengalaman belajar dengan lebih banyak menggunakan metode pemecahan masalah.

E. Pendekatan dan Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian tentang bagaimana pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang ini digunakan pendekatan kualtitatif dengan metode

 ISBN 978-602-14314-8-1

studi kasus. Melalui studi kasus ini peneliti berusaha mengungkapkan dan menganalisis data secara detail tentang bagaimana pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang.

Dalam penelitian tentang bagaimana pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang ini subyek penelitian terdiri tiga orang penyelenggara, lima orang penyelenggara program pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara mendalam *(indepth interview),* analisis dokumentasi sebagai sumber data triangulasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Dalam menganalisis data yang dimaksudkan, peneliti berpedoman kepada pendapat Nasution (1991 : 129) yang mengemukakan bahwa "tahap penelitian kualitatif meliputi tiga tahapan, yaitu : 1) *tahap orientasi* untuk mendapatkan informasi tentang apa yang penting untuk ditemukan, 2) *tahap eksplorasi* untuk menentukan sesuatu secara terfokus, dan 3) *tahap member check* untuk mengecek temuan menurut prosedur dan memperoleh laporan akhir.

Untuk menganilis data hasil penelitian dilakukan sesuai dengan model analisis Miles dan Huberman (1992 : 20), yaitu model analisis interaktif. Langkah-langkah analisis tersebut meliputi : 1) koleksi data *(data collection),* 2) penyederhanaan data *(data reductionaI),* 3) penyajian data *(data display)* dan 4) pengambilan kesimpulan, serta verifikasi *(conclusion: drawing verying)* (Nasution S., 1991 : 129).

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi hasi penelitian memberikan gambaran sebagai berikut :

1. Perencanaan pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang

Pada tahap perencanaan pembelajaran program pendidikan nonformal di PKBM kabupaten Karawang, penyelenggara :

1) Membantu warga belajar dalam mendiagnosis kebutuhan belajar. Identifikisi kebutuhan belajar secara menyeluruh yang dilakukan oleh perencana program pendidikan telah dibicarakan pada bagian terdahulu.

   Mengidentifikasi kebutahan belajar berkaitan dengan permasalahan sumber-sumber yang tersedia (pendukung dan penghambat). Keterlibatan dalam kegiatan identifikisi kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan dalam kegiatan belajar membelajarkan dilakukan agar tepat sasaran program pendidikan nonformal yang akan dilaksanakan.

   Setelah mendiagnosis kebutuhan belajar selanjutnya membantu warga belajar dalam menyusun tujuan belajar. Penentuan tujuan

belajar mengandung arti merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan belajar. Tujuan ini penting untuk dilakukan berdasarkan tiga alasan. Pertama, tujuan itu merupakan arah dari segala kegiatan belajar. *Kedua,* tujuan dijadikan dasar untak pendidikan dan pengadaan unsur-unsur belajar yang tepat Ketiga, tujuan itu adalah sebagai tolok ukur dalam evaluasi kegiatan belajar.

Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar dan tujuan belajar kemudian memilih prioritas kebutuhan belajar dan tujuan belajar berdasarkan masalah, dukungan dan hambatan yang ada). Keterlibatan sumber dan wraga belajar dilaksanakan untuk menentukan perumusan tujuan program, baik tujuan umum *(goals)* maupun tujuan khusus *(objectives)* kegiatan belajar membelajarkan. Selain itu, keterlibatan juga dilakukan dalam penentuan komponen-komponen program, pembelajaran seperti warga belajar, sumber belajar, bahan belajar, proses kegiatan belajar, alat evaluasi, fasifitas, alat-alat, dan biaya.

Dalam menentukan kebutuhan belajar, faktor pengalaman warga belajar menjadi modal sosial, budaya, SDM dan SDA yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam merancang, pengalaman belajar ini sumber belajar dapat membantu warga belajar dalam dua hal. Pertama, membantu warga belajar dalam penerapan prinsip-prinsip pengorganisasian bahan belajar. Kedua, ia membantu warga belajar dalam penentuan model kegiatan belajar yang akan ditempuh.

2) Membantu Warga Belajar dalam Menyiapkan Kelompok Belajar. Situasi yang baik untuk melibatkan warga belajar di dalam perencanaan kegiatan belajar adalah apabila kegiatan belajar itu dilakukan pada kelompok terbatas.
3) Membuat program belajar (menyusun dan menetapkan) bahan belajar, metode, teknik, waktu, evaluasi alat-alat dan fasilitas.

Pada tahap perencanaan pembelajaran partisipatif dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal perlu dilakukan melalui pembinaan keakraban, identifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar dan kemungkinan hambatan belajar, perumusan tujuan pembelajaran dan penyusunan program pembelajaran.

Kegunaan perencanaan pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah :

1) Kebutuhan belajar dilakukan secara bersama dalam kelompok yang terorganisasi dan dikelola oleh warga belajar.
2) Program pendampingan merupakan penigkatan proses

 ISBN 978-602-14314-8-1

kegiatan belajar yang lebih banyak mengandalkan pada komponen pendamping dalam mengusahakan perubahan tingkah laku warga belajar.

3) Kegiatan belajar pendampingan lebih banyak berorientasi pada tujuan belajar yang hasilnya langsung dapat dimanfaatkan oleh warga belajar untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mengembangkan partisipasmya dalam usaha-usaha yang menyangkut kepentingan masyarakat.
4) Kegiatan ini menitikberatkan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat baik sumber manusiawi, maupun alam agar dengan demikian terjadi saling memanfaatkan antara warga belajar dengan lingkunganya.
5) Kegiatan ini lebih memperhatikan segi manusiawi warga belajar dengan menghargai potensi dan kemampuan yang dimiliki serta dengan menekankan pada usaha warga belajar dalam memanfaatkan potensi dan menampilkan kemarnpuan itu untuk melakukan kegiatan berpikir dan berbuat guna mencapai tujuan belajar yang menjadi milik mereka.

2. Pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang.

Pada tahap pelaksanaan program pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM kabupaten Karawang, penyelenggara :

1) Menciptakan situasi kegiatan belajar. Hubungan antar warga belajar dan antara warga belajar dan sumber belajar menciptakan hubungan yang terbuka, akrab dan terarah.
2) Interaksi dalam pembelajaran antara warga belajar dan sumber belajar dilakukan melalui hubungan horizontal (komunikasi sejajar)
3) Tekanan kegiatan belajar pada warga belajar (warga belajar lebih aktif melakukan kegiatan belajar.
4) Pendekatan kegiatan belajar berpusat pada warga belajar (penyusunan bahan belajar, kegiatan belajar disusun bersama antara warga belajar dan sumber belajar. Peranan sumber belajar membantu warga dalam melakukan kegiatan belajar.

Pada penyelenggaraan pendidikan nonformal yang menggunakan strategi pembelajaran partisipatif, peran sumber balajar adalah sebagai berikut :

1) Sumber balajar menempatkan diri pada kedudukan yang tidak serba mengetahui.
2) Sumber belajar mempunyai peranan untuk membantu warga belajar dalam melaksakan kegiatan belajar berdasarkan kebutuhan belajar yang dirasakan perlu, penting atau mendesak oleh warga belajar.
3) Sumber belajar melakukan motivasi terhadap warga belajar

untuk berpartisipasi dalam menyusun tujuan belajar, bahan belajar dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan belajar.

4) Sumber belajar sekaligus menempakan kedudukannya sebagai warga belajar di dalam kegiatan belajar.
5) Sumber belajar bersama warga belajar melakukan kegiatan saling belajar, yaitu saling bertukar pikiran mengenai isi, proses dan hasil kegiatan belajar serta tentang cara-cara dan langkah-langkah pengembangan pengalaman belajar untuk masa berikutnya.
6) Sumber belajar berperan untuk membantu warga belajar dalam menciptakan situasi kegiatan belajar yang kondusif, mengembangkan semangat belajar bersama dan saling tukar pikiran.
7) Sumber belajar mengembangkan kegiatan belajar berkelompok dan memperhatikan minat perorangan, membantu warga belajar untuk mengoptimalkan respon terhadap stimulus yang dihadapi dalam kegiatan belajar.
8) Sumber belajar mendorong warga belajar untuk. meningkatkan semangat berprestasi, yaitu senantiasa berkeinginan untuk paling berhasil, semangat berkompetisi, tidak melarikan diri dari tantangan, dan berorientasi pada kehidupan yang lebih baik di masa datang.
9) Sumber belajar mendorong dan membantu warga belajar untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang diangkat dari kehidupan warga belajar sehingga mereka mampu berpikir dan bertindak terhadap dunia kehidupannya.

Metode dalam pembelajaran partisipatif adalah kegiatan atau cara umum penggolongan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah atau cara khusus yang digunakan pendidik dalam masing-masing metode pembelajaran. Teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Metode dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran partisipatif dapat digolongkan sebagai berikut :

1) Metode pembelajaran individual, teknik yang digunakan : tutorial, bimbingan perorangan, pembelajaran individual, magang dan lain sebagainya.
2) Metode pembelalaran kelompok, teknik yang digunakan : diskusi, simulisi, kerja kelompok, pemecahan masalah, bermain peran, dan lain sebagainya.
3) Metode pembelajaran massal , teknik yang digunakan : kontak sosial, paksaan sosial, demonstrasi, aksi partisipasi dan lain sebagainya.

Keterlibatan Sumber Belajar Menciptakan Situasi Pembelajaran Partisipatif adalah sebagai berikut :

1) Membantu warga belajar dalam menciptakan iklim belajar. Di dalam usaha menciptakan iklim

 ISBN 978-602-14314-8-1

belajar, sumber belajar bersama-sama warga belajar menyiapkan bahan belajar, menentukan fasilitas dan alat-alat serta membina keakraban diantara warga belajar.

2) Membantu warga belajar dalam melakukan langkah pembelajaran. Penjabaran penggolongan kegiatan belajar ke dalam urutan langkah-langkah kegiatan belajar akan menentukan cara pemilihan teknik-teknik belajar yang tepat dan penentuan bahan belajar yang cocok untuk mencapai tujuan belajar. Teknik-teknik kegiatan belajar yang dapat digunakan adalah teknik-teknik partisipasi dalam kelompok besar antara lain adalah tanya jawab, forum, kelompok pendengar, kelompok pemirsa, kelompok pembaca, kelompok buzz, peran pendengar, panel yang diperluas, dan sadap pendapat. diskusi dalam kelompok terbatas.

3. Penilaian pembelajaran partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di PKBM Kabupaten Karawang.

Penilaian dilakukan bersama warga belajar dan sumber belajar mulai dari menghimpun, mengolah, menyajikan dan mengambil keputusan.Warga belajar mengetahui sejauhmana perubahan yang telah dialami dan dicapai oleh mereka melalui kegiatan belajar. Penilaian terhadap hasil belajar dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan belajar telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tercapainya tujuan belajar akan mempengaruhi warga belajar dalam dua hal. Pertama, mereka mempunyai pandangan tentang tingkat kemampuan yang telah dicapai melalui kegiatan belajar. Kedua, mereka diharapkan akan menjadikan tingkah laku baru yang telah dimilikinya itu menjadi tingkat kemampuan saat ini yang akan dikembangkan pada waktu selanjutnya guna mencapai kemampuan yang lebih baik.

Penilaian terhadap pengaruh kegiatan belajar mencakup tiga segi yang berkaitan. Pertama, perubahan taraf hidup lulusan dalam aspek pekerjaan, pendapatan, kesehatan, dan lam sebagainya. Kedua, upaya membelajarkan orang lain terhadap perolehan belajar yang telah dirasakan manfaatnya. Ketiga, partisipasi warga belajar atau lulusan dalam kegiatan pembangunan masyarakat.

G. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka secara keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap perencanaan sumber belajar bersama warga belajar mengidentifikasi kebutuhan belajar yang akan dipenuhi melalui kegiatan belajar. Sumber belajar membantu warga belajar dalam mengidentifikasi sumber-sumber yang diperlukan, bahan belajar, alat-alat bantu, dan informasi lain

yang berhubungan. Usaha ini dapat meningkatkan kepercayaan diri para warga belajar dan keterampilan yang mereka miliki.

2. Pada tahap pelaksanaan sumber belajar memotivasi warga belajar apabila diketahui bahwa kegiatan dan kemajuan belajar itu lamban. Sumber belajar membantu warga belajar apar memperhatikan keterkaitan antara pengalaman yang telah dimiliki dengan kepentingan warga belajar lainnya. Sumber belajar merespon secara edukatif terhadap usaha para warga belajar untuk menerapkan pengalaman dan keterampilan baru yang mereka miliki dan membantu mereka untuk menggunakan respon tersebut terhadap stimulus serupa dari pihak lain dalam situasi kehidupan nyata. Sumber belajar mendorong warga belajar untuk mencari dan menemukan sendiri alternatif jawaban terhadap masalah yang timbul walaupun masalah itu mudah untuk dipeoleh sumber belajar.
3. Pada tahap penilaian, sumber belajar memotivasi warga belajar untuk melakukan evaluasi terhadap pengalaman terutama terhadap keterampilan yang telah dimiliki di dalam tugas sebenarnya atau dalam dunia kehidupamya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Penyelenggara Program Pendidikan Nonformal

a. Hasil penelitian ini dijadikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan nonformal sesuai dengan satuannya dan potensi lokal di sekutarnya.
b. Pihak penyelenggara program pendidikan Nonformal memberikan kesempatan belajar bagi warga belajar yang ingin meningkatkan partisipasinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
c. Penyelenggara melakukan kerja sama yang lebih luas dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan industri maupun instansi pemerintah maupun swasta sehingga dapat memperluas kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan Nonformal.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan ditinjau dari segi metode penelitian dan masalah penelitian yang dikaji. Pendekatan kualitatif dan metode studi kasus yang digunakan terbatas pada beberapa orang subyek penelitian sehingga pengelolaan program pendidikan nonformal belum dibahas secara lengkap. Pengelolaan program PKBM tidak saja membahas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program, masih ada bahasan pengelolaan lainnya. Karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pembinaan dan pengembangan program pendidikan nonformal di PKBM lain.

H. Daftar Pustaka

Bogdan, R. dan Taylor, S. J. (1993). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif.* Surabaya: Usaha Nasional.

 ISBN 978-602-14314-8-1

BPKB Jayagiri, (2001), *Standar Minimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Berbasis Masyarakat*, Bandung : BPKB Jayagiri Bandung Jawa Barat.

BP-PLSP, (2006), *Membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*, Bandung : BP-PLSP Jayagiri Bandung Jawa Barat.

_____, (2006), *Partisipasi Masyarakat*, Bandung : BP-PLSP Jayagiri Bandung Jawa Barat.

Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. (1998). *Pedoman Umum Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Jakarta: Depdikbud.

Gagne, M. R. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Intruction.* Florida: Florida State University.

Kamil, Mustofa. (2009), *Pendidikan Nonformal*, Bandung: Alfabeta.

_____, (2009), *Pendidikan dan Pelatihan*, Bandung: Alfabeta.

Mappa, S. dan Basleman, A. (1994). *Teori Belajar Orang Dewasa*. Jakarta: Depdiknas.

Moleong Lexi J. (1988). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Sevila Consuelo G. *et al.* (1993). *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press.

Sudjana, Djudju, (2004), *Pendidikan Nonformal (Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas*, Bandung, Fallah Production.

_____, (2004), *Strategi Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Nonformal*, Bandung, Fallah Production.

_____, (2004), *Manajemen Pendidikan Nonformal*, Bandung, Fallah Production.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama.

PERAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

oleh :
Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd
Fakultas Ilmu Pendidkan
Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Menyongsong era baru di tahun 2015 dengan adanya ASEAN *Economy Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), bangsa Indonesia dituntut untuk menciptakan banyak tenaga kerja yang mampu berkompetisi merebut lapangan kerja di antara negara ASEAN, terutama di negara sendiri. Karena selain membuka arus perdagangan barang atau jasa, MEA juga membuka peluang pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan dan sebagainya. Dunia pendidikan khususnya Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai tantangan besar untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing tinggi, untuk mencegah banjirnya tenaga profesional dari luar negeri ke Indonesia. Oleh sebab itu, PNF harus melakukan beberapa hal yang menjadi penguatan kelembagaan PNF dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) seperti berperan dalam mewujudkan ekonomi kreatif, mengembangkan metode pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran dan melaksanakan Kurikulum berbasis KKNI.

Kata-kata kunci: MEA, Pendidikan Non Formal, peningkatan SDM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2015 kita memasuki sebuah sistem perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang sering disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara Anggota ASEAN. Seluruh Negara Anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata yaitu ASEAN Economy Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Untuk itu Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar.

Salah satu tantangan besar dunia pendidikan nasional kita adalah menanamkan kesadaran kolektif sebagai

 ISBN 978-602-14314-8-1

bangsa yang perlu berjuang keras untuk mencapai kemajuan, mengejar ketertinggalannya dari Negara-negara lain dalam banyak aspek. Salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dengan cepat oleh bangsa ini adalah SDM yang kompeten. PNFI sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional harus terus mengupayakan inovasi-inovasi untuk membantu pemerintah mengupayakan kualitas human capital Indonesia yang kompetitif.

B. Rumusan Masalah

Dalam mengidentifikasi peran PNF dalam menghadapi MEA muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah yang dimaksud MEA ?
2. Apa saja lingkup Pendidikan Non Formal (PNF) ?
3. Bagaimana peran PNF dalam ekonomi kreatif ?
4. Bagaimana penguatan kelembagaan PNF dalam Peningkatan sumber daya manusia (SDM) ?

C. Tujuan

1. Mengenal tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Mengetahui lingkup Pendidikan Non Formal (PNF).
3. Mengetahui peran PNF dalam ekonomi kreatif.
4. Mengetahui Penguatan kelembagaan PNF dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM).

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN.

Karateristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah kawasan ekonomi yang kompetitif, pasar dan basis produksi tunggal, , wilayah pembangunan ekonomi yang merata, daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Komitmen MEA menuntut lebih banyak tenaga kerja yang saling berkompetisi merebut lapangan kerja di antara negara ASEAN, terutamal di negaranya sendiri.

2.2 Pendidikan Non Formal

Menurut pengertian Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 12 "Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang". Sedangkan Coombs (Trisnamansyah, 2003: 19) mendefinisikan nonformal education sebagai setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan baik dilakukan secara terpisah atau sebagai bagian penting dari kegiatan yang lebih besar, dilakukan secara sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai tujuan belajarnya.

Secara umum Pendidikan Non Formal mencakup :

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pendidikan yang ditujukan kepada usia pra sekolah dengan tujuan memaksimalkan usia emas dari seorang anak. Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi untuk membentuk anak berkembang sesuai tingkat perkembangannya. Dalam taraf perkembangannya anak usia dini memiliki potensi yang sangat besar dalam hal memaksimalkan kemampuannya, yaitu dengan pembelajaran yang sesuai dengan taraf perkembangannya.

2. Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah satuan dari Pendidikan Non Formal yang meliputi kelompok belajar program paket A, paket B dan paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau satuan lainnya.

3. Pendidikan keaksaraan

Pendidikan keaksaraan ditujukan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan membaca, menulis dan berhitung. Pada saat ini pendidikan keaksaraan dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai cara, misalnya dengan pengenalan keaksaraan yang didalamnya terdapat unsur-unsur aktivitas warga sehari-hari.

4. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan secara sengaja untuk mengembangkan kemampuan serta kemandirian masyarakat agar mampu mengembangkan potensi masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan potensi daerah, memberdayakan daerah sesuai potensi yang telah ada, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memiliki semangat dalam pembangunan daerah

5. Pendidikan keterampilan hidup

Pendidikan keterampilan hidup bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada seorang individu atau kelompok yang nantinya akan digunakan seorang individu atau kelompok tersebut dikemudian hari. Dalam pendidikan keterampilan hidup lebih mengedepankan kemampuan praktik bukan teori. Pendidikan keterampilan hidup juga dapat dijadikan sebagai sarana memberikan keterampilan dalam bentuk pelatihan kerja sehingga keterampilan yang sudah didapatkan dapat digunakan untuk bekal mata pencaharian.

2.3 Peran PNFI dalam Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Instruksi Presdien Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, sasaran Pengembangan ekonomi kreatif sebagai berikut : (1) periklanan; (2) arsitektur; (3) pasar seni dan barang antik; (4) kerajinan; (5) desain; (6) fashion (mode); (7) film, video, dan fotografi; (8) permainan interaktif; (9)

 ISBN 978-602-14314-8-1

musik; (10) seni pertunjukan; (11) penerbitan dan percetakan; (12) layanan komputer dan piranti lunak; (13) radio dan televisi; dan (14) riset dan pengembangan.

Dari berbagai sasaran tersebut, ada 3 jenis kegiatan dalam pendidikan non formal yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif, yaitu :

1. Inkubator bisnis

Inkubator bisnis merupakan suatu tempat yang menyediakan fasilitas bagi percepatan penumbuhan wirausaha melalui sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan base competency-nya. Dengan memanfaatkan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh inkubator, para pengguna jasa (tenant) dapat memperbaiki sisi-sisi lemah dari aspek-aspek wirausaha.

Terdapat tiga asumsi dasar dibentuknya inkubator bisnis (Raymond W. Smilor) yaitu:

1. Bahwa kita segera akan memasuki masa kewirausahaan (entrepreneurial era).
2. Dalam lingkungan bisnis saat ini terjadi kompetisi yang sengit diantara para usahawan.
3. Dibutuhkan suatu lembaga baru yang mampu merubah taktik dan strategi pembangunan ekonomi.

Jika dipandang Inkubator Bisnis sebagai sebuah sistem–proses, maka dalam sebuah inkubator bisnis akan ditemukan berbagai indikator sebagai berikut:

1. Wirausahawan yang prospektif (sebagai hasil seleksi) yang kemudian disebut tenant.
2. Fasilitas yang diperlukan untuk operasional inkubator dan untuk layanan tenant
3. Staff manajemen terlatih yang berperan sebagai fasilitator atau trainer/konsultan bagi para tenant.
4. Kurikulum pendidikan manajemen, teknis atau kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan tenant
5. Metodologi pelatihan atau pendampingan yang tepat untuk menyampaikan kurikulum inkubator kepada para tenant.
6. Lingkungan local yang merupakan masyarakat dimana bisnis inkubator tersebut melaksanakan aktifitas.
7. Output yaitu tenant yang telah lulus dari program inkubator bisnis dan siap menjadi wirausahawan mandiri

Perguruan Tinggi sebagai inkubator bisnis dapat menyediakan sarana untuk mengembangkan sumber daya dan iptek dengan menghasilkan produk iptek yang layak jual, menghasilkan pusat-pusat bisnis yang berbasis iptek dari sumberdaya akademik maupun non akademik, menghasilkan alumni berjiwa kewirausahaan, mengembangkan bisnis bagi masyarakat serta menyediakan jasa/konsultan/advokasi/sertifikasi.

Inkubator bisnis itu sendiri terbagi dalam 2 kelompok sasaran meliputi inkubator bisnis orientasi internal Perguruan Tinggi serta inkubator bisnis untuk masyarakat luas.

2. Komunitas belajar (learning community)

Komunitas belajar adalah suatu setting di mana pada komunitas tersebut terdapat tujuan belajar yang sifatnya mutual (saling menguntungkan), dan

menunjukkan adanya kepedulian terhadap pembelajaran dari setiap individu anggotanya. Komunitas belajar menjadi sebuah wadah yang akan mendorong terjadinya proses pembelajaran pada setiap anggotanya. John Dewey pada tahun 1916 telah lama mengamati bahwa anak-anak akan belajar pada saat mereka berpartisipasi pada setting-setting sosial. Beberapa dekade kemudian, Jerome Brunner (1996) menyatakan bahwa seseorang membuat makna (pengetahuan) berdasarkan hubungan-hubungan dan keikutsertaannya pada komunitas-komunitas atau budaya-budaya teertentu.

Untuk mewujudkan sebuah komunitas belajar yang baik dan kohesif, di dalam sebuah kelas harus terdapat berbagai karakteristik positif seperti :

- Hubungan antar individu yang saling peduli satu sama lain
- Pengharapan pamong belajar yang tinggi akan hasil belajar dari warga belajar
- Inkuiri (proses mencari tahu) yang produktif dalam belajar
- Lingkungan belajar yang positif.

Komunitas belajar yang baik dan kohesif akan sangat membantu warga belajar untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Sehingga dengan hasil belajar yang meningkat diharapkan tercipta lulusan yang terampil.

3. Kursus dan Pelatihan

Kursus merupakan proses pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan kurikulum yang berasal dari dasar hingga mahir (*Basic-Average-Expert*). Sedangkan pelatihan merupakan proses pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan tetapi materi yang diajarkan merupakan hal-hal yang sedang update.

Lembaga kursus merupakan salah satu lembaga yang berhubungan dengan pendidikan keterampilan hidup. Lembaga kursus mengajarkan keterampilan kepada seorang individu atau kelompok agar memiliki keterampilan, bahkan untuk mengembangkan keterampilan dari individu atau kelompok tersebut. Keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh lembaga pendidikan non formal bersifat aplikatif serta inovatif karena bertujuan untuk memberikan bekal terhadap individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelatihan kerja tidak hanya ditujukan untuk mereka yang masih belum bekerja, tapi pelatihan keterampilan kerja juga dapat diberikan kepada orang yang sudah bekerja untuk meningkatkan kemampuan kinerjanya dalam pekerjaannya.

2.4 Penguatan kelembagaan PNF dalam Peningkatan sumber daya manusia (SDM)

Penguatan kelembagaan PNF dalam Peningkatan sumber daya manusia

 ISBN 978-602-14314-8-1

(SDM) dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut.

(1) Mengembangkan metode Pembelajaran PNF.

Pengembangan metode pembelajaran adalah salah satu tupoksi Pamong Belajar sesuai Permen PAN dan RB nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. dengan harapan metode pembelajaran merupakan upaya memberikan solusi yang konstruktif dan inovatif dalam pelaksanaan program PNF. Dengan kata lain, pengembangan metode merupakan upaya pengembangan program PNF sekaligus menemukan sesuatu yang baru (adaptif dan inovatif) menurut kaidah dan metode ilmiah tertentu sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki.

(2) Mengembangkan Media Pembelajaran PNF

Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan peserta sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta pembelajaran (Arif S. Sadiman, 2009: 6-11).

Assosiation of Education and Communication Technology/AECT di Amerika, membatasi media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang belajar. Sementara itu Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.

Dalam bidang Pendidikan Non-Formal sudah sejak lama dikenal adanya kriteria yang harus dipatuhi dalam prosedur penyusunan pengembangan media atau bahan belajar. Kriteria tersebut lebih dikenal istilah 7-M, yaitu:

1. Mudah; artinya mudah membuatnya, mudah memperoleh bahan dan alatnya, serta mudah menggunakannya.
2. Murah; artinya dengan biaya sedikit, jika memungkinkan bahkan tanpa biaya, media pembelajaran tersebut dapat dibuat.
3. Menarik; artinya menarik atau merangsang perhatian warga belajar (peserta pembelajaran), baik dari sisi bentuk, warna, jumlah, bahasa maupun isinya.
4. Mempan; artinya efektif atau berdayaguna bagi warga belajar (peserta pembelajaran) dalam memenuhi kebutuhannya.
5. Mendorong; artinya isinya mendorong warga belajar (peserta pembelajaran) untuk bersikap atau berbuat sesuatu yang positif, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya sesuai tujuan belajar yang diharapkan.
6. Mustari; artinya tepat waktu, isinya tidak basi, dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal/sekitar tempat pembelajaran.

7. Manfaat; artinya isinya bernilai, mengandung manfaat, tidak mubazir atau sia-sia, apalagi merusak.

Penyusunan media pembelajaran dapat diartikan menciptakan media pembelajaran yang baru atau belum pernah ada, sedangkan pengembangan media pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya mengadaptasi, merekayasa, atau menyesuaikan (modifikasi) media pembelajaran yang sudah ada dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran seringkali tidak dilengkapi dengan media pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, pendidik (tutor/ fasilitator) ataupun pengelola/penyelenggara program dituntut untuk mampu merancang, menyusun atau mengembangkan media pembelajaran efektif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang dikelolanya.

Pelatihan/kursus yang biasanya dilakukan secara konvensional dalam PNF kini bisa dipadukan dengan media berupa pemanfaatan teknologi informasi baik murni pemanfaatan teknologi informasi maupun kombinasi antara teknologi informasi dengan tutor. Sehingga diharapkan semua tutor dapat menguasai teknologi informasi dan mengaplikannya dalam pembelajaran.

(3) Kurikulum PNF berbasis KKNI

Pada tahun 2012 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24). Di mana Peraturan Presiden ini memiliki sasaran ke depan:

(1) penataan mutu pendidikan tinggi berdasarkan penjenjangan kualifikasi lulusan,
(2) penyesuaian capaian pembelajaran untuk prodi sejenis, dan
(3) penyetaraan capaian pembelajaran dengan penjenjangan kualifikasi dunia kerja.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Ketentuan ini sangat relevan dengan pranata dan nilai-nilai pendidikan luar sekolah.

KKNI terdiri atas 9 jenjang kualifikasi. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. Penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh KKNI dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal atau pendidikan informal untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi.

 ISBN 978-602-14314-8-1

Deskripsi Kualifikasi pada KKNI merefleksikan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh seseorang melalui jalur :

1) pendidikan;
2) pelatihan;
3) pengalaman kerja;
4) pembelajaran mandiri.

Capaian Pembelajaran (learning outcomes) adalah internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis,ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI mau tidak mau harus menjadi acuan baru dalam penyusunan kurikulum pendidikan termasuk di perguruan tinggi, dan salah satu implementasi operasionalnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831). Regulasi ini sangat kompetibel dengan pranata PLS karena salah satu pokok kebijakan yang dituntut adalah adanya pengakuan pengalaman belajar terdahulu (recognition of prior learning) sebagai hal yang diijinkan sebagai bagian dari komponen pencapaian kompetensi di perguruan tinggi. Penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada kurikulum perguruan tinggi, dan standar nasional perguruan tinggi menghendaki adanya revisi dan rekonstruksi kurikulum semua jenis dan jenjang prodi sehingga memiliki standar yang jelas dan pasti, serta mampu menjamin layanan perkuliahan yang bermutu, serta lulusannya siap bersaing dan bersanding secara setara dengan lulusan program studi sejenis di tingkat internasional. Sehingga pada level 6, lulusan Prodi S1 PLS mampu bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang jabatan kerja sebagai pamong belajar, penyuluh, fasilitator, instruktur, pengelola, dan pendamping atau jabatan kerja sejenis pada program pendidikan nonformal dan informal dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PENUTUP

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah sistem pedagangan bebas yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara Anggota ASEAN.
2. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, beberapa kegiatan dalam pendidikan non formal (PNF) yang bisa digunakan adalah : 1. Membuat Inkubator bisnis; 2. Menciptakan komunitas belajar (learning

community) yang baik dan 3. Mengadakan kursus dan pelatihan.

3. Penguatan kelembagaan PNF dalam Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dapat dilakukan dengan mengembangkan metode pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan menerapkan kurikulum yang berbasis KKNI.

SARAN

Pendidikan Non Formal sebagai bagian dari pendidikan di Indonesia mempunyai peranan sangat penting dalam menciptakan lulusan pendidikan nonformal sebagai SDM yang terdidik dengan keterampilan yang terlatih, dan memenuhi standar internasional. Untuk itu lembaga pendidikan nonformal harus meningkatkan kualitas kurikulum dan fasilitasnya serta pendidiknya untuk memenuhi standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011. Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

http://lsetyobudi.lecture.ub.ac.id/.../INKUBATOR-BISNIS____FIXXXXX.pdf

http://greatteacherarysenpai.blogspot.com/2015/04/peran-pendidikan-nonformal-dalam.html

http://sr28jambinews.com/?/baca/19547/Peran-Pendidikan-Dalam-Menyongsong-Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).html

http://fauziep.com/tantangan-pnfi-di-tahun-2015-dan-menyongsong-pemerintahan-baru/

http://artikel-media.blogspot.com/2010/03/mengembangkan-ekonomi-kreatif.html

http://www.slideshare.net/lailanurrokhmah94/kurikulum-pendidikan-tinggi-sesuai-kkni-2014

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015

http://visiuniversal.blogspot.com/2014/06/makalah-pengembangan-media pembelajaran. html#sthash.BC0P7hWj.dpuf

 ISBN 978-602-14314-8-1

MODEL PELATIHAN BERBASIS NILAI KEAGAMAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER GENERASI MUDA

oleh:
Dr. Jajat S. Ardiwinata, M.Pd
Dr. Viena Rusmiati Hasanah, S.IP, M.Pd
Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd

Departemen Pendidikan Luar Sekolah
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan pada beberapa permasalahan, yaitu pertama, fenomena terjadinya krisis karakter khususnya kelompok generasi muda yang diakibatkan karena berbagai hal, diantaranya ketidaksiapan kelompok ini dalam menghadapi arus globalisasi yang berimplikasi terjadinya perubahan sosial yang semakin masif dan sangat cepat; kedua, eksistensi kelembagaan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda yang sangat signifikan dalam membentuk karakter; ketiga, belum tersusunnya sebuah prototipe modeling pelatihan yang standar dalam membentuk karakter generasi muda. Tujuan penelitian ini untuk menemukan model pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah model pelatihan yang dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam berbagai instansi pelaksana pelatihan untuk generasi muda, khususnya dalam membangun kompetensi dasar dalam membangun karakter generasi muda. Penelitian ini menerapkan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Rentang waktu pelaksnaan dirancang tiga tahun, mencakup; tahun pertama, studi eksploratif pada beberapa lembaga pelatihan yang melaksanakan berbagai pelatihan bagi pemuda, dengan orientasi produknya merekomendasikan sebuah model konseptual pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda. Pada tahun kedua;, penelitian akan memfokuskan pada pengembangan perangkat model serta uji coba model konseptual yang telah tersusun di tahun pertama. Adapun pada tahun ketiga, penelitian akan difokuskan pada diseminasi serta validasi model yang tersusun, sehingga dapat dilakukan pembakuan modeling. Produk penelitian ini merupakan model pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda, yang selanjutnya dapat disebarluaskan dan menjadi bagi kelembagaan diklat, serta sebagai salah satu temuan teknologi (*social engenering*) bidang pelatihan yang secara makro dapat menjadi instrumen dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Model Pelatihan, Nilai Keagamaan, Karakter Generasi Muda

A. Latar belakang

Mencari bentuk pendidikan karakter bangsa, dengan tekad *Nation and Character Building*, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Sunaryo Kartadinata, Rektor Universitas

 ISBN 978-602-14314-8-1

Pendidikan Indonesia dalam salah satu tulisannya, menunjukkan betapa saat ini sangat dibutuhkan sebuah inovasi dalam pembelajaran dalam lingkup baik formal maupun pendidikan nonformal dalam membangun bangsa. Dalam sembilan ayat kerangka pikir pendidikan karakter dalam bingkai Sistem Pendidikan Nasional, diungkapkan bahwa pendidikan karakter harus dapat dikembangkan dengan langkah yang komprehensif dan tepat sehingga dapat menjadi sebuah solusi bagi permasalahan dan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia.

Permasalahan mengenai krisis karakter di Indonesia, seperti yang telah kita pahami, mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan kemampuan untuk mengerahkan potensi masyarakat guna mencapai cita-cita bersama. Krisis karakter ini seperti penyakit akut yang terus menerus melemahkan jiwa bangsa, sehingga bangsa kita kehilangan kekuatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang maju dan bermartabat di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Krisis karakter di Indonesia tercermin dalam banyak fenomena sosial ekonomi yang secara umum dampaknya menurunkan kualitas kehidupan masyarakat luas. Beberapa fenomena sebagai bentuk krisis karakter yang kian merebak di Indonesia yaitu korupsi, mentalitas peminta-minta, konflik horizontal dengan kekerasan, suka mencari kambing hitam, kesenangan merusak diri sendiri, adalah beberapa ciri masyarakat yang mengalami krisis karakter.

Generasi muda adalah penerus bangsa yang harus ditingkatkan kualitasnya, khususnya dalam pembangunan mental dan karakter agar menjadi generasi yang tangguh dan mampu berdaya saing global. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut adalah sebagai berikut ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Adanya kata-kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam tujuan pendidikan nasional di atas menandakan bahwa praktik pendidikan bukan semata berorientasi kepada aspek kognitif, melainkan secara terpadu menyangkut tiga dimensi taksonomi pendidikan yakni kognitif, afektif dan psikomotor serta berbasis pada karakter bangsa yang didefinisikan dengan berbagai indikator sebagaimana tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan di atas.

Dengan demikian, praktik pendidikan dewasa ini yang masih mengagung-agungkan ranah kognitif, sangat bertentangan dengan kerangka

yuridis pendidikan nasional itu sendiri. Pendidikan yang hanya berbasis pada ranah kognitif tidak akan mampu membangun generasi bangsa yang berkarakter. Selain itu, jika kita amati dengan seksama, rumusan definisi pendidikan, pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional yang ditegaskan dalam UU Sisdiknas, selalu menegaskan secara tersurat tentang kekuatan spiritual keagamaan, nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, serta iman dan takwa. Hal tersebut mengandung makna bahwa sesungguhnya *core value* pembangunan pendidikan nasional harus bermuara kepada nilai-nilai transendental.

B. Pembatasan dan perumusan masalah

Penelitian ini ingin membangun sebuah model pelatihan dalam membentuk karakter generasi muda dengan basis nilai keagamaan. Fokus penelitian pada tahun pertama ini adalah untuk mengeksplorasi beberapa lembaga pelatihan dalam penyelenggaraannya. Hasil eksplorasi ini akan menjadikan sebuah konsepsi dari sebuah model pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, diajukan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Prototipe lembaga seperti apa saja yang menyelenggarakan pelatihan berbasis nilai keagamaan untuk membentuk karakter generasi muda?
2. Bagaimana desain pelatihan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga tersebut?
3. Bagaimana implementasi pengelolaan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut?
4. Pola-pola pembelajaran seperti apa yang dikembangkan pada pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam pelatihan di lembaga tersebut untuk membentuk karakter generasi muda?
5. Bagaimana proses pembelajaran dalam pelatihan di lembaga-lembaga tersebut dalam membentuk karakter generasi muda?
6. Bagaimana hasil pelatihan di lembaga-lembaga tersebut dalam membentuk karakter generasi muda?
7. Determinan faktor apa yang menjadi indikator penentu keberhasilan program pelatihan di lembaga-lembaga tersebut dalam membentuk karakter generasi muda?
8. Permasalahan apa yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan program pelatihan di lembaga-lembaga tersebut?
9. Model konseptual pelatihan seperti apa yang dipandang tepat untuk membentuk karakter generasi muda?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model pelatihan dalam membangun karakter generasi muda, secara lebih khusus diharapkan dapat menemukan dan menghasilkan sebuah desain pelatihan, implementasi pengelolaan pelatihan, pola, teknologi dan prinsip pembelajaran,

 ISBN 978-602-14314-8-1

faktor determinan keberhasilan dan kendala dalam pelatihan bagi generasi muda sehingga dapat secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada para pemuda sebagai penerus bangsa.

D. Urgensi penelitian

Hasil temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan model pendidikan dan pelatihan dalam membentuk karakter pemuda. Produk pelatihan ini dengan tersusunnya model pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda, diharapkan dapat disebarluaskan dan menjadi acuan, teknologi dalam pembelajaran pelatihan, untuk membentuk karakter generasi muda dalam berbagai kepentingan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan.

E. Luaran penelitian

Luaran penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan: (1) Draft proposal HKI dalam pengembangan model pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda. (2) Artikel hasil penelitian yang dapat diterbitkan pada jurnal nasional dan atau internasional terakreditasi.

F. Kajian Teoritis

1. Konsepsi Disain Penelitian

Penelitian yang diajukan ini sesuai dengan payung penelitian Universitas, payung penelitian,, Kelompok Bidang Kajian serta road map penelitian di Departemen Pendidikan nonformal. Penelitian ini sejalan dengan arah kebijakan Renstra UPI dalam Surat Keputusan Rektor UPI Nomor 0651/H40/PR/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang payung penelitian sebagai arah kebijakan. Dari lima fokus yang rujukan Universitas Pendidikan Indonesia untuk kegiatan penelitian yang meliputi: 1. Ilmu pendidikan guru ; 2. Ilmu pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan budaya lokal (*ethnopedagogy*); 3. Penerapan teknologi dalam pembelajaran; 4. Penerapan disiplin ilmu untuk pengokohan ilmu pendidikan, dan 5. Ilmu pendidikan dan disiplin ilmu untuk pemberdayaan masyarakat. Maka penelitian ini termasuk ke dalam payung penelitian mengenai Ilmu pendidikan dan disiplin ilmu untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif bidang kajian keilmuan Pendidikan nonformal, penelitian ini merupakan salah satu bidang kajian parumpun atau kelompok bidang kajian Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Konsep Pelatihan dalam Konteks Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada bagian ini dikembangkan landasan konseptual terkait dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), sebagai konsepsi dasar dalam kerangka pengembangan konsep dan desain pelatihan, sehingga dapat ditelaah terkait dengan tiga landasan fundasional pelatihan dalam konteks PSDM, seperti; *utility, forcasting and development*..

3. Konsep dan Teori Andragogi

Pelatihan dalam perspektif setting dan atau satuan pendidikan nonformal,

dikembangkan mengacu kepada landasan bangunan keilmuan dan teori andrgogi. Analisis pola dan proses pembelajaran, dengan berbagai perangkan pembelajaran dalam konstruksi model pelatihan yang dikembangkan perlu dilandasi mengacu kepada asumsi, prinsip, karakteristik, serta manajemen yang bersifat andragogis.

4. Konsep Pengelolaan Pelatihan

Secara makro dikembangkan mengacu kepada pandangan Sudjana (2000), terkait dengan dimenasi fungsi pengelolaan pelatihan, meliputi; perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan, penilaian dan pengembangan. Khusus mengenai pengorganisasi, landasannya bersandar pada apa yang dikemukakan Siagian dalam Sudjana (2000:186), khususnya mengenai langkah-langkah dalam pengorganisasian program pelatihan, yang mencakup: (1) Penentuan kebutuhan, (2) Penentuan sasaran, (3) Penetapan isi program, (4) Identifikasi prinsip-prinsip belajar, (5) Pelaksanaan program, (6) Identifikasi manfaat, serta (7) Penilaian pelaksanaan program.

5. Konsep Model Pelatihan

Desain pengembangan model ini dikembangkan tidak melandaskan kepada salah satu pandangan atau konsepsi model, melaninkan merupakan kombinasi dari berbabagai pandangan konsepsi model pelatihan. Sebagaimana berhasil diidentifikasi, terdapat berbagai model pelatihan yang memiliki langkah-lau ngkah tersendiri sesuai dengan tujuan dan orientasi pelatihan itu sendiri. Salah satu model diantaranya yaitu model tujuh langkah (*The Seven-Step Model*) yang dikembangkan oleh Parker, yaitu: 1) melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan latihan; 2) merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan pelatihan; 3) merancang kurikulum latihan; 4) memilih dan mengembangkan metode latihan; 5) menentukan pendekatan evaluasi latihan; 6) melaksanakan program latihan; 7) melakukan pengukuran hasil latihan.

Sedangkan model lain yang dikembangkan oleh Sudjana (2000:13) yaitu tentang Model Latihan Partisipatif *(Partisipatory Training Model*) yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 1) rekrutmen peserta latihan; 2) identifikasi kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan; 3) merumuskan dan menetapkan tujuan umum dan khusus; 4) menyusun alat evaluasi awal dan akhir pelatihan; 5) menyusun urutan kegiatan latihan, menentukan bahan belajar, dan memilih metode dan teknik pelatihan; 6) latihan untuk pelatih; 7) melaksanakan evaluasi awal bagi peserta latihan; 8) mengimplementasikan program latihan; 9) melakukan evaluasi akhir bagi peserta latihan; 10) evaluasi program pelatihan.

Berkaitan dengan jenis-jenis model pelatihan berdasarkan pada pengembangan kurikulumnya, Arif (1994:75) mengemukakan beberapa model pelatihan sebagai berikut: 1) model pelatihan yang berorientasi pada tujuan; 2) model pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan peserta; 3) model pelatihan yang berorientasi pada kompetensi; 4) model pelatihan yang bersifat kombinasi.

6. Konsep Nilai Keagamaan

 ISBN 978-602-14314-8-1

Dalam konteks pendidikan nilai, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan agar pendidikan dapat membentuk dan menguatkan karakter anak bangsa. Pendekatan tersebut adakah sebagai berikut: (1) Pendekatan Penanaman Nilai, (2) Pendekatan Perkembangan Kognitif, (3) Pendekatan Analisis Nilai, (4) Pendekatan Klarifikasi Nilai, (5) Pendekatan Pembelajaran Berbuat.

Dalam perspektif pendidikan Islam, Khalifah dan Quthub (2009:40-41) mengungkapkan tentang karakter pendidik atau guru muslim yang dibutuhkan dalam mendukung optimalnya proses internalisasi pendidikan nilai dan karakter melalui pembelajaran sebagai berikut: (1) Ruhiyah dan akhlakiyah, (2) Asas dan penopang pendidik, (3) Tidak emosional, (4) Rasional, (5) Sosial, (6) Fisik yang sehat, (7) Profesi, yang termasuk dalam sifat ini adalah keinginan dan kecintaan yang tulus untuk mengajar, serta yakin atas manfaat dan pengabdiannya terhadap masyarakat.

7. Konsep Karakter Generasi Muda

Pengertian karakter adalah *'distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group'*. Kamus Besar Bahasa Indonesia belum memasukkan kata karakter, yang ada adalah kata 'watak' yang diartikan sebagai: sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Dalam risalah ini, dipakai pengertian yang pertama, dalam arti bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif', bukan netral. Jadi, orang berkarakter' adalah orang punya kualitas moral (tertentu) yang positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk. Peterson dan Seligman, dalam buku *'Character Strength and Virtue',* mengaitkan secara langsung *'character strength'* dengan kebajikan. *Character strength* dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan (virtues). Salah satu kriteria utama dari *character strength'* adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain.

Pendidikan untuk pembangunan karakter pada dasarnya mencakup pengembangan substansi, proses dan suasana atau lingkungan yang menggugah, mendorong dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini tumbuh dan berkembang dengan didasari oleh kesadaran, keyakinan, kepekaan dan sikap orang yang bersangkutan. Dengan demikian, karakter bersifat inside-out, dalam arti bahwa perilaku yang berkembang menjadi kebiasaan baik ini terjadi karena adanya dorongan dari dalam, bukan karena adanya paksaan dari luar..

Membangun keyakinan, dan sikap yang mendasari kebiasaan baik bukan usaha 'sekali tembak', namun merupakan proses yang berlangsung sedikit demi sedikit secara berkelanjutan. Membangun karakter melalui penataran yang indoktrinatif selama seminggu atau dua minggu atau bahkan sebulan, tidak akan banyak membawa hasil. Jadi, upaya pembangunan karakter melalui pendidikan dengan menjadikannya sebuah proyek, tidak akan ada hasilnya. Pembangunan karakter hendaknya dijalankan sebagai upaya berkelanjutan yang ditanam pada semua susbstansi, proses dan iklim pendidikan. Koesoema (2010:2) memberikan formula bahwa pendidikan karakter jika ingin efektif dan utuh harus menyertakan tiga basis desain dalam pemogramannya, meliputi: (1) Desain pendidikan karakter berbasis kelas, (2) Desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah, (3) Desain pendidikan karakter berbasis komunitas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini apabila diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian merupakan salah satu bentuk penelitian pengembangan (*developmental research*) atau *research and development* (R&D) (Gay, Mills, & Airasian, 2009). Penelitian ini pun berdasarkan klasifikasi metode menggunakan desain penelitian *mixed-methods* yaitu model QUAL-quan (yang melibatkan baik itu metode penelitian kualitatif maupun metode penelitian kuantitatif).

Penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan teknologi pembelajaran dalam pelatihan beserta seluruh perangkat dalam pelatihan dengan mengembangkan sebuah produk berupa model pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda. **Dengan t**ahapan sebagai berikut: "1*) research and information collecting*; 2) *planning*; 3) *develop preliminary form of product*; 4) *preliminary field testing*; 5) *main product revision*; 6) *main field testing*; 7) *operation product revision*; 8) *operational field testing*; 9) *final product revision*; 10) *dissemination and implementation".*

Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah menemukan model konseptual dari model pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda, yang untuk selanjutnya di tahun kedua, penelitian akan dilanjutkan dengan melakukan penyusunan perangkat pelatihan untuk secara terbatas dilakukan uji coba model. Keefektifan model pelatihan akan dilakukan sampai pada akhirnya terbentuk model pelatihan yang teruji. Hasil penelitian di tahun kedua, selanjutnya akan dilakukan validasi dan diseminasi di tahun ke tiga untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas serta kemanfaatan bagi berbagai pihak yang membutuhkan teknologi pembelajaran serta metodologi dalam pelatihan ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Jawa Barat dan sebagai populasi penelitiannya adalah lembaga-lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan bagi

 ISBN 978-602-14314-8-1

generasi muda dengan basis keagamaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling, p*ertimbangan tertentu yang menjadi penentu dari jumlah sampel dalam penelitian ini adalah pertimbangan kekhasan dari *raw input* sasaran pelatihannya yaitu generasi muda, lembaga yang menyelenggarakan pelatihan berbasis keagamaan dan fokus pelatihan salah satunya adalah dalam membangun karakter pemuda. Ditetapkan 5 lembaga pelatihan bagi para pemuda yang ada di lingkup Jawa Barat. Diantaranya adalah Lembaga Pelatihan Santri Siap Guna Daarut Tauhiid (SSG DT), Lembaga Pelatihan Remaja Mesjid, Lembaga Pelatihan Pemuda berbasis mesjid dan organisasi kepemudaan lainnya di sekitar wilayah Jawa Barat.

Adapun yang menjadi teknik penelitian adalah menggunakan wawancara, FGD (*Forum Group Discuss*), observasi, penyebaran angket, maupun penelusuran data dokumen. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data untuk mengeksplorasi penyelenggaraan pelatihan di beberapa lembaga pelatihan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam metode penelitian dan pengembangan dengan pendekatan kualitatif jenis instrumen yang digunakan adalah angket, pedoman wawancara, skenario dan perangkat FGD (*Forum Group Discuss*) serta pedoman observasi dan pengumpulan dokumen.

Pengumpulan data pada penelitian ini, khususnya di tahun pertama memiliki tujuan untuk studi eksplorasi mengenai desain pelatihan, pengelolaan pelatihan, pola pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, determinan penentu keberhasilan, faktor penghambat penyelenggaraan di beberapa lembaga pelatihan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Observasi di lima lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pembinaan bagi generasi muda dengan basis keagamaan.
b. Wawancara dengan pengelola, tutor, peserta serta pengguna.
c. Penyebaran angket bagi para pemuda yang telah mengikuti pelatihan, peserta yang sedang mengikuti pelatihan, dan pengguna
d. Mengumpulkan data hasil FGD (*Forum Group Discuss*) dengan para pengelola dan tutor, juga dengan peserta pelatihan.

Setelah proses pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian (Sumarsono, 2004).

Analisa data dalam penelitian tahun pertama ini adalah analisis data dalam rangka kontruksi model pelatihan. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dilakukan melalui analisis logis. Data kualitatif diantaranya berkaitan dengan pengembangan model pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda**.** Untuk menghindari subjektivitas dan bias

terhadap data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan dan wawancara, maka digunakan criteria tertentu untuk memeriksa keabsahannya. Kriteria ini mengacu pada pendapat Sugiyono (2008:269-277) yang mencakup empat hal yaitu *credibility, transferbility*, *auditability* dan *confirmability*.

Analisis data kualitatif merupakan proses penyusunan, simplifikasi data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi. Analisis data dalam penelitian ini melalui langkah yang penting dalam penelitian, yaitu:

a. Peneliti melakukan kegiatan mengolah data yang terkumpul melalui pengamatan, wawancara maupun studi dokumentasi dari mulai awal hingga akhir pengumpulan data.
b. Reduksi data yaitu peneliti melakukan penelaahan seluruh catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
c. Display data yaitu peneliti merangkum data yang didapatkan ke dalam bentuk yang sistematis dan deskriptif sehingga memudahkan dalam memberikan makna dalam penelitian yang dilakukan.
d. Verifikasi dan kesimpulan, yaitu kegiatan penelitian dalam mencari makna dan dirumuskan kesimpulan yang jelas dan akurat mengenai hasil penelitian.

F. Hasil Penelitian

Mengacu kepada desain penelitian yang dikembangkan, secara metodologis penelitian ini baru masuk pada tahap eksplorasi dimana desain yang dikembangkan pada fase kesatu ini dapat mewujudkan rumusan model konseptual pelatihan berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda, temuan penelitian yang telah berhasil diungkapkan baru pada tahap pemetaan karakteristik lembaga penyelenggara pelatihan berbasis nilai keagamaan, khususnya agama islam dengan sasaran kelompok generasi muda yang orientasinya pembentukan karakter. Hal tersebut terkait dengan pertanyaan penelitian nomor 1, yaitu; Prototipe lembaga seperti apa saja yang menyelenggarakan pelatihan berbasis nilai keagamaan untuk membentuk karakter generasi muda?

Secara umum diperoleh beberapa prototype atau kategori kelembagaan penyelenggara pelatihan berbasis nilai keagamaan islam dalam pembentukan karakter generasi muda, mencakup: lembaga pelatihan pemerintah departemen, dinas dan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga swadaya masyarakat, yayasan, serta lembaga keagamaan islam.

Setiap lembaga tersebut memiliki karakteristik visi, misi, tujuan dan program pelatihan yang berbeda sesuai dengan landasan pengembangan lembaganya sendiri, hal ini berimplikasi kepada variabilitas disain pelatihan yang dikembangkan, serta komponen-komponen disain yang dirancang terkait dengan pelatihan yang diselenggarakannya.

Sebagai salah satu prototype yang paling memiliki karakteristik khas

 ISBN 978-602-14314-8-1

dengan kajian penelitian ini, secara singkat dipaparkan Profil Lembaga Pelatihan di Pesantren Daarut Tahudiid, salah satu programnya pelatihannya, yaitu; Program Santri Siap Guna (SSG) Daarut Tauhiid pada awal pendiriannya dicetuskan oleh KH. Abdullah Gymnastiar (AaGym) pada tanggal 25 April 1999. Tujuan dari program ini lebih dititikberatkan untuk membentuk santri sebagai pelayan masyarakat baik di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi maupun sosial. Tujuan lain adalah dimana Santri Siap Guna disiapkan sebagai pengkaderan dan pembinaan generasi muda yang mandiri yang mampu untuk menjadi motivator, stabilisator dan integrator bagi masyarakat. Adapun karakter yang diharapkan terbentuk dari program ini adalah santri berkarakter BAKU (Baik dan Kuat) dan berjiwa Pelopor (Peka, Inisiatif, Berani Aksi), Mandiri (Pantang Jadi Beban, Qonaah, 3M: Mulai dari Diri Sendiri, Mulai dari yang terkecil, Mulai Saat ini juga) dan Khidmat (Senang Menolong, Menyempurnakan, Tulus).

Organisasi Santri Siap Guna (SSG) Daarut Tauhiid memiliki visi untuk menjadi Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Generasi Muda untuk Mewujudkan Masyarakat Bertauhiid. Sedangkan misi yang diembannya yaitu:

1. Menyelenggarakan DIKLAT dan DIKLAT Lanjutan SSG
2. Menyelenggarakan DIKLAT Pelatih dan Kaderisasi
3. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
4. Menjalankan misi sosial kemanusiaan
5. Melakukan aksi-aksi kepedulian terhadap Lingkungan

Pelatihan dalam pemberdayaan Santri Siap Guna (SSG) ini direncanakan oleh tim pelatih untuk mewujudkan tujuan dan visi serta misi tersebut, bersama-sama dengan pimpinan pesantren Daarut Tauhiid, Abdullah Gymnastiar.

Tujuan pelatihan secara umum adalah membentuk santri pelayan masyarakat yang memiliki karakter BAKU (Baik dan Kuat) serta memiliki jiwa:

1. Pelopor (Peka, Inisiatif, Berani Aksi),
2. Mandiri (Pantang Jadi Beban, Qonaah, 3M: Mulai dari Diri Sendiri, Mulai dari yang terkecil, Mulai Saat ini juga) dan
3. Khidmat (Senang Menolong, Menyempurnakan, Tulus).

Penentuan tujuan ini, berdasarkan hasil diskusi tim, khususnya perhatian AaGym akan kondisi bangsa Indonesia yang membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki karakter Baik dan Kuat. Dalam pandangan AaGym, seorang individu tidak cukup hanya memiliki karakter Baik (sopan santun, peduli, penuh kasih sayang, perhatian, empati dan mengutamakan kebaikan bagi sesama), namun harus juga memiliki karakter Kuat (cerdas, berani, fisik sehat, kaya harta, kaya hati, dan kaya ilmu). Untuk itu diperlukan sebuah program pelatihan dan pembinaan yang tepat untuk membentuk santri pelayan masyarakat tersebut.

Karakter lain yang harus dibangun untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan di bangsa ini adalah dengan membentuk individu santri yang berjiwa

pelopor, artinya dia harus memiliki kepekaan dan mau berbuat dengan melakukan inisiatif yang kreatif serta berani untuk beraksi, berbuat sesuatu untuk kebaikan dan kebenaran. Adapun santri pelayan masyarakat yang berjiwa mandiri, yaitu seorang individu yang tidak mau menjadi benalu/beban bagi orang lain, senantiasa bersyukur akan apa yang dimiliki dengan setulus hati, serta selalu berpikir perbaikan akan apa pun dengan berprinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang dianggap kecil dan melakukan perbaikan mulai dari saat ini juga. Karakter Baik dan Kuat dengan jiwa khidmat maksudnya adalah seorang individu pelayan masyarakat harus memiliki kesenangan untuk senang menolong dengan ikhlas, selalu berbuat dan melakukan sesuatu dengan tuntas dan senantiasa menyempurnakan setiap tugas yang diamanahkan, serta semua perbuatan dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari manusia, kecuali balasan amal sholeh dari Allah SWT.

Perencanan pelatihan pada lembaga SSG Daarut Tauhiid dalam mentukan kebutuhan pelatihan lebih kepada analisis organisasi (Sudjana (2000); Bramley(1997)) dimana penilaian kebutuhan pelatihan dianalisis oleh manajer yang menentukan tujuan organisasi, yang dalam hal ini adalah pimpinan dari pondok pesantren.

Peserta pelatihan calon santri adalah masyarakat umum yang memang berminat dan ingin menempa diri untuk menjadi santri pelayan masyarakat. Usia yang ditetapkan adalah generasi muda ikhwan (laki-laki) dan akhwat (perempuan) mulai usia 17 tahun – 35 tahun. Pendidikan dan pelatihan diadakan selama 3(tiga) Bulan setiap hari Sabtu-Ahad. Kegiatan yang dilakukan indoor activity dan outdoor activity. Metode Diklat menggunakan metode *Experiental Learning, Learning by doing* (pembiasaan dengan langsung melakukan/mengerjakan) dan metode *Accelerated learning* (pembelajaran dengan percepatan).

Tahapan dari pendidikan dan pelatihan adalah dengan melalui tahapan yaitu:

1. Tahapan Dobrak Diri (masa orientasi)
2. Tahapan Bangun Diri (masa aktif belajar mengajar)
3. Tahapan Bangun Tim dan Bangun Organisasi (masa Tim Building dan aktif di masyarakat).

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Santri Siap Guna Daarut Tauhiid, dalam perencanaan akan melibatkan berbagai komponen yaitu tim pelatih, fasilitator, dan pemateri ahli. Materi yang disampaikan untuk tahapan 3(tiga) bulan pertama untuk dilantuk menjadi Santri Siap Guna (SSG) adalah:

1. Materi Keagamaan : Ma'rifatullah, Ma'rifaturrasul, Tauhiid, Fiqh Ibadah.
2. Materi Keorganisasian : Manajemen Organisasi, Funding Manajemen.
3. Materi Manajemen diri.

Adapun yang menjadi *Output*/manfaat dari pendidikan dan pelatihan ini adalah diharapkan dengan melaksanakan diklat SSG DT ini maka:

1. Dapat membangun jiwa korsa

 ISBN 978-602-14314-8-1

2. Mampu memimpin dan siap dipimpin
3. Terbentuk Karakter BAKU (Baik dan Kuat)
4. Membangun jiwa "Pelopor, Mandiri, Khidmat"
5. Menjadi agen perubahan/*change agent* (sebagai ragi) di masyarakat.

Sebagai output jangka menengah, setelah peserta mengikuti pendidikan dan latihan selama 3 bulan, maka diharapkan mereka akan terbagi menjadi beberapa kegiatan Pasca diklat, yaitu:

1. Peserta kembali berkiprah di masyarakat
2. Diklat Lanjutan, yaitu berupa program pendidikan dan latihan lanjutan untuk dapat bergabung dalam organisasi:
   a. Corp Pelatih
      Corp Pelatih yaitu Satuan unit di dalam Santri Siap Guna Daarut Tauhiid dengan profil input ikhwan dan akhwat yang telah selesai mengikuti Diklat SSG. Corps pelatih SSG-DT berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembinaan tingkat lanjut setelah fase diklat SSG.
   b. Satguna (Santri Penanggulangan Bencana)
      Satguna adalah satuan unit dibawah Santri Siap Guna Daarut Tauhiid yang anggotanya adalah SSG yang telah mengikuti Diklat Satgana, dimana setelah lulus diklat ini maka mereka langsung dapat menjadi tenaga sukarela/volunteer maupun tenaga profesional yang siap diterjunkan ketika dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan untuk penanggulangan bencana.
   c. Salih (Santri Lingkungan Hidup)
      Salih adalah satuan Unit dibawah Santri Siap Guna Daarut Tauhiid yang anggotanya adalah SSG yang telah mengikuti Diklat Salih, untuk menularkan semangat positif kepada masyarakat untuk kembali peduli kepada lingkungan hidup.

Adapun diklat lanjutan khusus untuk membentuk Satguna SSG DT (Santri penganggulangan bencana Santri Siap Guna DT), maka materi yang akan diikuti adalah meliputi:

1. Materi Keagamaan : Ma'rifatullah, Ma'rifaturrasul, Tauhiid, Fiqh Ibadah.
2. Materi Keorganisasian : Manajemen Organisasi, Funding Manajemen.
3. Materi Manajemen diri
4. Skill Relawan : Vertical Rescue, Fire Rescue, Water Rescue, Navigasi, SAR dan ESAR, Survival, Manajemen Perjalanan Perbekalan dan Perlengkapan.
5. Manajemen Bencana : Mitigasi Bencana, Disaster Mapping, Manajemen Dapur Umum, Trauma Healing, Manajemen Recovery.
6. Medis : Basic Life Support, Medical First Responden, Evakuasi, PPKM.

Pemateri untuk diklat lanjutan Satguna SSG DT adalah:

1. Tim Pengajar dan Trainer Daarut Tauhiid,
2. Tim SATGUNA DT,
3. Tim Badan SAR Nasional (BASARNAS),

4. Tim BPBD Prov. Jawa Barat dan
5. Pihak-pihak yang diundang dari Organisasi/LSM Penanggulangan Bencana Nasional.

Keseluruhan program pendidikan dan pelatihan dilakukan di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid, dengan memanfaatkan sarana serta fasilitas mesjid, aula, lapangan serta area diluar lingkungan pesantren yang sengaja diciptakan untuk mendukung program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan.

Perencanaan pelatihan SSG Daarut Tauhiid, dilakukan sesuai dengan konsep fungsi perencanaan dalam pengelolaan program Pendidikan nonformal, meskipun di dalam tahap penilaian belum ada standar yang baku untuk dapat menilai keberhasilan dari program pelatihan yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Burke, J. W. (1989). *Competency based education and training*. London; New York: Falmer Press.

Elias, J. L. 1989. *Moral education: secular and religious*. Florida: Robert E. Krieger Publishing Co., Inc.

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2009). *Educational research : competencies for analysis and applications* (9th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Merrill/Pearson.

Haris, R. (1995). *Competency-based Education and Training: Between a Rock and a Whirpool*. South Melbourne: Macmillan Education Australia.

Hatton, M. (1997). *A Pure Theory Of Lifelong Learning.* Lifelong learning: Policies, practices and programs. Toronto: School of Media Studies at Humber College.

Kartadinata, Sunaryo, Mencari Bentuk Pendidikan Karakter Bangsa. online diunduh 24 mei 2010

Koesoema A Doni. Pendidikan Karakter Integral. Kompas, 11 Februari 2010Mulyasa, E. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Inplementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia

Sadulloh Uyoh, 2003, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Alfabeta, Bandung

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Bandung. Fokusmedia

UNESCO. (2002). *Panduan Perencanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS), Asia Timur dan Tenggara.* Bangkok, Thailand: UNESCO Principal Regional Office for Asia and The Pasific

 ISBN 978-602-14314-8-1

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN NONFORMAL MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Joko Sutarto
Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Semarang
Email: deztar@yahoo.co.id

Abstrak. Tantangan utama bidang pendidikan, termasuk pendidikan nonformal (PNF) menghadapi MEA adalah peningkatan mutu dan produktivitas yang tercermin dari kompetensi tenaga kerja antar negara ASEAN. Dalam menghadapi MEA, berbagai ragam program PNF perlu selalu dilakukan penguatan agar lulusan yang dihasilkan mampu menjadi tenaga kerja yang siap bersaing dengan tenaga dari di kawasan ASEAN. Dari sisi kelembagaan, beberapa aspek yang perlu dilakukan penguatan yaitu penguatan manajemen kelembagaan PNF, pengembangan kurikulum/paket pembelajaran, penguatan tenaga PNF, dan perlunya dukungan kelembagaan. Penguatan manajemen kelembagaan sebagai pendukung agar mampu meningkatkan produktivitas lulusan, dengan beberapa strategi, yaitu: penerapan manajemen strategik, penerapan kepemimpinan transformasional, penciptaan iklim kerja yang dinamis, dan strategi pengembangan berbasis renstra. Pengembangan kurikulum diarahkan membangun pengetahuan melalui aktivitas interpretasi dan reinterpretasi melalui pengalaman-pengalaman baru, sehingga terbentuk pengetahuan dalam diri (*in here-knowledge*) yang dapat dijadikan dasar untuk tindakan melakukan perubahan kehidupan atau *action knowledge*. Pengembangan profesi tenaga PNF adalah peningkatan profesi keguruan melalui bentuk kegiatan *inservice training*. Penguatan kelembagaan pendidikan nonformal dalam menghadapi MEA memerlukan keterlibatan kelembagaan PNF dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat satuan PNF.

Pendahuluan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan pada akhir 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA tersebut, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas – terbuka, sehingga tumbuhnya persaingan secara sehat antar negara yang ditandai oleh mengalirnya barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Tantangan utama bidang pendidikan dalam menghadapi MEA adalah peningkatan mutu dan produktivitas yang tercermin dari kompetensi tenaga kerja antar negara ASEAN. Dilihat dari sisi pendidikan dan

 ISBN 978-602-14314-8-1

produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Karakteristik utama MEA adalah: (a) pasar dan basis produksi tunggal, (b) kawasan ekonomi yang terbuka berorientasi kompetitif, (c) wilayah pembangunan ekonomi yang merata , dan (d) daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Salah satu dampak kesepakatan tersebut adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Menghadapi tantangan yang demikian maka lembaga pendidikan nonformal perlu menyiapkan sejumlah program dan strategi agar lulusan lembaga pendidikan nonformal mampu bersaing di dunia kerja dan industri. Mereka disiapkan menjadi tenaga kerja yang terampil dan kompeten untuk berkompetisi dengan tenaga asing dari negara-negara lain di ASEAN. Penguatan kelembagaan Pendidikan nonformal merupakan suatu keniscayaan, kalau tidak ingin pendidikan nonformal tergerus arus persaingan terbuka dalam segala aspek yang terkait dengan keberlangsungan pendidikan nonformal terutama penyiapan lulusan pendidikan nonformal agar dapat bersaing dalam berkiprah menjadi tenaga kerja yang kompeten, terampil , dan siap bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan kelembagaan pendidikan nonformal melalui layanan yang bermutu merupakan cermin dari pelaksanaan penguatan atas kinerja secara terus menerus. Penguatan tersebut merupakan keharusan dalam peningkatan mutu di era global yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Program pendidikan nonformal yang kini terdapat di masyarakat cukup beraneka ragam. Ada program yang bersifat informasional yang bermaksud menyampaikan informasi, ada program instutusional yang bermaksud mengembangkan keterampilan individu, dan ada pula program *developmental* yang bermaksud membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kehidupan. Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 dinyatakan: bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis; sedangkan program pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat.

Ragam program kegiatan pendidikan nonformal dalam bentuk pembelajaran dan segala aspek manajemennya, yang sekarang berkembang di dalam masyarakat diwadahi oleh Lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, seperti SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan Keterampilan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Lembaga lainnya. Fungsi Lembaga penyelenggara pendidikan nonformal tersebut adalah: (a) melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat, (b) melakukan koordinasi dalam memanfaatkan potensi-potensi masyarakat, (c) menyediakan informasi kepada anggota masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional atau keterampilan bekal hidup (*life skills*), (d) menyediakan ajang pertukaran ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan diantara anggota masyarakat, dan (e) menjadi tempat untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan atau nilai-nilai tertentu bagi warga masyarakat yang membutuhkannya. Berbagai program yang dikembangkan diantaranya: (a) Pendidikan Keaksaraan, diselenggarakan dalam bentuk satuan kelompok belajar keaksaraan fungsional (KF) bagi warga masyarakat yang buta aksara, bahasa, pengetahuan dasar, dan keterampilan fungsional; (b) Pendidikan Kesetaraan, diselenggarakan dalam bentuk satuan kelompok belajar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA; (c) Pendidikan Kecakapan Hidup *(Life Skills)* adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan vokasional kepada warga masyarakat; dan (d) Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak jalanan, dan pelatihan kerja, dengan fokus pelayanan meningkatkan kemampuan warga masyarakat yang penekanannya pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan maupun kebutuhan dunia kerja.

Dalam menghadapi MEA, berbagai ragam program pendidikan nonformal tersebut perlu selalu dilakukan penguatan agar lulusan yang dihasilkan mampu menjadi tenaga kerja yang siap bersaing dengan tenaga dari luar di kawasan ASEAN. Dari sisi kelembagaan, beberapa aspek yang perlu dilakukan penguatan yaitu penguatan manajemen kelembagaan PNF, pengembangan kurikulum/paket pembelajaran, penguatan tenaga PNF, dan perlunya dukungan kelembagaan.

Penguatan Manajemen Kelembagaan PNF

Penguatan manajemen kelembagaan sebagai pendukung agar mampu meningkatkan produktivitas lulusan, dengan beberapa strategi, yaitu:

a. Penerapan manajemen strategik, manajemen strategik adalah ilmu dan kiat tentang perumusan (*formulating*), pelaksanaan *(implementing),* dan evaluasi *(evaluating)* keputusan-keputusan strategik antar fungsi-fungsi manajemen yang memungkinkan organisasi mencapai target secara efektif dan efisien.

 ISBN 978-602-14314-8-1

Keputusan strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diim-plementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Mintzberg (1990) dinyatakan bahwa ciri khusus manajemen strategik adalah penekanan pada pengambilan keputusan strategik, berhubungan dengan masa yang akan datang dalam jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan dan mempunyai tiga karakteristik, yaitu: (a) *rare*, yaitu keputusan-keputusan strategik yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru; (b) *consequential,* yaitu keputusan-keputusan strategik yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen; dan (c) *directive,* yaitu keputusan-keputusan strategik yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Studi tentang manajemen strategik yang dilakukan oleh Hunger & Wheelen, (1996) menekankan pada pemantauan dan evaluasi, peluang serta ancaman lingkungan berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan organisasi.

b. Penerapan kepemimpinan transformasional, pengkajian terhadap pengertian kepemimpinan (Bush and Coleman, 2000; Robbins, 2001; Stinger, 2002; Lipham, 1974) paling tidak ditemukan dua kata kunci, yaitu : (a) kepemimpinan adalah kegiatan/aktivitas/seni mempengaruhi dan menggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan (b) dalam upaya mempengaruhi dan menggerakkan tersebut seorang pemimpin harus bisa "membangun kekuatan, menghargai perbedaan, dan menghormati perbedaan". Upaya peningkatan mutu dan produktivitas dalam bidang apapun, tidak terlepas dari sistem manajemen yang dikembangkan, sehingga faktor kepemimpinan sangat memainkan peranan penting dan menentukan. Dengan mendayagunakan fungsi kepemimpinan secara sistematis, terancang dan menggunakan pendekatan yang tepat dimungkinkan dapat mendongkrak pencapaian mutu layanan pembelajaran. Temuan penelitian Sutarto (2010) mengungkapkan bahwa efektivitas kepemimpinan yang diukur dari indikator yang dikembangkan oleh Lipham (1974), yaitu: (a) memiliki visi; (b) menghargai sumberdaya manusia; (c) terampil berkomunikasi dan mendengarkan; (d) bertindak proaktif; (e) pengembangan keterbukaan; dan (f) bersedia menghadapi resiko, memberikan pengaruh secara total (*total effect*) terhadap mutu proses pembelajaran sebesar 56,39%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan semua sumberdaya lembaga (sumberdaya manusia dan sumberdaya *non*-manusia) dapat

memacu dan sekaligus memicu pencapaian mutu layanan. Dengan kata lain ketersediaan sumberdaya jurusan tidak mungkin dapat didayagunakan secara maksimal tanpa adanya pemimpin yang mampu menggerakkan, memiliki visi dan keberanian menghadapi resiko, di sinilah pentingnya kepemimpinan jurusan dalam upaya pencapaian mutu layanan. Kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan yang berorientasi ke masa depan, atau menerapkan *transformational leadrership* (Bush, 2000:23) yang bercirikan : (a) *idealized influence*, artinya memberikan pengaruh yang mendorong tumbuhnya ide-ide baru, (b) *inspirational motivation*, artinya berupaya memberikan motivasi terus menerus yang menimbulkan tumbuhnya inspirasi baru yang membuat berkembangnya suasana kerja yang produktif, (c) *intellectual stimulation*, yaitu selalu berusaha memberikan stimulasi intelektual untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya bagi peningkatan kerja, dan (d) *individualized consideration*, artinya memperhatikan aspek-aspek individual orang yang dipimpinnya, seperti bakat, minat, Menurut Useem (dalam Sulaksana, 2004:58) karakteristik kepemimpinan yang dapat mendukung proses inovasi memiliki ciri-ciri perilaku kepemimpinan sebagai berikut : (a) visioner, (b) percaya diri yang kuat dan mempercayai orang lain, (c) mengkomunikasikan ekspektasi kinerja dan standar yang tinggi, (d) menjadi teladan bagi visi, nilai-nilai dan standar kerja organisasi, dan (e) menunjukkan pengorbanan diri, kemauan kuat, keberanian dan konsistensi.

c. Penciptaan iklim kerja, melalui penciptaan iklim kerja jurusan yang kondusif diharapkan mutu proses pembelajaran dapat berjalan optimal yang pada gilirannya dapat peningkatkan pencapaian kompetensi calon tenaga PTK-PNF yang visioner dan terdidik. Hasil penelitian yang juga mengungkap tentang mutu proses pembelajaran menunjukkan bahwa perilaku kerja suatu organisasi ditentukan oleh suasana lingkungan kerja di dalam organisasi itu (Brookover et al, 1978; Purkey dan Smith, 1985; Hughes, 1991). Demikian juga halnya, perilaku kerja jurusan ditentukan oleh suasana atau iklim lingkungan kerja pada jurusan tersebut. Di negara-negara maju, riset tentang iklim kerja pada satuan pendidikan *(school working environment* atau *school climate*) telah berkembang dengan mapan dan memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pembentukan satuan-satuan pendidikan yang efektif. Brookover et all (1978) menyatakan bahwa kekondusifan iklim kerja suatu satuan pendidikan mempengaruhi perilaku atau tindakan seluruh komunitas satuan pendidikan tersebut, khususnya pada pencapaian prestasi akademik. Lebih tegas lagi, Purkey dan Smith (1985) juga menyatakan

 ISBN 978-602-14314-8-1

bahwa prestasi akademik PTK-PNF dipengaruhi sangat kuat oleh suasana kejiwaan atau iklim kerja kelembagaannya. Lebih lanjut Hughes (1991) menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan seperti jurusan mempunyai karakter suasana kerja, yang akan mempengaruhi keberhasilan proses kegiatan pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan Picus (1995:7; 2000:3-8) bahwa meningkatnya mutu pendidikan dan hasil belajar memerlukan tersedianya berbagai faktor yang mendukung terjadinya proses pembelajaran. Mutu satuan pendidikan selalu disejajarkan dengan konsep efektivitas satuan pendidikan, efisiensi, dan *school improvement*. Mutu satuan pendidikan menunjuk pada pengukuran masukan, proses, keluaran dan dampak. Efisiensi menunjuk pada pengukuran proses dan keefektifan satuan pendidikan pada umumnya dibatasi pada pengukuran keluaran. Konsep *School Improvement* (Bush dan Colemen, 2000:53) berkaitan dengan usaha-usaha institusi yang bersifat individual, menekankan pengalaman profesional para PTK-PNF untuk mengenali fokus peningkatan institusi. PTK-PNF sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas fungsi satuan pendidikan adalah seorang profesional. Artinya mereka dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pembelajaran. Untuk itu calon PTK-PNF harus menguasai ilmu yang diajarkan, menguasai berbagai metode pembelajaran, dan mengenal kelompok sasaran baik secara lahiriah maupun batiniah. Lebih tegas lagi, Purkey dan Smith (1985) juga menyatakan bahwa prestasi akademik dipengaruhi sangat kuat oleh suasana kejiwaan atau iklim kerja yang diciptakan. Pendapat lain dikemukakan (Lashely, 1999; Diane, 2007) yang menyatakan bahwa pemberdayaan pengelolaan dan sumberdaya manusia dapat meningkatkan kinerja organisasi, kinerja organisasi yang rendah disebabkan oleh perencanaan yang kurang bermutu dan iklim organisasi yang kurang mendukung, setiap satuan pendidikan (jurusan) mempunyai karakter suasana kerja, yang akan mempengaruhi keberhasilan proses kegiatan pembelajaran.

d. Strategi Pengembangan**,** Penetapan strategi pengembangan merupakan bagian penting dalam penyusunan kerangka pengembangan Lembaga PNF. Tujuan umumnya adalah menempatkan sistem, dengan segala keterbatasan yang ada, pada posisi paling baik di masa depan agar mampu menanggapi tantangan yang dihadapi. Penetapan strategi didasarkan atas penelaahan sistematik tentang sistem yang meliputi : (a) visi, (b) misi untuk mewujudkan visi, (c) keadaan intern dan ekstern yang berpengaruh terhadap pencapaian misi, (d) identifikasi masalah utama yang harus ditangani untuk perbaikan keadaan, dan (e) rencana perbaikan yang dilakukan secara periodi:

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Telaah strategis diawali dengan menggambarkan keadaan Lembaga PNF yang diinginkan pada suatu waktu jauh di depan. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar tentang kekuatan dan kelemahan intern sistem, serta peluang dan ancaman dari lingkungan ekstern sistem, yang berpengaruh terhadap pencapaian misi sistem. Uraian tentang semua unsur yang mempengaruhi pencapaian misi sistem kemudian dianalisis untuk menemukenali beberapa masalah besar sistem. Langkah ini dinamakan analisis kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman (analisis KKPA). Langkah terakhir adalah menyusun suatu program perbaikan keadaan sistem dalam suatu struktur program yang memberi gambaran komprehensif untuk merencanakan, mengendalikan implementasi, serta membuat evaluasi tentang pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan lembaga PNF dengan menggunakan manajemen mutu terpadu. Manajemen Mutu Terpadu atau *Total Quality Management* (TQM) adalah integrasi semua fungsi dan proses dalam suatu organisasi agar dapat mencapai peningkatan mutu secara berkelanjutan, tujuannya ialah kepuasan pelanggan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, maka lembaga PNF sebagai industri jasa *(service industry)* dengan menggunakan prinsip-prinsip TQM seharusnya mengutamakan pada layanan yang terbaik *(service excellence)* yakni: (1) berorentasi pada kebutuhan dan harapan pengguna jasa atau *costomerfocus,* (2) bekerja dalam tim, dalam proses manajemen, (3) pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan data, (4) perbaikan kecil secara terus menerus atau *confinous improvement,* dan (5) perbaikan yang konsiten untuk memenuhi dan berusaha melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam hubungan ini lembaga PNF, hanya akan berhasil meraih sukses , tumbuh berkembang serta mampu bersaing, apabila mendapat kepercayaan diri masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan. Lembaga PNF yang lebih baik ialah lembaga yang menjamin kelangsungan eksistansinya, akan tetapi berada pada kondisi siap menghadapi berbagai tantangan, menghilangkan berbagai kendala dan memanfaatkan berbagai peluang yang timbul. Pemimpin lembaga PNF harus memahami penggunaan berbagai pendekatan dan teknik dalam merumuskan strategi lembaga PNF yang dipimpinnya. Strategi pengembangan sekaligus program kegiatan dalam pengembangan kualitas lembaga PNF, diupayakan melalui: (a) penerapan paradigma baru lembaga PNF (kualitas, otonomi, akreditasi, evaluasi dan akuntabilitas); (b) upaya peningkatan *leadership, relevansi, academic atmospher, internal managemen* dan organisasi, efisiensi dan

 ISBN 978-602-14314-8-1

produktivitas; (c) pemberdayaan semua komponen yang terlibat dalam lembaga PNF; (d) menyusun jaringan dengan para lulusan, orang tua dan *stakeholders*; (e) pengembangan nilai esensial komunitas lembaga PNF (budaya kerja, profesionalisasi, tanggung jawab, kesejawatan, imtak menuju keluhuran budi pekerti). Sedangkan strategi pencapaian program dilakukan melalui: (a) skala prioritas; (b) sosialisasi, kerjasama, semangat kesejawatan, kontinuitas; (c) mengembangkan prakarsa, tanggung jawab, pelayanan (*services should be main priorities*); (d) evaluasi, inovasi; (e) kontrol, reward and motivation; dan (f) penjaminan mutu, dengan membentuk tim penjaminan mutu.

Pengembangan Kurikulum/Paket Pembelajaran

Pengembangan kurikulum/paket pembelajaran PNF merupakan suatu keharusan agar dapat menyesuaikan perkembagan dan kebutuhan dunia kerja. Layanan pembelajaran yang dikembangkan diukur dari indikator pengembangan materi pembelajaran, penerapan dan pengembangan metode pembelajaran, penerapan dan pengembangan media pembelajaran, penciptaan komunikasi dalam pembelajaran, pemberian motivasi dan dorongan kepada kelompok sasaran, pengembangan sikap kepeda kelompok sasaran. Pencapaian layanan pembelajaran yang efektif dan efisien dapat dikembangkan dengan penerapan "*transformational learning*" (Mezirow dalam Merriam S.B., 2001; Kuntoro, 2008) yaitu kegiatan pembelajaran yang dapat menghasilkan perubahan kerangka berfikir (peta kognitif) dan perubahan kesadaran (afektif) dari peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran berkembang menjadi tindakan (*action*) untuk mencapai kehidupan baru yang lebih baik. Berdasarkan pandangan tersebut, mutu Pembelajaran yang dikembangkan diorientasikan tidak menggunakan model pembelajaran yang cenderung sekedar mengumpulkan pengetahuan luaran (*out there-knowledge*), tetapi membangun pengetahuan melalui aktivitas interpretasi dan reinterpretasi melalui pengalaman-pengalaman baru, sehingga terbentuk pengetahuan dalam diri (*in here-knowledge*) yang dapat dijadikan dasar untuk tindakan melakukan perubahan kehidupan atau *action knowledge*.

Dengan demikian rancangan kurikulum/paket belajar, penerapan dan pengembangan metode pembelajaran, penerapan dan pengembangan media pembelajaran, pemberian motivasi dan dorongan kepada kelompok sasaran, diarahkan membekali penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, dan muatan karakter kewirausahaan sehingga setelah selesai mengikuti program kegiatan dapat digunakan bagi pemecahan masalah kehidupan. Produktivitas layanan PNF dapat dilihat dari perolehan hasil belajar yang berupa penguasaan kompetensi kelompok sasaran setelah menyelesaikan program kegiatan, yang tercermin dari pencapaian kecakapan hidup *(life Skill*),

yang memuat dimensi : (a) *general life skill*, seperti budaya tertib, kreatif, disiplin, berbudi pekerti luhur, cinta lingkungan, dan lainnya; (b) *akademik life skill*, berupa penguasaan pengetahuan akademik, metodik, dan teknik sesuai standar yang ditetapkan; dan (c) *vocasional life skill*, berupa penguasaan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal hidup di masyarakat, pengembangan diri, pengembangan profesi, bekerja/usaha mandiri, bekerja pada orang lain/lembaga/perusahan (seperti keterampilan di bidang elektro, komputer, bengkel, tata boga, kerajinan, budidaya pertanian dan lain-lain).

Penguatan tenaga PNF

Keberadaan tenaga PNF yang profesional dan bermartabat merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu, hampir semua bangsa di dunia selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Salah satu kebijakan yang telah ditempuh negara kita dalam rangka pengembangan profesi tenaga PNF adalah peningkatan profesi keguruan melalui bentuk kegiatan *inservice training*, seminar, *workshop*, lokakarya, dan semacamnya. Bentuk kegiatan tersebut sebagai sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa pengembangan profesi keguruan adalah sarana untuk menuju pencapaian mutu pendidikan nasional. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan selalu berorientasi kepada pencapaian mutu. Upaya peningkatan mutu dan produktivitas dalam bidang apapun, tidak terlepas dari sistem manajemen yang dikembangkan, sehingga faktor pembinaan memainkan peranan penting dan menentukan (Stephanie, 1997; Richard, 1996).

Dukungan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan pendidikan nonformal dalam menghadapi MEA sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kelembagaan PNF dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat satuan PNF. Keterlibatan yang diharapkan adalah munculnya sinergi hubungan yang selaras dan saling koordinasi. Jika koordinasi dilakukan secara sistemik, maka pelaksanaan program-program PNF dengan layanan yang bermutu akan bisa terwujud, yang pada gilirannya akan terlahir tenaga kerja lulusan PNF yang mampu bersaing di kawasan ASEAN. Instansi pemerintah sebagai penyelenggara PNF di masyarakat, secara faktual tidak terbatas pada lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Instansi pemerintah di tingkat Provinsi/kabupaten seperti BKKBN, dinas sosial, dinas pertanian, peternakan, kehutanan, dinas perdagangan, dinas perindustrian, dinas kesehatan, koperasi, pariwisata, tenaga kerja, dan sebagainya, dalam aspek-aspek tertentu termasuk lembaga penyelenggara PNF (terutama program PNF dalam bentuk kegiatan pendidikan

 ISBN 978-602-14314-8-1

masyarakat melalui kursus dan pelatihan, seperti program desa vokasi, keaksaraan fungsional, desa wisata, desa mandiri pangan, dan program edukasi masyarakat lainnya). Demikian pula perusahaan, pabrik, dan industri, dalam aspek tertentu bisa menjadi lembaga penyelenggara PNF. Namun demikian lembaga penyelenggara PNF tingkat pemerintah pusat yang secara tegas mengemban tugas PNF, adalah Direktorat Jenderal PAUDNI. Di tingkat provinsi/kabupaten/kota kewenangan pengelolaan PNF adalah dinas pendidikan/bidang PNF.

Instansi-instansi tersebut baik tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan program PNF terutama program pendidikan dan pengembangan masyarakat masih cenderung bekerja secara sektoral sehingga acapkali terjadi tumpang tindih kebijakan, kegiatan maupun kelompok sasaran yang dilayani. Oleh karenanya di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten/kota perlu perintisan program secara lintas sektoral yang melibatkan berbagai dinas, lembaga industri, dan lembaga masyarakat. Hal ini dipandang penting untuk menghindari terjadinya duplikasi program dan anggaran, sekaligus terjadinya koordinasi yang serasi, terarah sehingga akuntabilitas program yang dikembangkan dapat dipertanggung jawabkan, dan terhindar dari masalah penyimpangan. Bila dianggap memungkinkan Dinas Pendidikan/Bidang PNF di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten/kota dikembangkan peranannya lebih luas untuk melakukan koordinasi program layanan PNF dari bermacam dinas, lembaga industri, dan lembaga masyarakat. Agar pelaksanaan program PNF dapat terkoordinasi dengan baik maka diperlukan koordinasi dan promosi. Koordinasi dimaksudkan adalah aktivitas mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh bermacam-macam instansi dan lembaga agar terjadi sinkronisasi dalam hal program, tujuan, pendanaan, dan kelompok sasaran. Sedangkan promosi adalah kegiatan untuk terus menerus mendorong lembaga pemerintah, lembaga industri, lembaga masyarakat, dan masyarakat berpartisipasi terhadap program PNF.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penguatan kelembagaan PNF menghadapi MEA merupakan suatu keharusan, agar lulusan PNF mampu menjadi tenaga kerja yang profesional dan mampu bersaing dengan tenaga di kawasan ASEAN. Penguatan tersebut dilakukan melalui : (a) penguatan manajemen kelembagaan sebagai pendukung agar mampu meningkatkan produktivitas lulusan, dengan beberapa strategi, yaitu: penerapan manajemen strategik, penerapan kepemimpinan transformasional, penciptaan iklim kerja yang dinamis, dan strategi pengembangan berbasis renstra; (b) pengembangan kurikulum diarahkan membangun pengetahuan melalui aktivitas interpretasi dan reinterpretasi melalui pengalaman-pengalaman baru, sehingga terbentuk pengetahuan dalam diri (*in here-knowledge*) yang dapat dijadikan dasar untuk tindakan

melakukan perubahan kehidupan atau *action knowledge*; (c) penguatan tenaga PNF diarahkan peningkatan profesi keguruan melalui bentuk kegiatan *inservice training*, dan bentuk kegiatan akademik lain seperti *workshop*, seminar; dan (d) diperlukannya keterlibatan kelembagaan PNF dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat satuan PNF.

Rekomendasi yang disampaikan dalam rangka penguatan kelembagaan PNF menghadapi MEA, yaitu: (a) reorientasi visi-misi-program-strategi jurusan PNF agar dapat menjawab tantangan masa depan; (b) optimalisasi kerjasama dengan pihak pengguna dan para pengambil kebijakan yang terkait dengan PNF agar terjadi "sopo aruh-saling menyapa" antara akademisi jurusan dengan para pengambil kebijakan agar penguatan kompetensi yang diharapkan mendakat dukungan; (c) ditumbuhkannya srawung akademik antar pimpinan jurusan PNF yang mempunyai arahan saling membantu agar mutu layanan yang diharapkan mudah dicapai, misalnya bersama-sama merintis kurikulum berbasis KKNI; dan (d) pertukaran mahasiswa sebagai calon tenaga PTK-PNF antar jurusan dalam berbagai kegiatan seperti seminar mahasiswa.

Penguatan kompetensi tenaga PNF yang sudah bekerja di lapangan dapat dilakukan melalui: (a) rintisan penyelenggaraan pendidikan profesi tenaga PNF; (b) peningkatan kompetensi melalui diskusi kelompok, ceramah ilmiah, seminar, lokakarya dengan tema tentang isu-isu yang sedang hangat berkembang di masyarakat berkaitan dengan tugas-tugas tenaga PNF, dan memerlukan penyesuaian-penyesuaian sesegera mungkin agar para tenaga PNF tidak ketinggalan dengan isu-isu dan kebijakan baru yang dikembangkan, misalnya tentang kurikulum 2013; (c) pembentukan asosiasi profesi sebagai media peningkatan kompetensi sekaligus srawung akademik; dan (d) rintisan pengadaan jurnal ilmiah sebagai media pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi antar tenaga PNF.

Daftar Pustaka

Bush. Tony and Coleman Marianne. 2000. *Leadership and Strategic Management in Education.* London : Paul Chapman Publishing Ltd.

Brookover, W. B., Schweitzer, J. H., Schneider, J. M., Beady, C. H., Flood, P. K., &Weisenbaker, J. M. 1978. *Elementary school social climate and school achievement.* American Educational Research Journal(15), 301-318.

Diane, D. 2007. *Organizational change and work related empowerment. Journal of Nurshing management.* Vol 15, pg. 500-507.

Hughes, P. W. 1991. *Teachers' professional development*. Melbourne, Victoria: Australian Council for Educational Research.

Kuntoro, Sodiq. 2008. *Pengembangan Paradigma Baru Keilmuan dan Kelembagaan Pendidikan Nonformal.* Makalah disampaikan pada Semiloka Nasional Pendidikan Nonformal dan Temu

Kolegial Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia 25 – 27 Januari 2008 di UPI Bandung.

Lashely, C. 1999. *Employee empowerment in service: a framewark for analysis. Peronnel Review* Vol 28, No 3 199. Pg. 179.

Lipham, James. M. And Hoeh, James A. Jr. 1974. *The Principalship : Foundations and Functions.* New York : Harper and Row Publishers.

Mintzberg, Henry and Quin, James Brian. 1990. *The Strategy Process: Concept and Contexts.* New Jersey: Prantice-Hall, Inc.

Peraturan Presiden N0. 8 Tahun 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.* Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud.

Picus. L.O. 1995. *Does Money in Education.? A Policy Makers Guide Selectee. Paper In School Finance.* Tersedia di: http://inces.ed.gov/pubs.97/975. Diakses 8 Nopember 2004.

Richard, A, 1996. *Creating a climate and culture for sustainable organizational change. Journal Organizational Dynamics.* New York: Spring 1996. Vol 24 Iss. 4 pg. 6.

Purkey, S. C., & Smith, M. S. 1985. *Too soon to cheer? Synthesis of research on effective schools*. Educational Leadership(40), 64-69.

Robbins, Stephen P. 2001. *Organizational Behavior : Concepts, Controversions, and Aplications*. Nine Edition. New Jersey : Prentice Hall Inc.

Stephaine R. 1997. *Influences of organizational culture and climate on individual creativity.* The Journal of Creative Behavior. Vol 31, Iss.pg.27.

N.n. (2013). *Indonesia Hanya Menduduki Peringkat Empat di ASEAN*. Republika On Line.

Stinger, Robert. 2002. *Leadership and Organization Climate*: The Cloud Chamber Effect. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Sutarto, Joko. 2010. *Determinan Mutu Proses dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan*. Hasil penelitian dipublikasikan dalam majalah ilmiah Nasional Terakreditasi di Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) Universitas Negeri Malang, Edisi Jilid 17, Nomor 3, Oktober 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

STRATEGI PENDIDIKAN NONFORMAL MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Sungkowo Edy Mulyono
Jurusan PLS FIP Unnes
mulyono_pls@yahoo.co.id

Abstrak. Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bagi Negara Indonesia bukan sebuah persoalan yang mudah, akan tetapi harus berjuang keras dalam rangka memenangkan pasar. Guna menghadapi persoalan serta kompetisi memasuki MEA di tahun 2015, pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat penting, sehingga dibutuhkan suatu strategi yang tepat memasuki MEA. Diantara strategi yang saat ini dibutuhkan adalah bagaimana pendidikan nonformal mampu melakukan pendidikan dan pelatihan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta mengembangkan ekonomi kreatif.

Kata Kunci : strategi, pendidikan nonformal, masyarakat ekonomi asean (MEA)

A. Pendahuluan

Abad ini bagi kawasan Asean merupakan abad perdagangan bebas (MEA), dimana seluruh anggota negara-negara Asean melakukan traksaksi perdagangan bebas di kawasan Asean. Bertitik tolak dari kesepakatan pasar bebas di kawasan Asean tahun 2015, sudah barangtentu negara-negara Asean saling berkompetisi dalam mensikapi pasar bebas tersebut termasuk negara Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari 240 juta jiwa pada tahun 2015, merupakan problematik tersendiri yang harus dipecahkan, terlebih lagi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dengan jumlah penduduk yang begitu besar Indonesia tidak boleh berpangku tangan ataupun berdiam diri akan tetapi harus berjuang keras, mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki kwartal kedua hanya mencapai 4,7% dan ini mengalami penurunan bila dibandingkan untuk tahun sebelumnya yang mencapai 6,7%. Kondisi perekonomian yang begitu rendah ditahun 2015 merupakan suatu tantangan besar bagi bangsa ini dan bila dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya seperti Singapura, Malaysia, maupun Thailan. Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah. Guna mensikapi pertumbuhan ekonomi yang rendah, pendidikan memiliki peran yang cukup penting dalam ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik pendidikan formal maupun nonformal. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, yang telah membagi pendidikan menjadi tiga jalur yaitu pendidikan informal, formal, maupun nonformal memiliki peran dan tanggungjawab cukup besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain tanggungjawab tersebut, pendidikan baik formal maupun

 ISBN 978-602-14314-8-1

nonformal juga memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dimana sumberdaya manusia harus dibekali dengan berbagai pengetahuan, sikap, maupun keterampilan (Sutarto, 2007).

Pendidikan nonformal merupakan suatu pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal dan memiliki fungsi sebagai pengganti maupun pelengkap pendidikan formal. Sampai sejauh ini pendidikan nonformal telah melakukan berbagai strategi guna mengatasi problematik bangsa dan sekaligus menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015. Adapun strategi yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan serta memberikan berbagai pelatihan-pelatihan, yang diantaranya adalah pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, Pelatihan kemampuan manajerial, pelatihan keterampilan atau kecakapan hidup, pelatihan kewirausahaan termasuk mengembangkan ekonomi kreatif. Dimana berbagai pelatihan tersebut akan memberikan kontribusi bagi peningkatan sumberdaya manusia yang professional yang pada akhirnya akan mampu berkompetisi di era Maysarakat Ekonomi Asean dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Startegi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) membutuhkan berbagai strategi yang tepat, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun pendidikan. Mengingat MEA merupakan kesepakatan dari negara-negara Asean untuk melakukan perjanjian pasar bebas diantara negara-negara Asean. Indonesia secara kuantitatif, dilihat dari jumlah penduduk memiliki jumlah yang paling besar diantara negra-negara Asean, tidak hanya itu sumberdaya daya alam juga begitu melimpah, tinggal bagaimana cara untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Berpijak dari situasi dan kondisi Indonesia yang begitu menarik, baik dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, maka perlu kita bangun suatu etos kerja, peningkatan pengetahuan, sikap serta keterampilan yang tinggi baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Strategi pendidikan nonformal dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas serta mampu mengolah sumberdaya alam yang berdaya guna membutuhkan metode ataupun cara tersendiri diantaranya adalah memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan ekonomi kreatif, serta membangun jiwa kewirausahaan.

A. Pendidikan dan Pelatihan

Model pelatihan yang paling umum telah dihasilkan dari praktek pendidikan, dimana tujuannya adalah untuk mengajarkan individu bagaimana melaksanakan beberapa bagian dari suatu pekerjaan yang telah dirumuskan dengan baik. Dimana informasi dan/atau praktek keahlian-keahlian yang telah diberikan sangat sesuai dengan sesuatu pekerjaan yang tidak berubah, maka hal ini dapat menjadi sebuah model yang layak. Dimana kita mengharapkan bahwa

pelatihan yang diberikan harus membantu individu untuk mengubah situasi pekerjaan.

Menurut Nedler (Kamil,2010) Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau peserta pelatihan dalam menyelesaikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara dalam Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974, "Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori."

Konsep pelatihan juga diungkapkan oleh Dearden (1984) yang menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan bertujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisiensi kerja. Sebagai hasil pelatihan, peserta diharapkan mampu merespon dengan tepat dan sesuai situasi tertentu. Seringkali pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja yang langsung berhubungan dengan situasinya.

Pelatihan biasanya diasosiasikan pada mempersiapkan seseorang dalam melaksanakan suatu peran atau tugas biasanya dalam dunia kerja. Namun demikian pelatihan juga bisa dilihat sebagai elemen khusus atau keluaran dari suatu proses pendidikan yang lebih umum. Peter mengemukakan, " Konsep pelatihan bisa diterapkan ketika (1) ada sejumlah jenis keterampilan yang harus dikuasai, (2) latihan diperlukan untuk menguasai keterampilan tersebut, (3) hanya diperlukan sedikit penekanan pada teori." Definisi tersebut memberikan penekanan pada "penguasaan" tugas atau peran dan pada kebutuhan untuk melakukan pengulangan latihan hingga bisa melakukan sendiri, dan juga menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan relatif spontan dan tanpa dimotivasi pengetahuan dan pemahaman. Goldstein dan Gressner (1988), memberikan definisi pelatihan yang ditekankan pada tempat dilaksanakannya pelatihan. Mereka mendefinisikan pelatihan sebagai usaha sistematis untuk meguasai keterampilan, peraturan, konsep, ataupun cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah proses belajar yang dilakukan secara sistematis di luar sistem pendidikan yang berlaku untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan ataupun cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja.

Secara umum pelatihan bertujuan untuk : (a) menambah keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, (b) mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan (c) mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja sama (Moekijat, 1993: 2-3). Biasanya tingkat pengetahuan dari hasil pelatihan yang pernah diikutinya dapat mencerminkan kemampuan intelektual seseorang.walaupun secara tradisional

 ISBN 978-602-14314-8-1

jenis dan tingkat pendidikan lah yang digunakan seseorang untuk mencari pekerjaan sebagai ukuran untuk menilai kemampuan pelamar. Realitasnya, tidak mustahil bagi seseorang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi tidak mengecap pendidikan yang tinggi, misalnya dikarenakan ketidakmampuan ekonomi atau karena faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu pelatihan masih dianggap lebih efektif dalam upaya membantu pengembangan sumber daya manusia.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pelatihan bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pemberian keterampilan untuk mempermudah mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun manfaat pelatihan

Beberapa manfaat seperti yag diungkapkan oleh Robinson (1981) dalam Marzuki (1992) sebagai berikut: (a) pelatihan sebagai alat untuk memperbaiki penampilan/kemampuan individu atau kelompok dengan harapan memperbaiki *performance* organisasi. Perbaikan-perbaikan itu dapat dilaksanakan dengan berbagai cara; (b) keterampilan tertentu diajarkan agar para karyawan dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai standart yang diinginkan. Contoh : *skill* dalam menggunakan teknik yang berhubungan dengan fungsi : *"behavioral skill"* dalam mengelola hubungan dengan atasan, dengan bawahan dan sejawat; (c) pelatihan juga dapat memperbaiki sikap-sikap terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan atau karyawan, seringkali pula sikap-sikap yang tidak produktif timbul dari salah pengertian yang disebabkan oleh informasi yang tidak cukup dan informasi yang membingungkan.

Pembelajaran pelatihan adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan dan terkendali agar orang lain belajar dan terjadi perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman (Miarso, 2004). Pelatihan pendidikan nonformal sebagai sistem tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur pokok yaitu unsur masukan, unsur proses dan unsur hasil. Selanjutnya dalam proses pembelajaran pelatihan dipengaruhi oleh masukan instrumental dan masukan lingkungan (Hoy dan Miskel; 1991; Panen; Priyanto, 2005).

Pada dasarnya suatu proses pembelajaran pelatihan terkait dengan berbagai komponen yang sangat kompleks. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, media, peserta didik, pamong belajar dan komponen lainnya. Masing-masing komponen tersebut saling terkait sebagai suatu sistem. Suatu sistem merupakan keterkaitan antara input (masukan), proses, dan output (keluaran). Masukan dari pembelajaran dapat berupa peserta didik, tutor, materi, media dan lainnya. Proses pembelajaran adalah aktivitas kegiatan pembelajaran. Keluaran berupa perubahan diri warga belajar sebagai hasil dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran pelatihan dalam pendidikan nonformal dapat diukur tingkat efektifitasnya apabila dilakukan penilaian hasil belajar yang menunjukkan tingkat pencapaian pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta pelatihan.

B. Membangun Jiwa Kewirausahaan

Berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan wirausaha dalam persaingan ekonomi ketat di era Masyarakat Ekonomi Asean saat ini, diperlukan terobosan dan pendekatan baru yang salah satu diantaranya melalui pengembangan kewirausahaan, diharapkan dengan terobosan baru ini dapat mempercepat pencapaian tumbuhnya wirausaha-wirausaha yang mandiri yang memiliki karakter yang kuat untuk dapat membentuk wirausaha yang lebih mandiri, inovatif, dan berwawasan global.

Guna menciptakan wirausaha (*Entrepreneurship*) yang tangguh tidaklah mudah, karena diperlukan prasyarat-prasyarat tertentu, diantarnya adalah. mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, memiliki erorientasi kreatif dan perpektif. Happer (Priyanto, 2002) menyatakan, untuk suksesnya permulaan usaha memerlukan kemampuan membaca peluang yang tepat, memiliki keahlian dan kemampuan pada bidang yang akan ditekuni, melakukan pendekatan yang benar dalam menjalankan usaha, dan memiliki dana yang cukup untuk memulai dan mengoperasikan usaha. Yusuf (2006) menyatakan, kunci kewirausahaan yang sukses adalah berani mengambil resiko, mampu menjalankan usaha sendiri, mampu memanfaatkan peluang, dapat menciptakan usaha baru, inovatif, dan mandiri. Dengan pandangan yang jauh ke depan, akan selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya (Suryana, 2003). Prasyarat lainnya adalah, memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada, meskipun dengan berbagai resiko yang mungkin akan timbul.

Teori McClelland yang dikenal dengan teori *need for achievement* atau *n Ach* menyatakan, beberapa orang yang berjiwa *entrepreneurship,* kebutuhan untuk berprestasi demikian kuat sehingga ia lebih termotivasi dibandingkan upaya mencapai keuntungan. Untuk memaksimumkan kepuasannya, seseorang dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi, cenderung menetapkan tujuan mereka sebagai tantangan yang hendak dicapai. Individu yang termotivasi oleh keinginan berprestasi yang tinggi, cenderung melakukan pekerjaan yang beresiko dengan perhitungan, namun individu yang memiliki keinginan rendah untuk berprestasi umumnya menghindari tantangan, tanggung jawab, dan risiko.

Kecenderungan masyarakat dalam berwirausaha adalah mencari cara-cara yang tidak memiliki tantangan dan tidak beresiko. Cara seperti ini, biasanya dilakukan oleh *entrepreneur* pemula dengan modal dan pengalaman terbatas. Hal ini dapat dimaklumi, karena *entrepreneur* pemula dengan modal terbatas adalah rentan dengan resiko yang dialami, sekali ia mencoba berusaha lalu gagal, akan selamanya terpuruk tidak akan bangun untuk selamanya, dan bahkan ia akan menggadaikan segala yang dimilikinya untuk membayar resiko yang diembannya. Corten (2009) menyatakan, orang yang tidak berani ambil resiko adalah orang dalam posisi ekonomi lemah, karena jiko resiko

 ISBN 978-602-14314-8-1

menghampirinya, maka selamanya dalam keadaan tidak berdaya.

Upaya mengatasai persoalan tersebut diperlukan model wirausaha masyarakat. Menurut ahli perilaku (behaviorits), entrepreneurship sangat berperan dalam kesuksesan seseorang (Kets de Vries, 1977). Seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya (Priyanto, 2006). Entrepreneurship juga berperan dalam mengembangkan seseorang sehingga memiliki keinginginan untuk memaksimalkan economic achievement (Mc Clelland, 1976) dan menyebabkan seseorang bisa tahan uji, bisa fleksibel, bisa dipercaya, bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Sementara itu Barkham, 1989; Pollock, 1989 dalam Ghosh (1999) mengatakan bahwa skill, attitude dan pencarian informasi pasar merupakan faktor yang memberikan kontribusi pada kesuksesan perusahaan. Ahli-ahli sosiologi mengatakan bahwa entrepreneurship berperan dalam mengintegrasikan, mengarbitrase dan mengatur subsistem dalam masyarakat dan ekonomi (Parsons and Smelser,1956). Mereka para entrepreneur merupakan agen perubahan dalam masyarakat dimana dia tinggal (Barth, 1967). Storey (1982) berpendapat bahwa *entrepreneur* memegang peranan sebagai kreator dalam persaingan dan penciptaan lapangan kerja, sebagai "benih" dimasa depan dan sebagai alternatif dalam hal menghubungkan the bureaucratic employer-employee. Sementara itu Hagen (1960) percaya bahwa entrepreneur mampu memotivasi masyarakat karena dia dipandang menjadi kaum elit karena kesuksesannya di dunia usaha. Entrepreneur bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat. Dengan demikian kemiskinan berhubungan sangat erat kaitannya dengan ketiadaan kewirausahaan. Oleh karena itu, keberadaan kewirausahaan mulai dari level individu, organisasi sampai masyarakat sangat terkait erat dengan miskin atau tidaknya masyarakat. Jika kewirausahaan tinggi, maka kemiskinan akan rendah.

Dari sisi psikologis, kewirausahaan adalah suatu jiwa yang yang memiliki semangat, mimpi, berani mencoba, keinginan besar, kreatif, memiliki need for achievement, visi hidup dan independen. Jiwa yang demikian ini bisa dimiliki oleh siapapun, apakah itu pedagang, pengusaha, karyawan maupun masyarakat pada umumnya, yang mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga akan dihasilkan ide, inovasi, penemuan baru, kreatifitas, semangat baru dan pasar yang baru. Yang sering kita dengar dan artikan bahwa kewirausahaan sama dengan atau selalu identik dengan pemahaman usaha manufaktur dan dagang. Saat ini pemaknaan kewirausahaan telah berkembang tidak hanya pemaknaan seseorang sebagai "pengusaha" namun orang yang mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga akan dihasilkan ide, inovasi, penemuan baru, kreatifitas, semangat baru dan pasar yang baru. Kewirausahaan merupakan sesuatu yang ada didalam jiwa seseorang, masyarakat dan organisasi yang karenanya

akanberbagai macam aktivitas (sosial, politik, pendidikan), usaha dan bisnis. Kewirausahaan merupakan bidang yang sangat luas aktivitasnya. Drucker (Kasmir, 2007) mengatakan kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seseorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan Leibenstein (1979) mengemukakan kewirausahaan mencakup kegiatan-kegitan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan usaha pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum terindentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya.

C. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pemahaman ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan (kaum intelektual), dunia usaha dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Tanpa kolaborasi ketiga elemen tersebut dikhawatirkan pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan selaras dengan rencana atau program yang telah disiapkan, karena akan terjadi saling tumpang-tindih. Hal ini dapat dicapai melalui mekanisme koordinasi yang baik melalui sebuah badan nasional untuk pengembangan ekonomi kreatif yang melibatkan ketiga aktor tersebut.

Melihat perkembangan aktivitas kreatif yang semakin marak digulirkan di berbagai wilayah disertai dengan semakin antusiasnya berbagai kota dan daerah untuk menjadi kota kreatif turut mengindikasikan bahwa ekonomi kreatif telah mengambil peran dalam aktivitas perekonomian nasional. Bahkan telah bermunculan pula berbagai komunitas kreatif dan lapangan kerja kreatif sebagai respons terhadap antusiasme tersebut. Secara kualitatif, perkembangan ekonomi kreatif yang terjadi terlihat dari bermunculannya desainer berkelas internasional, beragamnya seniman, arsitek, artis panggung, musisi, produser/ sutradara bertaraf internasional, serta berkembangnya jenis profesi kreatif baru. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan ekonomi berdasarkan pada keterampilan, kreativitas dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, sehingga menitikberatkan

 ISBN 978-602-14314-8-1

pada pengembangan ide dalam menghasilkan nilai tambahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Iftikhar and Siraj Ud Din. *Evaluating Training And Development*. Vol. 7, No. 2 Desember 2009. Pakistan.

Baum, J. Robert, Edwin A. Locke dan Ken G. Smith, 2001. *AMultidimensionalModel Of Venture Growth*. Academic Management Journal. Vol. 44. No.2, 292-303.

Darojat, Ojat, 2007, *Pendidikan Kewirausahaan*, Universitas terbuka: Jakarta

Dirjen PAUDNI, 2010, *Panduan Kewirausahaan Usaha Mandiri*, Jakarta

Ghosh, B.C., Tan Wee Liang, Tan Teck Meng, Ben Chan,1998. *The Key Success Factors, Distinctive Capabilities, and Strategis Thrusts of Top SMEs in Singapore*. Journal of Business Research 51, 209-221.

Idris, Nor Aini, 2003. *Kemiskinan Bandar dan Sektor Tidak Formal di Malaysia*. Universiti Kebangsaan Malaysia

Kamil, Mustofa. 2010. *Model Pendidikan dan Pelatihan (konsep dan aplikasi)*. Bandung: ALFABETA

Sutarto, Joko. 2007. *Pendidikan Nonformal (Konsep Dasar, Proses Pembelajaran & Pemberdayaan Masyarakat.* Semarang

Kasmir, 2007, *Kewirausahaan*, Edisi Revisi, Alfabeta Bandung

Kemendikbud, 2010, *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum: Jakarta

Lee, D.Y., and Tsang, E.W.K. 2001. *The Effects of Entrepreneurial Personality Background and Network Activities on Venture Growth*. Journal of Management Studies. Vol. 38 (4). pp. 583-602.

Priyanto, Sony Heru, 2002. *Pengembangan Kewirausahaan dan KapasitasManajemen pada UKM Pertanian. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dian Andragogia* - Jurnal PNFI / Volume 1 / No 1 - Nopember 2009 Ekonomi. Vol. III No. 3, 401-427.

Priyanto, Sony Heru dan Iman Sandjojo (2005). *Relationship between entrepreneurial learning, entrepreneurial competencies and venture success*: empirical study on SMEs. Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 5, Nos. 5/6, 2005.

EVALUASI POTENSI KELOMPOK BELAJAR PAKET B UNTUK MENUNJANG WAJIB BELAJAR 9 TAHUN (Studi pada Beberapa Daerah Tingkat II di Jawa Tengah)

oleh:
UTSMAN
ut_unnes@yahoo.com

Abstrak. Tujuan studi evalusi ini untuk mengidentifikasi potensi latar sosial ekonomi-demografi warga belajar, pengelola kegiatan belajar, sarana-prasarana belajar, sistem perekrutan warga belajar dan fasilitator, proses belajar mengajar, dan sistem supervisi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan yang dilakukan pada kelompok belajar paket B di Daerah Tingkat II Jateng. Guna mencari jawaban atas tujuan tersebut, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif pada sejumlah kelompok belajar di beberapa Dati II Jateng dengn subyek pengelola, tutor, warga belajar, dan penyelenggara. Fokus penelitian ini terarah pada permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa latar sosioekonomi-demografi warga belajar kurang potensial untuk mendukung kegiatan belajar, demikian juga potensi sebagian besar pengelola belajar. Potensi sarana-prasarana belajar terlihat sangat terbatas, dan hal ini berakibat pada proses belajar mengajar yang dilakukan kurang memadai, yang pada akhirnya kualitas hasil belajar belum sesuai dengan harapan. Dalam hal supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara ringkas dapat dinyatakan tidak sesuai dengan harapan.

Kata kunci: Evaluasi, Kelompok Belajar Paket B.

PENDAHULUAN

Wajib belajar tahap pertama yaitu wajib belajar 6 tahun secara kuantitas telah menunjukkan keberhasilan yang nyata, meskipun secara kualitas masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari indikator partisipasi anak usia sekolah dasar (usia 7-12 tahun) yang secara nasional telah mencapai 95,71%. Sementara di propinsi Jawa Tengah tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun pada jenjang pendidikan SD sederajat telah mencapai 96,33 % (Kementerian'Pendidikan'dan'Kebudayaan, 2013). Ini berati bahwa hampir semua penduduk usia 7-12 tahun telah mengikuti kegiatan wajib belajar selama 6 tahun (pendidikan SD/MI).

Keberhasilan wajib belajar 6 tahun tersebut, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan pada jejang yang lebih tinggi. Untuk maksud itu pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah telah mencanangkan kegiatan wajib belajar Dikdas 9 tahun bagi anak usia 13-15 tahun. Persoalan

 ISBN 978-602-14314-8-1

besar yang masih menjadi tantangan dan kendala dalam pelayanan wajib belajar Dikdas 9 tahun di antaranya adalah masalah pemerataan dan mutu, terutama pada pendidikan setingkat SLTP. Dalam kaitannya dengan pemerataan dan mutu, tantangan yang harus dihadapi tidaklah sedikit, di antaranya adalah: Pertama, terbatasnya dana, sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan wajib belajar 9 tahun. Tersedianya sarana yang prasarana pendidikan SLTP yang terbatas terutama di daerah-daerah pedesaan (Utsman, 2008) kurangnya guru untuk bidang studi tertentu, serta ketidak sesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan bidang studi yang diajarnya (Depdikbud, 1998) merupakan hambatan bagi upaya peningkatan pemerataan pendidikan. Kedua, kondisi sosial ekonomi dan aspirasi orang tua untuk menyekolahkan anak yang amat terbatas, merupakan tantangan dan kendala yang juga tidak ringan (Latief, 1996; Ghoni, 1996; Markus 1996). .Ketiga, perkembangan tingkat partisipasi anak usia 13-15 tahun pada pendidikan SLTP sederajat masih belum menggembirakan dibandingkan dengan partisipasi anak usia 7-12 pada pendidikan SD. Laporan dari Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (2013) mencatat bahwa partisipasi anak usia 13-15 tahun pada pendidikan SLTP sederajat baru mencapai 78,3%. Sementara itu di Jawa Tengah partisipasi anak usia 13-15 tahun pada pendidikan SLTP sederajat telah mencapai di atas rata-rata nasional yaitu sebanyak 79,38% (Kemendikbud, 2013).

Upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan dasar 9 tahun telah dan terus diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menjawab persolan tersebut dengan mengadakan kegiatan kelompok belajar paket B (Kejar Paket B). Gerakan belajar melalui kelompok belajar paket B dimaksudkan untuk menampung warga belajar yang tidak sempat melanjutkan ke sekolah SLTP konvensional karena berbagai alasan. Namun hingga kini pelaksanaan kelompok belajar paket paket B dalam kaitannya dengan wajib belajar 9 tahun, khususnya di Jawa Tengah belum menggembirakan, karena sebagian besar kelompok belajar paket B perjalanannya cukup memperihatinkan. Kenyataan ini antara lain terlihat dari: (1) masih banyak warga belajar yang terdaftar pada kelompok belajar paket B hanya bisa bertahan dalam beberapa bulan saja; (2) banyak kelompok belajar paket B yang hanya tinggal papan nama; dan (3) jika ada yang terus berlangsung, kelompok belajar tersebut tidak bisa berjalan secara lancar sesuai harapan pengelolanya, artinya kegiatan belajarnya tidak rutin, warga belajar yang terlibat motivasinya sangat rendah. Padahal kegiatan kelompok belajar paket B tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Kenyataan seperti ini, mengindikasikan bahwa ada sesuatu masalah yang harus segera diselesaikan, dan untuk itu perlu dievalusai permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan berbagai potensi yang berkaitan dengan kegiatan kelompok belajar paket B.

Dengan melakukan evaluasi akan dapat diketahui kebutuhan-kebutuahn apa yang diperlukan dalam suatu program (Stufflebeam, D. L. et. al., 2000). Selain itu dengan evaluasi akan dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan suatu program (Chavis, D. 2004; Owston, Ron, 2007; Bledsoe. K.L & Graham, J. A., 2005).

Masalah-masalah yang menjadi fokus dalam kegiatan penelitian evaluasi ini adalah: Bagaimanakah potensi latar belakang sosial ekonomi-demografi, potensi pengelola kegiatan belajar, potensi sarana-prasarana belajar, sistem perekrutan warga belajar dan fasilitator, proses belajar mengajar, dan sistem supervisi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan yang dilakukan pada kelompok belajar paket B di Jateng? Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian evaluasi ini bertujuan untuk: mengidentifikasi potensi latar belakang sosial ekonomi-demografi warga belajar (learner), potensi pengelola kegiatan belajar, potensi sarana-prasarana belajar, sistem perekrutan warga belajar dan fasilitator, proses belajar mengajar, dan sistem supervisi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan yang dilakukan pada kelompok belajar paket B di Jateng.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang diarahkan pada latar dari fokus penelitian secara holistis, baik latar individu maupun kelembagaan sebagai suatu bagian yang utuh. Lokasi penelitian ini dilakukan pada beberapa Dati II Jateng, alasannya karena palaksanaan kegiatan belajar paket B di daerah tersebut berjalan cukup bagus dan bahkan sebagian PKBM dan Kejar Paket B telah menjadi juara tingkat nasional berkali-kali dalam kegiatan Apresiasi Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Infromal.

Subyek penelitian ini terdiri dari: 1) warga belajar kelompok belajar paket B, 2) tutor/fasilitator, 3) pengelola kelompok belajar paket B, dan 4) pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Fokus penelitian ini diarahakan pada potensi pelaksanaan kegiatan belajar paket B, yang meliputi: 1) potensi latar sosioekonomi-demigrafi warga belajar 2) potensi pengelola kelompok belajar paket B, 3) sistem perekrutan warga belajar, fasilitator, dan pengelola kegiatan belajar, 4) potensi kurikulum atau bahan belajar yang diterapkan pada kelompok belajar paket B untuk menunjang kehidupan warga belajar, 5) potensi sarana prasarana kelompok belajar paket B, 6) potensi proses belajar mengajar pada kelompok belajar paket B, dan 7) potensi sistem supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang diberlakukan pada Kejar Paket B.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati sarana dan prasaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, mengamati kegiatan proses pembelajaran, mengamati dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembelajaran, baik dokumen kurikulum, buku, maupun dokumen adminstrasi lainnya. Metode wawancara

 ISBN 978-602-14314-8-1

mendalam dilakukan untuk menggali informasi dari berbagai sumber informan tentang latar sosioekonomi-demografi warga belajar, pengelolaan kelompok belajar, sistem perekrutan warga belajar dan fasilitator, penggunaan bahan belajar, sarana prasarana kelompok belajar, proses belajar mengajar, dan sistem supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang diberlakukan pada Kejar Paket B.

Dalam rangka pembuktian temuan atau hasil lapangan dilakukan pemeriksaan keabsahan data agar penelitian benar-benar dapat diandalkan. Seale (1999) menyatakan bahwa keandalan adalah jantung dari laporan penelitian kaulitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan uji keahsahan data. Data yang dikumpulkan akan diuji kualitas, ketelitian dan kepercayaan untuk dipergunakan mengevaluasi hasil penelitiannya (Davies & Dodd, 2002; Mishler , 2000; Stenbacka, 2001).

Uji keabsahan dalam penelitian ini dilakukan antara lain dengan triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, keajegan pengamatan, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, dan pengecekan angggota. Triangulasi yang digunakan dalam peneliian ini adalah menggunakan dua stategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa metode, dan pengecekan derajat kepercayaan dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama pada saat pencarian data di tempat kegiatan Kejar Paket B. Triangulasi dengan menggunakan sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek bailk derajat kepercayaan informasi yang diperolah melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 2001). Cara yang dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi dengan wawancara; membandingkan saat situasi resmi waktu penelitian dan situasi infomal; membandingkan keadaan dalam perspektif orang yang berbeda; membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh dari lembaga pendidik Kejar Paket B.

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dengan berbagai sumber mulai dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh tepat pula. proses analisis data memiliki tiga unsur yang dipertimbangkan oleh penganalisis yaitu: (1) Reduksi data (2) Penyajian data dan (3) Penarikan Simpulan.

Reduksi data pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada catatan lapangan yang terkumpul, yang selanjutnya data yang terpilih disederhanakan dengan mengklarifikasikan data atas dasar fokus penelitian, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti melakukan abstraksi kasar menjadi uraian singkat atau ringkasan. Penyajian data, pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi data yang diperoleh secara keseluruhan yang telah mengalami reduksi melalui

bentuk naratif agar diperoleh penyajian data lengkap dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti membuat teks naratif mengenai informasi yang diberikan oleh subyek penelitian. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti melakukan uji kebenaran pada setiap data yang muncul dari data yang diperoleh dari subyek satu ke subyek yang lain dengan cara melibatkan peserta didik, guru atau pendidik, kepala sekolah, dan tidak lupa data para informan. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Sosioekonomi dan Demografi Warga Belajar

Jumlah warga belajar Kejar Paket B yang dijadikan tempat penelitian, saat ini secara adminstratif masih tercatat sebagai warga belajar adalah tiap kelompok belajar sekitar 17 –26. Menurut data yang ada bahwa hampir seluruh peserta kegiatan belajar berlatar belakang pendidikan SD dan madrasah, dan mereka mengikuti kegiatan belajar tersebut karena disamping kondisi ekonomi orang tua, juga karena di sekitar lokasi tidak ada kegiatan lembaga pendidikan setingkat SLTP yang bisa terjangkau dengan mudah. Warga belajar tersebut, umumnya berasal dari latar dan status ekonomi kurang beruntung, atau berasal dari keluarga miskin dan pekerjaan orang tua sebagai buruh tani dan atau bekerja pada sektor informal. Orang tua warga belajar, menurut data yang ada sebagian besar berpendidikan SD, namun ada informan lain, bahwa sebenarnya orang tua mereka umumnya tidak sekolah dan tidak tamat SD. Kondisi seperti tersebut menjadi salah satu diterminan terhadap rendahnya kualitas dan motivasi anak untuk belajar.

Menurut catatan yang ada, sebagian besar atau sekitar 65% peserta kegiatan kejar adalah wanita, dan hal ini terjadi karena menurut beberapa informan bahwa masih banyak orang tua yang berasal dari keluarga miskin lebih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki, sehingga jika ada sedikit biaya, yang diutamakan terhadap pembiayaan pendidikan adalah bagi anak laki-laki. Disamping, faktor “gengsi” bagi anak laki-laki untuk mengikuti Kejar Paket B lebih dominan dibandingkan wanita. Jumlah dalam keluarga bagi warga belajar yang dijadikan subyek penelitian umumnya adalah rata-rata antara 5-6 keluarga termasuk Bapak dan Ibu. Kenyataan ini pula yang menjadikan orang tua secara ekonomi berat untuk menyekolahkan anak. Sementara itu jika diamati dari data yang ada, tentang status perkawinan orang tua, terlihat hampir seluruhnya orang tuanya berstatus masih utuh dan tidak dalam keadaan cerai. Namun, ada beberapa warga belajar yang mengakui bahwa meskipun orang tua mereka masih utuh atau tidak cerai, namun ia jarang ketemu orang tuanya, karena orang tua bekerja dalam barbagi sektor di luar kota, dan umumnya ke Jakarta. Sementara ia sendiri tinggal bersama ibunya, ikut pada nenek atau

 ISBN 978-602-14314-8-1

saudaranya. Status warga belajar sendiri, sebagian ada yang sudah berkeluarga, dan jumlahnya tidak lebih dari 10%.

Kondisi fisik lingkungan mereka tinggal, semua berada di lingkungan pedesaan yang masih sarat dengan norma-norma kehidupan desa yang tradisionel, sehingga bisa jadi karena faktor ini, membuat mereka kurang menaruh kepedulian terhadap arti pendidikan. Pergaulan mereka (warga belajar) umumnya bergaul dengan anak-anak desa yang masih sebaya, oleh karena itu, mereka kurang memahami makna pendidikan bagi kehiduoannya kini dan kelak.. Jarak antara rumah dengan lokasi kegiatan belajar relatif terjangkau oleh warga belajar dengan kendaraan roda dua atau jalan kaki. Rata-rata jarak rumah dengan lokasi kegiatan belajar sekitar 1 sampai 3 kilo meter.

Potensi Pengelola Kelompok Belajar Paket B

Pengelola kegiatan belajar paket B adalah orang yang ditunjuk untuk berperan sebagai koordinator dan sekaligus dapat sebagai fasilitator dan atau tutor jika tutor berhalangan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar. Pendidikan pengelola sebagian besar adalah sebagian S1 dan SLTA/SPG/SGO. Umumnya mereka menjadi pengelola minimal sudah lima tahun, dan hanya beberapa yang baru ditunjuk menjadi pengelola. Para pengelola yang sudah minimal sudah menjadi pengelola 5 tahun sebagian besar sudah pernah mengikuti beberapa kegiatan penataran/pelatihan yang dilakukan untuk pengelolaan dan atau pembelajaran pada kelompok belajar. Sementara itu para tutor yang tergabung dalam kegiatan belajar paket B mempunyai latar belakang yang bevariasi,

Para pengelola dan atau tutor ikut terlibat dalam kegiatan belajar paket B karena berbagai alasan diantaranya: a) dianggap sebagai pengbdian kepada masyarakat, b) ingin menaruh kepedulian terhadap masalah pendidikan, c) ingin memajukan rakyat di desnya melalui pendidikan, dan e) sebagai tambahan kesibukan, terutama bagi yang belum diangkat sebagai guru tetap.

Bagi para pengelola, sebagain besar merasa siap mendapatkan tugas untuk mengelola kegiatan belajar, namun menurut mereka, seringkali dalam melakukan pengelolaan menemukan berbagai kendala yang tidak ringan dalam memotivasi warga belajar untuk terlibat dalam kegiatan. Semantara bagi para tutor, mengakui bahwa setiap mereka akan melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu mempersipakan materi pembelajaran dengan baik, meskipun seringkali materi yang dipersiapkan secara matang tersebut kurang mendapat perhatian dari warga belajar. Hal ini terjadi karena, menurut tutor bahwa motivasi warga belajar umumnya sangat rendah dibandingkan di sekolah-sekolah formal.

Pengelola kegiatan belajar paket B, dalam proses pembelajaran secara umum menggunakan metode dan teknik yang sama dengan pembelajaran pada sekolah-sekolah formal, dan mereka kurang memahami tentang metode dan teknik serta proses pembelajaran pada

pendidikan nonformal (kejar paket B). Mereka terlihat juga tidak memahami bagimana melakukan motivasi belajar, karena memiliki keterbatasan tentang pengetahuan pembelajaran secara nonformal.

Pemahaman pengelola dan atau tutor terhadap materi-materi yang diajarkan dalam kejar paket B, khususnya materi pelajaran bersifat *social science* secara umum cukup, namun untuk mata pelajaran bahasa Inggris, Matematika, IPA umum diajar oleh orang-orang kurang kompeten dibidangnya. Hal ini, menjadikan warga belajar Paket B secara realistis akan tertinggal dengan SLTP konvensional.

Sistem Perekrutan Warga Belajar

Sistem perekrutan yang warga dilakukan dengan beberapa cara secara simultan: 1) bekerjasama dengan aparat desa untuk mengidentifikasi warga desa yang tidak melanjutkan sekolah SLTP, 2) menyebarkan informasi melalui kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di pedesaan, seperti organisasi PKK, karang taruna, dan keagamaan tentang meberadaan kelompok belajar paket B, 3) petugas tingkat kecamatan dibantu aparat desa, tokoh masyarakat, dan petugas dari penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) melakukan pendataan secara langsung tentang anak-anak tamatan SD setempat yang tidak melanjutkan sekolah. Dalam perekrutan tersebut tidak ada sistem pemaksaan kepada calon warga belajar, namun upaya persuasif memang diakui oleh beberapa petugas yang melakukan perekrutan. Sementara untuk para tutor direkrut dengan menggunakan berbagai cara yaitu: 1) petugas penilik pendidikan luar sekolah diminta pertimbangan guna menentukan/menetapkan para warga masyarakat yang akan direkrut menjadi tutor dan sekaligus untuk menetapkan pengelolanya; 2) menghubungai secara langsung calon-calon tutor, khususnya warga desa setempat untuk mambantu pelaksanaan kelompok belajar paket B.

Penentuan waktu belajar ditentukan secara bersama antara pengelola, tutor, dan sebagian warga belajar dan kemudian konsultasikan kepada penilik UPTD kecamatan. Dalam hal ini tidak menjadi masalah karena yang terpenting harus diambil kesepakatan secara bersama. Secara umum kegiatan belajar tewrjadwal di sore hari dan pagi hari sesuai dengan kesepakatn, dan dilakukan tiga sampai 5 seminggu. Setiap kali pertemuan sekitar 4 sampai 6 jam pelajaran, dan setiap jam pelajaran rata-rata menggunakan waktu antara 40 menit. Namun relita yang ada bahwa kegiatan belajar sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi menurut informan karena warga belajar: (1) sibuk dengan urusan masing-masing, (2) kurang termotivasi dengan materi yang diberikan, dan (3) minat warga belajar untuk belajar rendah.

Penentuan tempat belajar didiskusikan bersama, khususnya oleh tutor, penyelenggara, dan pengelola. Dalam hal ini pertibangan-pertimbangan yang diutamakan adalah pertimbangan kemampuan daya tampung, kelengakapan fasilitas belajar, penerangan, mudah dijangkau. Menurut pengamatan yang ada bahwa tempat

 ISBN 978-602-14314-8-1

belajar hampir semua dilaksnakan di gedung SD atau di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sekaligus menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan.

Sewaktu proses perekrutan, calon warga belajar maupun tutor tidak dikenakan biaya apa pun, dan bahkan para tutor, menurut beberapa informan, juga mendapatkan sekedar uang beli sabun sekitar Rp 50.000 setiap bulan, dan diterimakan minimal dalam triwulan sekali.

Kurikulum Kejar Paket B

Materi belajar paket B yang diberikan secara umum mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan, yaitu dengan menggunakan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan tingkat kesetaraan dari setiap mata pelajaran. Menurut para pengelola, tutor, dan warga belajar, bahwa materi tersebut belum menyentuh kehidupan warga belajar, artinya sangat sedikit bila dikaitkan dengan kebutuhan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Materi yang diberikan lebih banyak bersifat pengetahuan dibandingkan keterampilan untuk memecahkan masalah kehidupan warga belajar, dan tidak kongruen dengan kondisi daerah dimana warga belajar berada.

Bila dikaitkan dengan dunia kerja mereka, umumnya skope dan lingkup, serta isi kurikulum juga tidak kongruen, karena sebagian besar warga belajar, bekerja membantu orang tua sebagai buruh, tani, atau lainnya yang tidak menggunakan ketermapilan-keterampilan khusus seperti berbahasa Inggris, Matematika dan sebagainya, akibatnya warga belajar sesudah belajar seakan-akan tidak memperoleh sesuatu yang berguna dalam membantu memecahkan masalah kehidupannya, kecuali hanya sekedar mendapatkan tambahan pengetahuan yang dianggap kurang bermakna dalam hidup.

Meskipun kegiatan belajar ini sebagai upaya penyetaraan dengan SLTP konvensional, namun menurut para tutor dan pengelola, bahwa akan sulit dan bahkan tidak mungkin pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh warga belajar bisa setara dengan yang diperoleh oleh siswa SLTP konevnsional. Hal ini terjadi karena: 1) bahan belajar yang diberikan secara kualitas maupun kuantitas jauh lebih rendah dibandingkan SLTP konvensional, meskipun banyak para tutor yang mencoba menggunakan buku pendamping modul untuk kegiatan pembelajaran, 2) waktu belajar di kelas yang digunakan oleh warga belajar sangat terbatas, dan bahkan tidak lebih dari seperempat waktu belajar di SLTP konvensional, meskipun diberi modul yang secara umum tidak pernah dipelajari oleh warga belajar, dan 3) sistem belajar, kedisiplinan, sarana, tutor, dan motivasi belajar dianggap kurang kondusif, termasuk sistem evaluasi yang digunakan untuk melihat keberhasilan belajar. Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, dan pengalaman selama ini, kemudian secara umum pengelola, tutor, dan penyelenggara bersikap pesimis terhadap apa yang hendak diharapakan dari kegiatan belajar paket B, terutama bila dikaitkan dengan pemecahan masalah hidup dan kehidupan.

Potensi Sarana-Prasarana

Potensi sarana belajar paket B seperti buku pelajaran, buku paket, dan buku modul, serta buku paket penunjang bila dilihat dari segi kuantitas hampir di semua tempat kegiatan belajar, terlihat cukup dibandingkan jumlah warga belajar, namun secara kualitas menurut para tutor, pengelolan dan penyelenggara dianggap kurang memadai, oleh karena itu seringkali para tutor mencari buku-buku sendiri sebagai pendamping yang dianggap memiliki kualitas yang memadai. Namun dalam hal ini muncul persoalan baru, karena warga belajar akan mengalami kesulitan dalam proses belajar. Sarana lain seperti alat-alat peraga, teramati tidak banyak para tutor menggunakan alat peraga, karena alat peraga yang ada sangat terbatas untuk bidang studi dan pokok bahasan tertentu. Kenyataan ini menjadi masalah tersendiri bila dikaitkan dengan proses pembelajaran yang berlangsung.

Sarana perpustakaan dan laboratorium, pada semua kelompok belajar tidak ada, dan jika ada perpustakaan, hanya berupa beberapa buku yang terkait dengan kegiatan belajar paket B yang tersimpan dalam satu-dua almari khusus, yang terlihat tidak dimanfaatkan oleh warga belajar. Prasarana seperti papan tulis, kapur, spidol, penghapus, bangku, kursi, menurut pengamatan peneliti, tidak menjadi masalah artinya cukup untuk kegiatan pembelajarn.

Sarana administrasi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar seperti buku absen warga belajar, buku absen tutor, buku tamu, buku inventaris alat belajar dan bahan belajar tidak semua kelompok belajar memiliki secara lengkap, namun tidak semua sarana administrasi tersebut tersusun secara rapi dan bahkan sebagian besar tidak teratur.

Potensi Proses Pembelajaran Kejar Paket B

Tutor sebelum melakukan proses kegiatan belajar, sebagian besar menyatakan telah siap, meskipun persiapan-persiapan tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran seperti pembuatan satuan pelajaran dan rencan pelajaran (SP dan RP) seperti sekolah konvensional. Rata-rata proses belajar dilaksanakan tiga kali seminggu, namun ada beberapa kemlompok belajar yang malakukan 5 kali seminggu. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagain tutor dan pengelola kegiatan belajar, menyatakan bahwa proses belajar yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan bahkan sebagian menyatakan bahwa kegiatan belajar pekat B ini seringkali terjadi kemacetan karena warga belajar tidak hadir. Bahkan ada beberapa kelompok belajar paket B yang saat ini hanya tinggal nama, karena aktifitas belajar sudah tidak ada.

Sistem pembelajaran dilalukan sebagaimana belajar di sekolah, yaitu sistem belajar klasikal, karena belajar dengan cara berkelompok tidak bisa berjalan. Pembelajaran dilakukan kurang lebih 3-6 jam setiap pertemuan dengan materi pelajaran sesuai jadual, namun serigkali terjadi materi pelajaran yang diberikan berubah-ubah bersamaan

 ISBN 978-602-14314-8-1

dengan ketidak hadiran tutor yang seharusnya mengajar materi tersebut.

Pembelajarn pada paket B ini diakui oleh semua tutor sulit dilaksanakan secara maksimal, dan hal ini terjadi karena: 1). warga belajar yang hadir rata-rata tidak lebih dari 50%, 2). warga belajar yang datang memiliki motivasi belajar yang rendah, (3) warga belajar sulit menerima materi belajar yang diberikan, terutama materi seperti IPA, bahasa Inggris, dan Matematika.

Metode yang digunakan tutor dalam proses pembelajaran secara umum masih konvensional, yaitu dengan ceramah. Sementara itu, belajar dengan sistem modul sulit untuk berjalan. Penggunaan metode ini dilakukan, menurut tutor dan pengelola, karena sebagian besar tutor menirukan pola-pola pembelajaran sekolah formal sehingga belum banyak mengenal metode-metode pembelajaran yang sering diterapkan pada pendidikan luar sekolah. Hal ini berarti menunjukkan bahwa para tutor dan pengelola tidak memahami praktek-praktek pembelajaran pada pendidikan luar sekolah. Kenyataan ini terjadi karena menurut pengakuan sebagian tutor bahwa mereka belum pernah dilakukan pelatihan atau penataran dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di luar sekolah. Mereka terlibat sebagai tutor belajar paket B karena merasa prihatin terhadap warga sekitar yang tidak sempat menikmati pendidikan di sekolah formal karena berbagai faktor, diantara faktor ekonomi, geografi, dan kitiadaan sekolah fromal yang terjangkau.

Selama proses belajar berlangsung, menurut pengamatan peneliti, para tutor tidak pernah menggunakan alat peraga yang kondusif, kecuali sarana papan tulis dan kapur tulis. Hal ini terjadi karena menurut tutor, tidak tersedia alat peraga yang bisa dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran kelompok belajar paket B. Hal ini terjadi, menurut para tutor dan pengelola, karena tidak ada bantuan baik dana maupun alat peraga dari pihak-pihak yang terkait, sementara itu peserta bealajar kelompok belajar paket B tidak dimintai sumbangan apa pun untuk kegiatan pembelajaran.

Menurut para pengelola, penilik pendidikan masyarakat, dan tutor, bahwa peserta kegiatan belajar paket B ini sebagian kecil yang bisa selesai, dalam arti yang sampai bisa mengikuti ujian persamaan setingkat SLTP, dan rata-rata sekitar hanya 20-30% pada setiap kelompok belajar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar paket B tidak bisa menuntaskan lulusan SD yang tidak bisa menikmati pendidikan formal setingkat SLTP secara keseluruhan.

Sistem Supervisi, Pelaporan, Evaluasi, dan Monitoring

Sistem supervisi yang dilakukan dalam kegiatan belajar paket B meliputi beberapa hal, yaitu supervisi administratif, dan edukatif. Supervisi adminstratif dan edukatif ditujukan pada program secara umum, warga belajar, tutor, sarana dan prasarana serta dana penyelenggaraan belajar. Pelaksanaan supervisi bidang-bidang tersebut, menurut para pengelola, tutor, dan warga

belajar jarang dilaku-kan oleh petugas yang terkait. Petugas yang biasanya datang memberikan supervisi hanya dari petugas penilik pendidikan nonformal UPTD kecamatan seepat, sedangkan penilik PNF tingkat Kabupaten dan Propinsi hampir semua Kejar Paket B menyatakan sangat jarang, dan kira-kira setahun sekali, dan bahkan ada beberapa kelompok belajar tertentu yang menyatakan belum pernah dilakukan supervisi oleh petugas pada tingkat kabupaten dan propinsi.

Sistem supervisi yang dilakukan secara lazim hanya melakukan kunjungan ke lokasi pelaksanaan kegiatan. Bentuk-bentuk lain seperti, bantuan pemecahan masalah, konferensi kasus, dan angket belum pernah dilakukan oleh petugas hampir semua mengatakan tidak pernah dilakukan. Materi supervisi terkait dengan program-program kegiatan belajar, masalah pengelolaan kegiatan belajar, dan masalah-masalah yang terkait dengan warga belajar. Satu hal yang sampai kini belum bisa dipecahkan oleh supervisor adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan kesadaran warga belajar agar mau belajar dengan rajin, tekun, dan atau setidaknya bisa belajar sampai berakhir kegiatan atau sampai bisa mengikuti ujian akhir. Sampai saat ini, semua pihak yang terkait dengan pengelolaan kegiatan belajar merasa kesulitas untuk mengatasinya, sehingga tidak sedikit warga belajar yang berhenti sebelum sampai ke tujuan.

Sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten selama ini dirasakan oleh semua petugas kegiatan belajar di lapangan sangat terbatas. Monitoring biasa hanya dilakukan dalam bentuk laporan bulanan dan atau sesekali petugas meninjau ke lokasi kegiatan belajar, dan selama jarang dilakukan pertemuan-pertemuan secara khusus dengan sesama petugas (pengelola, tutor, penyelenggara) dalam satu wilayah tingkat II atau tinglat I guna mambahas pers-oalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola kegiatan belajar Paket B. Akibat dari semua itu, menurut para petugas, banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan, bahkan ada kecenderungan masing-masing pengelola kegiatan belajar dengan menggunakan pola sendiri-sendiri dalam menjalankan kegiatan belajar paket B.

Sistem evaluasi yang selama ini diterapkan dan yang diperhatikan hanya cenderung pada evaluasi hasil belajar, dan ini pun dilakukan dalam bentuk tes tertulis. Sementara evaluasi penyelenggaraan kegiatan, terutama yang terkait dengan warga belajar, tutor, fasilitator, penyelenggara, kesesuaian bahan belajar, keefektifan buku modul, buku pelengkap yang digunakan, serta proses belajar pembelajaran, menurut semua penyelenggara terabaikan, atau dengan kata lain belum pernah diselenggarakan secara terfokus oleh pihak-pihak yang terkait (Depdiknas). Jika ada bentuk evaluasi tersebut hanya bersifat pereferial yang tidak ubahnya seperti pada aktifitas supervisi dan monitoring.

Sistem pelaporan kegiatan belajar paket B seharusnya dilakukan secara berjenjang yaitu laporan kemajuan belajar warga belajar disusun tutor

 ISBN 978-602-14314-8-1

disampaikan pada penyelenggara dan pengelola, laporan pelaksanaan proses belajar yang dilampiri kemajuan belajar disusun penyelenggara bersama pengelola disampikan pada penilik pendidikan nonfromal tingkat kecamatan, laporan yang ada pada penilik pendidikan tingkat kecamatan dirangkum kemudian dilaporkan pada penilik pendidikan nonformal tingkat kabupaten, laporan yang ada pada penilik pendidikan tingkat kabupaten dirangkum dan di laporkan pada kepala seksi pendidikan masyarkat tingkat propinsi.

Kenyataan yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa hampir semua level tidak pernah melaporkan kegiatan sesuai jadual yang ditetapkan, dan tidak sedikit laporan baru diberikan pada tiga bulan atau empat bulan sekali bahkan ada yang setahun sekali. Jika ditelusuri, tentang letak keterlambatan laporan, terdapat berbagai alasan yang dikemukakan, diantaranya, dari pihak yang lebih atas berargumen karena keterlambatan dari pihak bawah, sementara pada level yang paling bawah mengakui, bahwa tidak selamanya laporan diberikan terlambat, dan jika ada yang terlambat dikarenakan faktor teknis, terlupakan, dan ada yang menyatakan karena kesibukan dengan pekerjaan lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Seluruh peserta kegiatan belajar berlatar belakang pendidikan SD. Mereka mengikuti kegiatan belajar tersebut disamping kondisi ekonomi orang tua miskin, juga karena di sekitar lokasi tidak ada kegiatan lembaga pendidikan setingkat SLTP yang bisa terjangkau. Orang tua warga belajar sebagian besar tamat SD. Sekitar 65% peserta kegiatan kejar adalah wanita, dan hal ini terjadi karena masih banyak orang tua yang berasal dari keluarga miskin lebih mengutamakan pendidikan formal bagi anak laki-laki, dibandingkan wanita.

b. Pengelola kegiatan belajar paket B hampir semua berlatar belakakang pendidikan guru, dan cara bertindak disamakan dengan dengan pendidikan fromal.Oleh karena itu meraka sering menemukan berbagai kendala, terutama terkait dengan motivasi warga belajar. Hal ini terjadi karena, di saat pembelajaran metode dan teknik yang digunakan sama dengan pembelajaran pada sekolah-sekolah formal, dan kurang memahami tentang metode dan teknik serta proses pembelajaran pada pendidikan nonformal.

c. Perekrutan warga belajar dilakukan dengan beberapa cara secara simultan, yaitu bekerjasama dengan aparat desa, guru, organisasi terkait, dan petugas pendidikan luar sekolah. Dalam pelaksanaannya, tidak ada pemaksaan, namun dilakukan secara persuasif. Sedangkan para tutor direkrut atas dasar kemampuan, kemauan, dan pertimbangan dari dinas terkait.

d. Waktu belajar ditentukan pengelola, tutor, dan sebagian warga belajar secara umum kegiatan belajar dilaksnakan sore hari, namun kegiatan pembelajaran tersebut pada umumnya berjalan krang lancar lancar.
e. Materi belajar yang diberikan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan, namun menurut para pengelola, tutor, dan warga belajar, bahwa potensi materi tersebut belum menyentuh kehidupan warga belajar, karena lebih bersifat pengetahuan bukan keterampilan untuk memecahkan masalah kehidupan warga belajar. Disamping itu, tidak mungkin pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh warga belajar bisa setara dengan yang diperoleh oleh siswa SLTP konevnsional karena bahan belajar yang diberikan secara kualitas maupun kuantitas jauh lebih rendah dibandingkan SLTP konvensional.
f. Potensi sarana-prasarana sangat terbatas, sehingga baik tutor maupun warga belajar mengalami kesulitan dalam proses belajar-mengajar, dan akhirnya bermuara pada kualitas hasil belajar yang kurang memadai.
g. Tutor sebelum melakukan proses kegiatan belajar, sebagian besar menyatakan telah mempersipakan degan baik, namun pelaksaannya sering tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan bahkan sebagian menyatakan bahwa kegiatan belajar pekat B ini seringkali macet karena warga belajar tidak hadir. Sistem pembelajaran pada kegiatan ini sulit dilaksanakan secara maksimal, karena kehadiran warga belajar tidak rutin, motivasi belajar rendah, sulit menerima materi belajar.
h. Potensi kegiatan belajar paket B belum sepenuhnya mengantarkan warga belajar sampai dapat mengikuti ujian persamaan setingkat SLTP, dan rata-rata hanya sekitar 50-60% pada setiap kelompok belajar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar paket B tidak bisa menuntaskan lulusan SD yang tidak bisa menikmati pendidikan formal setingkat SLTP secara keseluruhan.
i. Sistem supervisi yang dilakukan petugas lazimnya hanya melakukan kunjungan ke lokasi pelaksanaan kegiatan. Bentuk-bentuk lain seperti, tes dadakan pada warga belajar, konferensi kasus, dan angket belum pernah dilakukan oleh petugas. Sedangkan sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten selama ini dirasakan oleh semua petugas di lapangan sangat terbatas. Kegiatan ini biasanya hanya dilakukan dalam bentuk laporan bulanan dan atau sesekali petugas meninjau ke lokasi kegiatan belajar.
j. Sistem evaluasi yang sering dilakukan hanya evaluasi hasil belajar, sementara evaluasi

 ISBN 978-602-14314-8-1

penyelenggaraan kegiatan, terutama yang terkait dengan warga belajar, tutor, fasilitator, penyelenggara, kesesuaian bahan belajar, keefektifan buku modul, buku pelengkap yang digunakan, serta proses belajar pembelajaran, menurut semua penyelenggara terabaikan, atau dengan kata lain belum pernah diselenggarakan secara terfokus oleh pihak-pihak yang terkait. Jika ada bentuk evaluasi tersebut hanya bersifat pereferial yang tidak ubahnya seperti pada aktifitas supervisi dan monitoring. Sementara itu sistem pelaporan kegiatan belajar paket B yang selama ini berjalan sering tidak mematuhi jadual dan prosedur yang ditetapkan, sehingga berdampak pada kebijakan-kebijakan mendatang yang akan diterapkan.

2. Saran-saran

a. Mengingat bahwa peserta kegiatan belajar berlatar belakang ekonomi sangat lemah, maka hendaknya materi pembelajaran dikaitkan dengan upaya peningkatan ekonomi serta dalam proses pembelajaran selalu mempertimbangkan kegiatan ekonomi, dalam arti jangan sampai kegiatan belajar mengganggu aktifitas ekonomi warga belajar.

b. Para tutor dan pengelola secara umum merasa sulit memotivasi warga belajar untuk belajar, oleh karena itu hendaknya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, petugas tersebut hendaknya diberikan pelatihan-pelatihan lebih dahulu tentang bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran pada sistem pendidikan luar sekolah,

c. Mengingat materi belajar yang diberikan belum menyentuh kehidupan masyarakat, maka hendaknya warga bekali berbagai keterampilan guna memecahkan memecahkan masalah kehidupan warga belajar.

d. Mengingat bahwa potensi sarana-prasarana sangat terbatas, hendaknya pihak-pihak yang terkait dan yang peduli terhadap kegiatan ini berupaya untuk membantunya, baik dalam bentuk materi maupun gagasan pemecahannya.

e. Mengingat bahwa sistem supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan masih banyak mengandung berbagai kelemahan dan kekurang dalam prakteknya, maka hendaknya petugas yang terkait berupaya meningkatkan kinerja dalam hal tersebut guna mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Bledsoe. Katrina L & Graham, James A. (2005) The Use of Multiple Evaluation Approaches in Program Evaluation. *American Journal of Evaluation*.; 26; 302

Chavis, D. (2004). Looking the enemy in the eye: Gazing into the mirror of

evaluation practice. *The Evaluation Exchange*, *9*, 8-9.

Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into Practice, 39*(3), 124-131.

Chavis, D. (2004). Looking the enemy in the eye: Gazing into the mirror of evaluation practice. *The Evaluation Exchange*, *9*, (8-9).

Depdikbud (1998). Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Abad 21. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Davies, D., & Dodd, J. (2002). Qualitative research and the question of rigor. *Qualitative Health research, 12*(2), 279-289..

Goni, J. Hein dan Sampoel. P. (1996). Studi Evaluasi Keberhasilan Sistem Forum Pembangunan Pendidikan di Propinsi Sulawesi Utara. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Latief, M. Adnan. (1996). Tantangan Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan dan Malang Propinsi Jawa Timur. Malang: Pusat Penelitian IKIP Malang.

Markus, J.F. (1994). *Studi evaluasi pelaksanaan program Coplaner propinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

*Owston, Ron (*2007) Models and Methods for Evaluation. Toronto, Canada : York University,

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative evaluation and research methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Utsman, (2008(. Aspek-aspek Sosial Budaya yang Berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil Penelitian tidak diterbitkan

Stufflebeam, D. L. et. al. (2000). *Evaluation Models Viewpoints On Educational and Human Services Evaluation.* Second Edition. New York: Luwer Academic Publishers

Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. *Qualitative Inquiry, 5*(4), 465-478.

Scriven, M. (1997). Minimalist theory: The least theory that practice requires. *American Journal of Evaluation*, *19*, 575-604.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). *APK/APM PAUD, SD, SMP, SMA, dan P*T. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

 ISBN 978-602-14314-8-1

PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

oleh:
Dr. Puji Yanti Fauziah, M.Pd
Dosen Jurusan PLS FIP UNY

Pendahuluan

Indonesia pada saat ini menjadi salah satu Negara dengan potensial ekonomi terbesar urutan ke enam belas, hal ini disebabkan karena jumlah populasi produktif berjumlah 55 juta dengan 45 juta masyarakat ekonomi menengah sebagai pangsa pasar, dan pada tahun 2030 Indonesia akan diprediksi menjadi Negara kertujuh terbesar di dunia dengan jumlah usia produktif mencapai 133 juta penduduk menengah dengan kunsumsi tinggi, 113 juta penduduk produktif . (Mckinsey dalam Rudy suryanto 2015).

Selain peluang ekonomi tantangan bangsa Indonesia adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin. Menurut data Tim Nasional Perpepatan penanggulangan kemiskinan tahun 2014 tingkat kemiskinan dalam prosentase 11,25% atau menurun dari tahun 2013 11,36%. Tetapi secara jumlah orang miskin pada tahun 2014 bertambah dari tahun 2013 jumlahnya hanya sekitar 28,17 juta tahun 2014 bertambah menjadi 28,28 juta jiwa (TPK 2015)

Dari data peluang ekonomi dan tantangan kemiskinan memberikan gambaran bahwa menyongsong Masyarakat ekonomi ASEAN yang cetuskan di Cebu pada tahun 2007 memberikan pertanyaan besar apakah bangsa kita sudah siap menghadapi situasi yang kompetitif, lalu bagaimana dengan SDM pendidikan nonformal , apa yang harus kita lakukan selaku akademisi yang akan menghasilkan output mahasiswa PLS yang memiliki daya saing tidak hanya Nasional tetapi berkompetisi dalam tingkat ASEAN.

Hasil analisis posisi daya saing Neagara-negara ASEAN memasuki AFTA tahun 2015 berada diperingkat ke 8 dari sepuluh Negara (Vincent Gesper dalam Rudy Suryanto 2015). Hal ini menunjukkan besarnya tantangan bangsa kita agar memiliki tingkat daya saing tinggi untuk mengelola potensi ekonomi dan potensi alam yang luar biasa. Sehingga dengan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompetitif.

Salah satu strategi yang dapat kita lakukan adalah melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal menjadi tulang punggung bagi warga masyarakat yang menginginkan pendidikan diluar jalur formal agar dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetisi. Menurut data saat inijumlah penduduk produktif yang bekerja berjumlah kurang lebih lima puluh juta penduduk hal ini menjadi peluang bagi pendidikan nonformal untuk memfasilitasi. Makalah ini akan mencoba mengulas secara

 ISBN 978-602-14314-8-1

umum tentang konstribusi Pendidikan nonformal dalam berbagai bidang untuk menyosngong MEA.

Dalam bidang pendidikan anak usia dini kita bias melihat potensi peluang berupa jumlah penduduk yang mengalami bonus demografi sehingga jika kita mengelola dengan baik bonus demografi sejak dini dengan stimualsi yang baik dan tepat akan memberikan perubahan positif pada anak untuk menghasilkan anak yang cerdas, sehat and berkarakter. Cerdas dalam berbagai aspek perkembangan, sehat fisik dan memiliki karakter yang positif. Dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakatkita bias melihat bahwa jumlah perempuan yang ilaterate masih berjumlah 25% dari jumlah penduduk Indonesia, artinya kita masih punya pekerjaan rumah yaitu perempuan yang tidak memiliki akses atau karena factor budaya perempuan-perempun Indonesa tidak dapat mengenyam pendidikan formal, sehingga pendidikan nonformal menjadi kebutuhan mendasar dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Makalah ini akan mencoba membahas tentang urgensi peran strategis PNF dalam membangun masyarakat yang kompetitif dalam hal ini menjadi masyarakat pembelajar, Program-program yang ditawarkan dalam memfasilitasi untuk mendidik masyarakat, serta berbagai kebijakan dari instansi pemerintah yang harus bersinergi dan berkoordinasi agar dapat mendukung masyarakat Indonesia yang siap untuk menjadi masyarakat ASEAN.

Pembahasan

Pendidikan nonformal merupakan salah satu konsep yang lahir dari adanya prinsip "lifelong learning"yang dilahirkan oleh UNESCO pada tahun1970 an. Lifelong learning sampai saat ini masih sangat relevan dengan kebutuhan belajar masyarakat. Terlebih dengan adanya MEA yang membuat masyarakat menjadi masyarakat pembelajar agar menjadi masyarakat yang memiliki daya saing positif dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu konsekwensi dari adanya MEA adalah mudahnya produk-produk luar , jasa pelayanan dan juga tenaga kerja untuk masuk ke Indonesia. Sehingga jika kita hanya mengandalkan jalur pendidikan formal an sich akan sulit untuk beradaptasi dengan dinamisasi perubahan kebutuhan masyarat, sehingga baik dalam level individual, komunitas bahkan sebuah Negara harus dinamis untuk senantiasa belajar.

Pendidikan nonformal adalah usaha sadar terencana yang berada di jalur luar persekolahan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, Pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, kepemudaan , kursus dan lembaga pelatihan. Pendidikan nonformal menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat untuk menjadi wahana belajar yang fleksibel memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan nonformalbidang-bidang yang dikaji sangat lengkap untuk memfasilitasi kebutuhan belajar masyarakat dari usia termuda yang dimulai dari PAUD, remaja dengan adanya program bina keluarga remaja, bidang kepemudaan,

kesetaraan dan keaksaraan bagi masyarakat yang tidak terfasilitasi di jalur persekolahan dan orang tua melalui pendidikan lansia.

Peran strategis Pendidikan nonformal dalam mempersiapkan masyarakat ekonomi ASEAN mengharuskan Pendidikan nonformal memfasilitasi tidak hanya bagi masyarakat marjinal tetapi juga masyarakat menengah ke atas dengan catatan jika kita dapat melihat dan memetakan peluang. Selama ini pendidikan nonformal banyak terbelenggu dalam memberdayakan masyarakat yang tidak beruntung, masyarakat miskin, remaja yang bermasalah, siswa formal yang tidak lulus lalu diserahkan ke pendidikan nonformal seolah-oleh pendidikan nonformal hanya menggarap " masyarakat bermasalah". Padahal di sisi lain masyarakat menengah juga membutuhkan fasilitasi pendidikan nonformal bagaimana "club belajar" banyak berkembang dalam bidang-bidang yang tidak terakomodir dalam mata pelajaran di jalur formal. Club belajar sains, robotic, perkumpulan hobi untuk menyalurkan energy anak remaja agar positif. Kelompok-kelompok belajar ini pada akhirnya membentuk anak yang senang belajar hal-hal atau menanamkan kecintaan " learning ho to learn".

Isu Homeschooling yang banyak berkembang di kota-kota besar yang didorong adanya ketidakpuasan terhadap system pendidikan yang ada (Puji yanti fauziah 2014) memberikan sinyal bahwa pendidikan nonformal dan informal dapat memfasilitasi para orangtua yang menginginkan putra-putrinya untuk berkembang lebih optimal tanpa anak terbelenggu pelbagai macam keterbatasan baik keterbatasan waktu anak, minat anak dan idealism orang tua. Homeschooling memberikan warna baru dalam masyarakat untuk terus bergerak memperbaiki system pendidikan di Indonesia.

MEA sebagai bagian dari proses globalisasi merupakan proses mendunia yang akan menjadi tantangan berat bagi kita karena dengan globalisasi persaingan semakin terbuka tidak hanya menghadapi persaingan dalam skala lokal tetapi lebih berat dan kompleks. Dalam sebuah situs website Wikipedia dijelaskan bahwa *Globalization is the increasing interconnection of people and places as a result of advances in transport, communication, and information technologies that causes political, economic, and cultural convergence*. Globalisasi adalah perkembangan multi hubungan dari manusia dan tempat yang dampaknya menyebabkan adanya persamaan dalam pertumbuhan transportasi, komunikasi, teknologi informasi dan kebudayaan. Semakin kompleks dan ketatnya persaingan dalam era globalisasi dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai gambaran, kualitas sumber daya manusia yang terangkum dalam *human development indeks*, Indonesia pada tahun 2006 naik peringkat ke 108 dibanding pada tahun 2004 yang masih menduduki peringkat ke 111, hal ini semakin mendorong kita untuk bisa meningkatkan kembali HDI menjadi lebih baik. Salah satu komponen

 ISBN 978-602-14314-8-1

yang menjadi unsur penilaian adalah *Life Expectancy, education and Gross Domesic Product* (GDP). Sehingga dalam hal ini peran strategi pendidikan nonformal adalah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Salah satu tujuan MEA adalah mewujudkan masyarakat ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang solid dengan adanya aliran barang, jasa, ketenagakerjaan, serta aliran investasi yang bebas. Dalam hal ini ekonomi menjadi focus MEA, tetapi roda ekonomi akan sulit berjalan jika kita tidak menyiapkan masyarakat yang siap menerima kebebasan dalam berbagai bidang , hal ini tentu saja akan berimbas pada kesiapan masyarakat untuk fleksibel dalam menghadapi perubahan seperti yang diungkapkan rogers bahwa jika kita merekonseptualisasikan pendidikan nonformal menjadi fleksibel learning. Pendidikan nonformal akan menjadi fleksibel dalam hal materi, waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kita bias melihat pelbagai kursus dan pelatihan yangn dapat meningkatkan kualitas pekerja agar memiliki nilai lebih. Kualifikasi pendidikan dapat dipenuhi melalui pendidikan formal tetapi peningkatan kompetensi, kinerja di fasilitasi oleh pendidikan nonformal.

Pekerjaan besar kita adalah proporsi SDM yang tidak proporsional, menurut data dilapangan pekerja dengan pendidikan dasar berjumlah 70%, pendidikan menengah22% dan pendidikan tinggi hanya 7%. Dari data ini kita bias melihat bagaimana salah satu kontribusi PLS adalah melalui program kesetaraan dan keaksaraan agar dapat meningkatkan pendidikan yang mayoritas memiliki pendidikan dasar. Sehingga bagi masyarakat yang sudah bekerja dapat difasilitasi untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengankebutuhannya. Salah satu cara untuk memudahkan level pendidikan bagi msyarakat untuk bersaing adalah melalui kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI membantu bagi masyarakat untuk memetakan posisi kompetensi dan kuaifikasi tidak hanya secara Nasional tetapi tingkat Internasional, hal ini terkait dengan adanya kebijakan dari MEA tentang free of labour atau bebasnya tenaga asing untuk masuk dalam lingkungan ASEAN. Dan untuk mensuport tenaga kerja PLS sangat berperan dalam program-program kursus, sehingga peran Direktorat Kursus, Dikmas menjadi sangat urgent. Tetapi tentu Direktorat tidak bias hanya bekerja tanpa koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi dapat berbentuk kerjasama misalnya dengan Universitas, kementrian tenaga kerja, kementrian social agar terjadi percepatan yang signifikan.

Untuk mensiasati free of services dalam hal layanan, Pendidikan nonformal harusmengembangkan social entrepreneur, entrepreneur dimaknai tidak hanya harus menjual produk yang berwujud barang. Tetapi kita bias membuat terobosan layanan kepada masyarakat .Dalam hal ini tentu saja tawaran-tawaran pendidikan kemasayarakatan akan lebih menarik jika

marketing dan packaging program bagus. Kelembagaan PLS seperti PKBM,SKB, TBM, TK, SPS PAUD tidak bias hanya mengandalkan pada bantuan pada pemerintah, lembaga harus melakukan terobosan-terobosan dalam mencari pendanaan agar lembaga dapat mandiri. Penguatan kelembagaan bisa dilihat dari penguatan pengelola maupun kualifikasi instruktur atau fasilitator Pendidikan nonformal. Rogers mengatakan bahwa proses inovasi dan difusi pada level organisasi berbeda jika dibandingkan pada level individual, Baik tingkat organisasi atau dalam hal ini kelembagaan harus diiringi dengan perubahanpada tingkat individual agar sama-sama terakselerasi untuk menghasilkan tawaran-tawaran program,ide-ide layanan social dan pendidikan yang menarik.

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga penghasil inovasi-inovasi pembelajaran PNF yang sangatproduktif. Tetapi kenyataannya inovasi model-model pembelajaranhanya terbatas pada penulisan laporan dan seminar. Padahal menurut Rogers untuk menyebarkan sebuah inovasi setidaknya diperlukan empat komponen utama yaitu : inovasi, saluran komunikasi, waktu dan system social (Rogers 1971: 11). Perguruan tinggi dalam lingkungan pendidikan nonformal memiliki peran penting karena preguruan tinggi menjadi supplier SDM pendidikan nonformal, dengan adanya MEA diharapkan jurusan PNF di PT dan pelbagai inovasinya dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan. Selain lulusan PT juga banyak menghasilkan inovasi, baik inovasi pembejalaran, inovasi dalam mengintervensi social serta inovasi lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan nonformal.

Dalam hal ini PT menjadi innovator itu sendiri, sehingga langkah selanjutnya adalah mencari saluran komunikasi untuk menyebarkan pelbagai hasil penelitian. Saluran komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media. Dalam hal ini media dapat berupa jurnal, internet atau langsung melakukan komunikasi antara PT dengan lembaga-lembaga nonformal misalnya PKBM, SKB, BPKB, PPAUDNI, BPPAUDNI yang dijadikan lab site kampus. Kegiatan seminar menjadi ajang penting untuk melakukan komunikasi sehingga dalam aktivitas seminar setidaknya universitas memberikan prioritas abagi para praktisi untuk memfasilitasi kehadiran mereka dengan meringankan biaya administrasi atau pendaftaran.

Ikatan akademisi PNF I (IKAPENFI) sebagai organisasi Nasional dapat menjadi saluran komunikasi efektif karena IKAPENFI menaungi seluruh Jurusan PNF se Indonesia, sehingga setelah saluran komunikasi terbangun maka langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi dalam waktu yang berkelanjutan. Semakin sering kita berkomunikasi dalam waktu yang relative intens akan mempermudah dan mengakselerasi jurusan-jurusan yang minim informasi untuk saling menshare ide dan mengembangkan peningkatan kualitas jurusan masing-masing. Menjelang era MEA yang tinggal menghitung hai diharapkan melalui

 ISBN 978-602-14314-8-1

perguruan tinggi terutama IKAPENFI dapat mengakselerasi lembaga-lembaga PNF untuk meningkatkan daya siang dan kualitas kelembagaan dan personal dengan program-program kerjasama yang integrative antara akademisi, praktisi dan juga birokrasi.

Simpulan

Menjelang implementasi MEA Pendidikan nonformal berperan penting dalam mempersiapkan SDM Indonesia melalui jalurnonformal. Peningkatan SDM harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kelembagaan lembaga-lembaga PNF. Dan Perguruan tinggi teruatama jurusan PNF memiliki peran sentral untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan menghasilkan pelbagai inovasi-inovasi pembelajaran, media, dan materi-materi pendidikan nonformal. Dan untuk menyebarkan inovasi tersebut diperlukan saluran komunikasi yang memadai, waktu yang intensif serta satuan system social yang jelas dan focus yang akan kita garap agar dapat berhasil optimal menghasilkan SDM PNF yang kompetitif dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

Daftar Pustaka

Rogers M Everet , (1971) : diffusion of inovasion. Mcmillan publishing New York.

Mudrajad Kuncoro Prof, Ph.D (2015): AEC dan tantangan PT dalam menghasilkn SDM . UGM Yogyakarta

Rudy Suryanto (2015) : Meretas kesiapan SDM menyongsong MEA. UMM.

KEPROFESIONALAN SDM PNF MENGHADAPI MEA

oleh:
Dr. Abednego, M.Pd
Universitas Pattimura-Ambon

A. Latar Belakang

Pasar bebas ASEAN hadir dan beroprasi secara penuh diperkirakan akhir tahun 2015, berbagai persiapan telah dan sementara di persiapkan pemerintah Indonesia. Namun sejumlah pertanyaan kritis dilontarkan para pakar ekonomi dan pengembangan SDM, misalnya siapkah pelaku ekonomi Indonesia menghadapi persaingan di tahun 2015?; apakah tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di antara negara ASEAN lainnya? Adakah persiapan lembaga pendidikan Non-Formal menghadapi MEA? Jawaban pasti tidak sekarang melainkan setelah ada hasil evaluasi pelaksanaan MEA kelak.

Visi dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam ASEAN Vision 2020, yaitu "*untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal yang lebih bebas*".

Tujuan MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, dengan dibentuknya kawasan ekonomi ASEAN 2015 ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN.

Karakteristik utama MEA adalah pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang merata, daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Dalam beberapa hal, Indonesia dinilai belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Namun banyak peluang yang dapat kita lihat dari Ekonomi ASEAN 2015 ini. Dalam kekhawatiran mengenai terhantamnya sektor-sektor usaha dalam negeri kita, jika kita mengingat bagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan China. Kini China mampu menguasi pasar domestik kita yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas Indonesia. Berdasarkan fakta peringkat daya saing Indonesia periode 2012-2013 berada diposisi 50 dari 144 negara, masih berada dibawah Singapura yang diposisi kedua, Malaysia diposisi ke dua puluh lima, Brunei diposisi dua puluh delapan, dan Thailand diposisi tiga puluh delapan. Melihat kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang menjadi faktor rendahnya daya saing Indonesia menurut kajian.

Kementerian Perindustrian RI yaitu kinerja logistik, tarif pajak, suku bunga bank, serta produktivitas tenaga kerja.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik bagi bangsa Indonesia karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya

 ISBN 978-602-14314-8-1

akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia (Republika Online, 2013).

MEA membutuhkan tenaga kerja profesional di bidangnya. Negara makmur seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan lainnya telah lama mempekerjakan orang-orang yang profesional di bidang pekerjaannya dan memberi penghargaan yang tinggi sebagaimana dirintis Tailor 1911 dalam bukunya *Scientific Management* telah berhasil melipatgandakan produktivitas tenaga kerja sebesar seratus kali lipat dan motivasi berprestasi oleh McClelland yang mengatakan apalah gunanya kepakaran dalam bidangnya jika tidak ada dorongan untuk berbuat, karenanya kepakaran dan motivasi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat, penting diterapkan pada negara-negara miskin. Tenaga kerja yang profesional di bidangnya baru direspons negara Indonesia tahun 2013 dengan menerima CPNS melalui test kompetensi.

Peningkatan keahlian dapat dilakukan melalui pendidikan formal, dan pendidikan nonformal. Peran strategis pendidikan nonformal dalam menyongsong MEA dapat direalisasi melalui upaya meningkatkan kualitas layanan dalam mengembangkan *solft skill* dan *hard skill* peserta didik secara profesional. Diharapkan tercipta lulusan sarjana pendidikan nonformal sebagai SDM yang profesional dengan keterampilan yang terlatih memenuhi standard internasional.

B. Telaah Kritis Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Keunggunal Komparatif

1. Pembangunan Ekonomi Indonesia Selama ini

Telaah kritis Sasono (dalam Talaohu, 2013) memberi gambaran dinamika pembangunan ekonomi Indonesia selama ini, telah menghasilkan pertumbuhan tinggi untuk sekelompok kecil orang, kemiskinan untuk banyak orang, dan ketergantungan asing untuk

seluruh masyarakat. Pertumbuhan tinggi yang dinikmati sekelompok kecil orang merupakan ketergantungan yang sangat kental. Di sisi lain, kemiskinan yang diderita banyak orang merupakan produk dari ketergantungan asing, diikuti proses pertukaran yang sama sekali tidak adil dan pencangkokan sistem produk asing, diiringi model hubungan sosial yang menyingkirkan mereka dan sistem produksi yang bertahun-tahun telah mereka lakukan untuk mencari nafkah. Sektor pertambangan, perdagangan, perbankan adalah sektor yang didominasi asing.

Proses tersingkirnya banyak orang dari sektor produksi tersebut diperparah lagi dengan penerapan sistem produksi baru yang tidak pro-buruh. Sistem baru ini merupakan padat modal seperti industri tekstil yang merupakan hasil pengembangan teknologi untuk menggantikan peran buruh. Proses industrialisasi dengan dinamika sistem produksi seperti di negara maju tersebut telah menumbuhkan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan armada besar sektor informal di perkotaan yang tergusur dari pedesaan dan meledaknya jumlah buruh tani dan tani gurem. Proses transformasi tersebut telah mengakibatkan penyerahan secara bulat-bulat penentuan lokasiberbagai sumberdaya pada kekuatan pasar sehingga proses transformasi telah mengakibatkan biaya sosial yang sangat tinggi. Kemiskinan massal yang terjadi, bersamaan dengan peristiwa kepincangan sosial yang ekstrim ini, tidak bisa diatasi dengan bantuan sosial yang sering kali merupakan praktek pameran kedermawanan, sebab akar kemiskinan yang bersifat struktural tidak dikoreksi.

Bangsa Indonesia kini dalam persimpangan jalan untuk menentukan pilihan: apakah kita akan membiarkan situasi yang merendahkan nilai kemanusiaan dan menista kehormatan bangsa, ataukah merintis model pembangunan yang berbasis peran serta rakyat dan pembangunan kembali kehidupan kebangsaan yang beradab dan bermartabat.

Ketidak adilan sosial dan kemiskinan massal yang menyertainya , adalah tantangan dan tugas besar kebangsaan kita untuk mengatasinya. Potensi kemanusiaan dari bangsa dengan penduduk yang besar di negara yang berlimpah sumberdaya alam ini, sesungguhnya adalah dasar kokoh untuk membangun bangsa yang maju, modern dan jaya. Namun itu semua tidak berfungsi dalam situasi kepincangan sosial yang berkelanjutan tanpa koreksi berarti selama ini.

Kita harus membangun kemandirian dan harus percaya bahwa bangsa Indonesia mampu membangun kemandirian. Kita harus bekerja ke arah itu. Kita tidak boleh meneruskan situasi ketergantungan asing yang berkelanjutan. Tanpa kemandirian, posisi bangsa akan lemah dalam dunia yang terbuka dan sarat persaingan. Dengan kemandirian, bangsa Indonesia harus mampu membangun kekuatan disemua bidang dan kita mengatakan tidak kepada kelemahan dan kekuatan asing. Dengan kemandirian, Bangsa Indonesia harus membangun kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa untuk berperan secara

 ISBN 978-602-14314-8-1

terhormat dan dengan demikian kita dapat ikut memberikan sumbangan bagi terwujudnya tata dunia yang damai dan berkeadilan.

2. Keunggulan Komparatif (*comparative advantage*)

Memasuki pasar bebas ASEAN, mekanisme pasar mendorong masing-masing negara di ASEAN bergerak ke arah sektor yang daerahnya memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Keunggulan komparatif dipahami dari variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja (Tarigan, 2014).

Negara Indonesia didapati banyak daerahnya memiliki keunggulan komparatif, antara lain:

1. Pemberian alam, yaitu karena kondisi alam akhirnya wilayah itu memiliki keunggulan untuk menghasilkan suatu produk tertentu, misalnya tanah Papua memiliki keunggulan komparatif tambang emas dan hasil hutan, daerah Maluku memiliki keunggulan komparatif rempah-rempah dan ikan yang melimpah, daerah Sulawesi memiliki keunggulan komparatif komoditi kopra dan kopi, daerah Kalimantan memiliki keunggulan komparatif tambang batubara, begitupun daerah lainnya bahkan hampir semua daerah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif baik komoditi maupun pertambangan
2. Daerah konsentrasi/sentra dari suatu kegiatan sejenis, misalnya produksi sepatu di Cibaduyut
3. Upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah cukup serta didukung oleh keterampilan yang memadai dan mentalitas yang mendukung Masyarakatnya menguasai keterampilan khusus, misalnya ukiran Jepara, ukiran Bali, dan kain Songket
4. *Socio-cultural community* yang mendukung pembangunan, misalnya "*Pela-Gandong" dari Maluku*, "*Sipakatau-Sipakalaqbiq, sipatuo-sipatoqkong*" dari Sulawesi Selatan dan lain sebagainya yang hampir semua daerah di Indonesia memilikinya.
5. Jumlah penduduk terbesar di ASEAN yang pada tahun 2015 diproyeksikan mencapai 255,5 juta jiwa atau sebesar 40,3% dari jumlah penduduk di seluruh ASEAN. Diperkirakan 38 dari 100 penduduk berada dalam usia produktif di Negara-negara ASEAN adalah penduduk Indonesia. Artinya Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi pemasok tenaga kerja terbesar di ASEAN terutama di Negara-negara yang proporsi usia produktifnya kecil, misalnya Singapura dan Thailand.

Dengan didukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, stabilitas ekonomi, sosial dan politik maka Indonesia seperti ini adalah sebuah potensi pasar yang luar biasa.

C. Sasaran dan Bentuk Pendidikan Nonformal Bagi Peserta Didik dalam Menyongsong MEA

Dalam rangka meningkatkan kualitas bagi tenaga kerja produktif usia 25 tahun ke atas atau sekitar 97.090.000 penduduk Indonesia, sebagian terbesar hanya dapat memanfaatkan pendidikan nonformal. Jumlah tenaga kerja produktif tersebut berasal dari tenaga kerja terdidik (professional) maupun tenaga kerja yang belum terampil. Berhadapan dengan persaingan tenaga kerja, maka secara berkesinambungan mereka mengembangkan dirinya melalui pelatihan kerja, termasuk penguasaan bahasa Inggris.

Sasaran tenaga produktif yang membutuhkan pendidikan nonformal berkaitan dengan MEA diantaranya:

a. Tenaga kerja produktif yang masih menganggur dan pengangguran musiman
b. Tenaga kerja produktif yang sudah bekerja baik sebagai petani, nelayan, buruh industri dan pertambangan, pedagang eceran termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL), dan pekerja lainnya
c. Tenaga kerja produktif perempuan

Bentuk-bentuk pendidikan nonformal yang relevan dengan aktivitas perekonomian menyongsong MEA, antara lain:

1. Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) bagi tenaga produktif yang menginginkan kemandirian dalam berusaha. WHO (World Health Organization, 1997) memberikan pengertian bahwa kecakapan hidup adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. WHO mengelompokkan kecakapan hidup kedalam lima kelompok, yaitu :
   a) kecakapan mengenal diri (*self awareness*) atau kecakapan pribadi (*personal skills*),
   b) kecakapan sosial (*social skills*),
   c) kecakapan berpikir (*thinking skills*),
   d) kecakapan akademik (*academic skills*), dan
   e) kecakapan kejuruan (*vokasional skills*).
2. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja bagi pekerja yang bekerja diperusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Pendidikan nonformal yang lebih menekankan pada pengembangan kompetensi yang berkenaan dengan pengembangan kepribadian dan keprofesionalan, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, mampu bekerja mandiri dan mengadakan kemitraan, menguasai pemanfaatan sumber-sumber baru untuk pengembangan kepribadiannya, memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesinya dan mampu meningkatkan diri dalam kinerja profesinya. Kompetensi pendukung adalah kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris dan penguasaan komputer.

 ISBN 978-602-14314-8-1

3. Latihan manajemen perusahaan dan manajemen pemasaran bagi pekerja yang berhubungan dengan perusahaan yang memproduksi barang eksport dan jasa.
4. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan partisipasinya sebagai pelaku ekonomi. Bentuk pendidikan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya sehingga memerlukan pendidikan *life skill*, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dan latihan manajemen perusahaan serta manajemen pemasaran.

Meningkatkan produktivitas tenaga kerja menjadi perhatian sejak dini menjadi kunci sukses kesinambungan kualitas SDM ke depan.

D. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) PNF untuk Mendukung MEA.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bagi PNF untuk mendukung MEA mengacu pada Standar Kompetensi Guru Pemula Lulusan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jenjang S1, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan Dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Tahun 2004. SKL dirangkum dalam lima rumpun kompetensi, yaitu:

1. Penguasaan bidang keilmuan dan keahlian
2. Pengenalan tentang peserta didik
3. Penguasaan pengelolaan satuan pendidikan luar sekolah
4. Penguasaan pembelajaran yang mendidik
5. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan.

Terkait dengan MEA yang mengedepankan faktor *competitive* yang didukung oleh pendidikan nonformal yang memenuhi standar internasional, maka kompetensi keprofesionalan perlu didukung kemampuan analisis kebijakan publik dan manajemen perusahaan dan pemasaran.

E. Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004. *Standard Kompetensi Guru Pemula Lulusan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jenjang S1*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan Dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. Jakarta.

Northcote Parkinson, M.K Rustomji, S.A. Sapre. *Fast Track to Success Series*, diterjemahkan Lyndon Saputra. Binarupa Aksara Publisher, Tangerang 2010.

Robinson Tarigan. 2014. *Ekonomi Regional*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Santoso, W. et.al (2008). Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: *Integrasi ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional*. Jakarta: Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Tammat R. Talaohu. 2013. *Malapetaka Ekonomi Global*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama

DAMPAK IMPLEMENTASI METODE PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH PADA TUTORIAL PROGRAM PAKET B BINAAN PKBM AL ISHLAH JAKARTA TIMUR

oleh:
Dr. Durotul Yatimah, MPd
Universitas Negeri Jakarta

Abstrak. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pemerintah sudah membuat kebijakan melalui system pendidikan nasional dengan membuka tiga jalur pendidikan, pendidikan formal, non formal dan in formal. Masalahnya kesempatan mengikuti pendidikan khususnya pada jalur non formal, kurang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pada pendidikan kesetaraan Paket B di PKBM Al Ishlah, kehadiran warga belajar dalam pembelajaran masih rendah. Pada tahun 2014,dari 15 warga belajar, hanya 8 orang yang aktif, selebihnya hanya datang pada saat ujian program Paket B. Penyebabnya terutama karena pembelajarannya belum berorientasi pada pemecahan masalah yang nyata dihadapi warga belajar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dampak metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah *(Problem Posing)* itu? Metode penelitian dilakukan dengan pra eksperimen dengan pendekatan *One Group Pretest-Posttest Design.*

Hasil penelitian menunjukan penggunaan metode pemecahan masalah telah bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi warga belajar didalam pembelajaran, nilai akademik warga belajar meningkat yakni melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal, dan kemampuan *soft skill* yang sangat menonjol, Dampak metode pemecahan masalah (1) munculnya kesadaran warga belajar terhadap pendidikan, (2) Tumbuh keinginan untuk berpartisipasi aktif,bekerja sama dan bersinergi (3) Tumbuhnya percaya diri bahwa mereka dapat meningkatkan kemampuannya (4) Tumbuhnya orientasi pelayanan. Dampak ini diharapkan dapat memicu semangat warga belajar untuk memotivasi belajar anak-anaknya secara berkelanjutan.

Kendala-kendala pembelajaran Berbasis Masalah (1) pengetahuan dan wawasan Warga belajar terbatas, diskusinya lama karena perbedaan pendapat (2) Adanya warga belajar yang mendominasi diskusi. Tutor harus mengendalikan diskusi, agar warga belajar lain aktif juga mengemukakan pendapat (3) Warga belajar tidak mengetahui jadwal tutorial yang lengkap dengan nama mata pelajaran. Tutor harus melengkapi jadwal itu, setelah berdiskusi dengan tutor lain dan warga belajar tentang waktu yang memungkinkan semuanya dapat hadir.

Faktor pendukung pembelajaran berbasis pemecahan masalah (1) Pimpinan PKBM dan para tutor umumnya berlatar belakang PNF yang seuai dengan tuntutan tugasnya di PKBM (2) Warga belajar umumnya adalah orang dewasa yang memiliki konsep diri dan pengalaman, yang dapat dijadikan bahan pembelajaran (3) Jadwal kegiatan tutorial disusun

 ISBN 978-602-14314-8-1

sesuai waktu yang dimiliki tutor dan warga belajar, sehingga pembelajaran berlangsung kondusif.

Alternatif pengembangannya (1) Para tutor membuat bank soal yang terus disempurnakan materinya juga masalahnya diambil dari lingkungan tempat tinggal warga belajar, agar tutor memiliki beragam soal berkualitas, dalam jumlah yang terus bertambah, dan akhirnya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran (2) Tutor melakukan simulasi atas kasus di lingkungan tempat tinggal warga belajar. Warga belajar ditugaskan mencari solusi dan tutor mengevaluasi daya serap warga belajar terhadap materi dan tingkat kesadaran sosial dan keterampilan sosial warga belajar (3) Tutor bermitra dengan lembaga terkait. Tutor mengarahkan kegiatan dan tugas warga belajar di lokasi dan cara penyusunan laporan. Tutor juga memonitor dan mengevaluasi.

Kesimpulannya dampak pembelajaran berbasis masalah tumbuhnya kesadaran warga belajar terhadap pendidikan, tumbuh keinginan berpartisipasi aktif dan bekerja sama, tumbuh percaya diri,dan tumbuhnya orientasi pelayanan. Dampak ini diharapkan dapat memicu semangat warga belajar untuk memotivasi belajar anak-anaknya secara berkelanjutan.

Kata kunci : metode, pemecahan masalah, warga belajar

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang benar. Hal ini tercantum didalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR). Sehubungan dengan itu,sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin setiap warga negaranya mendapatkan layanan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, didalam UUD 1945 dijelaskna bahwa : salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya ini dilakukan terutama melalui kerja keras dan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting didalam kehidupan setiap orang. Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalama rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai fungsi tersebut, dalam Sistem Pendidikan Nasional terdapat tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang

ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.

Untuk dapat memberikan layanan pembelajaran pada kelompok masyarakat tertentu, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Peserta didiknya berada diluar usia sekolah seperti orang yang sudah putus sekolah bertahun-tahun, sudah bekerja dan sudah berkeluarga. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip *multi exit* dan *multi entry* dan dimaksudkan agar terjadi perluasan kesempatan bagi warga yang membutuhkan pendidikan formal tetapi tidak berkesempatan memperolehnya (Moedzakir : 2010 : 33).

Terbukanya kesempatan memperoleh pendidikan ini belum mampu menarik minat warga masyarakat untuk mengikuti pembelajaran secara intensif. Kebutuhan terhadap pendidikan masih dipandang belum mendesak. Tujuan mereka mengikuti program pendidikan kesetaraan masih berfokus pada perolehan ijazah, dan belum berfokus pada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini berpengaruh pada intensitas mereka dalam mengikuti pembelajaran. Jumlah kehadiran warga belajar dalam pembelajaran juga rendah. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2014, dari 15 warga belajar yang terdaftar, hanya sekitar 8 warga belajar yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, selebihnya hanya datang pada saat ujian program Paket B.

Penyebab munculnya permasalahan di atas, terutama karena materi pelajaran didalam program Paket B masih belum berfokus pada pemecahan masalah yang nyata dihadapi warga belajar. Pemecahan masalah menurut Nakin (2003) dapat dipandang sebagai proses pemerolehan atau pembentukan pengetahuan. Dengan kata lain, warga belajar mempelajari IPS, IPA, atau mata pelajaran lainnya melalui aktivitas pemecahan masalah Dalam hal ini, masalah difungsikan sebagai pemicu bagi warga belajar untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Pembelajaran IPS, IPA, atau mata pelajaran lainnya demikian disebut pembelajaran berbasis masalah *(problem based learning*). Menurut Nakin (2003), adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu (heuristik), yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah, untuk menemukan solusi masalah itu. Upaya pembelajaan yang berorientasi pada pemecahan masalah warga belajar, sangatlah vital peranannya didalam memotivasi semangat belajar warga belajar. Dalam mengatasi kondisi ini,maka diperlukan pendekatan pembelajaran yang berorientasi praktis pada pemecahan masalah warga belajar, dengan

 ISBN 978-602-14314-8-1

mempertimbangkan potensi yang mereka miliki. Pendekatan dalam pembelajaran orang dewasa harus bersifat *student-centered* yang berfokus pada pemecahan masalah warga belajar. *Knowles* (1977:38) mengemukakan bahwa yang penting dalam pembelajaran orang dewasa ialah efek atau dampaknya bagi peserta didik. Selanjutnya *Knowless* (1977:41) mengatakan bahwa tujuan pembelajaran orang dewasa adalah "untuk menjadikan orang dewasa menyadari tentang kesulitan yang dihadapinya didalam tugas dan peranannya serta mampu mengatasinya". Orang Dewasa adalah mereka yang sensitive tentang kesulitan yang dihadapi dan ia berusaha sungguh-sungguh untuk mengatasinya sendiri.

Mc Kenzie menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran orang dewasa adalah menjadikan seseorang mampu mengatasi kondisi yang sulit pada masyarakat modern, juga mampu memberi semangat pada peserta didik untuk berkembang lebih maju. Karena itu ia yakin perlu adanya pro aktif memfasilitasi pengembangan individu, menjadikan individu mampu mengarahkan dirinya sendiri yang menjadi tanggung jawabnya untuk lebih memungkinkan terciptanya eksistensi dirinya sebagai manusia.

Pencapaian layanan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada penyelesaian masalah warga belajar, ditentukan oleh berbagai faktor. Didalam PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan yang berkualitas itu harus memenuhi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian. Standar proses pembelajaran merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang dinilai paling berperan terhadap pencapaian mutu pendidikan. Proses pembelajaran yang memenuhi standar itu, menuntut kemampuan pendidik untuk dapat memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, wawasan yang luas dan mendalam, penalaran yang kuat, serta kemauan untuk terus mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kemajuan IPTEKS. Sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan luar sekolah, yaitu *lifelong learning*, *lifelong education*, *learning by doing,* dan lain-lain.

Dengan metode pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah *(Problem Posing)*, diharapkan partisipasi warga belajar dapat meningkat, karena masalah yang dibahas adalah masalah riil yang dialami warga belajar dan terjadi disekitar kehidupan mereka.

2. Permasalahan

Penelitian ini membahas permasalahan tentang "Bagaimana dampak implementasi metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah *(Problem Posing)* itu"?

3. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka ruang lingkup penelitian ini mencakup pada masalah dampak implementasi metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah *(Problem Posing)* pada tutorial di PKBM Al Ishlah Jakarta Pusat.

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Peningkatan Partisipasi Warga Belajar Setelah Penggunaan Metode Pemecahan Masalah.
2. Peningkatan Akademik Warga Belajar Setelah Penggunaan Metode Pemecahan Masalah.
3. Peningkatan Soft skill Warga Belajar Setelah Penggunaan Metode Pemecahan Masalah.
4. Dampak Pelaksanaan Penggunaan Metode Pemecahan Masalah.
5. Kendala-kendala Dalam Penggunaan Metode Pemecahan Masalah
6. Faktor Pendukung Penggunaan Metode Pemecahan Masalah.
7. Alternatif Pengembangan Penggunaan Metode Pemecahan Masalah.

B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Konsep Metode Pemecahan Masalah *(Problem Possing)*

Proses pembelajaran perlu diorientasikan pada pemecahan masalah agar warga belajar semangat mengikuti pembelajaran. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah perlu dikuasai warga belajar, agar mereka memiliki bekal yang kuat dalam menghadapi masalah nyata didalam kehidupannya. Menurut Nakin (2003), pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu (heuristik), yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah, untuk menemukan solusi masalah itu. Upaya pembelajaan yang berorientasi pada pemecahan masalah warga belajar, sangatlah vital peranannya didalam memotivasi semangat belajar warga belajar.

Banyak ahli pendidikan telah merekomendasikan berbagai cara atau strategi peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada warga belajar. Salah satu cara atau strategi untuk melatih kemampuan warga belajar didalam memecahkan masalah yang dihadapinya didalam kehidupan adalah metode *problem posing.* Diperolehnya solusi atas suatu masalah menjadi syarat bagi proses pemecahan masalah yang dikatakan berhasil. Namun demikian, terciptanya solusi atas suatu masalah menurut Brownell bukan berarti petanda keberhasilan metode tersebut. Brownell (Mc Intosh et al, 2000) menyatakan bahwa suatu masalah belum dikatakan telah diselesaikan hanya karena telah diperolehnya solusi dari masalah itu. Menurutnya, suatu masalah baru benar-benar dikatakan telah diselesaikan apabila warga belajar telah memahami apa yang ia kerjakan, yakni memahami proses

 ISBN 978-602-14314-8-1

pemecahan masalah dan mengetahui mengapa solusi yang telah diperoleh tersebut harus dibuat.

2. Perbedaan Metode Problem Possing dengan Metode Konvensional

Ada beberapa perbedaan yang terdapat pada pembelajaran berbasis pemecahan masalah apabila di bandingkan dengan pembelajaran konvensional. Beberapa perbedaan itu adalah :

Pendekatan Konvensional (Program Berdasarkan Buku)	Pendekatan Problem Possing (Program Berdasarkan Masalah dan Potensi Warga Belajar)
1. Tutor dianggap memiliki semua pengetahuan yang penting dan merupakan sumber segala informasi.	1. Tutor menyediakan : kerangka pikir" yang membantu warga belajar memikirkan dan mendiskusikan berbagai masalah dan potensi pemecahannya.
2. Warga belajar " botol kosong" yang perlu diisi.	2. Warga belajar dianggap sudah memiliki pengalaman, informasi cita-cita harapan, potensi untuk berkembang.
3. Interaksi satu arah : Tutor berbicara dan memberikan cara prakteknya dan warga belajar mendengarkan dan mengikutinya.	3. Interaksi multi arah : Salah satu Warga belajar sebagai Tutor sebaya untuk memberikan ketrampilan dengan cara menyampaikan dengan bahan praktek langsung dan diikuti oleh warga belajar lainny
4.Kurikulum sudah terbentuk paket yang harus diselesaikan dalam priode tertentu	4. Kurikulum digali dari warga belajar dalam arti memberdayakan warga belajar dimana mereka diminta sebagai tutor sebaya dalam merencanakan suatu kegiatan ketrampilan.
5.Praktek pembelajaran Usaha mandiri sudah dirancang dari pusat untuk didistribusikan.	5. Praktek Ketrampilan pembelajaran usaha mandiri dirancang berdasarkan masalah dan potensi serta kebutuhan warga belajar.
6 . Warga belajar bersifat pasif hanya meneriman ketrampilan dari tutornya.	6. Warga belajar bersifat aktif semua warga belajar keaksaraan usaha mandiri terlibat langsung dalam membentuk usaha produktif

3. Langkah-langkah Penerapan Metode Pemecahan Masalah

Penerapan metode pembelajaran pemecahan masalah ini mengacu pada pendapat Ahli. Polya (1973) memberikan heuristik atau langkah-langkah umum pemecahan masalah, yaitu (1) memahami soal atau masalah, (2) membuat suatu rencana, (3) melaksanakan rencana itu, dan

(4) menelaah kembali. Menurut Nakin (2003), pemecahan masalah dapat pula dipandang sebagai proses pemerolehan atau pembentukan pengetahuan. Dengan kata lain, pembelajaran yang menggunakan metode pemecahan masalah, akan menghasilkan pengetahuan dan skill yang menjadi bekal warga belajar dalam menghadapi permasalahan hidupnya sehari-hari.

Apabila dirinci, langkah penerapan metode pemecahan masalah itu adalah sebagai berikut :

Perencanaan ⬇	❖ Identifikasi Masalah ❖ Memilih strategi pembelajaran partisipatif ❖ Memilih metode Pemecahan masalah
Pelaksanaan ⬇	❖ Merumuskan tujuan pembelajaran ❖ Studi kasus ❖ Brainstorming ❖ Bermain peran ❖ Refleksi proses pembelajaran ❖ Evaluasi ❖ Penugasan
Evaluasi ⬇	❖ Evaluasi terhadap metode pemecahan masalah ❖ Menginventarisir kendala dalam penerapan metode ❖ Mencari solusi atas kendala yang muncul ❖ Menginventarisir keunggulan
Rekomendasi ⬇	❖ Menyusun rekomendasi operasional
Follow Up	❖ Memantau terus menerus untuk perbaikan perencanaan berikutnya

4. Hakikat Pendidikan Orang Dewasa

Menurut Robert D. Boyd, orang dewasa adalah pribadi yang matang dan independen, dan telah mengalami beberapa tahapan proses psikologis yang berbeda dari psikologis anak-anak.[1] Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa aspek-aspek pendekatan terhadap orang dewasa sangat berbeda dengan pendekatan terhadap anak-anak, terutama terkait dengan lingkup pendidikan. Mereka lebih merasa dihargai bila pendidikan yang diikutinya mengacu pada pemecahan masalah, bertukar informasi, dan tidak terkesan mengurui. Orang dewasa cenderung memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi.[2]

[1] Hervy Hosfiar, *Naskah BP3LS Metodologi Belajar Orang Dewasa,* (Jakarta: BP3LS, 2008), h. 2.

[2] *Ibid.*, h. 3.

 ISBN 978-602-14314-8-1

Menurut Knowless (1977:35) ada 5 asumsi dasar yang menjadi karakteristik orang dewasa. Kelima asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut : (1) Konsep diri. Orang dewasa menyadari betul bahwa ia dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri. (2) Pengalaman. Pada diri orang dewasa, hampir seluruh perjalanan hidupnya adalah pengalaman yang dapat diungkapkan kembali serta sangat mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku sehari-hari. (3) Kesiapan Belajar. Orang dewasa umumnya sudah siap untuk belajar, baik fisik maupun mental, karena apa yang akan dipelajari adalah apa yang menjadi kebutuhannya. (4) Orientasi Belajar. Orang dewasa belajar untuk memecahkan berbagai persoalan hidup yang tengah dihadapi dan yang akan dihadapi. (5) Motivasi belajar dari dalam sangat dominan (*internal motivation is strongerst).* Orang dewasa beiajar terutama didominasi oleh faktor-faktor internal, mereka meyakini apa yang akan dilakukan dan apa pula manfaatnta, adapun faktor dari luar tidak begitu berpengaruh.

Kualitas penyelenggaraaan layanan pendidikan nonformal yang berbasis masalah itu diantaranya sangat ditentukan oleh standar pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK-PNF). Pembelajaran Program Paket B yang berbasis pemecahan masalah, akan menuntut pendidik untuk dapat mengelola pembelajaran yang bersifat penemuan dan pemecahan masalah nyata pada kehidupan mereka saat ini. Arah pencapaiannya adalah pemecahan masalah agar mendapatkan situasi yang lebih baik. yang sengaja diciptakan, sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat ini. Makna pembelajaran dengan pendekatan andragogi yang berbasis pemecahan masalah mengandung arti "memecahkan masalah hari ini" sehingga warga belajar orang dewasa memiliki semangat yang tinggi untuk terlibat dan berpartisipasi aktif didalam pembelajaran

5. Kemampuan *Soft skill*

Penguasaan keterampilan tertentu akan sangat berpengaruh pada tingkat kesuksesan seseorang. Dengan keterampilan yang dimilikinya, seseorang dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya. *Soft skill* merupakan keterampilan diluar keterampilan teknis dan akademis. Soft skill merupakan keterampilan intra personal dan inter personal. Keterampilan intra personal mencakup kesadaran diri (kepercayaan diri, penilaian diri, sifat dan preferensi, serta kesadaran emosi) dan keterampilan diri (peningkatan diri, pengendalian diri, manajemen sumber daya, dan pro aktif). Adapun keterampilan inter personal mencakup kesadaran sosial (kesadaran politik, memanfaatkan keragaman, berorientasi pelayanan)

dan keterampilan sosial (kepemimpinan, pengaruh, komunikasi, kooperatif, kerja sama tim, dan sinergi).

Banyak ahli percaya, bahwa kesuksesan hidup setiap orang, tidak hanya karena memiliki kemampuan *hard skill,* melainkan juga karena kemampuan *soft skill*. Fakta menyatakan bahwa modal utama sukses dalam lapangan pekerjaan yakni, 20% untuk kompetensi akademik *(teknis, hard skill),* dan 80% untuk kompetensi non akdemik *(softskill).*

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode, Lokasi, Waktu dan Subjek dan Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian pra eksperimen dengan pendekatan *One Group Pretest-Posttest Design*. Metode ini digunakan karena hasil dari penelitian dapat langsung dibandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Peneliti menggunakan metode penelitian pra eksperimen dengan pendekatan *One Group Pretest-Posttest Design*. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa hasil dari penelitian dapat diketahui secara akurat, karena dapat langsung dibandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Warga belajar sebelum diberi perlakuan, subyeknya diamati, dan sesudah perlakuan subyek itu diamati lagi untuk mengetahui akibat perlakuan pada warga belajar. Invaliditas internal bersumber terutama pada *maturation, testing dan instrumentation*. Untuk mengurangi ancaman validitas itu dilakukan pengontrolan.

Lokasi penelitian di PKBM Al Ishlah Jakarta Pusat. Waktu penelitian dari Nopember 2014 sampe dengan Maret 2015. Subjek Penelitian ini dilakukan terhadap ruror dan warga belajar. Sampel penelitian ini teknik sampel purposif, yakni menetapkan PKBM Al Ishlah untuk diperlakukan sebagai kelompok subjek penelitian eksperimental. Penetapan satu subjek penelitian itu terutama dengan pertimbangan (l) kesediaan bekerjasama dalam penelitian, dan (2) keterjangkauan.

2. Teknik Instrumen Pengumpulan data

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti, salah satu tujuan dibuatnya instrumen adalah untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang ingin dikaji dalam penelitian.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan bersamaan dengan dan atau setelah pengumpulan data melalui pengorganiasasian data, Pengolahan data dilakukan dengan memilah dan mengelompokan data

 ISBN 978-602-14314-8-1

berdasarkan klasifikasi data. Mencatat kata-kata dan ungkapan dan menelusuri data guna menampilkan pola, tema, atau topik yang mencakup data inilah yang dimaksudkan sebagai kategori koding (Bogdan dan Biklen, l982 : l56).

Untuk mengetahui efektivitas penerapan *problem possing* pada penelitian eksperimental ini, analisis data dilakukan melalui teknik uji beda rerata melalui uji t. Untuk mengetahui sejauhmana data yang dikumpulkan memenuhi asumsi statistik yang diperlukan untuk suatu uji statistik digunakan beberapa teknik uji asumsi. Asumsi statistik yang diuji adalah normalitas distribusi dan homoginitas varian. Disamping itu, untuk kepentingan pengembangan instrumen telah digunakan teknik korelasi Product Moment dan Alpha Cronbach. Teknik-teknik uji statistik itu digunakan untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas instrumen secara memadai. Untuk mengerjakan analisis statistik yang diperlukan dimanfaatkan komputer melalui program SPSS/PC + for DOS versi 4.00.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Partisipasi Warga Belajar dalam Pembelajaran Setelah Menggunakan Metode Pemecahan Masalah

Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan keaktifan warga belajar didalam kegiatan pembelajaran. Sebelum diterapkan metode pemecahan masalah, warga belajar umumnya kurang aktif dalam proses pembelajaran. Melalui metode pemecahan masalah ini, warga belajar, mampu berpartisipasi dalam mengembangkan–materi pembelajaran, sehingga tumbuh tanggung jawab dan rasa memilikinya terhadap proses pembelajaran. Antara tutor dan warga belajar terjadi interakasi belajar multi arah, saling berbagi pengalaman,sehingga potensi tutor dan warga belajar sama-sama berkembang dan akhirnya masing-masing memiliki kemandirian.

2. Peningkatan Akademik Warga Belajar Setelah Menggunakan Metode Pemecahan Masalah

Nilai akademik warga belajar juga mengalami peningkatan. Peningkatannya tidak terlalu signifikan,tetapi hasil pembelajaran setelah menggunaka metode pemecahan masalah cukup baik yakni melampaui batas KKM.

3. Peningkatan Soft Skill Warga Belajar Setelah Menggunakan Metode Pemecahan Masalah

Pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah pada penelitian ini, mampu menjadikan warga belajar meningkatkan kemampuan *soft skill*nya. Kemampuan *soft skill* yang paling menonjol pada warga belajar Paket B di PKBM Al- Ishlah adalah sebagai berikut :

Jenis Keterampilan	Sebelum Pembelajaran	Sesudah Pembelajaran dengan metode Pemecahan masalah
Intra personal		
a. Kesadaran diri	Kepercayaan diri rendah, merasa tidak memiliki kemampuan	Mulai muncul percaya diri karena adanya peningkatan kemampuan
	Emosi kurang terkendali	Emosi secara bertahap mulai terkendali
b. Keterampilan diri	Pro aktif rendah, tidak partisipatif	Mulai muncul pro aktif dan inisiatif pada pembelajaran
	Upaya meningkatkan diri rendah	Mulai menyadari pentingnya peningkatan diri
Inter Personal		
Kesadaran sosial	orientasi pelayanan rendah, karena merasa tidak mampu	orientasi pelayanan mulai tumbuh.
Keterampilan sosial	Komunikasi rendah, merasa tidak tahu apa yang harus dikomunikasikan	Mulai muncul kemauan untuk berkomunikasi dengan orang lain
	Kooperatif rendah, tidak meyakini ada manfaatnya	Dapat terlibat / kooperatif dalam kegiatan
	kerja sama tim rendah, merasa tak mampu	Muncul keinginan dan tindakan untuk bekerja sama dengan pihak lain.

Secara rinci, warga belajar mulai meningkat kemampuannya,mereka sudah dapat (1) menemukan masalah yang nyata dihadapi mereka (2) mampu membuat pertanyaa inti atas masalah tersebut (3) semangat untuk memikirkan solusi atas masalah tersebut (4) menganalisis atas masalah yang ada (5) mulai dapat memanfaatkan potensi mereka.

4. Dampak Pelaksanaan Pembelajaran Setelah Menggunakan Metode Pemecahan Masalah

Beberapa hal positif yang muncul akibat dari adanya pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah, adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran individu maupun kesadaran kolektif, mulai mucul di lingkungan masyarakat, khususnya pada warga belajar terhadap manfaat pendidikan. Melalui tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan ini, diharapkan akan menjadi pemicu kesadaran warga belajar untuk memotivasi anak-anaknya

 ISBN 978-602-14314-8-1

untuk menempuh pendidikan dengan baik.

2. Mulai tumbuh orientasi pelayanan pada warga belajar, dalam arti bahwa mereka akan memberikan layanan atau mendukung semua anak-anaknya untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang baik.
3. Mulai tumbuh keinginan untuk berpartisipasi aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan warga masyarakat lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas.
4. Mulai tumbuh rasa percaya diri dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri secara berkelanjutan, karena mereka meyakini pentingnya pembelajaran bagi kpeningkatan kehidupan mereka.

5. Kendala-kendala Dalam Pembelajaran dengan Metode Berbasis Masalah

Ada beberapa kendala yang muncul didalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode berbasis masalah. Beberapa kendala itu adalah sebagai berikut :

1. Warga belajar pengetahuan dan wawasannya terbatas, sehingga proses pelaksanaan diskusinya memakan waktu yang lama, karena terjadi perdebatan dan ketidaksesuaian pendapat diantara mereka. Dalam kondisi seperti ini, maka pendidik/tutor bertindak sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan diskusi tersebut.
2. Sebagian besar warga belajar terlibat didalam diskusi tersebut, namun demikian ada beberapa warga belajar yang sangat dominan untuk mengendalikan diskusi tersebut. Pada kondisi ini pendidik/tutor bertindak sebagai fasilitator yang bertindak demokratis, mengarahkan diskusi dan memberi kesempatan pada warga belajar lain untuk berlatih mengemukakan pendapat dan aktif didalam proses pembelajaran tersebut.
3. Warga belajar tidak mengetahui jadwal yang lengkap,yang berisi hari, jam pertemuan dan mata pelajarannya. Selama ini hanya disebutkan hari dan jam pertemuan saja. Pendidik/tutor selanjutnya berdiskusi dengan warga belajar untuk melengkapi jadwal tutorial tersebut.

6. Faktor Pendukung Penggunaan Metode Pemecahan Masalah

Ada beberapa faktor pendukung didalam pembelajaran berbasis pemecahan masalah pada program Paket B di PKBM Al Ishlah ini. Beberapa faktor pendukung itu diantaranya adalah :

1. Aspek sumber daya manusia, yaitu Pimpinan/Direktur PKBM mempunyai latar belakang pendidikan yang seuai dengan tuntutan tugasnya di PKBM, yaitu lulusan S1 bidang

pendidikan non formal dan S1 bidang pendidikan agama/tarbiyah, serta S2 bidang manajemen pendidikan. Pimpinan PKBM ini juga sudah mempunyai pengalaman cukup lama yaitu sekitar 15 tahunan. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman ini, pimpinan PKBM dapat mengetahui seluruh potensi dan tantangan serta peluang-peluang,termasuk kebijakan-kebijakan yang terkait dengan seluruh warga belajar dan lembaga yang dipimpinnya.

2. Aspek sumber daya manusia lainnya, yaitu sebagian besar tutor di PKBM Al Ishlah mempunyai latar belakang pendidikan yang seuai dengan tuntutan tugasnya di PKBM, yaitu lulusan S1 bidang pendidikan non formal. Dengan demikian,tutor memiliki konsep dan sekaligus memahami realitanya tentang lembaga pendidikan non formal termasuk seluruh programnya,budaya lembaga tersebut,peluang dan tantangan serta potensi-potensi yang mungkin dapat didayagunakan untuk memberdayakan seluruh masyarakat disekelilingnya, khussunya warga belajar yang terlibat didalamnya.
3. Warga belajar program Paket B umumnya adalah orang dewasa yang telah memiliki konsep diri dan pengalaman hidup. Dengan bekal konsep diri dan pengalaman hidup ini, menjadi peluang positip bagi pimpinan dan seluruh tutor untuk memfokuskan pembelajaran dengan basis pemecahan masalah,sehingga warga belajar akan lebih termotivasi untuk aktif didalam pembelajaran.
4. Jadwal kegiatan tutorial disusun sesuai waktu yang dimiliki tutor dan warga belajar, yakni sore hari sebanyak 2 kali dalam seminggu. Akhirnya seluruh warga PKBM dapat menunaikan seluruh tugas dan peran utamanya dan pembelajaran di PKBM berlangsung secara kondusif.

7. Alternatif Pengembangan Pembelajaran berbasis Pemecahan Masalah

Proses pembelajaran dengan metode pemecahan masalah terus diupayakan untuk disempurnakan. Beberapa hal yang dilakukan tutor diantaranya adalah :

1. Para tutor membuat bank soal dari berbagai soal mata-mata pelajaran yang menggunakan metode pemecahan masalah pada program Paket B. Berbagai soal dari mata-mata pelajaran itu oleh para tutor itu terus disempurnakan terutama agar *contentnya* berasal dari peristiwa yang terjadi disekitar tempat tinggal warga belajar, sehingga warga belajar akan meningkat semangat dan

 ISBN 978-602-14314-8-1

partisipasinya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dengan demikian, para tutor dapat memiliki beragam soal dan jumlah soal yang terus bertambah dan terus diperbaiki kualitas contentnya, sehingga mempermudah pelaksanaan pembelajaran yang berbasis metode pemecahan masalah. Hal ini relevan dengan konsep PNF yaitu *lifelong learning,*

2. Para tutor berupaya melakukan simulasi atas kasus yang terjadi di lingkungan PKBM dan atau di lingkungan tempat tinggal warga belajar. Dalam simulasi tersebut warga belajar diminta untuk melakukan pemecahan masalah. Kondisi ini akan meningkatkan kreativitas dan keakfian warga belajar dan akan memudahkan tutor untuk mengevaluasi seberapa tinggi daya serap warga belajar atas materi yang disampaikan, sekaligus dapat melihat bagaimana kesadaran social dan keterampilan sosial warga belajar dalam menghadapi permasalahan di lingkungannya. Hal ini sejalan dengan konsep PNF yaitu *learning by doing*.
3. Para tutor dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga dilingkungan PKBM yang terkait dengan materi/content pembelajaran, misalnya Koperasi, bank, museum, pasar, dan lain-lain. Sebelum berangkat ke lokasi, tutor sudah menyiapkan gambaran umum kegiatan di lokasi yang akan dikunjungi, dan tugas yang harus dillakukan warga belajar di tempat tersebut serta tata cara menyusun laporan atas kunjungan tersebut. Pada saat sampai di tempat yang dituju, warga belajar dimonitor bagaimana aktivitas belajar mereka, dan juga mengevaluasi laporan kunjungan yang dibuat warga belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara: *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarso sung tulodo*.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan bahwa penggunaan metode pemecahan masalah dapat menumbuhkan hal-hal positif sebagai berikut :

a. Meningkatnya partisipasi warga belajar didalam proses pembelajaran.
b. Nilai akademik warga belajar juga mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi hasil pembelajaran dengan metode pemecahan masalah ini mampu melampaui batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

c. Kemampuan *soft skill* yang paling menonjol pada warga belajar adalah sebagai berikut :
   (1) mampu menemukan masalah yang nyata dihadapi mereka.
   (2) mampu membuat pertanyaa inti atas masalah tersebut.
   (3) semangat untuk memikirkan solusi atas masalah tersebut.
   (4) menganalisis atas masalah yang ada.
   (5) mulai dapat memanfaatkan potensi mereka.

d. Dampak penggunaan metode pemecahan masalah adalah sebagai berikut :
   1. Munculnya kesadaran warga belajar terhadap pendidikan, hal ini diharapkan dapat menjadi pemicu kesadaran mereka untuk memotivasi anak-anaknya menempuh pendidikan dengan baik.
   2. Tumbuhnya orientasi pelayanan, diharapkan dapat memicu munculnya semangat memberikan layanan terbaik pada anak-anaknya untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang baik.
   3. Tumbuh keinginan untuk berpartisipasi aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
   4. Tumbuhnya percaya diri bahwa mereka dapat meningkatkan kemampuanyai, hal ini diharapkan dapat memotivasi mereka untukterus belajar secara berkelanjutan.

e. Kendala-kendala Dalam Pembelajaran dengan Metode Berbasis Masalah :
   1. Warga belajar pengetahuan dan wawasannya terbatas, sehingga diskusinya cukup lama, karena terjadi ketidaksesuaian pendapat diantara mereka.
   2. Sebagian besar warga belajar terlibat didalam diskusi, tapi ada beberapa yang sangat dominan. Tutor harus mengarahkan diskusi dan memberi kesempatan pada warga belajar lain untuk mengemukakan pendapanya.
   3. Warga belajar tidak mengetahui jadwal tutorial yang lengkap, maka tutor harus menyusun jadwal yang lengkap, setelah berdiskusi mengenai waktu yang memungkinkan para tutor dan warga belajar dapat hadir pada rtutorial tersebut.

f. Beberapa faktor pendukung didalam pembelajaran berbasis pemecahan masalah yaitu :

 ISBN 978-602-14314-8-1

1. Aspek sumber daya manusia, yaitu Pimpinan PKBM dan para tutor yang umumnya mempunyai latar belakang pendidikan yang seuai dengan tuntutan tugasnya di PKBM.
2. Warga belajar umumnya adalah orang dewasa yang telah memiliki konsep diri dan pengalaman. Konsep diri dan pengalaman itu dapat diangkat sebagai bahan pembelajaran dengan metode pembelajaran ber basis pemecahan masalah.
3. Jadwal kegiatan tutorial disusun sesuai dengan waktu yang dimiliki tutor dan warga belajar, yakni sore hari sebanyak 2 kali dalam seminggu.Akhirnya seluruh warga PKBM dapat menunaikan seluruh tugas dan peran utamanya dan pembelajaran di PKBM berlangsung secara kondusif.

g. Alternatif pengembangan metode pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Para tutor membuat bank soal. Semua soal itu oleh tutor terus disempurnakan materinya, dan lokasi kejadian disarankan disekitar tempat tinggal warga belajar. Hal ini penting, agar tutor memiliki beragam soal yang berkualitas,dalam jumlah yang terus bertambah, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. Para tutor melakukan simulasi atas kasus di lingkungan tempat tinggal warga belajar. Warga belajar ditugaskan mencari solusi atas masalah dan tutor mengevaluasi daya serap warga belajar terhadap materi dan tingkat kesadaran sosial dan keterampilan sosial warga belajar dalam menghadapi permasalahan.
3. Para tutor bekerja sama dengan lembaga dilingkungan PKBM. Sebelum berangkat, tutor memberikan arahan gambaran umum kegiatan dan tugas di lokasi serta cara penyusunan laporan. Setelah di lokasi, warga belajar dimonitor dan dievaluasi aktivitasnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Apps, Jerold W., (1979) *Problems in Continuing Education,*New York, Mc Graw Hill,Inc.

Basleman, Anisah, (2008) *Cara Belajar Orang Dewasa*, Jakarta: FIP Press.

Brown, S., & Walter, M. I. (1990). *The Art of Problem Posing.* Philadelphia, PA:Franklin Institute Press.

Cankoy, O & Darbaz, S. (2010). *Effect Problem Possing Based on Problem Solving Instruction on Understanding.*

D.Sudjana, (2010), *Pendidikan Luar Sekolah, Sejarah Perkembangan*

Falsafah dan Teori Pendukung, Asas, Bandung: Falah Production.

Hamalik, Oemar. (2007). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Rosda Karya.

Jalil, A,. (2005). *Pembelajaran dengan Pendekatan Problem Posing untuk Meningkatkan Hasil Belajar. Siswa SMP pada Konsep Sistem Hormon*. ***Jurnal Penelitian Kependidikan***. Nomor (2). 48-71.

Knowles, Malcolm Sherperd (1977) *The Adult Learner;The Definitive Classic in Adult Education and Human Resources Development ad* London.

Nakin, J. B. N. (2003). *Ceativity and Divergent Thinking in Geometry Education*. Disertasi University of South Africa. [Online]. Tersedia: http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/ available/etd-04292005-151805/unrestricted/00thesis.pdf. [7Januari 2008].

Nasution, S. (2009) *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif Dalam pendidikan Luar Sekolah,* Bandung Nusantara Press.

Sanjaya, W. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Subijanto, *et.al. (2009). Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Depdiknas.

 ISBN 978-602-14314-8-1

MENCARI MODEL PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI YANG IDEAL GUNA MEMPERSIAPKAN SDM HANDAL INDONESIA DALAM MERAIH SUKSES DI ERA KOMPETESI GLOBALISASI

oleh:
DR. Drs. Muhammad Ilham Abdullah, M.Pd.
(Dosen PLS – FKIP Universitas Bengkulu)

Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tujuan utama kehidupan manusia berdimensi jauh ke depan menembus dan melampaui batas kehidupan keduniawian. Tujuan kehidupan dalam Islam bukan hanya sekedar mencapai kesejahteraan dunia belaka atau sekedar untuk memenangkan kehidupan era globalisasi yang sering menjadi momok menakutkan. Sebab kalau hanya sebatas itu, maka kalau kesejahteraan dunia sudah dicapai dan era globalisasi dapat dimenangkan, lalu bagaimana dengan nasib kehidupan kita selanjutnya setelah dunia ini? Sudahkah kita melakukan persiapan matang untuk antisipasi ke arah itu. Sebab setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan babak lain yang lebih luas, lebih abadi. Menurut hemat penulis bahwa dunia hanya sebagai wadah training kehidupan dalam rangka menghadapi kehidupan sebenarnya di alam keabadian nanti. Jadi tujuan kehidupan menurut Islam adalah pengabdian kepada Al-halliq Allah SWT. dengan mentaati segala aturan dan menjauhi segala larangan-Nya. Ini konsukuensi yang sangat logis, karena kita dalam posisi sebagai mahluk yang diciptakan, bukan lahir dengan sendirinya, seyogyanya harus tunduk dan patuh kepadaNya. Semua ciptaan-Nya di dunia ini termasuk manusia mau atau tidak mau harus sujud kepadanya sebagai pencipta (Q.S. Al-Haj:19). Manusia yang mencoba tidak mau mengkuti aturanNya atau mengabaikan sunnatullah maka tunggu peringatan-Nya dan kehancurannya (Q.S. Attaubah:24).

*Karena manusia sebagai khalifah untuk mengabdi kepadaNya maka tentu dituntut agar dapat beramal ibadah sebanyak-banyaknya dengan cara meningkatkan kualitas iman dan taqwa (IMTAQ) belajar dan bekerja keras agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terampil, berdedikasi tinggi, sehat jasmani dan rokhani peka terhadap tuntutan dan mengatasi tantangan hidup sehingga dapat mensejahterakan diri dan orang lain. Bukti manusia sebagai diutus sebagai khalifah, Al-Haliq telah membekalinya kecerdasan sehingga dapat mengembangkan IPTEK yang terbukti bisa membantu meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup manusia, seperti ditegaskan Habibie dalam seminar Internasional tanggal 3 Agustus 1994 di Bandung bahwa "…*science and technology development has provided abundant asistance in fulfilling the quality and welfare of human beings in the world." *Sisi lain dari kemajuan IPTEK terutama di bidang komunikasi,*

 ISBN 978-602-14314-8-1

informasi dan transportasi ternyata membawa dampak yang menjadikan dunia semakin sempit dan transparan, hubungan perdagangan antara bangsa juga semakin dekat menuju ke perdagangan bebas dunia, baik secara regional, nasional maupun internasional.

Kemajuan IPTEK dan globalisasi pada hakekatnya membawa rahmat. Dikatakan demikian karena dengan gelombang era penuh kompetisi itu membuat kita terpacu, termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas IMTAQ dan IPTEK agar kita dalam upaya memperoleh manfaat tetap terkendali dan tidak terlindas, terkubur atau terseret kehidupan era kesejagadan dengan segala pengaruhnya. Djojonegoro (1995) juga menegaskan bahwa tidak ada alternatif lain bagi bangsa Indonesia kecuali keharusan memiliki kemampuan prima untuk mempersiapkan manusia karya, unggul dalam menguasai, memanfaatkan serta mengembangkan IPTEK. Gagasan ini memang strategis karena dengan meningkatkan IPTEK akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Adiwikarta (1988) meyakini benar adanya hubungan yang ajeg antara derajat kualitas pendidikan SDM dengan tingkat pertumbuhan perekonomian. Semakin baik dan tinggi tingkat kualitas pendidikan, maka semakin tinggi/ baik pula derajat kehidupan ekonomi. Kemudian pada gilirannya dengan ekonomi yang baik juga akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Bagaimana kondisi ekonomi dan kualitas pendidikan SDM kita di Indonesia? Jawabannya adalah belum memenuhi harapan dan tertinggal dari negara-negara lain. Meski telah banyak dana yang dikeluarkan untuk pembangunan; sumber daya alam di mana-mana telah dikuras dan hutang luar negari dalam jumlah besar yang tidak pernah lunas untuk membiayai proyek pembangunan SDM dan perekonomian secara simultan; upaya meningkatkan kualitas pendidikan telah banyak dilakukan; tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk proyek-proyek penataran P4 misalnya yang tujuannya mewujudkan SDM Indonesia Pancasilais, namun hasilnya dari sisi moral, masih sangat menyedihkan, terbukti negara kita bertahta di level teratas (nomor satu) di Asia dan urutan ketiga di dunia untuk urusan kejahatan korupsi. (Indo Siar,12/ 09/'01). Korupsi adalah kejahatan yang sangat berbahaya, karena merugikan dan dapat melimpuhkan bahkan mematikan aspek-aspek kehidupan lain termasuk pendidikan. yang akibatnya bermunculan SDM rendah kualitasnya. Dengan SDM yang bekualitas rendah itu kembali menciptakan krisis-krisis baru hingga terjadi krisis multi demensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa krisis yang terjadi adalah buatan manusia yang cerdas intelektualnya tetapi rendah kualitas kecerdasan spritual, dan emosionalnya sehingga ia dikalahkankan hawa nafsunya sendiri sebagai tanda kegagalan menjalankan misi sebagai khalifah, karena kelezatan dunia yang sangat sesaat. Harus kita ingat,

kegagalan menjalankan misi berarti kita gagal hidup di dunia ini dan neraka jahannam telah siap menjadi tempat kita nanti. Tuhan tidak bisa disogok agar lolos dari jeratan sangsi hukum dengan uang hasil korupsi seperti banyak terjadi di abad modern sekarang ini.

Dari kejadian seperti dipaparkan, menjadikan pelajaran bahwa pendidikan yang hanya mengedepankan kecerdasan intelektual dan mengabaikan keceradasan emosional dan spritual (CES) adalah suatu ketimpangan. SDM yang cerdas intelektual dan lemah CES cenderung menjadi manusia congkak/ angkuh/ sombong dan akan rapuh terhadap godaan-godaan untuk berbuat kedzoliman. Kecerdasan demikian tidak banyak berkotribusi untuk kemasalahatan orang lain, bahkan kehadirannya sangat membahayakan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Penggundulan hutan dimana-mana yang dapat menimbulkan bahaya banjir misalnya adalah hasil perlakuan manusia yang cerdas intelektualnya tetapi rendah CES nya. Kecerdasan intelektual tanpa diayomi dengan CES manusia akan buta. Tidak mampu melihat dan merasakan lezat dan nikmatnya nilai-nilai kebaikan yang dilakukan sehingga sering melakukan pelanggaran. Kita masih ingat dengan dengan kebenaran pesan manusia yang dijuluki manusia cerdas, Einstein. Hamba Tuhan yang satu ini berkeyakinan kuat bahwa *"Science without religion is blind and religion without science is lamb."*

Kemakmuran dan kesejahteraan hidup secara merata yang kita kejar dari dulu hingga sekarang dengan segala rancangan perencanaan dan strategi pencapaiannya dirumuskan yang dilandasi teori itu dan teori ini, dengan menguras sumber daya alam baik yang *renewable* maupun *unrenewable resources* dan ditambah dengan hutang luar negeri dalam jumlah besar yang tidak pernah lunas, untuk membiayai pembangunan sebagai alasannya; pesta demokrasi dilakukan setiap lima tahun sekali dengan biaya yang cukup mahal guna memilih wakil-wakil yang dapat memperjuangkan nasib rakyat hasilnya terpilihlah sejumlah wakil-wakil yang kurang aspiratif, yang kebanyakan tidak mampu membaca kebutuhan rakyat, hasilnya adalah masih banyak gubuk reok, lingkungan kumuh, kriminalitas, kemelaratan, maraknya kasus *unskilllabour* berkeliaran keluar negeri mencari kerja, pengangguran/kemiskinan, terlihat hidup di tengah-tengah sekelompok kecil manusia kaya raya yang harta kekayaannya laksana gunung es menjulang tinggi, yang tidak pernah mencair. Inikah bentuk kemakmuran yang kita perjuangkan dan dambakan selama ini? Jawabannya adalah tidak. Ini adalah kegagalan yang harus kita koreksi.

Kita harus jujur mengakui bahwa kondisi negeri kita mengalami krisis multi dimensi akibat banyak manusia yang kualitas kecerdasan spritual, empsional rata-rata rendah. Oknum yang berkuasa kebanyakan cerdas otaknya tetapi tidak cerdas secara emosional dan spritual sehingga keberadaannya banyak yang menyimpang, menyalahgunakan

 ISBN 978-602-14314-8-1

kekuasaan, melakukan banyak penyelewengan dan pengrusakan. Semakin banyak koruptor yang rakus, oknum sombong/congkak, mengutamakan keduniawian, rendah kesabarannya, tidak jujur, tidak melihat bahwa setiap perbuatan baik adalah ibadah dan pasti mendapat balasan Tuhan, maka kemakmuran yang didambakan dari penguasa yang cerdas otaknya itu akan hanya menjadi angan-angan belaka. Kita tidak dapat berdalih untuk mengingkari kenyataan, karena secara ilmiah terbukti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita yang semula sudah cukup rendah posisinya yaitu 110 dari 175 negara ternyata pada tahun 2003 semakin melorot ke urutan 112. Kita harus merasa malu dengan Singapura yang berada pada urutan 28, Brunei, Thailand, Filipina, Vietmnam masing-masing di urutan 28, 31, 74, 85, 109 semuanya di atas Indonesia. Jumlah penduduk yang menganggur mencapai 8 juta jiwa dan yang setengah menganggur 32, 9 juta jiwa. Selanjutnya angka kemiskinan 38,4 juta atau 18,20 % dari jumlah penduduk Indonesia.

Kemudian data kualitas pendidikan kita juga masih menyedihkan. Nilai NEM Siswa SLTP di Indonesia untuk semua bidang studi dari tahun 1996-2002 rata-rata hanya 5,46 (Jalal, 2002).

Rendahnya kualitas pengetahuan, sikap, skill yang dimiliki sehingga konsekuensinya daya saing tenaga kerja tentu juga rendah. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang tidak sekolah ada 7 % yang belum tamat SD 15, 7 %, lulusan SLTP 36, 15 % dan lulusan SLTA 17,05 %.

Krisis multi demensi sangat kompleks yang dialami bangsa kita dapat dipastikan sebagai indikasi rendahnya mutu pendidikan baik dari aspek intlektual, emosional, terutama spritual. Pendidikan kita selama ini lebih banyak mengedepankan aspek intelektual dan keduniawian daripada emosional apalagi aspek spritual. Mengabaikan perintah Tuhan yang mencipta dan sekaligus yang berkuasa di alam semesta ini, azab dan peringatan-Nya pasti akan turun berupa bencana sosial dan bencana alam.
(Q.S. At-Taubah: 24 dan Al-Araf: 96).

B. Alasan Perlunya Penemuan Model Pembelajaran PAUD Ideal

Mencermati uraian berbagai bentuk krisis kehidupan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor dominan sebagai penyebabnya adalah rendahnya kualitas pendidikan baik formal, in formal maupun non-formal. Di jalur non-formal, krisis yang terjadi pada pendidikan PAUD perlu mendapat perhatian ekstra agar kualitasnya dapat didongkrak naik. Karena itu penulis tertarik untuk merekomendasi kepada para pendidik khususnya pendidik anak usia dini agar melakukan pengkajian/penelitian pengembangan sehingga dapat diperoleh model pembelajaran PAUD yang lebih dapat merangsang dan meningkatkan PAUD harus seluruh potensi anak usia dini. Mengapa harus PAUD yang diprioritaskan peningkatan

kualitasnya? Jawabannya adalah seperti berikut:

1. Lebih mudah menanamkan nilai-nilai pendidikan secara positif kepada anak dari pada orang dewasa;
2. Pendidikan bersifat sumur hidup dimana sebaiknya dilakukan mulai dari ayunan hingga ke liang lahat (Sudjana, 1995);
3. Hak-Hak Anak Seantero Dunia oleh PBB (*United Nations*) yang antara lain dinyatakan bahwa setiap anak berhak: a) berkelangsungan hidup; b) memperoleh perlindungan; c) tumbuh-kembang; d) berprestasi.
4. Banyak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan prasekolah. Penyimpangan dimaksud adalah lebih kuatnya persepektif orang dewasa yang dibuktikan dalam proses pendidikan pra-sekolah yang menyerupai miniatur SD kelas I. Gejala tersebut disebabkan tingginya tuntutan orang tua terhadap pendidikan anak yang masih berusia dini (Supriadi (1999:7);
5. Kasus pendidikan anak usia dini di lapangan terkesan mengekploitasi. Contoh banyak wadah pendidikan anak usia dini di kota besar yang menawarkan berbagai program ambisius seperti pengajaran bahasa Inggris, komputer, maupun jaminan mampu membaca, menulis dan berhitung sebelum masuk SD (Kompas, 16/08/1992). Kegiatan tambahan tersebut menjadi mata pelajaran resmi yang harus dipatuhi murid-muridnya. Prinsip belajar sambil bermain menjadi rancu. Penekanan tidak lagi pada kegiatan bermain, tetapi justru pada kegiatan belajar;
6. Banyak Model pembelajaran PAUD yang pernah kita jumpai, seperti model-model pembelajaran yang ditawarkan Froebel, Ausubel, Piaget, Montessori dan Ki Hajar Dewantoro ternyata masih menyimpan sisi-sisi kelemahan dibalik kelebihannya, yang tentu perlu disempurnakan karena pendekatan pembelajarannya masing-masing menekankan aspek-aspek tertentu sehingga tidak holistik.
7. Fase anak usia dini adalah masa emas. Phase di mana otak manusi 70 % telah terbentuk pada usia dini. Pernyataan tersebut sangat beralasan, sebab salah mendidk anak usia dini akan berakibat fatal secara jangka panjang. Salah satu contoh hasil penelitian membuktikan bahwa otak manusia, telah terbentuk 70 % ketika masih usia dini (Ilham, 2004). Ini artinya, apabila pendidikan yang diterima anak masih berusia dini kualitasnya buruk, maka akan berakibat buruk pula ketika mereka dewasa. Demikian pula sebaliknya apabila anak-anak usia dini mendapat pendidikan positif yang sesuai

 ISBN 978-602-14314-8-1

dengan kebutuhan dan karakteristik mereka, maka laju tumbuh-kembang akan sangat pesat dan berdampak jangka panjang.

D. Aspek-aspek yang Perlu Diperhatikan dalam Pengembangan Model PAUD

Dalam mendesain dan menemukan model pembelajaran PAUD yang ideal ada. Beberapa hal minimal menjadi pertimbangan, antara lain:

1. Model pembelajaran harus dapat menstimulasi seluruh aspek-aspek potensi perkembangan secara holistik yang mengarah kepada hakekat tujuan kehidupan manusia secara utuh. Aspek-aspek tersebut antara lain meliputi aspek potensi daya pikir, kreativitas, sikap dan tingkah laku yang baik (kecerdasan spritual dan emosional), potensi keterampilan berbahasa, keterampilan yang berhubungan dengan motorik halus dan kasar (jasmani). Kesemua aspek itu harus dirangsang secara simultan dalam satu paket kegiatan pembelajaran yang bersifat holistik. Mengapa harus holistic? Alasannya tidak lain adalah cara belajar anak secara psikologis masih bersifat keseluruhan dan tidak mendalam dan detail tetapai masih bersifat totalitas dan simultan,
2. Ciri lain dari karakteristik belajar anak adalah mereka belajar sambil bermain *(Learning by playing). Konsep* Belajar sambil bermain atau dalam bermain sambil belajar *(Playing by Learning)* merupakan keharusan bagi anak usia dini dalam memacu perkembangan mereka. Dari penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, diperoleh temuan bahwa bermain mempunyai manfaat yang besar bagi perkembangan anak. Bermain merupakan pengalaman belajar yang sangat berguna untuk anak, misalnya saja memperoleh pengalaman dalam membina hubungan dengan sesama teman, menambah perbendaharaan, menyalurkan perasaan-perasaan tertekan. Masih banyak lagi manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan bermain antara lain misalnya bisa memunculkan gagasan seseorang tentang cara memanfaatkan kegiatan bermain untuk mengembangkan bermacam-macam aspek perkembangan anak, yaitu aspek fisik, motorik, social, emosi, kepribadian, kognisi, ketajaman penginderaan, keterampilan olah raga dan menari.
3. Dalam pembuatan model pembelajaran, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan keselamatan anak. Maksudnya, temuan model dalam penerapannya harus tidak membahayakan kesehatan anak baik secara pisik maupun psikologis;
4. Dalam proses penemuan model, direkomendasikan harus mengacu pada kaidah-kaidah ilmiah antara lain melalui serangkaian kegiatan penelitian pengembangan seperti disarankan oleh pakar Research and Development Borg, W.R. and Gall, M.D. (1979) dan dilengkapi dengan

pendekatan *Action Research* (Kaji Tindak) sehingga pada akhirnya nanti dapat diperoleh model pembelajaran yang aplikabel dan efektif dalam membelajarkan anak karena sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tumbuh-kembang anak usia dini.

E. Bentuk Kegiatan Permainan dengan APE Berbasis Lingkungan Sekitar/Pedesaan.

Berikut beberapa bentuk kegiatan permainan dengan menggunakan APE PAUD yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, seperti: tanah, pasir, dedaunan, aneka ragam bumbu masak/dapur, tanaman palawija, ubi kaytu dan ubi jalar. Pemaparan tersebut diharapkan sebagai inspirasi bahwa APE PAUD tidak harus berupa APE yang sudah jadi dibeli dari took alat permainan PAUD, tetapi di sekitar kita dapat menjadi sumber untuk bahhan pembuatan APE. Semua berpulang kepada kreativitas dan kemauan tutor/guru PAUD nya.

Selanjutnya penulis coba jelaskan secara singkat tujuan pengembangan potensi peserta didik yang dapat dikembangkan serta cara-cara/ langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan dari setiap bahan-bahan lingkungan tersebut.

1. Tanah, pasir, dan dedaunan.

a. Tujuan yang dapat diperoleh dari penggunaan bahan tersebut:

1) Mengenalkan penggunaan tanah, pasir, dan daun sebagai alat yang berguna; 2) Mengembangkan kesenangan untuk bereksplorasi pada anak; 3) Menumbuhkan rasa apresiasi terhadap alat yang terdekat untuk berekspresi; 4) Menanamkan rasa bersyukur dengan adanya lingkungan hidup dan memeliharanya; 5) Mengembangkan kemamapuan berbahasa, penambahan kosa kata, penyusun kalimat.

Halaman dengan daerah yang berpasir. Daun-daunan dari pohon yang rimbun (sebaiknya hindari memetik daun yang masih segar, ambil saja daun berguguran). Kemudian ranting-ranting kering, tongkat, lidi, tusuk gigi

b. Caran penggunaan dalam kegiatan bermain:

Menulis atau menggambar di atas tanah atau pasir dengan jari atau sepotong ranting. Dapat juga menulis atau menggambar di atas daun dengan sepotong lidi atau tusuk gigi. Namun kegiatan ini bersifat sekilas meskipun sangat disenangi anak. Pada kegiatan ini guru harus bertindak cepat dalam evaluasinya. Apresiasi guru terhadap kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi anak sebagai model, karena segera seelah mendapat contoh anak akan beramai-ramai mengerjakannya.

2. Bumbu masak/ dapur

a. Potensi peserta didik yang dapat dikembangkan antara lain:

1) Mengenalkan tanaman yang digunakan sebagai bumbu dapur di rumah
2) Mengembangkan penggunaan seluruh pancaindra

 ISBN 978-602-14314-8-1

3) Menanamkan rasa bersyukur dapat menikmati makanan dengan penuh cita rasa
4) Mengembangkan kesenagan menanam dan memelihara tanaman
5) Mengembangkan kemampuan melihat persamaan dan perbedaan pada tanaman
6) Mengembangkan kemampuan berbahasa, memperkaya kosa kata menyusun kalimat.

Bahan- bahan bumbu dapur antara lain dapat berupa: lengkuas, kunyit, kunci, jahe, daun jeruk purut, daun salam, daun sereh dan berbagai bumbu dapur lainya. Tanaman bumbu dapur hamper sama bentuknya. Sekolah akan tertolong bila memiliki tanaman bumbu dapur di halaman sekolah atau ditanam di pot-pot. Anak dapat mengamati tanaman tersebut, sehingga merupakan kegiatan yang menarik. Anak dapt mencium daun yang berbeda. Ditambah lagi kalau mereka dapat melihat bahwa bagian yang terpenting dari tanaman tersebut adalah akarnya. Dapat pula diterangkan oleh guru bahwa kebanyakan dari tanaman bumbu dapur dapat juga dipergunakan sebagai apotik hidup.

b. Caran penggunaan dalam kegiatan bermain:

Anak melihat persamaan dan perbedaan bentuk bagian tanaman, misalnya daun dan umbi dari dua macam tanaman yang hamper sama bentuknya. Ketika kegiatan pengamatan ini berl;angsung seluruh pancaindra anak akan bekerja aktif. Pengamatan terhadap umbi, warna, bau serta kegunaannya dalam masakan akan sangat menarik bagi anak. Pengenalan terhadap tanaman ini akan lebih menyadarkan anak tentang beraneka ragam tanaman yang ada di sekelilingnya. Bila anak menggambar tanaman dan ada gambar yang tidak menyerupai tanaman yang telah mereka lihat sebaiknya guru tidak membetulkan maupun mempersalahkan. Karena saat itu pengamatan mereka masih sangat terbatas. Yang penting adalah upaya guru untuk meningkatykan kemampuan pengamatan mereka. Tempatkan sepotong dari bagian tanaman yang paling kuat baunya di tabung bekas tempat film. Tutup dengan kain yang berlubamngsehingga mudah tercium baunya. Buatlah dari masing-masing tanaman dua tempat. Tugas anak adalah mencari tabung yang berisi bau tanaman yang sama.

3. Ubi Kayu /Singkong

a. Potensi peserta didik yang dapat dikembangkan antara lain:

1) Menghargai dan memelihara lingkungan
2) Pengenalan hasil bumi khususnya palawija ubi kayu
3) Mengembangkan kemampuan mengamati proses perubahan dari mentah ke makanan jadi
4) Mengembangkan kemampuan berbahasa
5) Mengembangkan motorik halus, penglihatan dan pendengaran
6) Mengenalkan berbagai tanaman makanan penting pengganti beras

7) Mensyukuri lingkungan hidup kita dan menanamkan kebiasaan memeliharanya
8) Mengebangkan cita rasa dan penggunaan pancaindra lainnya

b. Bermain dengan kegiatan pembuatan tepung sagu/aci/kanji:

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembuatan tepung kanji: ***Pertama*,** ubi kayu dikupas, dicuci dan diparut halus. ***Kemudian***, parutan itu diberi air dan disaring dengan kain sampai airnya jernih. ***Berikutnya***, larutan itu diendapkan, air yang jernih di atasnya dibuat dan sari ubi kayu ditiriskan dengan kain. ***Selanjutnya***, endapan tersebut dikeringkan dan tepung yang kita dapatkan disebut disebut sagu atau tepung kanji.

Agar sagu yang telah jadi selanjutnya dapat dibuat menjadi satu kegiatan pembelajaran yang lebih mengasyikkan bagi peserta didik yaitu kegiatan membuat bubur sagu/ kanji. Langkah kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: ***Pertama,*** ambil dua sendok tepung sagu/aci/kanji; ***Kemudian***, rebus satu gelas air dan aduk tepung sagu di air tersebut sampai mendidih. ***Berikutnya,*** bubuhkan dua sendok gula dan santan secukupnya; ***Setekah itu***, bubur siap disantap bersama-sama anak didik.

Dengan bubur sagu tersebut bagi guru PAUD yang kereatif dapat memanfaatkannya untuk kegiatan finger painting guna penmgembangan potensi bakat seni anak didik. Cara membuatnya sangat mudah dan sederhana yaitu dengan bubur sagu seperti disebutkan sebelumnya cukup hanya dengan mem bubuhkan pewarna makan. Kemudian dioleskan campuran tersebut di atas kertas gambar. Yang paling baik adalah kertas gambar yang mengkilat. Dan anak menggerak-gerakkan jari jemarinya pada kertas tewrsebut sehingga memperoleh gambar yang ia sukai. Dapat juga guruy memperdengarkan music dan anak menggerakkan tangannya sesuai irama yang ia dengarkan.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak pemerhati pendidikan terutama bagi pendidik PAUD dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran sambil bermain bagi anak usia dini dalam rangka mempersiapkan generasi sumber daya manusia Indonesia yang handal sehingga tantangan globalisasi dapat diatasi dan dijinakkan, hiungga diperoleh karunia, rahmat kesejahteraan hidup. Kemudian yang tidk kalah pentingnya adalah semoga dengan bermanfatnya tulisan ini dapat menjadi salah satu ladang pahala amal ibadah bagi penulis. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (1973). Departemen Agama R.I. Jakarta.

Abdulhak, I. (2001). *Komunikasi Pembelajaran: Pendekatan Konvergensi dalam Peningkatan Kualitas dan Effektivitas Pembelajaran.* Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada FIP-UPI Bandung.

---------- (1996). *Strategi Membangun Motivasi dalam Pendidikan*. Ban dung: AGTA Manunggal.

---------- (2002). "Memposisikan Pendidikan Anak Usia Dini." *Jurnal PADU*. Edisi 2: 54-59.

Adiwikarta, S. (1988). *Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*. Jakarta: Depdikbud.

Azis, W. (1986). "*Pendidikan Nilai-nilai dan Etika Asia di Sekolah"*. Jurnal Mimbar Pendidikan 4 (15): 34-39.

Borg, W.R. and Gall, M.D. (1979). *Educational Research: An Introduction*. New York: Longman Inc.

Frued, A. (1965). *Safeguarding the Emotional Helath of our Children: An Inquiry into the Concept of Rejecting Mother and Child Welfare*. New York: Mc. Graw Hill Book Company.

--------- (2002). "***Stimulasi Otak untuk Mengoptimalkan Kecerdasan Anak***". *Jurnal PADU*. Edisi 02, 9-17.

Habibie, B.J. (1994). Pidato Seminar International. Bandung.

Ilham, A. ***"Islam dan Kesehatan Mental***". *Jurnal Inspirasi*. 2 (2): 21-28.

Ismail Endang, (2007). Education Games: Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permainan Edukatif. Pilar Media. Yogyakarta.

Jojonegoro, W. (1994). *Education and Training for Industry*. Orasi Ilmiah pada Depdiknas Jakarta.

Martuti, (2008). ***Mengelola PAUD dengan Aneka Ragam Permainan Merah Kecerdasan Majemuk***. Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Musbikin, (2008). ***Mendidik Anak Kreatif Ala Einstein***. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sudono, Anggraini, (2000). Sumber Belajar dan Alat Permainan. PT Grasindo. Jakarta.

Supriadi, D. (1999). *Antara TK dan SD Dibalik Kebijakan Ada Kons trak Berpikir,* Makalah: Seminar Pemantapan Kelembagaan dan Peningkatan Pendidikan TK. Jakarta: Direktorat Dikdas,Depdiknas.

---------- (2003). *Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia: "Where Do We Go from Here?* Makalah Seminar Nasional PAUD 10/12/03 Bandung: UPI dan Ditjen PLS dan Pemuda Depdiknas.

Tedjasaputra, Mayke, (2001). ***Bermain, Mainan, dan Permainan***. PT Gramadya Indonesia Jakarta/

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Jakarta.

Young, M.E. (1996). **Early Child Development: an Investment in the Futu re.**Washington: World Bank.

EVALUASI PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

oleh:
Dr. Gatot Margono, M.M
DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam upaya menjadikan suatu Negara / Pemerintahan maju dan berkembang, karena pendidikan dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia, dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka implikasinnya pada kemajuan berbagai bidang kehidupan lainnya seperti : ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi dll.

Pendidikan tidak sekedar berperan dalam kemajuan bangsa, tapi juga sangat erat kaitannya dengan pasar bebas / globalisasi di mana di era ini penuh dengan berbagai peluang, tantangan bahkan ancaman khususnya di sector ketenagakerjaan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di harapkan mampu membuat terobosan dan lompatan yang signifikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif, professional, murah dan dapat di nikmati oleh kalangan luas. Pendidikan Non Formal adalah salah satu program pendidikan yang di harapkan mampu menjawab tantangan dan pasar bebas yang sudah mulai di berlakukan, terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Peran dan fungsi pendidikan Non Formal sangat jelas sebagai lembaga pendidikan di luar pendidikan Formal, hendaknya pemerintah tidak memandang sebelah mata baik dari sisi pembinaan, pengawasan, pendanaan karena selama ini kenyataannya bahwa Pendidikan Formal memang mendapat porsi dan proporsi yang lebih dari pada pendidikan Non Formal.

Pendidikan Nasional di bangun secara seksama melalui 3 jalur yaitu Pendidikan Formal (pendidikan persekolahan), Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.

Pendidikan Non Formal (PNF) merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang, tetapi tidak ketat dan tetap mengedepankan kualitas.

Oleh karena itu apa yang terkandung dalam UU Sisdiknas dapat dilihat dari beberapa perspektif yaitu pertama Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti penambah dan /pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, kedua Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap kepribadian.

Berdasarkan paparan dan penjelasan diatas maka program-program

 ISBN 978-602-14314-8-1

Pendidikan Non Formal (PNF) agar lebih berhasil dan dapat menyesuaikan perkembangan maka diperlukan evaluasi.

B. KONSEP PENDIDIKAN NON FORMAL

Konsep pendidikan Non Formal muncul sekitar tahun 1960 hingga awal 1970. Philip Combs dan Manzoor A, PH (1985) dalam bukunya "The World Crisis in Education" mengungkapkan pendidikan itu pada dasarnya di bagi menjadi 3 jenis yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal. Khusus untuk pendidikan Non Formal, Combs mengartikan sebagai sebuah kegiatan yang di organisasikan diluar system persekolahan yang mapan, apakah dilakukan secara terpisah atau bagian terpenting dari kegiatan yang lebih luas dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik tertentu guna mencapai tujuan belajarnya.

Pendidikan Non Formal juga di katakan sebagai pendidikan berbasis masyarakat yaitu pendidikan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan seumur hidup.

Pendidikan berbasis masyarakat (Community based Education) menurut Michael W. Galbraith Could be defined as an education process by which individuals (In this case adults) become more corrt petent in their skill, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control over local aspect of their community through democratic participation artinya pendidikan berbasis masyarakat sebagai proses pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten dalam keterampilan, sikap dan pengetahuan mereka dalam upaya untuk hidup, bekerja dan bermasyarakat.

C. PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan terutama bagi masyarakat yang belum/tidak terlayani oleh Pendidikan Formal.

Beberapa program-program Pendidikan Non Formal diantaranya adalah :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Keaksaraan
4. Pendidikan Kursus dan Pelatihan
5. Pendidikan Kecakapan Hidup
6. Pendidikan Kepemudaan
7. Pendidikan Pemberdayaan perempuan
8. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Program-program tersebut merupakan program yang sudah berjalan selama ini.

D. EVALUASI PROGRAM PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Program-program Pendidikan Non Formal yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah selama ini

telah berjalan sebagaimana mestinya dari sisi kuantitas memang sudah berjalan dengan baik, namun dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan terutama asek tata kelola, manajemen dan sumber daya manusia. tugas yang cukup berat kedepan dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA), pendidikan Nonformal harus mampu menghasilkan tenaga kerja yang professional agar lulusannya mampu bersaing di antara Negara asean, karena kita telah memiliki komitmen bersama diantara masyarakat asean.

Kita sadari bahwa Pendidikan Non Formal disamping memilki keunggulan juga memiliki kelemahan-kelemahan terutama aspek koordinasi, motivasi, keragaman dan luasnya program Pendidikan Non Formal. Oleh karena itu, diperlukan Evaluasi agar hasilnya dapat digunakan untuk penyempurnaan program-program PNF yang akan datang. Evaluasi tersebut meliputi :

1) ***Pengelolaan program PNF***

Penyelenggaraan program PNF terutama aspek pembelajaran pengelolanya sampai saat ini sebagian besar tidak memiliki latar belakang Pendidikan Non Formal. Keterlibatan mereka dalam program Pendidikan Non Formal didorong oleh rasa pengabdian kepada masyarakat, mereka pada umunya dari latar belakang Pendidikan Formal dan kenyataan ini sering mempengaruhi tampilan mereka dalam proses pembelajaran antara lain dengan menerapkan pendekatan mengajar Pendidikan Formal di dalam Pendidikan Non Formal, sehingga pendekatan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pendidikan Non Formal. Keterlibatan mereka sebagian karena keadaan terpaksa, karena menggangur tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka mencoba, disamping itu juga karena pengaruh ekonomi sehingga pekerjaan apapun yang penting ada uangnya. Dengan hasil evaluasi aspek pengelola maka diperlukan peningkatan kemampuan tenaga pengelola dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah.

2) ***Satuan Pendidikan Non Formal***

Satuan Pendidikan Non Formal saat ini tumbuh dan berkembang bagaikan jamur, sehingga keberadaannya tidak dapat dikendalikan lagi.

mereka pada umumnya mendirikan satuan pendidikan Non Formal seperti PAUD, PKBM lembaga kursus hanya semata mata mengejar dan mengharapkan bantuan dari pemerintah, mana kala ada bantuan mereka exis (ON), tapi manakala tidak ada bantuan mereka (OFF), motif mereka semata mata hanya mengejar keuntungan sesaat, hal inilah perlu dievaluasi secara mendalam karena dapat merugikan masyarakat dan pemerintah.

3) ***Koordinasi***

Sulitnya koordinasi disebabkan oleh keragaman dan luasnya program PNF yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, semua lembaga pemerintah baik yang berstatus kementerian maupun non

 ISBN 978-602-14314-8-1

kementerian menyelenggarakan Pendidikan Non Formal berbagai lembaga swasta, perorangan, masyarakat menyelenggarakan program PNF yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut atau untuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya variasi program tersebut yang diselenggarakan oleh berbagai pihak sangat memungkinkan terjadinya program yang tumpang tindih, program yang sama kemungkinan dapat digarap oleh berbagai lembaga. Oleh karena itu, perlu di evaluasi bagaimana meningkatkan koordinasi antar pihak penyelenggara program dan duduk bersama mulai dari penyusunan program, penyelenggaraan program agar hasil dari program tersebut lebih efektif dan efisien bermanfaat bagi masyarakat.

4) ***Program Keaksaraan***

Program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, cenderung tidak maksimal karena minimnya pembelajaran, mereka pada umumnya datang manakala sudah mendekati ujian mereka hanya butuh ijasah. Hal ini perlu evaluasi terutama aspek pembelajaran, penyelenggaraan program harus ketat, untuk menjaga kualitas lulusan.

5) ***Program – Program yang tidak tuntas***

Ada beberapa program yang tidak tuntas diantaranya adalah :

a. **Program keaksaraan**

Hasil evaluasi banyak peserta yang telah diajar calistung kembali lagi menjadi buta aksara karena sedikit sekali sentuhan lanjutannya. Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) alokasi anggarannya sangat kecil dan jumlah sasarannya sangat terbatas, padahal program KUM tersebut merupakan program lanjutan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam calistung, seharusnya jumlah eserta program keaksaraan dasar harus sama dengan keaksaraan usaha mandiri.

b. **Program kursus dan pelatihan**

Program khusus dan pelatihan dananya sangat kecil sehingga hanya mampu sekedar memberikan pengetahuan awal. Waktunya sangat singkat seharusnya waktunya ditambah, dananya di tambah dan mereka mengikuti magang didunia usaha/industry agar mereka lebih professional kemudian perlu diberikan modal awal untuk memulai usaha kecil-kecilan sehingga mereka langsung membuka usaha dan keterampilannya tidak hilang.

Penyelenggaraan uji kompetensi bagi peserta yang telah mengikuti kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LSK belum merata di semua Propinsi Kabupaten / Kota yang ada di Indonesia. Karena hanya ada di beberapa Propinsi / Kabupaten dan Kota, dari hasil evaluasi

pemerintah segera memfasilitasi membentuk LSK untuk setiap bidang keahlian.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi program-program Pendidikan Non Formal pada umumnya telah berjalan cukup baik apabila dilihat dari komponen konteks, input, proses dan produk. Namun belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan guna penyempurnaan program-program Pendidikan Non Formal yang dilakukan oleh Pemerintah swasta dan organisasi yang lain. Mau dan tidak karena tuntutan maka program-program Pendidikan Non Formal harus disempurnakan dan ditingkatkan kualitasnya. Kedepan kualitas lulusan Pendidikan Non Formal mampu bersaing terutama menghadapi masyarakat ekonomi Asean.

F. DAFTAR PUSTAKA

Getskow, feronika (1997) Community college older adult programe development dikutip dari WWW, Eric.ed.gov Juni 2007

Akdon, (2006). Strategic Management For Education Management, Bandung:Alpabeta

David,Freed R (2001). Strategic Management, Concept and cases, New jersey. Prentice Hall international.Inc.

Sujana (2000) Management program untuk Pendidikan luar sekolah dan pengembangan Sumber daya Manusia. Bandung:Falah Production.

Sujana, D (2001). Pendidikan Non Formal :Wawasan, Sejarah perkembangan, Falsafah dan Teori pendukung serta asas, Bandung : Falah production.

 ISBN 978-602-14314-8-1

DESAIN PROGRAM PENGUATAN DESA LABSITE PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL MELALUI KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Zulkarnain
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM
zulkarnain.fip@um.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian: (1) Dihasilkannya desain program penguatan desa labsite PLS berbasis keunggulan lokal dalam bidang pemberdayaan masyarakat, (2) dihasilkannya desain model pembelajaran PPL mahasiswa Prodi PLS S-2 yang terintegrasi pada penguatan labsite PLS dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian pengembangan. Model tahapan yang akan digunakan meliputi (a) *planning*), (b) (*acting*), (c) (*observing and reflecting* atas pelaksanaan pembelajaran. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Desain desa Labsite berbasis keunggulan lokal yang dijadikan sasaran Program Pengalaman Lapangan mahasiswa Pascasarjana Prodi PLS, (2) Desain implementasi pembelajaran mahasiswa melalui kegiatan PPL didasarkan hasil identifikasi mahasiswa, dalam hal ini kegiatan PPL pemberdayaan masyarakat.
Kata kunci: Keunggulan lokal, desa labsite, program pengalaman lapangan.

Pendahuluan

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan kegiatan pendidikan yang dirancang dan diorganisasikan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik, dan diselenggarakan di luar sistem persekolahan. Tujuan Program Studi (Prodi) PLS S-2 adalah untuk menyiapkan tenaga professional bidang PLS yang mampu mengembangkan kelimuan secara mandiri dan atau berkolaborasi. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan S2 Peminatan Pemberdayaan Masyarakat Prodi PLS Universitas Negeri Malang diharapkan memiliki kemampuan professional dalam bidang pengelolaan program pemberdayaan masyarakat (PM). Untuk mendukung kemampuan professional tersebut, setiap mahasiswa PLS S-2 diwajibkan mengikuti program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

PPL PLS dilaksanakan di luar kampus agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari sesuai kurikulum Prodi PLS. Sebagai perwujudan dari kegiatan ini adalah kegiatan belajar di masyarakat dengan cara ikut serta mengerjakan suatu tugas kegiatan yang relevan dengan pendidikan luar sekolah di suatu masyarakat di desa *Labsite* PLS.

Penyelenggaraan PPL yang dilaksanakan secara terfokus dalam satu wilayah/kawasan/komunitas tertentu, akan menjadi sebuah *gerakan* bagi masyarakat yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Salah

 ISBN 978-602-14314-8-1

satu model layanan program yang dipandang penting adalah menjadikan desa *Labsite* berbasis keunggulan komparatif l*okal* sebagai *gerakan* dalam pengembangan ekonomi pedesaan yang dilakukan secara simultan dengan pengembangan aspek sosial-budaya dan lingkungan dengan prinsip seimbang dan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat yang tenteram, aman dan nyaman.

Penguatan Desa *Labsite* berbasis keunggulan komperatif lokal sebagai lokasi PPL mahasiswa Prodi PLS diharapkan menjadi titik awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sekaligus menjadikan produk pedesaan sebagai produk unggulan yang berdaya saing. Kawasan pedesaan yang dijadikan *Labsite* bagi mahasiswa yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran (magang, studi observasi, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat dan pendampingan) berbagai kecakapan vokasional dalam dimensi sosial budaya dan lingkungan.

Tujuan PPL mahasiswa S-2 PLS agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis di lapangan dalam mengelola program-program pendidikan luar sekolah (mengidentifikasi, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi) di lembaga mitra yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar sekolah di masyarakat.

Labsite merupakan tempat kegiatan PPL adalah yang dianggap layak untuk memberikan pengalaman belajar langsung bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan teori dan konsep PLS. Desa *Labsite* berbasis keunggulan komparatif lokal merupakan sentra penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui kursus dan atau pelatihan berbagai kecakapan vokasional untuk bekerja atau berwirausaha dalam dimensi sosial budaya dan lingkungan secara simultan, seimbang, dan berkelanjutan. Kecakapan vokasional yang dilatihkan hendaknya bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan/keunggulan lokal. Dalam proses pembelajaran kecakapan vokasional perlu dibangun pula kesadaran dan pola perilaku untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan.

Desa Wonoagung terletak di Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang, sekitar 670M di atas permukaan air laut. Potensi sumberdaya Desa Wonoagung cukup mendukung di bidang perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Sebaliknya potensi sumber daya manusia dapat terlihat pada (a) tradisi gotong royong masih terjalin erat, (b) sumberdaya perempuan yang aktif dalam kader kesehatan dan kegiatan produktif, dan (c) besarnya jumlah penduduk usia produktif.

Sebaliknya permasalahan Desa Wonoagung secara umum adalah: (a) banyak warga masyarakat yang putus sekolah, (b) rendahnya penguasaan teknologi pertanian sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil pertanian, (c) kurang maksimalnya pengelolaan hasil paska panen, (d) rendahnya kualitas pendidikan pada mayoritas warga masyarakat Desa Wonoagung, sehingga kurang mampu

bersaing dalam memperoleh pekerjaan maupun membuka dan menciptakan lapangan baru. (e) masih rendahnya keterampilan usaha produktif yang disebabkan minimnya pelatihan, workshop, dan kursus untuk meningkat-kan kemampuan usaha warga, dan (f) belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat desa maupun di tingkat padukuhan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) merancang desain program penguatan desa *Labsite* berbasis keunggulan lokal dalam pemberdayaan masyarakat bagi mahasiswa Program S2 PLS; (2) merancang model/desain pembelajaran PPL yang terintegrasi pada penguatan *Labsite* PLS dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan efektifvitas dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian pengembangan produk melalui penelitian pengembangan (Bogdan & Biklen, 1982: 87).

Pengembangan produk ini dilakukan melalui tahapan yang meliputi tahap perencanaan penguatan desain penguatan desa labsite, tahap kedua pelaksanaan pembelajaran (*acting*), (c) observasi dan refleksi (*observing and reflecting*) atas pelaksanaan pembelajaran.

Pendekatan operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Tema penelitian operasional didasarkan pada permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan suatu program; (2) Dalam proses pelaksanaan penelitian berkolaborasi dengan pihak terkait dengan pihak yang menyelenggarakan program yang akan menyelenggarakan penelitian; (3) Karena mulai dari penentuan permasalahan yang akan dipecahkan, desain penelitian didiskusikan bersama serta dalam proses pelaksanaan dilaksanakan bersama, maka hasil penelitian akan dimanfaatkan langsung oleh pihak yang memerlukan; (4) Desain operasional Penelitian ini dilaksanakan pada pelaksanaan PPL disajikan pada semester Gasal tahun 2013/2014. Peserta mahasiswa program S2 PLS Pascasarjana UM.

Lokasi penelitian di Dusun Jabon Garut Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, sebagai desa Labsite Prodi Pendidikan Luar Sekolah Pacasarjana Universitas Negeri Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Desain Penguatan Desa Labsite Berbasis Keunggulan Lokal

Berdasarkan gambar desain penguatan desa Labsite (gambar 01), dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Identifikasi Sumberdaya Desa Labsite

Identifikasi calon desa sasaran bertujuan mengetahui tingkat kelayakan suatu desa untuk dijadikan desa *Labsite* sesuai karakteristik atau persyaratan yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kelayakan calon desa sasaran dikumpulkan data dan informasi berikut: (a) kondisi demografis, (b) kondisi geografis, (c) data sasaran

 ISBN 978-602-14314-8-1

program PM, (d) infra struktur (sarana-prasarana pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan, transportasi), (e) lembaga lokal, (f) organisasi kemasyarakatan/sosial/kepemudaan, (g) fasilitas teknologi, (h) SDM (tokoh masyarakat, perangkat desa, SDM yang memiliki kompetensi/keahlian tertentu), (i) kondisi sosial-budaya, ekonomi dan kesehatan masyarakat, dan (j) program-program pendidikan luar sekolah yang sudah ada. Teknik pengumpulan data yang dipakai mencakup: wawancara, observasi, dokumentasi dan *focus group discussion*.

2) Menentukan Sasaran dan Program

Menentukan sasaran dan program pada desa Labsite harus melakukan penentuan karakteristik peserta didik, karakteristik penyelenggaran, dan menentukan struktur organisasi. Karakteristik peserta didik atau warga belajar sebagai berikut: (a) pendidikan minimal lulus SD atau sederajat, (b) tidak berstatus pelajar atau warga belajar program keseteraan, (c) tidak memiliki pekerjaan (menganggur), (d) usia produktif (18-44 tahun); (e) diutamakan dari keluarga miskin atau tidak mampu.

Persyaratan lembaga penyelenggara: (a) bergerak di bidang pendidikan non formal, pengabdian dan pemberdayan masyarakat, dan (b) kredibilitasnya diakui. Adapun lembaga/organisasi yang dapat menjadi penyelenggara desa vokasi adalah: PKBM yang aktif dalam penyelenggaraan program–program pendidikan luar sekolah, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan.

Untuk menjamin terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PPL mahasiswa secara optimal dan berkesinambungan maka diperlukan struktur organisasi yang mantap, simple dan kaya fungsi. Kewenangan dan tanggungjawab setiap unsur kepengurusan juga harus dirumuskan.

3) Persiapan Sosialisasi Desa Labsite.

Program desa Labsite akan berjalan dengan baik jika ada komitmen yang kuat dari aparat desa, tokoh masyarakat dan segenap warga masyarakat. Untuk membangun komitmen tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyatakat. Adapun tujuan sosialisasi adalah: (a) memberikan pemahaman tentang desa Labsite, (b) menumbuhkan motivasi, inisiatif dan prakarsa, (c) menggalang simpati/kepedulian masyarakat, (d) menggalang komitmen, dan (e) menggalang partisipasi.

4) Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat atau mobilisasi sumber daya pada hakekatnya adalah aktivitas menggerakkan/mengerahkan segenap sumber daya (*resources*) yang ada (internal maupun eksternal) demi terselenggaranya desa Labsite secara efektif dan efisien.

Ada begitu banyak potensi (sumber daya) di desa yang belum diberdayakan secara optimal untuk pembangunan desa karena berbagai hal terutama keterbatasan SDM. Sumber daya yang

dapat dimobilisasi baik internal maupun eksternal yaitu mencakup: (a) sumber daya alam; (b) sumber daya manusia (expert, praktisi, akademisi, tokoh intelektual desa, tokoh masyarakat, kader desa, pamong/perangkat desa, penyuluh, tenaga terdidik); (c) kapital -- sosial (jaringan/mitra, informasi, sistem nilai, teknoliogi, material, modal/finansial, pola interaksi sosial).

Setiap individu dewasa, sebagai bagian dari masyarakat bisa berpartisipa-si/berkontribusi dalam kegiatan desa labsite. Wujud partisipasi berupa: (a) ide/gagasan, pemikiran yang bijak, penggerak (motor), (b) keterampilan pendampingan, (c) dana, (d) sarana (lahan, rumha, gedung, dan sebagainya), (e) keahlian, dan (f) tenaga.

5) Output dan Outcome

Output yang dihasilkan adalah adanya **k**elompok-kelompok tani/usaha di dalam masyarakat, sedangkan output yang dihasilkan adalah (a) meningkatnya produktivitas usaha, dan (b) munculnya kelembagaan yang kuat di masyarakat dan berkelanjutan.

6) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Labsite Prodi PLS

Pertama, cakupan program mencakup 4 (empat) aspek pengembangan yaitu. (a) pengembangan aspek ekonomi; (b) pengembangan aspek sosial; (c) pengembangan aspek budaya dan (d) pengembangan aspek lingkungan. yang dilakukan secara simultan, seimbang dan berkelanjutan. ***Kedua,*** **k**arakteristik kecakapan desa Labsite sebagai berikut: (a) Kecakapan keterampilan yang dilatihkan jelas aspek pasarnya.; (b) bernilai ekonomi tinggi; (c) mudah bahan bakunya; (d) diutamakan memiliki nilai keunggulan komparatif lokal. **Ketiga**, sarana prasaranyang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program kerja desa labsite adalah sebagai berikut: sarana kerja tim manajemen desa labsite, Rumah/gedung untuk sekretariat. Sarana pembelajaran vokasi: ruang belajar, bahan dan alat praktek untuk pelatihan keterampilan, kurikulum dan modul, buku penunjang, media dan alat peraga, ruang pamer jika ada, ruang produksi, papan nama, papan pelayanan informasi, ATK pembelajaran.

7. Hubungan Fungsional antara Desa Labsite, Prodi PLS, dan Mitra Kerja

Hubungan fungsional antar penyelenggara desa *Labsite* dengan mitra kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Penyelenggara Program Desa Labsite berperan sebagai koordinator, penggerak, pelaksana/penanggungjawab, penyedia fasilitas dan anggaran, Mitra kerja yang ingin berpartisipasi mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing. Peran mitra kerja dapat sebagai pembina teknis maupun administratif, pendampingan, pengguna lulusan/pasar, asistensi, konsultasi, sharing anggaran, mediator, penyedia fasilitas, informasi dan teknologi, nara sumber teknis dan sebagainya. Setiap pihak yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan desa Labsite harus berkoordinasi dengan penyelenggara

 ISBN 978-602-14314-8-1

sehingga tercipta integrasi program dan sistem pelayanan. Prosedur desain desa labsite dilihat pada alur bagan sebagai berikut.

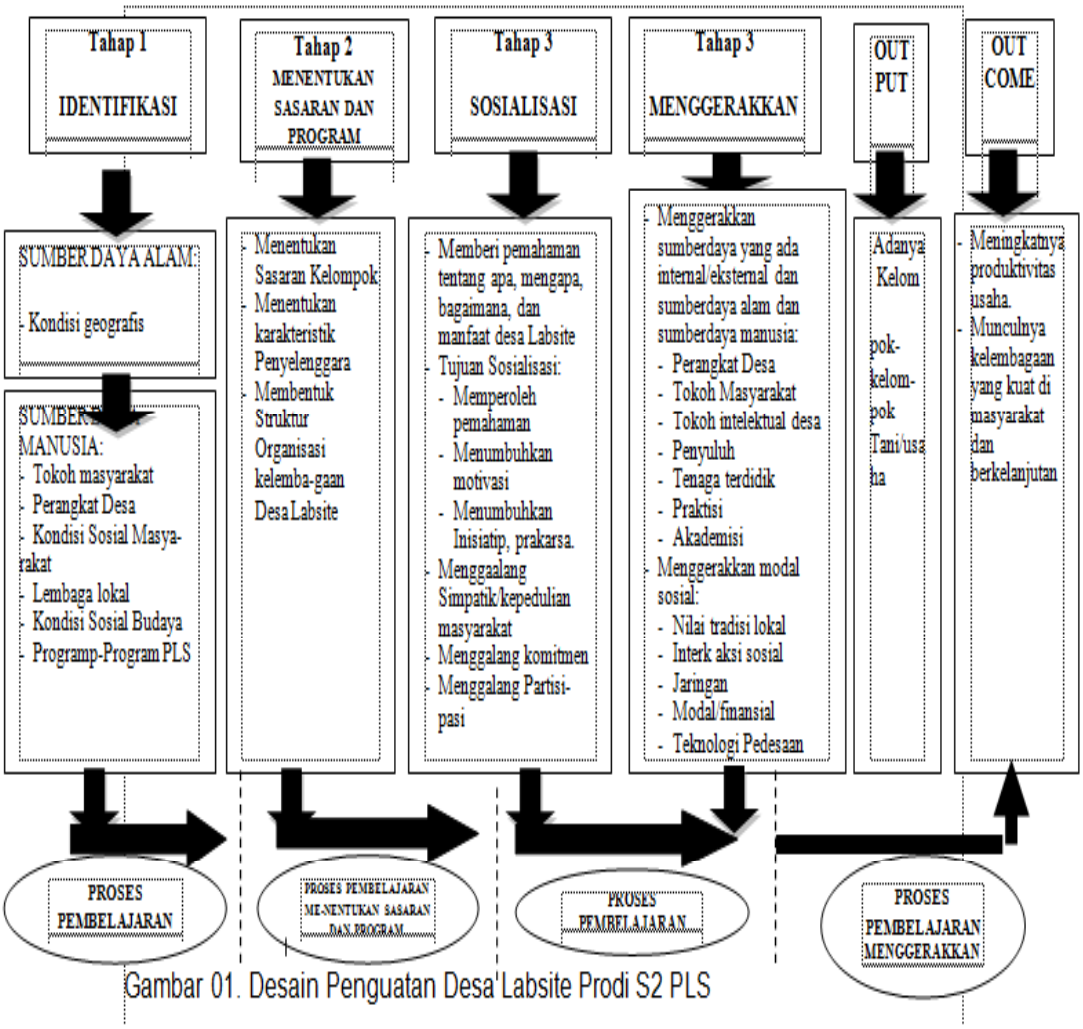

Gambar 01. Desain Penguatan Desa Labsite Prodi S2 PLS

Desain Kegiatan PPL Pemberdayaan Masyarakat di Desa Labsite PLS

Desain pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa S2 Prodi Pendidikan Luar Sekolah Pascasarjana sebagai berikut.

Tahap pertama, pembekalan. Mahasiswa diberikan pembekalan tentang materi seluruh aktifitas PPL pada desa Labsite Prodi PLS Pascasarajan UM dengan tujuan agar mahasiswa dapat melaksanakan PPL dengan lancar dan maksimal.

Tahap kedua, persiapan lapangan. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan tempat PPL untuk menyampaikan maksud dan tujuan PPL sehingga ada kesepakatan antara Pimpinan Laboratorium PLS, mahasiswa, dan tempat PPL.

Tahap ketiga, orientasi lapangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada mahasiswa tentang kondisi tempat/ lembaga tempat PPL dan mahasiswa dapat menemukan permasalahan yang akan dipecahkan melalui PPL. Pada tahap ini mahasiswa melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah serta penentuan prioritas program pemberdayaan masyarakat. Beberapa kegiatan pendukung yang dilakukan adalah: (1) mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) khusus yang berkaitan dengan rencana pengembangan program ke PLS-an, (2) mengkaji data dasar/database yang memuat tentang informai kelompok sasaran PLS. Dalam kajian data dasar dapat dilakukan dua hal: calon kelompok saran yang masalah yang perlu diecahkan, dan potensi yang mendukung pelaksanaan program, (3) mendaftar program/kegiatan yang perlu dilaksanakan berdasakan masalah yang ada, (4) Menetapkan program/kegiatan yang akan dilakukan, dan (5) kegiatan dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok mahasiswa tergantung pada cakupan program yang akan dilaksanakan.

Tahap keempat, menyusun proposal, terdiri atas: (a) program kegiatan PPL program pemberdayaan masyarakat. Setiap mahasiswa wajib menyusun proposal kegiatan PPL sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan, (b) penyusunan media dan bahan ajar dengan proposal yang telah disetujui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Tahap kelima, implementasi program, mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL sesuai dengan proposal yang telah disetujui DPL.

Tahap keenam, monitoring dan evaluasi, setiap mahasiswa wajib menyusun alat monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan.

Tahap ketujuh, penyusunan laporan akhir kegiatan PPL, mahasiswa wajib menyusun laporan individual dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tahap kedelapan, seminar hasil, setiap mahasiswa wajib melakukan pertanggung jawaban terhadap hasil PPL sesuai dengan laporan yang disusun.

Tahap kesembilan, menyerahkan laporan PPL, setiap mahasiswa wajib mengumpulkan laporan yang telah disyahkan DPL ke kantor Lab PLS.

Rangkaian Kegiatan PPL

PPL merupakan matakuliah wajib yang mempunyai bobot 4 sks yang berarti mahasiswa (jika berada dalam lapangan) harus bekerja dan belajar 16 jam/minggu atau jam minimum. Waktu pelaksanaan PPL secara regular dilaksanakan selama 16 minggu pada masa perkuliahan biasa. Waktu PPL regular dibagi sebagai berikut: 1 (satu) minggu kegiatan di kampus burupa pembekalan terhadap mahasiswa, 1 (satu) minggu kegiatan orientasi kemasyarakatan tempat PPL,12 (dua belas) minggu pelaksanaan PPL di Desa Labsite, dan 1 (satu) minggu kegiatan seminar evaluasi (ujian terbuka), dan 1 (satu) minggu penyusunan laporan kegiatan PPL.

Kegiatan PPL dilaksnakan selama 16 minggu mahasiswa sebagi berikut: (a) mengikuti pembekalan PPL, (b)

 ISBN 978-602-14314-8-1

mendapat informasi pembagian lokasi PPL, (c) berangkat ke lokasi PPL, (d) membuat laporan PPL, (e) menyerahkan laporan PPL ke LAB, (f) konsultasi dengan DPL.

Tugas dosen Pembimbing Lapangan sebagai berikut: (a) mengantar mahasiswa yang dibimbing; (b) memberi bimbingan kepada mahasiswa; (c) memantau mahasiswa, (d) menguji dan menilai laporan mahasiswa, (e) mengikuti seminar laporan PPL, (f) menjemput mahasiswa.

Dokumen yang harus dibuat dan diserahkan ke Prodi dan Lab PLS berikut: proposal kegiatan PPL, bahan/ media belajar PPL, dan Laporan akhir PPL. Penilaian hasil pelaksanaan PPL berbasis Desa Labsite, terdiri dari: (1) Aspek yang dinilai: (a) Kemampuan konseptual, dengan bobot: 30; (b) kualitas dan kuantitas kegiatan di lapangan, dengan bobot: 30; (c) laporan berkala dan laporan akhir (termasuk seminar) bobot: 20; dan (d) kedisiplinan konsultasi dan kerjasama, dengan bobot:20.

Nilai akhir mahasiswa ditentukan oleh tim anggotanya terdiri dari kepala laboratorium PLS dan dosen pembimbing dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan penilaian pamong, serta pihak pihak lain ditempat magang.

Materi Program PPL Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta observasi yang dilakukan, maka materi program PPL mahasiswa tentang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: (a) Pengelolaan Sumber Energi Alternatif, dan (b) Pengembangan usaha Produktif Rumah Tangga atau Paska Panen. Materi yang telah ditentukan sebagai materi PPL, selanjutnya disusun rancangan silabus pembelajaran PPL.

Hasil PPL Berbasis Keunggulan Lokal Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat di desa Labsite Wonoagung Kecamatan Kasembon.

Data yang dipaparkan pada bagian ini merupakan implementasi atau pelaksanaan desain model pembelajaran PPL Pemberdayaan Masyarakat mahasiswa S2 Prodi PLS pada Semester Gasal 2013/2014. Implementasi Model permbelajaran dimaksud dilaksanakan sengan langkah-langkah pembelajaran yang telah disiapkan dan dikemas pada desian model pembelajaran, dengan rincian langkah meliputi: (1) pembekalan, (2) persiapan lapangan, (c) orientasi lapangan, (4) Menyusun proposal, (5) implementasi program PPL, (6) monitoring dan evaluasi, (7) penyusunan laporan, dan (8) seminar laporan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

Pembekalan PPL. Pelaksanaan pembekalan PPL dilaksanakan pada pertemuan pertama. Pada pertemuan tersebut diikuti oleh 8 (delapan) mahasiswa. Agenda utama pada pertemuan pertama adalah pelaksanaan kontrak belajar proses perkuliahan. Pada awalnya dosen pendamping lapangan menyampaikan tujuan PPL beserta

indikator pencapaian tujuan perkuliahan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, dosen menyampaikan materi belajar dan lokasi desa labsite yang telah dipilih. Pada akhir pertemuan, diperoleh kesepakatan bahwa seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan sesuai desain yang direncanakan.

Persiapan Lapangan. Sebelum mahasiswa melaksanakan PPL dilakukan pematangan teori pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat melalui penerapan model pembelajaran studi lapangan ke lembaga *best practise*. Penilaian atas kemampuan mahasiswa dilakukan melalui penyusunan laporan dan dipresentasikan serta pertanyaan lisan atas laporan yang disusun secara berkelonpok. Secara umum diperoleh data bahwa pemahaman mahasiswa terhadap materi konsep dan teori teknik pengorganisasian masyarakat tidak ada masalah.

Orientasi Lapangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan mahasiswa terhadap kondisi tempat/ lembaga tempat PPL dan melakukan identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan melalui PPL. Kegiatan pendukung yang dilakukan meliputi: mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) khusus yang berkaitan dengan rencana pengembangan program ke PLS-an, mengkaji data dasar/database yang memuat tentang informai kelompok sasaran PLS dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok.

Menyusun Proposal Kegiatan PPL Pemberdayaan Masyarakat. Substani proposal berisi rencana kegiatan atau program yang bersinergis dengan program desa berdasarkan RPJMDS dan kebutuhan masyarakat. Proposal tersebut dikonsultasi kepada DPL untuk mendapat saran atau masukan, dan persetujuan

Implementasi PPL Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan program kegiatan PPL di desa Labsite Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang selama 2 bulan. Intensitas kegiatan PPL di Desa Wonoagung dilakukan setiap minggu selama 4 hari, yakni hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kecuali ada kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang di luar hari tersebut. PPL pemberdayaan masyarakat berdasarkan identifikasi telah menghasilkan program pemberdayaan masyarakat yang sedang dalam proses dilaksanakan masyarakat, yakni Usaha Produksi Rumah Tangga Dodol Durian, serta Pengelolaan Sumber Energi Alternatif Biogas.

Penyusunan Laporan PPL. Hasil kegiatan PPL masing-masing individu menyusun laporan berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan oleh dosen pembinan matakuliah. Sistematika laporan hasil PPL sebagai berikut: Lembar pendahuluan terdiri dari sampul, lembar persetujuan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Hasil Kegiatan PPL Berdasarkan Identifikasi Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Usaha Produktif Dodol Durian dan Singkong.

Industri olahan pangan dan dodol durian yang dikelola PKBM Desa

 ISBN 978-602-14314-8-1

Wonoagung dilatarbelakangi oleh keadaan ibu-ibu yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami di sawah. Para ibu tersebut menganggur setelah melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu tumah tangga, sehingga muncul gagasan pada fasilitator desa untuk bisa memberdayakan ibu-ibu dengan memanfaatkan potensi yang ada di Dusun Jabon Garut yang memiliki sumberdaya alam yang sangat berlimpah terutamaa pohon singkong dan pohon durian yang belum dimanfaatkan dengan maksimal sehingga tidak memiliki nilai jual yang tinggi.

Adapun kegiatan rielnya sebagai berikut: (a) pelatihan pengembangan usaha kelompok, (b) pelatihan peningkatan pembuatan bahan pangan olahan, (c) asistensi/mengundang konsultan, (d) mengadakan kunjunghan belajar, (e) mengadakan pelatihan pengemasan bahan olahan, dan mendaftarkan produk olahan ke Dinkes untuk mendapatkan PIRT.

Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Energi Terbarukan Biogas.

Biogas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi langka oksigen (anaerobic) menjadi sumber energi alternatif yang sudah mulai dipilih. Manfaat biogas adalah sebagai berikut: (a) salah satu energi alternatif yang baru dan terbarukan, (b) apinya dapat diperoleh secara gratis tanpa harus membeli gas elpiji, minyak tanah atau harus mencari kayu bakar dari gas yang dihasilkan oleh reaktor biogas, (c) mengurangi waktu untuk mencari kayu bakar, (d) mengurangi pencemaran udara akibat CO2 dari kompor dan tungku kayu bakar, (e) turut memelihara kelestarian alam, (f) mendapat pupuk organik dari hasil ampas biogas, dan (f) tidak ada pencemaran bau yang ditimbulkan dari bau kotoran ternak.

Pemberian skill/kemampuan, kepada perorangan yang berminat tentunya akan mendaftar menjadi user biogas akan difasilitasi dengan subsidi 2.000.000 dari HIVVOS dan selebihnya biaya mendiri. Terlepas dari hal itu user juga diberikan pengetahuan melalui pemakaian, pemeliharaan serta fungsi – fungsi komponen biogas. Selain itu diberikan juga pelatihan terhadap beberapa orang user biogas yang nantinya akan dijadikan teknisi biogas.

Tahapan terakhir yaitu keberlanjutan, dalam hal ini terlihat adanya pendampingan kepada user biogas, seperti yang disampaikan oleh Pak Lasiman salah satu teknisi biogas di Dusun Jabon Garut DesaWonoagung, beliau menyampaikan adanya pertemuan antara user biogas, teknisi dan perangkat desa untuk menyampaikan keluhan – keluhan atau saran – saran yang mereka dirasakan selama menggunakan biogas tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap pemberian skill saja tetapi juga pendampingan juga dilakukan oleh Bapak Lasiman dan Bapak Samin dengan pengecekan alat serta mendengar saran – saran dari warga.

Desain Implementasi Pembelajaran Mahasiswa Melalui Kegiatan PPL

Desain kegiatan PPL mahasiswa dengan kegiatan PPL melaksanakan identifikasi kebutuhan dan masalah serta penentuan kegiatan/program PLS: (1) Mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) khusus yang berkaitan dengan rencana pengembangan program ke PLS-an. Apabila dokumen belum ada maka tugas kita adalah membantu desa dalam penambahan rencana pengembangan desa dalam bidang ke-PLSan. (2) Mengkaji data dasar/database yang memuat tentang informai kelompok sasaran PLS. Apabila tidak tersedia maka kita akan membantu desa menyiapkan data dasar yang memuat sasaran dan potensi pengembangan PLS sesuai /terbatas pada lokasi tempat kegiatan. Dalam kajian data dasar dapat dilakukan dua hal: (a) Calon kelompok saran yang masalah yang perlu dipecahkan, (b) Potensi yang mendukung pelaksanaan program. (3) Mendaftar program/ kegiatan yang perlu dilaksanakan berdasakan masalah yang ada. (4) Menetapkan program/ kegiatan yang akan dilakukan. Sebenarnya kegiatan ini merupakan pengulangan kegiatan identifikasi yang telah dilakukan sebelum melakukan magang. Oleh sebab itu kegiatan penentuan program ini merupakan upaya memastikan apakah rencana awal sudah layak diimplementasikan tidak ada perubahan. Kegiatan dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok mahasiswa tergantung pada cakupan program yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan PPL tersebut mahasiswa bertindak sebagai fasilitator, pendamping, mengorganisir masyarakat.

PPL yang dilaksanakan pada desa labsite PLS memberikan pembelajaran pengalaman langsung kepada mahasiswa S2 bidang pendidikan nonformal dan informal, khususnya pemberdayaan masyarakat. Selain itu efektivitas pembelajaran PPL di labsite Desa Wonoagung, mahasiswa memproleh kompetensi sebagai agen perubahan. Kompetensi itu meliputi: memahami sasaran, menumbuhkan kesadaran masyarakat, komunikasi, pengelolaan pembaharuan, pengelolaan pembelajaran, membangun jaringan, teknik pendampingan, fasilitasi, dan kompetensi lainnya.

PEMBAHASAN

Desain Penguatan Desa *Labsite* Berbasis Keunggulan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat

Perwujudan dari kegiatan memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dalam kurikulum Program S2 PLS ini adalah kegiatan belajar sambil bekerja dengan cara ikut serta mengerjakan suau tugas kegiatan yang relevan dengan pendidikan luar sekolah di suatu masyarakat.

Dalam rangka memadukan aspek konsep dengan empirik (realita), aspek teoritis dengan praktis, dan aspek pengetahuan dengan keterampilan, maka kegiatan proses belajar-mengajar di Prodi S2 Pendidikan Luar Sekolah ditunjang oleh labsite (laboratorim masyarakat di luar kampus). Penyelenggaraan proses pembelajaran

 ISBN 978-602-14314-8-1

yang dilaksanakan secara terpusat dalam satu wilayah/kawasan/komunitas tertentu, dan menjadi sebuah *gerakan* bagi masyarakat yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Salah satu layanan program pembelajaran yang dipandang penting, menjadikan *desa lab site (laboratorium sosial)* berbasis keunggulan lokal.

Fungsi dari desa laboratorium sosial (labsite) adalah: (a) sebagai sumber belajar untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran terdiri dari 3 ranah yakni: ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan/afektif. (b) sebagai metode pembelajaran, (c) sebagai prasarana pendidikan (Panduan Pengembangan Lab. PLS FIP UM, 2013).

Fungsi dan peran laboratorium sangat penting sebagai tempat yang dapat dijadikan sebagai pusat sumber belajar mahasiswa. Oleh karena itu perlunya pengembangan program-program laboratorium Labsite Jurusan PLS dikelola dengan baik untuk mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan, fungsi pengadaan/ pengembangan media pembelajaran, fungsi penelitian dan pengembangan dan fungsi lain yang relevan untuk peningkatan efektivitas dan efisien pembelajaran pada jurusan Pendidikan Luar Sekolah.

Penguatan Desa Wonoagung berbasis keunggulan lokal sebagai labsite pemberdayaan masyarakat bagi mahasiswa program S2 Prodi PLS melalui kegiatan PPL sangat penting. PPL berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa memberikan pengalaman langsung dalam masayarakat sebagai agen perubahan, fasilitator, penyuluh pendamping dalam menggerakkan potensi alam dan potensi sumber daya manusia dalam masyarakat. Menurut Anwas (2013) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri. Bentuk pemberdayaan perlu disesuaikan dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Jadi yang dimaksud kawasan labsite adalah sebuah tempat/lokasi yang mempunyai ciri serta mempunyai kekhususan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran studi lapangan dan PPL mahasiswa berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Setiap tempat yang mempunyai ciri dan identitas khas merupakankeunggulan guna implemen tasi pengembangan kegiatan prodi PLS (Wibowo, http://desacilembu.blog-spot.com-/2011/07/cilembu-sebagai-labsite di akses 3 Januari 2013).

Labsite pendidikan nonformal dan informal memiliki fungsi: 1) tempat pengakajian dan kebijakan pe ndidikan nonformal informal. Sebagai tempat pengkajian dan kebijakan akan dipergunakan oleh tim pengkaji dan pengembang untuk melaksanakan uji kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, uji dampak kebija kan, ujicoba program PNFI, ujicoba inovasi program PNFI, ujicoba kurikulum, ujicoba media dan sarana pembelajaran pembelajaran, ujicoba

programpeningkatan kompetensi SDM PNF dan desiminasi atau replikasi program PNFI. 2) tempat penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan informal.

Desain Implementasi Pembelajaran Mahasiswa Melalui Kegiatan PPL

Tahap awal kegiatan PPL adalah melaksanakan identifikasi kebutuhan dan masalah serta penentuan kegiatan/program PLS. Kegiatan ini merupakan upaya memastikan apakah rencana awal sudah layak diimplementasikan. Kegiatan dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok tergantung pada cakupan program yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan PPL tersebut mahasiswa bertindak sebagai fasilitator, pendamping, mengorganisir masyarakat.

Peran pembelajaran sebagai fasilitator, dan pendampingan didukung oleh pendapat Prastowo (2010) menjelaskan mahasiswa sebagai pendamping warga masyarakat agar mereka menjadi seorang individu yang mempunyai semangat tinggi. Dalam proses pendapingan dalam kegiatan PPL, mahasiswa harus berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam kegiatan PPL di desa lab sosial ini mahasiswa dilatih untuk menjadi motivator yang sabar dan tekun, tidak mudah menyerah dalam menghadapi problema masyarakat, sebagai pembimbing, dan mengorganisir masyarakat.

Efektivitas pembelajaran PPL di *labsite* Desa Wonoagung, mahasiswa memperoleh kompetensi sebagai agen perubahan, kompetensi itu meliputi: kompetensi pemahaman sasaran, kompetensi menumbuhkan kesadaran masyarakat, kompetensi komunikasi, kompetensi pengelolaan pembaharuan, kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi membangun jaringan, kompetensi pendapingan, kompetensi sebagai fasilitator, dan kompetensi lainnya.

Kompetensi yang diperoleh melalui pembelajaran langsung ke lapangan melalui kegiatan PPL ini diperkuat oleh pendapat Anwas (2010) yang menjelaskan bahwa mengorganisir, melakukan pendapingan, dan memahami asaran program PLS merupakan kemampuan yang sangat perlu dimiliki oleh mahasiswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, desain desa Labsite berbasis keunggulan lokal yang dijadikan sasaran Program Pengalaman Lapangan mahasiswa S2 Prodi PLS Pascasarjana UM berdasarkan Identifikasi calon desa sasaran bertujuan mengetahui tingkat kelayakan suatu desa. Pembelajaran PPL ini dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang implementasi program pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, namun juga mendapatkan pengalaman praktis dengan pihak-pihak atau lembaga yang telah berkecimpung dalam pemberdayaan masyarakat.

Kedua, desain implementasi pembelajaran mahasiswa melalui kegiatan PPL didasarkan hasil identifikasi mahasiswa yakni

 ISBN 978-602-14314-8-1

pemberdayaan masyarakat menangani program olahan makanan camilan dodol durian dan energi terbarukan dengan biogas. Dalam pelaksanaan PPL tersebut mahasiswa bertindak sebagai fasilitator, pendamping, mengorganisir masyarakat. Meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selalu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Ketiga, mahasiswa memproleh kompetensi sebagai agen perubahan, kompetensi itu meliputi: kompetensi pemahaman sasaran, kompetensi menumbuhkan kesadaran masyarakat, kompetensi komunikasi, kompetensi pengelolaan pembaharuan, kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi membangun jaringan, kompetensi pendampingan, kompetensi sebagai fasilitator, dan kompetensi lain.

Saran

Pertama, Kegiatan PPL di Desa Labsite berbasis keunggulan lokal ini diharapkan dapat membuka jaringan baru dengan lembaga/pihak yang menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menjalin kemitraan yang positif. Karena itu, pihak Jurusan PLS sebaiknya dapat mengelola pelaksanaan program kegiatan belajar dengan baik dan memonitor pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sehingga dapat mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran.

Kedua, kegiatan PPL pemberdayaan masayarakat sebaiknya dimanfaatkan dengan baik sebagai ajang untuk memotivasi diri mahasiswa sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan masyrakat best practise.

DAFTAR PUSTAKA

Anwas, O.M. (2013). *Pemberdayaan Masayarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta

Boyle, Patric G., (1981). *Planning Better Program.* New York: McGraw-Hill.

Kindretvater. (1980). *Nonformal Education as Empowering Process*. New York: Jossay-Bass.

Prastowo. J. (2010). *Belajar dari Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.

P2 PNFI Jawa Barat. (2012). *Petunjuk Teknis Desa Labsite*. P2PNFI: Jawa Barat

Wahyuni, Sri. (2011). *Menghasilkan Biogas dari Aneka Limbah*. Jakarta: Agro Media Pustaka

Wibowo, http://www.google.com, (MEDIA ONLINE) diaKses tanggal 12 Agustus 2013

MEMBANGUN MASYARAKAT PEMBERDAYA
(How To Build Empowering Society)

oleh:
ANSORI, S.Pd. M.Pd.
Dosen Program Studi Pendidikan Luar Sekolah
STKIP Siliwangi Bandung

Abstract

Education is a humanization process. Education to build and develop a variety of potential available in the community. Until they are able to utilize, manage and maintain with the aim to provide the best value for humanity. Not only to maintain the extent of utilization. Indeed, the most impirtant is ability to keep it for the continuity of next generations in the future. This is the basic assumption, why it is important to be able to build a community empowerment completely.

Keyword : education, community empowerment

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat dewasa ini memunculkan adanya berbagai perubahan yang terjadi di tengah masyarakat itu sendiri. Berbagai mobilisasi sosial berkembang dengan demikian cepat dan dinamis. Hal ini mendorong adanya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Bahkan bila dicermati, dinamika sosial mempunyai makna yang strategis dalam proses pembangunan sesuai dengan era globalisasi dan arus informasi yang semakin deras dalam puncak keunggulan budaya. Perubahan sosial memiliki makna strategis karena dinamika sosial mempunyai interelasi, interdependensi, dan korelasi yang erat dengan perkembangan budaya, pertumbuhan ekonomi, serta pembinaan politik yang bersifat integral komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka, bahkan pada masa orde baru, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami fase pembangunan yang sangat pesat. Hal ini pun memperluas kesempatan kepada setiap anggota masyarakt untuk dapat memperbaiki kualitas kehidupannya. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik (Katz dalam Moeljarto, 1987). Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, dan indikator yang sekaligus menjadi domain setiap negara berkembang. Dalam konsep pembangunan terdapat interpetasi yang secara diametris bertentangan satu sama lain, mulai dari perbedaan perpektif

 ISBN 978-602-14314-8-1

ontologi dan epistemologi pada tingkat filsafat sampai pada tingkat empirik. Paradigma pertumbuhan sosial ekonomi ditinjau dari konsep pembangunan *'growth paradigm'* menimbulkan kelompok negara maju dan berkembang. Untuk mengejar ketertinggalan sosial ekonominya, negara-negara berkembang menerapkan konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigma*) yang ditandai oleh meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional (*gross national product*). Peningkatan GNP ternyata tidak menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan nasional dan harapan *'trickle down effect'*.Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya berbagai program yang dilakukan pada masa orge baru, kini mulai diganti dengan berbagai program lainnya, yang dianggap mampu menjadi solusi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, saat ini maupun di masa yang akan datang.

Dalam berbagai kasus, pembangunan justru memiliki dampak turunan yang menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat. Pertambahan beragam spesifikasi jenis pekerjaan, menuntut manusia yang terspesifikasi pula. Bagi kelompok masyarakat tertentu hanya akan menyebabkan adanya keteringgalam dalam pembangunan. Inilah yang kemudian menjadi sumber permasalahan dalam pembangunan masyarakat. Berbagai program pembangunan, bahkan belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Mengingat paradigma pertumbuhan telah menimbulkan ketimpangan yang lebih besar, maka diterapkan alternatif lain, yakni konsep pembangunan dengan paradigma pertumbuhan dan pemerataan. Hasil konsep yang disebut belakangan termanifestasikan dalam perbaikan sosial ekonomi masyarakat, meskipun dikhawatirkan terjadi eksploitasi terhadap SDA yang mengancam kelangsungan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pendekatan konsep pembangunan manusia (*human development*). Sebab pembangunan, tanpa disertai dengan proses pemberdayaan dan pembangunan masyarakat justru hanya akan memperparah kondisi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan, menurunkan berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sedangkan masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang yangharus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam masalah manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Dan kini, saatbentuk pemerintahan yang lebih demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Merubah situasi dan kondisi masyarakat memang

membutuhkan berbagai pendekatan yang komprehensif, pada saat kini pembangnan memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Hal inilah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pembangunan itu sendiri. Sebab, pada dasarnya, pembangunan fisik hanya bisa dilaksanakan dan dilanjutkan, bilamana pembangunan secara psikologis dapat dilakukan dengan baik. Agar berbagai ketimpangan yang diakibatkan oleh pembangunan dapat diatasi degan solusi yang konstruktif.

Pembahasan

Permasalahan umum dalam proses pembangunan adalah upaya melibatkan masyarakat dalam berbagai proses pembangunan itu sendiri. Inilah urgensi penting pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah bahwa konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Kemampuan untuk dapat memutuskan atau berkehendak secara mandiri bukan berarti melepaskan diri dari tanggungjawab negaradalam rangka melindungi rakyat. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya)kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Namun, dalam hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan secara berkelanjutan dan memperluas aksesibilitas terhadap sarana-sarana yang dapat membantu masyarakat, baik secara materiil maupun immateriil.

Keterlibatan masyarakat yang mandiri sebagai partisipan dalam proses pembangunan bermakna pada terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di dalam tingkat yang jauh lebih besar (makro), yaitu ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Permendagri RI Nomor 7 Tahhun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

 ISBN 978-602-14314-8-1

(Pasal 1 , ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Standar kemiskinan sendiri dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan dalam hal keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasokkebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004). Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat ? Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Langkah pertama, yaitu ciptakan iklim yang memperkuat daya, dan melindungi masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Program penguatan hal seperti ini harus dikembangkan dengan menggunakan pendekatan pendidikan yang berkelanjutan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan itu sendiri. Karena, dalam beberapa hal, pendidikan jauh lebih aksesibel dalam membangun kemandirian dalam rangka penguatan potensi masyarakat yang ada, baik secara individual maupun secara sosial.

Kedua, perkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), sehingga dapat berjalan dan dimanfaatkan secara optimal, dengan program pelestarian yang tepat. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar, ini adalah bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing masyarakat dalam pembangunan dan persaingan global. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan palingbawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di daerah pedesaan, yang menjadi pusat konsentrasi penduduk yang minim keberdayaan. Untuk itu,

perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini, permasalahan pemberdayaan pada level masyarakat terbawah (*grassroot*) merupakan pekerjaan terpenting dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di manapun. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern yang tepat, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawabanadalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatanpartisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Dalam upaya pembangunan karakter masyarakat seperti itu, peran pendidikan sangat dominan. Karakter masyarakat berdaya tidak mungkin dapat dibangun dengan pendekatan diluar pendidikan. Kesadaran akan status dan peran dirinya di tengah pembangunan dan dunia secara global, dapat didasarkan pada upaya pendidikan yang berkelanjutan dan komprehensif.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus mampu mencegah (*preventing*) yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat (*pro poor*). Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah, selain itu isolasi hanya akan membuat masyarakat semakin terbatas dalam aksesibilitas. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), melainkan harus berfokus pada penguatan sektor produktif dalam kehidupan masyarakat. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain), termasuk dalam berbagai usaha produktif dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Sehingga, kemandirian masyarakat dalam berbagai tantangan kehidupan baik dalam skala regional maupun global mampu untuk dapat berdiri sebagai salah

 ISBN 978-602-14314-8-1

satu pilar kemandirian dalam perekonomian nasional.

Langkah kedua : Program Pembangunan Pedesaan yang Terpadu.

Di berbagai belahan dunia, pemerintah negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi pedesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan (Sunyoto Usman, 2004). Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan *output* dan pendapatan para petani, hal ini menjadi salah satu prioritas yang penting, terutama untuk beberapa negara agraris seperti halnya Indonesia. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju, di era pasar bebas seperti ini, berbagai kebutuhan pada produk pertanian secara langsung maupun produk turunannya menjadi komoditas yang perlu untuk dikembangkan, karena akan mendorong kemandirian petani dan negara itu sendiri. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan/ produk kreatif yang berbahan dasar hasil-hasil pertanian. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternatif menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan, pengembangan seperti ini akan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai saluran perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan, program pembangunan masyarakat terpadu,tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yangdapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor yang bertujuan untuk pengembangan program yang jauh lebih luas dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk senantiasa mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara sosial tetap dekat dengan desa, tetapi secara eknomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti

kota. Ini membantu masyarakat untuk mempercepat proses perputaran modal di pedesaan, sehingga petani tidak lagi tergantung pada sistem perekonomian tradisional dimana barter menjadi pilihan utama, bahkan dalam kondisi tertentu justru memaksa petani terjebak bujukan para tengkulak dan spekulan pasar.

Sama seperti halnya proses pembangunan pedesaan, pendapat lain dikemukakan oleh J. Nasikun (dalam Jefta Leibo, 1995), telah mengajukan strategi pemberdayaan masyarakat yaitu : (1) Strategi pembangunan gotong royong, (2) Strategi pembangunan Teknikal-Profesional, (3) Strategi Konflik, (4) Strategi pembelotan kultural. Dalam strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinyamasyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan. Dengan demikian, rasa tanggungjawab dan rasa memiliki diantara anggota masyarakat dapat dibangun dengan baik. Ini akan membantu proses pemberdayaan itu sendiri, agar terus berkembang dan berkelanjutan.

Sedangkan, strategi pembangunan Teknikal – Profesional, dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen–agen pembaharu (*change agent*) sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharu sangat dibutuhkan, terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharu merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara–cara yang lebih kreatif sehingga hambatan–hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat ditekan seminimal mungkin. Strategi Konflik, melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasasi oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil, demokratis dan menyeluruh.

Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat. Ini secara tidak langsung membutuhkan pendekatan penyadaran, melalui pendidikan yang berkesinambungan, agar masyarakat semakin memahami peran dan statusnya dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Strategi pembelotan kultural, menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu

 ISBN 978-602-14314-8-1

gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis-religius. Strategi ini merupakan reaksi terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang berkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan, bahkan penggunaan teknologi seringkali menumbuhkan adanya permasalahan baru yang berhubungan dengan dehumanisasi[3]. Proses ini membuat manusia dan masyarakat teralienasi[4] dalam kehidupannya sendiri. Dalam berbagai hal, program pembangunan seringkali dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang cukup tinggi. Misalnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi penggunaan alat berteknologi tinggi, dan sebagainya. Hal ini akan diperparah dengan permasalahan kebudayaan yang saling berbenturan, dimana masyarakat tidak siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembangunan kebudayaan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam sisi lainnya, pendidikan tidak mampu memberikan penguatan karakter kebudayaan yang lebih baik[5]. Inilah yang akan menghambat berbagai program pembangunan, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang komprehensif untuk mampu menjawab permasalahan tersebut, agar proses pemberdayaan tidak terhambat permasalahan yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers,partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyakkeunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro Eko, 2002). Pendekatan pendidikan luar sekolah bisa menjadi jembatan, untuk membangun sikap saling menghormati satu sama lain, dalam konteks pemberdayaan, sehingga pembangunan masyarakat yang berdaya, harus didasarkan pada bagaimana membangun program pendidikan luar sekolah yang komprehensif, aktual, konstruktif dan berkelanjutan, agar masyarakat benar-benar siap dalam menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pembangunan dewasa ini.

Penutup

Pembangunan secara fisik, telah lama menjadi salah satu bagian utama dalam proses pembangunan. Namun, dalam kenyataannya, pembangunan fisik

[3] LihatTilaar. 2003. Pendidikan dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung; Remaja Rosdakarya
[4] *Ibid*, hal. 108
[5] Lihat Koentjaraningrat. 2001. Antropologi, Suatu Pengantar. Jakarta; Rineka Cipta.

saja, hanya membuat masyarakat semakin terasing dalam kehidupannya secara sosial maupun dalam hal karakter kebudayaan yang sejatinya menjadi karakter dalam berkehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang. Pendidikan luar sekolah memberikan kesempatan kepada masyarakat, untuk terus terlibat dalam proses pembangunan baik secara fisik maupun secara kultural. Sehingga, nilai karakter individu, masyarakat dan budaya tidak lagi hilang karena masalah kepentingan pembangunan fisik dan mengorbankan karakter budaya Indonesia di masa yang datang.

Referensi

Christenson and Robinson.1994. *Community Development in Perspective*.Iowa;Iowa State University

Gregorius Sahdan. 2008. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Jurnal Ekonomi Rakyat.

Faturochman, dkk. 2007. *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

J, Nasikun. 1995. Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta : Andi Offset.

Koentjaraningrat. 2001. *Antropologi, Suatu Pengantar*. Jakarta; Rineka Cipta.

Kutut,Suwondo. 2005. *Civil Society* Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar & Percik.

Suharto,E. 2011. *Pemberdayaan Rakyat*. Ceramah diklat PIM II. LAN, Jakarta

Sunyoto Usman. 2004.*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sutoro, Eko. 2002.*Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda. Desember 2002.

 ISBN 978-602-14314-8-1

PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

oleh:
Bagus Kisworo
PLS FIP UNNES

Abstrak

MEA merupakan sebuah bentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dengan konsep MEA Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, semua pihak dan pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan atau program yang strategis dalam menyongsong MEA, agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, dan yang paling utama adanya sinergitas yang terorganisir antara pemerintah dan para praktisi pendidikan sangat diperlukan, karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis dalam mengembangkan SDM yang dapat menghadapi berbagai konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan dalam MEA.

Beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Tidak hanya dampak, ada beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi MEA. Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia.

Pengembangan SDM adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi SDM agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud, adalah pada aspek pendidikan dan pelatihan. Mengingat tujuan Pengembangan SDM berkaitan erat dengan MEA, maka program pelatihan yang dirancang harus selalu berkaitan erat dengan berbagai dampak dan konsekuensinya, termasuk di dalam tujuan pelatihan membekali SDM dengan keterampilan yang dapat digunakan dalam menyongsong era MEA.

Kata kunci: Pendidikan Nonformal, Pengembangan SDM, MEA

 ISBN 978-602-14314-8-1

Rasional

Negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA mengisyaratkan bagi bangsa Indonesia untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkompeten dan mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin pesat. SDM dipandang memiliki peranan yang semakin besar bagi kesuksesan suatu bangsa. SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban,cost).

Dalam konteks MEA pengertian SDM harus dipandang secara makro seperti apa yang disampaikan oleh Nawawi (2003:37) yang mana pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja).

Mengacu pada Nawawi dapat disimpulkan unsur SDM dalam suatu bangsa, mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan dan atau menangkap input-input tersebut, teknologi dan cara apa yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan input-input tadi menjadi output-output yang memenuhi keinginan pasar, atau publik.

MEA merupakan sebuah bentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dengan konsep MEA Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan.

Oleh karena itu, semua pihak dan pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan atau program yang strategis dalam menyongsong MEA, agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, dan yang paling utama adanya sinergitas yang terorganisir antara pemerintah dan para praktisi pendidikan sangat diperlukan, karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis dalam mengembangkan SDM yang dapat menghadapi berbagai konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan dalam MEA.

Dampak dan Konsekuensi MEA

Beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Tidak hanya dampak, ada beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi MEA. Pertama, mutu pendidikan tenaga

kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. (National Geographic Indonesia 2014 : 12).

Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara.Pada 2015 mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namun laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi.

Dampak dan konsekuensi MEA yang akan dihadapi bangsa Indonesia memerlukan kebijakan yang strategis, dan salah satunya adalah melalui dunia pendidikan, dalam hal ini pendidikan tidak hanya dibebankan pada pendidikan formal semata, tetapi peran dari pendidikan nonformal menjadi sangat penting. Saling ketergantungan antara pendidikan formal dan nonformal semakin nyata ketika berbagai negara merasa perlu mengembangkan pendidikan nonformal bagi warga negaranya.

Pendidikan Nonformal dan pengembangan SDM menuju MEA

Dewasa ini kedudukan PNF semakin penting dan strategis. PNF tidak lagi sekedar sebagai pelengkap, penambah bahkan pengganti pendidikan formal, tetapi secara faktual sudah tumbuh menjadi jalur pendidikan yang mampu menjawab permasalahan pendidikan yang tidak dapat terselesaikan oleh pendidikan formal.

Kebijakan pendidikan nonformal dikemas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk kecakapan hidup sebagai target penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam pengembangan SDM. Ada beberapa macam PNF yang dapat diselenggarakan sebagaimana dinyatakan pada pasal 26 ayat (3) bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain.

 ISBN 978-602-14314-8-1

PNF diselenggarakan antara lain untuk memberikan kecakapan hidup (*life skill*) kepada peserta didik. dalam jurnal pendidikan dan kebudayaan (Subijanto,2005: 365) kecakapan hidup adalah kemampuan, keterampilan dan kecanggupan, yang diperlukan seseorang dalam menghadapi dan menjalankan kehidupan nyata.

kecakapan hidup mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di masyarakat. kecakapan hidup merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan mengembangkan kerjasama melaksanakan peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, dan memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu cakupan *life skill* amat luas seperti *Communications skill, Management skill, and planning skill*. (Anwar,2005:20-21).

Berdasar pada kebijakan pendidikan dan beberapa konsep, kecakapan hidup sangat penting diberikan kepada semua orang dalam rangka pengembangan SDM. Hal ini berarti program kecakapan hidup dalam pemaknaan program PNF diharapkan dapat menolong SDM Indonesia dalam menyongsong MEA.

Pengembangan SDM merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi manusia agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang.

Armstrong (1997:507) menyatakan sebagai berikut: "Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut".

McLagan dan Suhadolnik (Wilson, 1999:10) mengatakan: *"HRD is the integrated use of training and development, career development, and organisation development to improve individual and organisational effectiveness"*. (Terjemahan bebas: Pengembangan SDM adalah pemanfaatan pelatihan dan pengembangan, pengembangan karir, dan pengembangan organisasi, yang terintegrasi antara satu dengan yang lain, untuk meningkatkan efektivitas individual dan organisasi).

Definisi senada dikemukakan oleh Mondy and Noe (1990:270) sebagai berikut: *"Human resorce development is a planned, continuous effort by management to improve employee competency levels and organizational performance through training, education, and development programs"* (Terjemahan bebas: Pengembangan SDM adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan).

Sedangkan Harris and DeSimone (1999:2) mengatakan sebagai berikut: *"Human resource development can be*

defined as a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its members with necessary skills to meet current and future job demands". (Terjemahan bebas: Pengembangan SDM dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang).

Sementara itu, Stewart dan McGoldrick (1996:1) mengatakan: *"Human resource development encompasses activities and processes which are intended to have impact on organisational and individual learning".* (Terjemahan bebas: Pengembangan SDM meliputi berbagai kegiatan dan proses yang diarahkan pada terjadinya dampak pembelajaran, baik bagi organisasi maupun bagi individu).

Dari beberapa pengertian para ahli, dapat dikatakan bahwa Pengembangan SDM adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi SDM agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud, adalah pada aspek pendidikan dan pelatihan.

Mengingat tujuan Pengembangan SDM berkaitan erat dengan MEA, maka program pelatihan yang dirancang harus selalu berkaitan erat dengan berbagai dampak dan konsekuensinya, termasuk didalam tujuan pelatihan membekali SDM dengan keterampilan yang dapat digunakan dalam menyongsong era MEA.

Salah satu media, kegiatan atau aktivitas dalam pengembangan sumber daya manusia salah satunya melalui pendidikan atau pelatihan. Pada hakekatnya pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di sebuah negara. Namun sebelum proses pengembangan sumber daya manusia ini dilaksanakan, maka ada dua pertanyaan pokok yang harus dijawab, yaitu:

a. Apakah kebutuhan pelatihan kita?
b. Apa yang ingin kita penuhi melalui upaya pengembangan sumber daya manusia?

Setelah menentukan tujuan proses pengembangan sumber daya manusia, maka manajemen dapat menentukan metode-metode yang cocok dan media yang tepat untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan tersebut. Pada dasarnya banyak sekali metode dan media yang dapat digunakan, namun dalam prakteknya, pemilihan metode tersebut tergantung pada tujuan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, pengembangan sumber daya manusia harus selalu dievaluasi secara terus-menerus dalam rangka memfasilitasi perubahan dan memenuhi tujuan bangsa.

Tidak seorangpun yang menyangkal adanya hubungan yang erat antara pendidikan dan kualitas manusia. Kendatipun sesuatu negara memiliki dana dan sumber daya alam yang melimpah, namun keseluruhannya hanya sarana pasif dalam proses produksi, yang hanya bermanfaat apabila manusianya mampu mendayagunakan Kekayaan

 ISBN 978-602-14314-8-1

alam dan dana yang tersedia bagi kemakmuran bangsa. Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitasi manusia, karena melalui pendidikan terjadi pembentukan sikap, wawasan dan transfer ilmu dan teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa secara efektif, serta juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Sebelum pelatihan dapat diselenggarakan, kabutuhan akan hal itu perlu dianalisis lebih dahulu. Hal demikian disebut sebagai langkah/tahapan penilaian dari proses pelatihan. Menurut (Sjafri:2003:140). setelah tahap analisis kebutuhan dilakukan, maka harus melakukan beberapa tahapan berikutnya:

a. Penilaian kebutuhan pelatihan.
   1) Penilaian kebutuhan perusahaan.
   2) Penilaian kebutuhan tugas.
   3) Penilaian kebutuhan karyawan. (analisis berbasis dampak dan konsekuensi MEA)
b. Perumusan tujuan pelatihan.
   Perumusan tujuan pelatihan harus ada keterkaitan antara input, output, outcome, dan impact dan pelatihan itu sendiri.
c. Prinsip-prinsip pelatihan.
   1) partisipasi
   2) pendalaman
   3) relevansi
   4) pengalihan
   5) umpan balik
   6) suasana nyaman
   7) memiliki kriteria
d. Merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan.
   1) Pelatihan instruksi pekerjaan
   2) Perputaran pekerjaan
   3) Magang dan pelatihan
   4) Kuliah dan presentasi
   5) Permainan peran dan pemodelan perilaku
   6) Studi kasus
   7) Simulasi
   8) Studi mandiri dan pembelajaran program
   9) Pelatihan laboratorium
   10) Pembelajaran aksi.

Daftar pustaka

Armstrong, Michael. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.

David Megginson; Paul Banfield; Jennifer Joy-Matthews,(1993). Human Resource Development, Usa: Kogan Page Ltd

David M. Harris, Randy L. DeSimone, (1994) Human Resource Development The Dryden Press Series in Management.

Hadari Nawawi, (2003*), Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015, diakses tanggal 22 Mei 2015

McGoldrick, J. and Stewart, J. (1996) *'The HRM-HRD Nexus', in HRD: Perspectives, Strategies and Practice*, London: Pitman

Mangkuprawira. Sjafri. (2003). *Mananjemen Sumber Daya Manusia Strategik.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Mondy; Robert M. Noe, (1990) *Human Resource Management*, USA: Allyn and Baco

www.ilo.org/asia/lang--en/ ILO in Asia and the Pacific diakses tanggal 22 Mei 2015

 ISBN 978-602-14314-8-1

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MAMPU BERSAING DALAM MEA MELALUI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

oleh:
Dr. AZIZAH HUSIN M.Pd.
Prodi Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Unsri
azizahhusin66@yahoo.co.id

Abstrak. Menjalani kesepakatan dalam bidang ekonomi Negara-negara Asean (MEA), dibutuhkan kemampuan untuk berkompetisi. Kemampuan berkompetisi dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan meliputi pengetahuan, sikap, mentalitas dan nilai, dan kecakapan berwirausaha. Kemampuan yang cukup besar berperanitu adalah pembentukan mentalitas kewirausahaan yang yang unsurnya saling berhubungan. Wujud nyatanya adalah kepbribadian wirausaha. Mentalitas wirausaha tersebut sebagai modal utama diluar modal material yakni kemauan kuat, percaya diri, mandiri, etos kerja tinggi, berdisiplin, bertanggung jawab, jujur, berwawasan ke depan, dapat melakukan hubungan sesama manusia dengan baik. Melalui pendidikan wirausaha, dapat menjadikan bangsa Indoensia siap menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri.

PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat Indonesia akan menghadapi suatu kesepakatan dalam bidang ekonomi di tingkat negara-negara Asean yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, dimana anggotanya bersepakat kerjasama untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang ekonomi termasuk tenaga kerja. Pada masyarakat saat itu kondisi yang berkembang adalah persaingan dalam perdagangan, jasa, dan bisnis. Masyarakat sangat menggelobal, semua hubungan dapat terkoneksi satu sama lain. Tidak ada batas lagi antara Negara. Begitupun hubungan perdagangan dan ekonomi jadi terbuka dan bebas. Untuk itu dituntut kemampuan manusia dai suatu bangsa atau Negara agar dapat memberdayakan masyarakatnya sendiri, sehingga tidak tergilas oleh pesatnya kemajuan dari Negara-negara yang lebih dahulu sudah kuat ekonominya. Bagi Negara yang belum kuat perkembangan ekonominya dengan kualitas sumberdaya manusia yang baik, besar kemungkinan akan menjadi tuan rumah dinegara orang lain.Dengan keadaan ini, Negara yang kualitas sumberdaya manusianya kurang baik, maka akan lebih cenderung tidak menjadi tuan rumah di negarinya sendiri, karena lemahnya kemampuan untuk bersaing dengan Negara lain.

Untuk itu diperlukan kemampuan bangsa Indonesia dapat dan siap bersaing dengan Negara lain. Masyarakat diharapkan mampu memberdayakan diri sendiri dan mandiri secara ekonomi. Jika sudah berdaya secara ekonomi, maka masyarakat Indonesia akan sejahtera dan

 ISBN 978-602-14314-8-1

maju tidak tertinggal dengan Negara lain di lingkungan Asean.

Bagaimana menciptakan kemampuan bersaing dengan Negara lain. Jawaban yang paling dekat adalah melalui kemampuan berwirausaha. Dalam kemampuan berwirausaha mengandung kemampuan mandiri, kreatif, inovatif, ketekunan, kerja keras, disiplin diri dan waktu, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat dipercaya, tidak mudah menyerah, kemampuan meneghadapi resiko, kemampuan membaca peluang bisnis, kemampuan manajemen waktu dan pekerjaan, memiliki alternative banyak dalam memecahkan masalah, dan lainnya.

Kemampuan berwirusaha menyangkut tidak hanya berkaitan dengan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, namun menyangkut perilaku, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pekerjaan. Kemampuan berwirausaha dapat dilakukan dalam semua aspek kehidupan, seperti kemampuan bekerja dengan baik dan berkualitas, kemampuan dalam kehidupan dengan memiliki dan mengembangkan nilai-nilai positif dari cirri perilaku / kepribadian wirausaha. Kemampuan tersebut akan menbuat sukses di jenis apapun pekerjaannya, sehingga ia akan sukses dalam kehidupan.

Kondisi di Indonesia jumlah wirausahanya sangat kecil, tidak mencapai 0,2 % dari total penduduk. Tingkat pengangguran bertambah dari waktu kewaktu terutama pada kalangan lulusan perguruan tinggi. Jika dilihat dari besarnya biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah atau masyarakat itu sendiri, maka pengangguran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi sangat tidak diharapkan.Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan penggodokan keilmuan, sikap mental dan kecakapan dari perguruan tinggi telah menjadikannya kelompok barisan angkatan kerja berada pada level kemampuan intelektual. Mereka belum handal untuk memulai usaha awal, yang tentunya bekerja dengan keras baik secara fisik maupun mental, dan belum memiliki atau mengembangkan sikap mental wirausaha.

Sebagaiaman diketahui bahwa dunia pendidikan dapat melakukan usaha untuk merobah masyarakat melalui domain pengetahuan, afeksi, dan psikomotor. Melalui pendidikan kewirausahaan diharapkan dapat mencetak insane yang berkualitas dalam kehidupannya baik dalam bekerja, maupun dalam berwirausaha. Dengan memahami kondisi diatas, maka tulisan ini membahas mengenai bagaimanakah peran pendidikan kewirausahaan dalam menciptakan manusia yang dapat bersaing dengan negara lain.

PEMBAHASAN

Dahulu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat tidak terbiasa berkompetisi. Kehidupan sehari-harinya adalah bekerjasama, kooperatif, saling tolong menolong dan tidak individualis. Namun lama kelamaan, seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesatnya perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, budaya

berkompetisi mulai meningkat. Adapun factor penyebab perubahan seiring dengan pesatnya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam dunia pendidikan mengalami pergeseran yang besar. Dalam dunia pendidikan sebagai contoh yang cukup berpengaruh adalah dilaksanakannya penerimaan mahasiswa masuk perguruan tinggi dengan persaingan yang ketat serta pelaksanaan ujian nasional setiap tahun. Jika dahulu untuk mendapatkan pekerjaan masih mudah karena jumlah penduduk belum besar, lapangan pekerjaan membutuhkan tenaga kerja, maka persaingan untuk masuk masih rendah, didukung juga oleh budaya nepotisme yang tidak memperhatikan kualitas calon pekerja. Seiring dengan perjalanan waktu, jumlah penduduk yang makin bertambah, lulusan pendidikan khususnya yang sulit dapat pekerjaan, barisan angkatan kerja meningkat, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, himpitan ekonomi, membuat budaya kompetisi itu makin meningkat. Budaya berkompetisi yang berkembang itu bukan kompetisi dalam pengertian meliputi aspek untuk mengatasi persoalan sempitnya lapangan kerja. Namun yang berkembang adalah budaya untuk mendapatkan peringkat tinggi atau baik dalam aspek kecerdasan atau kognitif.

Sementara didalam fakta kehidupan ini ada aspek yang sangat penting dan mendesak khususnya menghadapi tekanan ekonomi adalah tidak mencukupinya ketersediaan lapangan kerja. Karena mentalitas masyarakat yang selalu berorientasi mendapatkan pekerjaan atau melamar pekerjaan, pada akhirnya pengangguran di semua level usia dan tingkat pendidikan makin meningkat, khususnya akhir-akhir ini dialami oleh tamatan perguruan tinggi (S1). Sehingga jenjang pendidikan yang diperoleh tidak jadi jaminan untuk mudah mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadikan problematika social ekonomi terutama masalah pengangguran. Faktor pengangguran dapat merugikan masyarakat cerminan dari tidak efektifnya antara biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan yang diperoleh dengan tujuan agar setelah tamat dari PT lalu bekerja, berkeluarga dan hidup layak. Namun kenyataan yang muncul berbeda. Jika memperoleh pekerjaan, banyak juga yang tidak sesuai dengan keilmuannya dan tidak seduai dengan kelayakan upah/gaji.

Dilema ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencarikan solusinya. Persoalan yang paling mendasar adalah sikap mental dari masyarakat yang selalu mengandalkan bantuan dari pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan atau budaya melamar pekerjaan. Selain itu fakta selanjutnya jika mereka sudah bekerja, pendapatan yang diperoleh tidak sebesar pendapatan jika seseorang melakukan praktek wirausaha.

Dari kondisi yang telah disebutkan diatas, tampaknya hal terbaik yang dilakukan adalah berwirausaha. Pandangan masyarakat terhadap praktik wirausaha adalah bagaimana untuk menjadi wirausaha ? nantinya akan rugi, perlu modal sedangkan mereka tidak punya modal, perlu kerja keras, dan lain-

 ISBN 978-602-14314-8-1

lain. Pandangan ini didasari sikap mental yang sudah lama terjadi dalam masyarakat dan lulusan perguruan tinggi. Sementara kualitas yang mereka sajikan adalah bekal akademis atau cerdas kognitif.

Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan wirausaha. Pendidikan wirausaha mengandung upaya untuk memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan kecakapan / skill berwirausaha. Produk akhir dari pendidikan kewirausahaan adalah membentuk insan yang memiliki kepribadian yang berkualitas sumberdaya manusia yang sehat rohani, yakni : kepercayaan diri, kemandirian, etos kerja, tanggung jawab, disiplin, tekun, jujur, dapat berkomunikasi dengan orang lain, berkemauan keras, dan beberapa sikap mental positif lainnya yang harus dimiliki sebagai pribadi wirausaha. Sikap mental dan perilaku tersebut diatas dapat sebagai modal utama dalam memulai wirausaha (Setiawan : 1993) . Jika sikap mental tersebut dikembangkan dan ditingkatkan, maka usahanya akan semakin besar dan baik prospeknya. Sehingga pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa berwirausaha itu perlu modal dapat dipupus. Karena pandangan mengenai perlunya modal sebagai syarat utama, menjadikan pengaruh yang negative bagi pertumbuhan wirausaha muda di Indonesia. Untuk itu perlu dipupuk dan didik agar masyarakat kuat dengan sikap mental yang kuat tersebut.

Mentalitas tidak mandiri tersebut perlu diubah menjadi mentalitas yang kuat dan percaya diri untuk menemukan solusi tentang masa depannya. Cara merobahnya adalah melalui pendidikan kewirausahaan pada mahasiswa. (Hendro : 2011).

Pendidikan kewirausahaan pada mahasiswa adalah usaha memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam bentuk pengetahuan, penanaman nilai-nilai, serta kecakapan sebagai bekal mereka berusaha menolong dirinya sendiri untuk dapat menciptakan lapangan kerja.

Krisis Global Membuat Pengangguran Terdidik Meningkat

Sudah bukan rahasia lagi bahwa tanpa krisis keuangan global, Indonesia sebenarnya sudah dihadapkan pada ancaman ledakan pengangguran terdidik yang semakin tinggi. Ancaman ini makin serius dengan adanya krisis global (Kompas: 2008 dalam Hendro : 2010). Yang paling rentan mendapat ancaman serius adalah pengangguran berpendidikan rendah. Sebanyak 55% angkatan kerja nasional adalah lulusan SD, disusul SMA dan sederajat lalu diikuti lulusan sarjana yang sekarang semakin besar. Pendidikan kewirausahana untuk menciptakan mindset agar tamatan perguruan tinggi tidak berpikir untuk selalu melamar pekerjaan. Menciptakan lapangan kerja terbukti lebih meningkatkan pendapatan yang jauh lebih baik daripada melamar pekerjaan.

Saat ini pertumbuhan lapangan kerja lamban dan arus modal dari luar negeri rendah. Fakta ini menuntut para lulusan SMA dan Perguruan Tinggi membekali diri dengan ilmu untuk menciptakan

lapangan kerja. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu kewirausahaan. Dengan ilmu kewirausahaan ini tercipta mindset di dalam diri para lulusan PT untuk tidak hanya berorientasi pada mencari kerja, tetapi menyadarkan bahwa ada pilihan menarik lainnya selain mencari kerja, yaitu menciptakan lapangan kerja (Kemendiknas : 2010). Dalam kurun waktu yang sama, pilihan menciptakan lapangan kerja terbukti menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada pilihan berkarir, mencari kerja, atau menjadi karyawan. Tentu saja hal ini bisa tercapai apabila mahasiswa dibekali pengetahuan, Wwasan, keterampilan, pola pikir, strategi, dan taktik yang mumpuni, yaitu kewirausahaan yang cerdas (smart entrepreneur, bukan hanya kerjakeras semata).

Kewirausahaan merupakan sebuah ilmu, seni, dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumberdaya, informasi, dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir (Kasal : 2010).

Adversity sangat terkait dengan keberhasilan wirausaha, karena menjalankan usaha pribadi memerlukan keberanian untuk menghadapi kegagalan, dan kemauan untuk mencoba terus menerus sampai berhasil. Oleh sebab itu, adversity tampaknya suatu prediktor yang baik bagi keberhasilan wirausaha. Menurut Rogers dan Shoemaker (dalam Kasal : 2010) keinovasian seseorang berkaitan dengan adapsi-inovasi. Artinya, semakin inovatif sifat seseorang semakin dia terbuka dan menerima inovasi. Dengan asumsi ini, seorang wirausaha yang memiliki ciri inovatif diharapkan akan menjalankan usahanya secara inovatif pula. Yang pada akhirnya, semua mengarah kepada kewirausahaan yang merupakan kemajuan dan kesejahteraan dunia, bahkan telah menjadi pangkal dari pertumbuhan ekonomi.

Di era globalisasi sekarang ini, dunia telah memasuki babak baru masyarakat global, yakni babak baru dari suatu era masyarakat yang semakin universal dan modern. Sekarang ini, masyarakat dunia dapat saling berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh gerak, ruang, dan waktu.

Globalisasi merupakan era masyarakat pengetahuan dengan sumber daya utama masyarakat bukan lagi bertumpuh pada alam, namun pada pengetahuan. “That its primary resource will be knowledge” (Peter Drucker 1993). Masyarakat berubah dari masyarakat tunggal yang berenergi politik, menjadi masyarakat pluralistik yang ber energi ekonomi (Widya : 2011).

Peranan dan Fungsi Kewirausahaan

Untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa khususnya dalam keterpurukan ekonomi bangsa ini membutuhkan orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha, yakni suatu semangat sikap mental positif (SMP) yang mengutamakan kinerja dan produktifitas dalam mengoptimalkan pencapaian target (goals). Oleh karena itu, semakin banyak anak bangsa yang memiliki jiwa wirausaha, semakin terbuka lapangan pekerjaan yang berdampak positif bagi pengurangan pengangguran dan

 ISBN 978-602-14314-8-1

peningkatan daya beli (purchasing power) masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan semakin apresiatif yang berdampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini (Kemendiknas : 2010).

Peranan Kewirausahaan

para wirausahawan merupakan generator penggerak perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Keadaan ini, akan berdampak positif bagi peningkatan daya beli masyarakat dan pendapatan negara. Semakin tinggi pendapatan negara, kemampuan negara untuk membiayai pembangunan secara berkelanjutan semakin terjamin.

Tantangan persaingan global, tantangan pertumbuhan penduduk, tantangan pengangguran, tantangan tanggung jawab sosial, keanekaragaman ketenagakerjaan, dan tantangan etika, tantangan kemajuan tekonologi dan ilmu pengetahuan, dan tantangan gaya hidup beserta kecenderungannya merupakan tantangan yang saling terkait satu sama lain. Dalam persaingan global, semua sumber daya antar-negara akan bergerak bebas tanpa batas. Sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan gaya hidup akan bergerak melewati batas-batas negara. Hanya sumber daya yang memiliki keunggulanlah yang dapat bertahan dalam persaingan. Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang cepat disertai persaingan yang tinggi akan menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan akan menimbulkan pengangguran bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki keunggulan dan daya saing yang kuat. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan sumber daya yang berkualitas yang dapat menciptakan berbagai keunggulan, baik keunggulan komparatif (comparative advantages) maupun keunggulan kompetitif (competitive advantages), di antaranya melalui proses kreatif dan inovatif wirausaha.(Kemendiknas : 2010)

Untuk dapat bersaing di pasar global sangat diperlukan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi yaitu barang dan jasa yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi diperlukan tingkat efisiensi yang tinggi. Tingkat efisiensi yang tinggi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi, yaitu sumber daya manusia yang profesional dan terampil yang dapat menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab tantangan baru. Selanjutnya kualitas sumber daya manusia yang tinggi tersebut hanya dapat ditentukan oleh sistem pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang kreatif dan inovatif. Sumber daya kreatif dan inovatif hanya terdapat pada wirausaha. Oleh sebab itu wirausahalah yang mampu menciptakan keunggulan bersaing melalui kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Tilaar: 2012).

Kewirausahaan bertujuan untuk mengurangi pengangguran

Kewirausahaan adalah suatu proses untuk menjadikan seseorang sukses dalam usaha ekonomi khususnya dan sukses dalam kehidupan umumnya.

Kewirausahaan adalah ilmu, seni dan keterampilan yang mengelola semua keterbatasan sumberdaya, informasi, dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir.

Perkembangan prosentase jumlah wirausahawan di Indonesia tidak begitu pesat. Padahal jumlah wirausahawan yang mandiri dan sukses akan jadi lokomotif ekonomi Indonesia yang mampu mengatasi tingkat pengangguran pasip maupun aktif dan pada akhirnya mampu mengatasi tingkat kemiskinan yang absolute.

Bila satu orang lulusan perguruan tinggi menjadi wirausaha, maka kemungkinan ia akan mengajak temannya sebagai partner atau karyawan. Jika jumlah lulusan yang menjadi karyawan afalah 10%, maka yang akan bergabung dengannya bisa menjadi 20% (satu partner dan 1 karyawan). Dengan demikian, jumlah pencari kerja angkatan tahun tersebutotomatis berkurang 30%. Seandainya sebagian kecil saja lulusan berpikiran sama, wirausaha bisa menjadi cara dan alternative untuk mengurangi tingkat pengangguran yang sekarang ini cukup tinggi (Hendro :2011).

Tujuan dan manfaat kewirausahaan

Pendidikan saja tidak cukup menjadi bekal untuk masa depan. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang sanggup mengubah "kesulitan" menjadi "peluang" dan memberikan kontribusi bagi perusahaan (Kompas, 3 November 2009). Kewirausahaan bisa diterapkan disemua bidang kehidupan. Dengan demikian kewirausahaan berguna bagi bekal masa depan bila ingin berkarir di bidang apapun.

Sumber kekayaan orang-orang kaya didunia berdasarkan hasil survey disimpulkan kekayaan itu diperoleh karena mayoritas(80%) menjadi pengusaha (wirausahawan), 20% terdiri dari menjadi top executive, dan hanya sedikit yang berasal dari warisan atau hibah orangtua atau leluhurnya.

Kewirausahaan sebelumnya dianggap adalah hasil bakat dan factor keturunan. Namun sekarang kewirausahaan dapat dipelajari dan dibuat strateginya karena telah menjadi ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus. Kewirausahaan telah menjadi lokomotif ekonomi suatu Negara. (Drucker:1991) mengatakan bahwa kemajuan perekonomian suatu bangsa akan dimotori oleh kewirausahaan yang visioner dengan daya kreativitas dan inovasi. Pernyataan ini dapat dibuktikan dari UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah sokoguru perekonomian Indonesia yang tahan terhadap krisis yang terjadi pada tahun 1998.

Jika orang yang berbahasa Inggris mengartikan kewirausahaan sebagai bisnis kecil yang baru, maka orang Jerman menafsirkan sebagai kemampuan dan kepemilikan yakni orang yang memiliki sekaligus menjalankan sendiri usahanya(Drucker:1991:27).

Ditinjau dari etimologis, wiraswasta merupakan suatu istilah yang berasal dari kata "wira" dan "swasta". Wira berarti berani, utama, atau perkasa. Swasta berarti berdiri sendiri. Dengan mempertimbankan arti etimoligs itu,,

 ISBN 978-602-14314-8-1

maka ternyata wiraswasta bukan berarti usaha partikulir atau sampingan, keterampilan berusaha sendiri. Jadi wiraswata adalah keberanian, keutamaan serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.

Unsur wiraswasta:

Wiraswastasesungguhnya mencakup beberapa unsure penting yang satu dengan lainnya saling terkait dan tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari yaitu :

1. unsur pengetahuan
2. unsur keterampilan
3. unsur sikap mental

Unsur pengetahuan adalah unsure kognitif mencirikan penalaran (reasoning) yang dimiliki seseorang, yaitu tingkat kemampuan berpikir seseorang yang umumnya lebih banyak ditentukan oleh tingkat pendidikannya baik formal maupun non formal. Makin tinggi dan luas pengetahuan seseorang, maka makin luas dan tinggi pula pengetahuan yang dimilikinya, pengetahuan seseorang dapat berkemban dari hasil belajar sendiri, atau self studi. Beberapa tokoh terkenal Einstein, James Watt, dan Adam Malik, contoh orang maju karena belajar sendiri.

Keterampilan motorik lebih berasosiasi pada kerja fisik anggota badan, tangan, kaki, mulut (untuk bersuara) dn bekerja dan berkarya. Unsur keterampilan pada umumnya banyak diperoleh melalui keterampilan. Tingkat keterampilan akan makin tinggi karena adanya ulangan. Seseorang yang telah bekerja lama akan lebi mahir daripada orang yang baru dan belum berpengalaman. Banyak berlatih dan displin yang tinggi sebagai kunci utama untuk memperoleh keterampilan yang tinggi.

Unsur sikap mental lebih mencirikan respon, tanggapan atau tingkahlaku seseorang ketika dia dihadapkan pada suatu situasi tertentu (Widya: 2011). Sikap mental lebih menggambarkan reaksi sikap dan mental seseorang menghadapi suatu situasi, misalkan dihadapkan untuk melakukan pekerjaan. Seseorang mungkin akan menerimanya dengan senang hati, menerimanya dengan berat hati, atau menolak, atau acuh tak acuh saja. JIka ia menerima pekerjaan tersebut akan dikerjakan dengan segera, ada yang suka menunda, ada yang bekerja asal-asalan, adanya malas, dan ada yang sungguh-sungguh.

Tingkah laku yang ditunjukkan tersebut banyak mencirikan sikap mentalnya. oleh seseorang dalam menghadapi situasi (pekerjaan). Rasa tanggung jawab, kejujuran, ketegasan keberanian, untuk mengambil tindakan dan inisiatif, dan berbagai tindakan lainnya, juga dapat menggambarkan sikap mental seseorang walaupun hanya bersifat lahiriah.

Bagi Indonesia, pengembangan sikap mental inilah yang paling penting untuk dapat melaksanakan pembangunan lebih baik. Setiap orang dituntut untuk dapat mengubah sikap mentalnya menjadi sikap mental maju sesuai dengan tantangan pembangunan dewasa ini untuk masa mendatang. Hanya dengan perubahan sikap mental itulah

ketinggalan dari bangsa-bangsa lain dapat dikejar.

Tantangan dalam pertumbuhan Ekonomi

Perubahan dunia pekerjaan manusia ternyata dibarengi oleh pertumbuhan ekonomi. Pendapatan perkapita dalam gross national product dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan yang dimaksud adalah menganggat harkat dan martabat kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga mereka layak dan hidup sejahtera serta dapat memenuhi semua kebutuhannya sebagai warga Negara, ummat manusia. Cara yang dilakukan melalui menggalakkan kewirausahaan. Kewirausahaan itu penting karena pendapatan seseorang lebih baik jika mereka melakukan usaha mandiri dan menjadi pemilik serta pemimpin dan pengelolanya. Untuk menjadi seorang wirausahawan dibutuhkan pengetahuan, sikap mental, kepribadian, dan kecakapan berwirausaha.

Letak keterkaitan masyarakat ke depan adalah masyarakat yang tangguh mentalnya, gigih, beretos kerja, dapat menghadapi tantangan zaman, berkualitas dalam pengetahuan, bersikap mental yang baik, dan berkecakapan.Sehingga kedepan bangsa Indonesia siap bersaing dengan Negara Asean lainnya. Bangsa Indonesia diharapkan menjadi tuan rumah sendiri dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas, bahkan bangsa Indonesia kuat ekonominya karena bangsanya banyak yang memiliki sikap mental wirausaha.

Konsep Mental Wirausaha

Mental wirausaha adalah mental yang memiliki keberanian dengan pernuh perhitungan untuk memulai dan melakukan usaha. Perhitungan resiko (Meredith :2006) ini didasarkan oleh pemahaman terhadap apa yang akan dilakukan dalam berusaha yang meliputi berbagai aspek yakni : faham sengan usaha yang dipilihnya, lingkungan masyarakat pemakai jasa, produk, atau idenya, faham dengan kebutuhan masyarakat, bisa mengelola keuangannya, dan bisa mengatasi masalah yang ada.

Peter F. Drucker (1991) bahwa "kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda". Sesuatu yang baru dan berbeda dapat berupa ide, barang / produk, dan jasa yang berbeda dari sebelumnya. Kebaharuan tersebut dapat diklasifikasikan hasil dari kreativitas dalam bentuk modifikasi, kombinasi, atau benar-benar suatu hal, karya, aktivitas, prosedur yang benar-benar baru. Inovasi yang dimaksudkan oleh Drucker adalah suatu yang berbeda dan baru tidak sama dari sebelumnya. Inovasi dalam kewirausahaan diperlukan untuk meningkatkan usaha agar pembeli atau pemakai jasa tidak jenuh dan tertarik untuk menggunakannya. Inovasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti: fisik, lingkungan social, produk, jasa, teknik, metode, isi, manajemen, dll.Untuk itu sangat diperlukan kreativitas, karena inivasi ada disebabkan

 ISBN 978-602-14314-8-1

juga karena adanya kemampuan berkreativtias.

Mental adalah hal mendasar yang dimiliki oleh seseorang, cerminan atas mental adalah sikap seseorang dalam berperilaku. Manusia yang bermental wirausaha menurut (Buchari : 2009) mempunyai kemampuan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Setiap orang mempunyai tujuan dan kebutuhan tertentu dalam hidupnya.

Mentalitas wirausaha memiliki keyakinan yang kuat pada potensi diri (Hendro :2011) adalah sebagai ujud dari rasa syukur terhadap ciptaanNya. Rasa syukur ini dihiasi dengan menerima semua yang ada pada dirinya dan berusaha mengarahkan pikiran dan tujuan yang direncanakan. Keyakinan yang kuat dapat kita tumbuhkan di dalam jiwa kita dengan jalan : mengenal potensi, kelebihan dan kekurangan diri, percaya kepada kemampuan sendiri, dan mengetahui tujuan dan kebutuhan hidup. Dengan demikian akan dapat memupuk rasa percaya diri yang tinggi.

Selanjutnya diperlukan kejujuran sebagai salah satu sikap mental wirausaha yang wajib dimiliki. Orang yang jujur menimbulkan kepercayaan orang lain terhadap individu tersebut. Jika orang lain ingin berhubungan dengan hal yang menyangkut kebutuhan untuk saling mempercayai, maka orang akan mengingat individu tersebut. Dengan demikian tujuan akan lebih mudah dicapai.

Ketahanan fisik dan mental menjadi syarat penting wirausahawan. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan yang datang baik yang ringan sampai kepada yang berat. Beratnya beban kehidupan yang dihadapi manusia menyebabkan kepada tidak sehatnya fisik dan mental. Himpitan hidup itu terutama sering disebabkan oleh factor ekonomi yang paling besar, selebihnya karena persoalan psikologis dan penyakit. Jika seorang yang memiliki mental wirausaha, maka tidak akan menyerah dengan keadaan, Mereka berusaha kuat menyelesaikan dan menghindari terjadinya kelemahan fisik dan mental tersebut tanpa kenal putus asa.

Wirausahawan mempunyai karakteristik tekun dan beretos kerja. Seorang yang sukses diperoleh hasil dari bekerja keras.Mereka bekerja dengan ketekunan, ketabahan dan mencari pendapatan dengan cara yang halal. Dengan demikian berarti mereka menggunakan segala potensi dirinya untuk meraih apa yang diidamkan dengan cara yang baik dan benar atau halal. Sebagai contoh, rakyat Jepang adalah bangsa yang memiliki etos kerja tinggi, sehingga dengan cepat dapat selamat keluar dari krisis dalam segala bidang setelah mengalami bom Hirosima. Mereka adalah bangsa yang terkenal beretos kerja tinggi, tekun, disiplin dan kerja keras. Sekarang Jepang menjadi Negara industrialis terbesar dengan produk industri telah menyebar di berbagai Negara khususnya Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan modal dalam wirausaha adalah modal sikap mental dan perilaku positif.

PENUTUP

Pendidikan kewirausahaan merupakan jawaban yang terdekat untuk memberikan solusi pada masyarakat dalam menghadapi persaingan bebas dalam ekonomi Asean. Masyarakat Indonesia sekarang ini sudah harus mampu menghadapi tingginya kompetisi dalam bidang ekonomi. Melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat dipersiapkan aspek pengetahuan, sikap mental, dan psikomotornya untuk berorientasi kewirausahaan. Kualitas sumberdaya manusia menjadi terangkat secara serentak dengan kuatnya dukungan semua pihak dalam mendidik masyarakat memahami bagaimana berwirausaha, membaca peluang untuk melakukan bisnis, kemampuan mengatasi resiko, analisis potensi diri yang paling dapat diarahkan untuk wirausaha. Modal yang sangat berperan adalah modal sikap mental dan kepemilikan mentalitas wirausaha yakni kemandirian, percaya diri, berkemauan keras, beretos kerja, tidak mudah menyerah, tekun dan gigih, jujur, dapat berhubungan social dengan baik pada orang lain, berpikiran positif dan berwawasan ke depan. Selain itu masyarakat memiliki kecakapan berkomunikasi, pemasaran, berusaha dan lainnya. Melalui pendidika kewirausahaan, maka masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dan menjadi tuan rumah di Negara sendiri.

Daftar Pustaka

Alma, Buchari, (2009), Kewirausahaan. Bandung: Penerbit ALFABETA

Widya, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 8 Nomor 1, April 2011

Tilaar, (2012), Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship. Jakarta, Penertbit Kompas.

Hendro, (2011), Dasar-Dasar Kewirausahaan, Jakarta, Penerbit Erlangga

Wajandi S., (1988), Pengantar Kewiraswastaan, Bandung, CV. Sinar Baru

Setyawan J., (1993), Strategi Efektif Berwirausaha, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Soemanto W., (1992), Pendidika Wiraswasta, Jakarta, PT. Bumi Aksara,

Drucker, Peter. (1991), Inovasi dan Kewiraswastaan: Prakter dan Dasar-Dasar, Jakarta, Penerbit Erlangga

Meredith, (1992)., Kewirausahaan Teori dan Praktek, Jakarta Pusat, PT Karya Unipress

Kasal R, (2010)., Wirausaha Muda: Mandiri., Jakarta, PT. Gramedia Jakarta.

----------, Kepmendiknas, 2010. Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi

Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya saing bangsa. Pendidikan Kewirausahaan. Jakarta: Pusat Kurikulum

 ISBN 978-602-14314-8-1

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN NONFORMAL

Yuli Utanto
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP Unnes
utanto1979@gmail.com

A. Pendahuluan

Terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disertai dengan munculnya kebijakan-kebijakan lainnya seperti PP Nomor 19/2005, Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 saat ini membawa pemikiran baru dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah pada berkembangnya keinginan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan. Otonomi pengelolaan pendidikan ini diharapkan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada tataran paling bawah *(at the bottom)* yaitu satuan pendidikan nonformal. Penerapan kurikulum Pendidikan Nonformal (PNF) dewasa ini sebagai bukti bahwa satuan pendidikan nonformal diharapkan menjadi *centre of excellence* dari inovasi implementasi kebijakan pendidikan saat ini yang bukan hanya harus dikaji sebagai wacana dalam pengelolaan pendidikan namun sebaiknya dipertimbangkan sebagai langkah strategis ke arah peningkatan mutu pendidikan.

Pemberdayaan satuan pendidikan nonformal dengan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Adanya otonomi dalam pengembangan kurikulum ini merupakan potensi bagi satuan pendidikan nonformal untuk meningkatkan kinerja para pengelola satuan pendidikan nonformal termasuk pamong belajar dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, otonomi dalam pengembangan kurikulum memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan nonformal dalam mengelola sumber daya dan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, serta mendorong profesionalisme para pengawas, pengelola satuan pendidikan nonformal, dan pamong belajar. Dalam pelaksanaan kurikulum PNF ini, pengelola satuan pendidikan nonformal dan pamong belajar memiliki kesempatan yang sangat luas dan terbuka untuk melakukan inovasi pengembangan kurikulum, misalnya dengan cara melakukan eksperimentasi di lingkungan di mana satuan pendidikan nonformal itu berada. Pengelola satuan pendidikan nonformal dan pamong belajar menjadi perancang kurikulum *(curriculum designer)* bagi satuan pendidikan nonformalnya berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan sekaligus melaksanakan, membina, dan

 ISBN 978-602-14314-8-1

mengembangkannya. Melaksanakan kurikulum yaitu mentransformasikan isi kurikulum yang tertuang dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran kepada warga belajar dalam proses pembelajaran. Membina kurikulum yaitu mengupayakan kesesuaian kurikulum aktual dengan kurikulum potensial sehingga tidak terjadi kesenjangan. Mengembangkan kurikulum yaitu upaya meningkatkan dalam bentuk nilai tambah dari apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum potensial.

Pengelola satuan pendidikan nonformal dan pamong belajar berkesempatan juga melakukan penilaian langsung terhadap berhasil tidaknya kurikulum tersebut. Dengan melakukan penilaian dapat diketahui kekurangan dalam pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yang sedapat mungkin diatasi, dicarikan upaya lain yang lebih baik, sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Dalam hal inilah, peranan pengawas satuan pendidikan nonformal (*supervisor*) sangat dibutuhkan untuk membina pengelola satuan pendidikan nonformal dan pamong belajar dalam merancang, melaksanakan, membina, mengembangkan, sampai mengevaluasi kurikulum pada satuan pendidikan nonformal tersebut.

B. Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia

Kecenderungan yang nampak dari pelaksanaan kurikulum pada waktu yang lalu yaitu adanya penekanan makna mutu pendidikan yang lebih banyak dikaitkan dengan aspek kemampuan akademik, khususnya pada aspek kognitif. Hal tersebut berdampak pada terabaikannya aspek akhlak, budi pekerti, seni, dan kecakapan yang diperlukan oleh warga belajar untuk menghadapi kehidupannya. Indikator-indikator yang mendukung kecenderungan tersebut, yaitu; bersifat sangat populis yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua warga belajar di seluruh tanah air yang sebenarnya memiliki potensi, aspirasi, dan kondisi lingkungan yang berbeda. Dan kurang memberikan kemerdekaan pada pamong belajar dan tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan improvisasi dan justifikasi sesuai kondisi lapangan.

Pada saat yang sama diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjawab persoalan penyeimbangan antara kognisi dan emosi, pengembangan kecakapan hidup *(lifeskills)*, pendidikan nilai, keterkaitan dengan dunia kerja, pendidikan multikultur, multibahasa, pendidikan berkelanjutan, pengembangan kepekaan estetika, proses belajar sepanjang hayat, profil kemampuan lulusan, globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan pengembangan konsep satuan pendidikan nonformal sebagai pusat budaya *(centre of culture)*. Semua hal tersebut sangat mendukung perlunya penyesuaian dan perubahan kurikulum yang signifikan bagi masa depan anak bangsa.

Kebijakan pengembangan kurikulum sudah diwarnai oleh semangat otonomi daerah, dimana sekalipun kurikulum itu ditujukan untuk mencapai tujuan nasional, tetapi cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Pelaksanaan

kurikulum menerapkan prinsip "*Kesatuan dalam Kebijakan dan Keberagaman dalam Pelaksanaan*". Standar nasional disusun pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan masing-masing daerah/satuan pendidikan nonformal. Perwujudan "*Kesatuan dalam Kebijakan*" tertuang dalam pengembangan Kerangka Dasar, Standar Kompetensi Bahan Kajian, dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran, beserta Pedoman Pelaksanaannya. Perwujudan "*Keberagaman dalam Pelaksanaan*" tertuang dalam pengembangan silabus dan skenario pembelajaran. Pendekatan yang digunakan saat itu yaitu pendekatan kurikulum berbasis kompetensi *(competency-based curriculum)*. Pendekatan ini menjadi pilihan dalam untuk menghadapi berbagai persoalan dengan harapan: (a) Adanya peningkatan mutu pendidikan secara nasional, (b) Dilakukan secara responsif terhadap penerapan hak-hak azasi manusia, kehidupan demokratis, globalisasi, dan otonomi daerah, (c) Agar pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional, (d) Agar pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta tuntutan desentralisasi, (e) Lembaga pendidikan nonformal tidak akan kehilangan relevansi program pembelajaran terhadap kepentingan daerah dan karakteristik warga belajar serta tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum yang berdiversifikasi.

Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU Nomor 20/2003, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai delapan standar, yaitu: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Penetapan standar tersebut bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar tersebut juga memiliki fungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian standar tersebut telah dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan badan mandiri/independen yang secara struktural bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Hakekat kurikulum

Istilah kurikulum *(curriculum)*, yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari kata *curir* (pelari) dan *curere* (tempat berpacu). Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari *start* sampai *finish* untuk

 ISBN 978-602-14314-8-1

memperoleh medali/penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran *(subject)* yang harus ditempuh oleh seorang warga belajar dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan. Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu (1) adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh warga belajar, dan (2) tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh penghargaan. Dengan demikian, implikasi terhadap praktik pengajaran yaitu setiap warga belajar harus menguasai seluruh materi pelajaran yang diberikan dan menempatkan pamong belajar dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan warga belajar ditentukan oleh seberapa jauh materi pelajaran tersebut dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian.

Pengertian kurikulum seperti disebutkan di atas dianggap pengertian yang sempit atau sangat sederhana. Jika mempelajari buku-buku atau literatur lainnya tentang kurikulum, terutama yang berkembang di negara-negara maju, maka akan ditemukan banyak pengertian yang lebih luas dan beragam. Kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar *(learning experiences)* yang dialami warga belajar dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Alberty (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada warga belajar di bawah tanggung jawab pengelola satuan pendidikan nonformal *(all of the activities that are provided for the students by the school)*. Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga belajar di luar kelas. Pendapat yang senada dan menguatkan pengertian tersebut dikemukakan oleh Lewis (1974) yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya satuan pendidikan nonformal untuk mempengaruhi warga belajar supaya belajar.

Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka secara teoretis kita agak sulit menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki empat dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu: (1) Kurikulum sebagai suatu ide/gagasan, (2) Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide, (3) Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoretis dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. (4) Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan.

Pandangan atau anggapan yang sampai saat ini masih lazim dipakai dalam dunia pendidikan di negara kita, yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang disusun guna memperlancar proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan rumusan pengertian kurikulum seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Dalam pengembangan kurikulum pendidikan nonformal, dapat dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan nonformal yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

D. Fungsi dan Peranan Kurikulum

Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi pamong belajar, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi pengelola satuan pendidikan nonformal dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di satuan pendidikan nonformal. Bagi warga belajar sebagai subjek didik, terdapat enam fungsi kurikulum sebagai berikut: (a) Fungsi Penyesuaian *(the adjustive or adaptive function),* (b) Fungsi Integrasi *(the integrating function),* (c) Fungsi Diferensiasi *(the differentiating function),*(d) Fungsi Persiapan *(the propaedeutic function),* (e) Fungsi Pemilihan *(the selective function),* (f) Fungsi Diagnostik *(the diagnostic function).*

Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan warga belajar agar memiliki sifat *well adjusted* yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, warga belajar pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. **Fungsi integrasi** mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Warga belajar pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, warga belajar harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya.

Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu warga belajar. Setiap warga belajar

 ISBN 978-602-14314-8-1

memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. **Fungsi persiapan** mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan warga belajar untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan warga belajar untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena sesuatu hal, tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual warga belajar berarti pula diberinya kesempatan bagi warga belajar tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. **Fungsi diagnostik** mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan warga belajar untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila warga belajar sudah mampu memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan warga belajar dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya.

Kurikulum dalam pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Hamalik (1990), terdapat tiga peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis/evaluatif.

a. ***Peranan Konservatif.*** Artinya, kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para warga belajar. Dengan demikian, peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum, yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku warga belajar sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakatnya.
b. ***Peranan Kreatif.*** Artinya, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap warga belajar mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-

kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.

c. ***Peranan Kritis dan Evaluatif.*** Peranan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada warga belajar perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkernbangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan-penyempurnaan.

Ketiga peranan kurikulum di atas tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum pendidikan nonformal menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, di antaranya pamong belajar, pengelola satuan pendidikan nonformal, pengawas, orang tua, warga belajar, dan masyarakat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait tersebut idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

E. Landasan Pengembangan Kurikulum

Dalam setiap kegiatan pengembangan kurikulum, baik pada level makro maupun mikro, selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Hal ini disebabkan bahwa kurikulum itu sendiri pada hakekatnya merupakan rancangan atau program pendidikan. Sebagai suatu rancangan/program tersebut, maka kurikulum ini menempati posisi/kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, dalam arti akan sangat menjadi penentu terhadap proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh pendidikan. Dengan posisi yang penting itu, maka penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dibutuhkan berbagai landasan/dasar yang kokoh dan kuat.

Landasan-landasan tersebut pada hakekatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum pada waktu mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Sebuah

 ISBN 978-602-14314-8-1

bangunan/gedung yang besar tentu membutuhkan landasan atau fondasi yang kuat agar bangunan tersebut dapat berdiri tegak, kokoh dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka yang cepat *ambruk*/hancur adalah gedung itu sendiri, tetapi apabila landasan pendidikan/kurikulum yang lemah, tidak kokoh, maka yang dipertaruhkan adalah manusianya (warga belajar).

Berkaitan dengan landasan-landasan pengembangan kurikulum ini, Zais (1976) mengemukakan empat landasan, yaitu : *philosophy and the nature of knowledge, society and culture, the individual,* dan *learning theory*. Dengan berpedoman pada empat landasan tersebut dibuatlah model yang disebut *"An eclectic model of the curriculum and its foundations"* sebagai berikut :

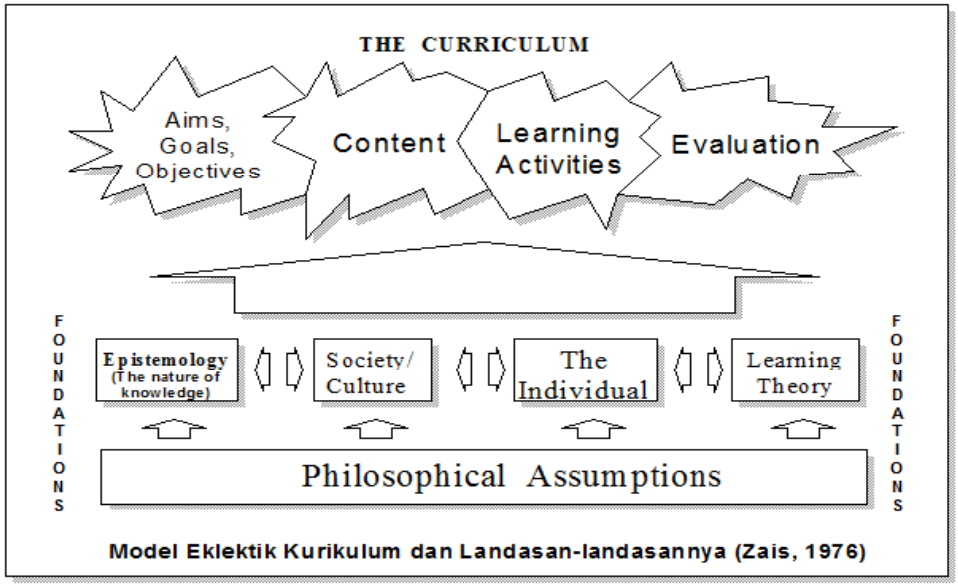

Model Eklektik Kurikulum dan Landasan-landasannya (Zais, 1976)

Dengan memperhatikan bagan di atas, suatu kurikulum dengan berbagai komponennya yang terdiri atas tujuan *(aims, goals, objectives)*, isi/bahan *(content)*, aktivitas belajar *(learning activities)*, dan evaluasi, agar memiliki tingkat relevansi dan fleksibilitas yang tinggi/memadai perlu ditopang oleh berbagai landasan *(foundations)*. Landasan-landasan tersebut yaitu: landasan filosofis sebagai landasan utama, epistemologi (sifat-sifat pengetahuan), masyarakat dan kebudayaan, individu (warga belajar), dan teori-teori belajar.

Selain pandangan tersebut di atas, berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat empat aspek pokok yang mendasari pengembangan kurikulum tersebut, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial-budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga

pendidikan. Filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini ditentukan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran.

Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi/teori belajar dan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada warga belajar agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tarap perkembangan warga belajar tersebut. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana kurikulum itu disampaikan kepada warga belajar dan bagaimana pula warga belajar harus mempelajarinya, dengan kata lain berkenaan dengan penentuan strategi kurikulum.

Landasan sosial-budaya dijadikan sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena pendidikan selalu mengandung nilai yang harus sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, keberhasilan suatu pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya, menjadi dasar dan acuan bagi pendidikan/kurikulum.

Landasan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) diperlukan dalam pengembangan kurikulum sebagai upaya menselaraskan isi kurikulum dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia IPTEKS yang menyebabkan pula perkembangan dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain landasan-landasan kurikulum pada umumnya seperti dijelaskan di atas, dalam implementasi kurikulum satuan pendidikan nonformal pada suatu negara selalu dilandasi juga oleh landasan legal berupa kebijakan-kebijakan pendidikan yang diberlakukan di negara tersebut. Penyelenggaraan kurikulum pendidikan nonformal (PNF) yang saat ini diterapkan di Indonesia dilandasi oleh kebijakan perundang-undangan, antara lain: (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (c) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

F. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum

Sebenarnya tidak terhitung banyaknya prinsip yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum pada jenjang pendidikan manapun biasanya dikembangkan dengan menganut prinsip-prinsip tertentu, di mana prinsip yang dianut

 ISBN 978-602-14314-8-1

merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum itu. Pada dasarnya pamong belajar harus bisa menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah ditentukan oleh para pengambil keputusan, namun demikian khususnya pada tataran pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan non formal, bisa juga diciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu selalu mungkin terjadi suatu kurikulum satuan pendidikan nonformal menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dengan yang digunakan dalam kurikulum satuan pendidikan nonformal lainnya.

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum biasanya ditulis secara eksplisit di dalam buku atau dokumen kurikulum satuan pendidikan nonformal. Implementasi dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut dapat dikaji atau dipelajari dalam keseluruhan isi buku kurikulum tersebut, di dalam pelaksanaan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Menurut Rusman (2004), sering terjadi implementasi prinsip-prinsip kurikulum itu sukar diidentifikasi, bahkan kadang-kadang yang nampak menonjol justru terjadinya peristiwa-peristiwa kurikuler yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum itu. Penyimpangan tersebut dapat diakibatkan oleh banyak hal, seperti:

a. Pencantuman prinsip-prinsip dalam buku kurikulum itu hanya bersifat proforma, artinya hanya sekadar menaati langkah-langkah pengembangan kurikulum atau untuk menimbulkan kesan bahwa suatu kurikulum mendukung nilai-nilai luhur tertentu, terutama yang bersifat politis atau ilmiah;
b. Prinsip-prinsip tersebut tidak dihayati oleh para pengembang kurikulum, pelaksana kurikulum dan hasil evaluasi kurikulum tidak menunjukkan adanya kandungan nilai dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut;
c. Situasi dan kondisi di tempat kurikulum itu dilaksanakan telah berkembang dan tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu.

Dalam kondisi seperti itu, suatu kurikulum dapat dikatakan tidak lagi mengemban fungsi yang sebenarnya, kurikulum itu berjalan secara semu. Memang demikianlah kenyataannya yang dialami oleh sejumlah kurikulum, apalagi bagi kurikulum yang telah lama sekali tidak direvisi.

Setiap kurikulum harus didasarkan pada prinsip yang terbaik (*excellence*) agar setiap warga belajar dapat mencapai yang terbaik bagi diri dan lingkungannya. Tiap warga belajar harus berpegangan pada standar yang sesuai dengan kemampuannya baik pada aspek moral, etik, pengetahuan, ataupun aspek lainnya. Mengingat bahwa setiap warga belajar mempunyai bakat, minat dan motivasi yang berbeda, maka perbedaan itu perlu juga dipertimbangkan sehingga tidak hanya satu standar kualitas yang ditentukan untuk semuanya.

Kaitannya dengan kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan nonformal (PNF) yang saat ini diberlakukan di Indonesia, secara umum

didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang tertera dalam UU No.20/2003 (pasal 36), yaitu bahwa: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa, dan (3) Kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan: (a) Peningkaatan iman dan taqwa, (b) Peningkatan akhlak mulia, (c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat siswa, (d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) Tuntutan dunia kerja, (g) Perkembangan IPTEK dan seni, (h) Agama, (i) Dinamika perkembangan global, dan (j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Secara lebih khusus menurut Rusman (2004), kurikulum PNF dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut:

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan warga belajar dan lingkungannya.

   Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa warga belajar memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi warga belajar disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan warga belajar serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada warga belajar.

b. Keberagaman dan terpadu

   Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik warga belajar, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

   Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar warga belajar untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

 ISBN 978-602-14314-8-1

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

f. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan warga belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pelaksanaannya, kurikulum PNF menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada kebutuhan potensi, perkembangan dan kondisi warga belajar untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini warga belajar harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan warga belajar mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau

percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi warga belajardengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi warga belajar yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.

d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan warga belajar dan pamong belajar yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata latih/pelajaran, muatan kekhasan dan pengembangan diri warga belajar diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar jenis serta jenjang pendidikan.

G. Struktur dan Muatan Kurikulum

Struktur kurikulum pada dasarnya merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan nonformal dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai warga belajar sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum tersebut. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Unsur kekhasan/muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri warga belajar merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Jika ditelaah dari dokumen standar isi sebagai lampiran Permendiknas No. 22/2006, struktur kurikulum tersebut dibedakan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan.

Namun demikian, dalam Permendikbud No. 81/2013 tentang Pendidiran Satuan Pendidikan Nonformal dijelaskan bahwa satuan pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Permendikbud tersebut adalah: (a) Lembaga Kursus dan Pelatihan, (b) Kelompok Belajar, (c)

 ISBN 978-602-14314-8-1

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, (d) Majelis Taklim, dan (e) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. Sedangkan yang dimaksud dengan Satuan PNF Sejenis terdiri atas Rumah Pintar, Balai Belajar Bersama, Lembaga Bimbingan Belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Satuan pendidikan nonformal tersebut memiliki kurikulum kekhasan yang dikembangkan masing-masing.

Menariknya, oleh Permendikbud tersebut Lembaga Bimbingan Belajar diakomodasi menjadi satuan pendidikan nonformal bersama dengan Rumah Pintar dan Balai Belajar Bersama. Namun anehnya, Taman Bacaan Masyarakat yang sudah lama ada justru belum tidak diakomodasi. Selain itu, Permendikbud ini mengatur bahwa Pendidikan Kesetaraan menjadi salah satu bentuk pendidikan nonformal.

Struktur kurikulum pada satuan pendidikan kesetaraan paket A setara SD/MI di dalamnya meliputi substansi pembelajaran yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 8 mata pelajaran yang telah ditetapkan. Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan paket B setara SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 10 mata pelajaran.

H. Proses Penyusunan Kurikulum

Dalam pengkajian teori pengembangan kurikulum, terdapat empat tahapan pengembangan kurikulum yang dapat ditempuh, yaitu mulai dari tahap makro, tahap institusi, tahap mata pelajaran, dan tahap program pembelajaran. Pada tahap makro, pengembangan kurikulum dikaji dalam lingkup nasional, baik untuk satuan pendidikan nonformal maupun diluar satuan pendidikan formal, baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Secara vertikal berkaitan dengan kontinuitas atau kesinambungan pengembangan kurikulum dalam berbagai tingkatan (*hierarhi*) institusi pendidikan, sedangkan secara horizontal berkaitan dengan pengembangan kurikulum pada tingkatan pendidikan yang sama/setara sekalipun jenis pendidikannya berbeda. Pada tahap institusi, kegiatan pengembangan kurikulum dilakukan di setiap lembaga pendidikan nonformal. Aspek-aspek yang dikembangkan pada tahap ini di antaranya: visi dan misi satuan pendidikan nonformal, tujuan satuan pendidikan non formal, materi/mata pelajaran yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan, dan fasilitas yang dibutuhkan termasuk media dan alat pembelajaran.

Pada tahap materi/mata pelajaran, pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran (GBPP) atau pola dasar kegiatan belajar-mengajar (PDKBM) atau silabus pembelajaran untuk masing-masing materi/mata pelajaran yang

dikembangkan pada setiap satuan pendidikan. Dari GBPP/PDKBM/silabus pembelajaran tersebut oleh pamong belajar selanjutnya dijabarkan menjadi program yang akan dilaksanakan pada periode belajar tertentu. Dalam periode waktu tersebut diharapkan para warga belajar dapat menguasai satu kesatuan kompetensi baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan tertentu. Isi program tersebut adalah apa yang ada dalam GBPP/PDKBM/silabus pembelajaran pada suatu mata pelajaran, kemudian dilakukan pengaturan-pengaturan yang melengkapinya sehingga program tersebut membentuk suatu program kerja lengkap dengan penentuan alokasi waktu yang dibutuhkan serta kapan dilaksanakannya.

Tahap program pembelajaran merupakan tahap pengembangan kurikulum secara mikro pada level kelas, di mana tugas pengembangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya seorang pamong belajar. Dengan berpedoman pada GBPP/PDKBM/silabus pembelajaran kemudian pamong belajar menjabarkannya dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran.

Dalam proses pengembangan kurikulum, tentu saja banyak pihak yang turut terlibat atau berpartisipasi. Hal ini disebabkan karena begitu besar dan sangat strategisnya peranan dari kurikulum itu sendiri sebagai salah satu alat utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Apabila dikaji secara seksama, sebenarnya harus banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum itu, di antaranya saja para administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli psikologi, ahli bidang ilmu pengetahuan, para pamong belajar, orangtua siswa, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam porsi kegiatan yang berbeda-beda. Dari sekian banyak pihak yang terlibat, maka yang secara terus menerus terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum yaitu para administrator pendidikan, pada ahli pendidikan dan kurikulum, dan tentu saja para pamong belajar sebagai pelaksana kurikulum di satuan pendidikan nonformal.

Para administrator pendidikan biasanya terdiri atas pejabat yang relevan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari mulai tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai tingkat kecamatan dan satuan pendidikan nonformal. Di tingkat pusat, lembaga yang secara khusus mengkaji dan menjadi dapurnya pengembangan kurikulum nasional yaitu Pusat Kurikulum Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Keterlibatan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum yaitu menyusun dasar-dasar hukum, kerangka dasar kurikulum, serta standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kerjasama dengan para ahli pendidikan dan ahli bidang studi dari perguruan tinggi yang relevan dilakukan untuk meminta masukan dan memantapkan kerangka dasar kurikulum tersebut. Atas dasar itu, para administrator di daerah (Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota) sampai pengelola satuan pendidikan nonformal mengembangkan kurikulum satuan pendidikan nonformal

 ISBN 978-602-14314-8-1

yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Para pengelola satuan pendidikan nonformal sebagai administrator pendidikan yang berada pada level paling bawah memiliki wewenang dalam membuat operasionalisasi pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan nonformal. Para pengelola satuan pendidikan nonformal sebagai administrator pendidikan inilah sebenarnya yang secara terus-menerus terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum satuan pendidikan nonformal.

Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum satuan pendidikan nonformal membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang studi/disiplin ilmu. Para ahli pendidikan dan ahli kurikulum memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan kurikulum bukan hanya sekedar memilih dan menyusun bahan pelajaran dan metode mengajar, tetapi menyangkut penentuan arah dan orientasi pendidikan, pemilihan sistem dan model kurikulum, serta berbagai perangkat dan pedoman penjabaran dan implementasi dari model-model tersebut. Keterlibatan para ahli pendidikan dan kurikulum terutama sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum baik pada tingkat pusat maupun daerah. Apalagi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang menuntut adanya otonomi pendidikan dan otonomi satuan pendidikan nonformal, maka keterlibatan para ahli pendidikan dan kurikulum sangat diperlukan, sebab apa yang telah digariskan pada tingkat pusat belum tentu dapat dengan mudah dipahami oleh para pengembang dan pelaksana kurikulum di daerah.

Pengembangan kurikulum juga membutuhkan keterlibatan para ahli bidang studi/disiplin ilmu yang memiliki wawasan tentang pendidikan dan perkembangan tuntutan masyarakat. Sumbangan mereka dalam memilih materi bidang ilmu yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Mereka juga sangat diharapkan keterlibatannya dalam menyusun materi ajar dalam sekuens yang sesuai dengan struktur keilmuan tetapi sangat memudahkan para warga belajar untuk mempelajarinya.

Kunci keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kurikulum di satuan pendidikan nonformal pada hakekatnya ada di tangan para pamong belajar. Sekalipun tidak semua pamong belajar dilibatkan dalam pengembangan pada tingkat pusat/nasional, namun dia adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun para pamong belajar tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, pamong belajar yang menerjemahkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP, dia yang mengolah dan meramu kembali untuk disajikan dalam

pembelajaran. Pamong belajar berada di garis depan dalam implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan non formal, oleh karena itu pamong belajar pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Hasil-hasil penilaian pamong belajar akan sangat membantu dalam menentukan hambatan dalam implementasi kurikulum. Sebagai pelaksana kurikulum, pamong belajar harus mampu menciptakan kegiatan belajar-mengajar yang memungkinkan para warga belajar dapat menyerap isi kurikulum dengan sempurna. Pamong belajar tidak hanya berperan sebagai pengajar yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan kepada warga belajar, dengan lebih banyak menggunakan metode penuturan/ceramah. Peranan pamong belajar seperti itu dalam kondisi sekarang nampaknya sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kurikulum, oleh karena itu perlu dikurangi frekuensinya. Sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan ilmu pendidikan serta ditambah lagi dengan adanya kebijakan otonomi pendidikan dan otonomi satuan pendidikan nonformal, maka akan makin banyak peranan dan keterlibatan pamong belajar dalam mengimplementasikan kurikulum yang memungkinkan terjadinya proses belajar pada diri warga belajar.

Satuan pendidikan nonformal adalah lembaga masyarakat yang mempersiapkan warga belajar agar mampu hidup di dalam masyarakat itu. Sebagai bagian dari masyarakat, satuan pendidikan nonformal sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana satuan pendidikan nonformal itu berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, sangat diperlukan keterlibatan pihak masyarakat dalam menentukan arah pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini bisa saja berwujud pemberian bantuan dalam pelaksanaan kurikulum atau memberikan saran-saran, usul, pendapat mengenai keperluan-keperluan yang paling mendesak untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan nonformal, sehingga warga belajar dapat mengatasi masalah-masalah di masyarakat di mana mereka hidup. Orang tua siswa, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, diharapkan sangat berperan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Keterlibatan orangtua bisa dalam kegiatan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orangtua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orangtua yang memiliki cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Keterlibatan orangtua lebih besar dalam kegiatan pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini diperlukan adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara pamong belajar, satuan pendidikan nonformal dan para orangtua. Sebagian besar waktu belajar warga belajar yang dituntut kurikulum ada di luar satuan pendidikan nonformal, di antaranya

 ISBN 978-602-14314-8-1

dilaksanakan di rumah, dengan demikian sewajarnya apabila orangtua turut mengikuti dan mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah.

I. Komponen Isi Kurikulum

Kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan di suatu satuan pendidikan nonformal. Dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan nonformal akan menyangkut banyak faktor, mempertimbangkan isu-isu mengenai kurikulum, siapa yang dilibatkan, bagimana prosesnya, apa tujuannya, dan kepada siapa kurikulum itu ditujukan. Umumnya para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan merupakan suatu siklus dari beberapa komponen.

Tyler (1975) menyajikan empat langkah pengembangan *(Four-Step Model)* dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu: *(a) What educational purposes should the school seek to attain? (b) What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? (c) How can these educational experiences be effectively organized ? (d) How can we determine wether these purposes are being attained?*.

Pertanyaan pertama pada hakekatnya merupakan arah dari suatu program atau tujuan kurikulum, pertanyaan kedua berkenaan dengan isi/konten yang harus diberikan untuk mencapai tujuan, pertanyaan ketiga berkenaan dengan strategi pelaksanaan, dan pertanyaan keempat berkenaan dengan penilaian (evaluasi) pencapaian tujuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi komponen utama yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan nonformal. Komponen-komponen itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi, berinteraksi, berinterelasi satu sama lain dan membentuk suatu sistem *(system)*.

Dalam kaitannya dengan komponen isi kurikulum satuan pendidikan nonformal, penyusunannya mengikuti sistematika, yaitu mencakup: (1) Tujuan pendidikan satuan pendidikan nonformal, (2) Struktur dan muatan kurikulum, dan (3) Kalender pendidikan.

Komponen tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan umum pendidikan, yaitu meletakkan dasar dan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan nonformal ini peran tujuan sangatlah menentukan.

Hasan (1990) menyatakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Dengan demikian suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang final. Demikian juga Nasution (1987) menyatakan, tujuan

memberikan pegangan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan itu telah dicapai.

Mendukung pendapat tersebut, Sukmadinata (1988) menunjukkan bahwa tujuan sangat memegang peranan penting, akan mewarnai keseluruhan komponen-komponen lainnya dan akan mengarahkan semua kegiatan mengajar. Demikian pula Hasan (1990) menyatakan, tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi/konten, strategi dan media pembelajaran, dan evaluasi, bahkan dalam berbagai model pengembangan kurikulum, tujuan ini dianggap sebagai dasar, arah, patokan dalam menentukan komponen-komponen yang lainnya.

Komponen struktur dan muatan kurikulum memuat penjelasan-penjelasan yang rinci berkaitan dengan program pendidikan, pengembangan diri warga belajar, pengaturan waktu belajar, ketuntasan belajar, dan ketuntasan belajar, peminatan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Sedangkan komponen terakhir yaitu kalender pendidikan yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik satuan pendidikan nonformal, kebutuhan warga belajar dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Sebagai salah satu bentuk alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak pengelola satuan pendidikan nonformal dalam penyusunan kurikulum PNF ini bisa dengan menggunakan sistematika yang memuat bagian-bagian sebagai berikut:

a. Pendahuluan, diantaranya meliputi uraian mengenai latar belakang atau rasional penyusunan kurikulum satuan pendidikan nonformal; visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan nonformal; dan standar kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang satuan pendidikan nonformal yang bersangkutan.
b. Keadaan dan potensi satuan pendidikan nonformal, diantaranya meliputi uraian mengenai keadaan dan lingkungan satuan pendidikan nonformal; struktur organisasi dan personil satuan pendidikan nonformal; keadaan warga belajar; dan program kemitraan/kerjasama yang digagas satuan pendidikan nonformal dengan lembaga/pihak lain.
c. Struktur dan muatan kurikulum, diantaranya meliputi uraian mengenai struktur kurikulum satuan pendidikan nonformal dan muatan kurikulum yang terdiri atas mata latih/pelajaran, muatan kekhasan, kegiatan pengembangan diri warga belajar, pendidikan kecakapan hidup, beban belajar, ketuntasan belajar, peminatan, dan kelulusan.
d. Kalender pendidikan, diantaranya meliputi uraian mengenai permulaan tahun pendidikan/pelajaran, waktu

 ISBN 978-602-14314-8-1

belajar, kegiatan belajar, jadwal kegiatan, dsb.

e. Lampiran-lampiran, berupa garis besar program pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan nonformal dan beberapa contoh rancana pembelajaran.

J. Penutup

Pengembangan kurikulum pendidikan nonformal (PNF) menjadi bukti bahwa satuan pendidikan nonformal sebagai *centre of excellence* dari inovasi implementasi kebijakan pendidikan. Pengembangan kurikulum PNF perlu dipertimbangkan sebagai langkah strategis ke arah peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pengelola satuan pendidikan nonformal dan pamong belajar menjadi perancang kurikulum *(curriculum designer)* bagi satuan pendidikan nonformalnya berdasarkan kebutuhan warga belajar, masyarakat dan standar nasional pendidikan sekaligus melaksanakan, membina, serta mengembangkannya sesuai perkembangan IPTEKS. Pengelola dan pamong belajar harus mentransformasikan isi kurikulum yang tertuang dalam program pendidikan dan rencana pelaksanaan pembelajaran kepada warga belajar dalam proses pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan warga belajar. Mereka harus membina kurikulum dengan mengupayakan kesesuaian kurikulum aktual dengan kurikulum potensial sehingga tidak terjadi kesenjangan. Pengelola dan pamong belajar juga harus mengembangkan kurikulum sebagai upaya nyata untuk meningkatkan nilai tambah dari apa yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum potensial.

Daftar Pustaka

Djaali. (2006). *Standar Nasional Pendidikan*. Makalah Semiloka Nasional Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berbudaya. Jakarta.

Doll, Ronald C. (1974). *Curriculum Improvement Decision Making and Process*, Third Edition, Allyn and Bacon, Inc., Boston-London-Sidney.

Hamalik, Oemar. (1990). *Pengembangan Kurikulum, Dasar-dasar dan Pengembangannya*, Mandar Maju, Bandung.

Hasan S. Hamid. (1988). *Evaluasi Kurikulum*, P2LPTK, Jakarta.

Hernawan A. Herry. (2006). *Pengembangan Silabus dan Satuan Pembelajaran*. Makalah Pelatihan Pengembangan Kurikulum bagi Pamong belajar. Bandung.

Ornstein, Allan c. and Francis P. Hunkins. (1988). *Curriculum, Foundations, Principles, and Issues*. Allyn and Bacon. Boston.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan.*

Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang *Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.*

Rusman. (2004). *Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bahan Ajar Sekolah Pascasarjana UPI.

Sudjana, Nana. (1989). Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Satuan Pendidikan, Sinar Baru, Bandung.

Sukmadinata, N. Syaodih. (2001). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Tyler, Ralph W. (1975). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. The University of Chicago Press, Chicago and London.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional.*

Zais, Robert S. (1976). *Curriculum, Principles and Foundations*, Haeper and Row Publisher, New York.

 ISBN 978-602-14314-8-1

PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KETENAGAKERJAAN MASYARAKAT DESA YANG BERDAYA SAING DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

oleh:
Dr. Tri Suminar, M.Pd
tri.suminar@mail.unnes.ac.id

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Hasil survei *Japan ASEAN Integration Fund* (JAIF) pada 2012 lalu mencatat 73% para pelaku bisnis di ASEAN yang menjadi responden berpandangan bahwa integrasi ASEAN akan memberikan manfaat peningkatan Ekonomi, dan 64% kalangan publik meyakini bahwa integrasi ASEAN akan meningkatkan kondisi secara keselurahan. Sehubungan hal tersebut, kualitas pekerja Indonesia merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap bidang ekonomi, politik, dan sosial di negara ini. Kualitas SDM harus ditingkatkan, baik di dalam negeri maupun intra ASEAN untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN menuntut lebih banyak tenaga kerja yang saling berkompetisi merebut lapangan kerja di antara negara ASEAN, terutama tenaga kerja lokal di negara itu sendiri. Bagi tenaga kerja yang memiliki kompetisi kerja tinggi, akan mempunyai kesempatan lebih luas dalam mendapatkan keuntungan ekonomi dengan adanya MEA. Sementara itu, sumber daya manusia Indonesia kini dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi MEA, masih sering dikeluhkan kualitas lulusan pendidikan tinggi kita tidak berbanding lurus dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Kompetisi SDM antar negara ASEAN merupakan hal yang pasti terjadi pada saat terealisasinya MEA yang dimulai pada akhir tahun 2015 ini. Bila pekerja Indonesia tidak siap menghadapi persaingan terbuka ini, maka pekerja Indonesia hanya sebagai penonton saja karena akan kalah bersaing dengan pekerja dari negara ASEAN lainnya. Bagaimana kesiapan SDM Indonesia khususnya masyarakat pedesaan dalam menyambut MEA 2015 nanti?

Berdasar data BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2014 telah mencapai 125,3 juta orang atau bertambah 1,7 juta dibanding Februari 2013. Namun, jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD kebawah yakni 55,31 juta, disusul lulusan sekolah menengah pertama 21, 06 juta, sekolah menengah atas 18,91 juta, sekolah menengah kejuruan 10,91 juta, Diploma I/II/II 3,13 juta dan universitas hanya 8,85% (Koran Sindo, 6 Mei 2014). Rendahnya kualitas pekerja Indonesia bila dilihat dari tingkat pendidikan formal ini jelas sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia perlu

 ISBN 978-602-14314-8-1

mencari terobosan dan cara singkat untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja bagi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar MEA.

Usaha riil peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia terus berpacu dengan waktu. Salah satu upayanya adalah melalui pelatihan peningkatan kualitas *soft skill* dan *hard skill* bagi angkatan kerja yang sudah ada atau bagi tenaga kerja yang belum bekerja atau berstatus pengangguran. Artinya, diperlukan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia untuk ditawarkan kepada pemberi pekerjaan agar dapat berhasil menghadapi MEA akhir tahun 2015.

Pendidikan nonformal dalam menghadapi MEA dapat direalisasikan melalui upaya meningkatkan kualitas layanan dalam mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* peserta didik secara profesional. Harapannya, tercipta lulusan pendidikan nonformal sebagai SDM yang terdidik dengan keterampilan yang terlatih, memenuhi standar internasional. Salah satu program pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan yang sedang digalakkan pemerintah khususnya bagi tenaga kerja yang berasal dari pedesaan adalah pelatihan pendidikan kecakapan hidup. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar mereka mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya, yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Sasaran program pelatihan kecakapan hidup menjangkau SDM Indonesia baik di pedesaan maupun perkotaan. Namun kualitas SDM Indonesia jika dibandingkan dari kawasan tempat tinggalnya, kualitas masyarakat pedesaan jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan. Mereka rata-rata berpendidikan formal rendah, sehingga sangat membutuhkan bekal berbagai kecakapan hidup, yakni kecakapan akademik berpikir logis, kecakapan sosial, kecakapan personal atau kepribadian yang tangguh dan kecakapan vokasi untuk bekerja.

b. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang hendak dikaji pada makalah ini adalah:

a) Bagaimanakah komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi ketenagakerjaan Indonesia?
b) Bagaimanakah kemampuan ketenagakerjaan masyarakat desa dalam berdaya saing?
c) Bagaimanakah peran strategis pendidikan nonformal program pendidikan kecakapan hidup dalam meningkatkan kemampuan berdaya saing bagi ketenagaan masyarakat pedesaan?

2. Pembahasan

a. Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Ketenagakerjaan Indonesia

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum

yang baik untuk Indonesia. *Pertama*, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi ini akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights* (IPR), *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Demikian pula berdasarkan ASEAN *Economic Blueprint*, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Berdasarkan paparan tersebut, komitmen MEA terhadap aspek ekonomi akan menjadi kesempatan yang baik bagi negara Indonesia karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional Negara Indonesia.

Namun pada sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa

 ISBN 978-602-14314-8-1

permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, komitmen MEA pada aspek ekonomi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Kondisi tersebut akan dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia. Sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Implikasi lain komitmen MEA adalah pada aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Dengan demikian dapat disimpulkan implikasi MEA terhadap Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para *risk professional* diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang baik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan,

infrastrukur baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia.

b. Tantangan Ketenagakerjaan Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah komunitas yang tinggal di dalam satu daerah yang memiliki ikatan kuat dan sangat mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dikarenakan pada masyarakat desa tradisi itu masih sangat kuat dan kental. Bahkan terkadang tradisi ini juga sangat mempengaruhi perkembangan desa, karena terlalu tinggi menjunjung kepercayaan nenek moyang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan pembaharuan desa. Di sisi lain banyak hal yang mengakibatkan sebuah desa sulit untuk mengalami pembaharuan, antara lain isolasi wilayah, yaitu desa yang wilayahnya berada jauh dari pusat ekonomi daerah, desa yang mengalami ketertinggalan di bidang pembangunan jalan dan sarana-sarana lainnya, sulitnya akses dari luar, bahkan desa yang mengalami kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa berpengaruh terhadap masalah struktur ketenagakerjaan yang dihadapi di pedesaan, Pedesaan, dihadapkan pada kondisi masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari struktur pendidikan yang masih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja maupun angkatan kerja perkotaan. Kualitas sumber daya manusia di pedesaan sebagian besar memiliki keterampilan rendah *(low skill)*. Rata-rata lama sekolah bagi penduduk pedesaan yang berusia di atas 15 tahun hanya 5,84 tahun atau tidak lulus sekolah dasar, yakni 6 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah bagi penduduk kota sudah mencapai 8,73 tahun. Proporsi penduduk usia di atas 15 tahun yang telah mengikuti pendidikan setingkat SMP/MTs di pedesaan sebesar 23,8%, sedangkan di perkotaan mencapai 52,9 persen.

Dampak rendahnya kualitas SDM pedesaan, pada umumnya mereka tergolong miskin karena produktivitasnya rendah. Tantangan ketenagakerjaan masyarakat pedesaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya (bukan sekedar subsisten belaka), terutama para buruh tani. Tekanan ekonomi kapitalis ke pedesaan berupa penerapan teknologi modern dan sistem pasar (mengutamakan efisien) serta perubahan nilai ekonomi mengakibatnya tingginya tingkat konversi tanah dari pertanian ke non-pertanian. Akibatnya, adalah hilangnya kesempatan kerja bagi sebagian besar buruh tani.

Kondisi di atas akan menjadi lebih memprihatinkan jika telah diterapkannya MEA dalam waktu dekat ini. Indonesia kebanjiran produksi pertanian import yang lebih berkualitas, sementara produk pertanian menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika kondisi ini berlanjut dalam waktu yang lama tanpa upaya peningkatan kualitas ketenagakerjaan khususnya bagi masyarakat pedesaan di bidang yang lain

 ISBN 978-602-14314-8-1

(non pertanian) akan berdampak meningkatnya masalah kemiskinan. Alih-alih MEA meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, justru sebaliknya kita akan terpuruk pada situasi ketidakberdayaan di tengah-tengah arus globalisasi.

Fenomena di atas menjadi tantangan bagi ketenagakerjaan masyarakat pedesaan dalam rangka menyongsong MEA pada akhir tahun 2015 ini. Oleh karena itu dibutuhkan gerak cepat upaya meningkatkan kualitas ketenagaan masyarakat pedesaan melalui program pendidikan, khususnya layanan pendidikan non formal yang dapat ditempuh dalam waktu jangka pendek. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan strategis pendidikan nasional yang dimulai tahun 2010-2014, yakni tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis pendidikan nasional ini adalah: a) sebanyak 19,00% anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan. b) sebanyak 60.000 peserta didik kursus dan pelatihan memperoleh sertifikat kompetensi. c) sebanyak 68,00% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. d) Jumlah model dan program nonformal dan informal yang dikembangkan di tingkat regional sebanyak 145. e) Pendidik dan tenaga kependidikan nonformal dan informal mengikuti peningkatan kompetensi mencapai 44,63%.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran di atas dilakukan beberapa kegiatan: a) penyediaan tutor berkompeten yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup, b) penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education.* c) penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan orang dewasa berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

c. Peran Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Meningkatkan Kemampuan Berdaya Saing Masyarakat Pedesaan.

Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia, dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Data tersebut menunjukkan buruknya tingkat pendidikan di Indonesia serta diperlukannya peningkatan mutu sumber daya manusia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah bersama dengan berbagai kalangan telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih bermutu. Kemendiknas

bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (2014) menggiatkan program pendidikan kecakapan hidup dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan vokasi sesuai kebutuhan peluang kerja yang ditangani oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Bahkan pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui BLK telah menyelenggarakan program pelatihan keliling ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil dengan menggunakan kendaraan pelatihan kerja keliling. Kendaraan pelatihan kerja keliling ini dilengkapi peralatan dan instruktur pelatihan kerja yang disesuaikan dengan berbagai kejuruan diantaranya otomotif sepeda motor, las, elektornika, listrik, menjahit/bordir, bangunan dan pertanian. Untuk melaksanakan program ini, Kemenaker menggandeng pemerintah daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota melalui untuk menjalankan program pelatihan kerja keliling ini. Pengelolaan MTU telah diserahkan kepada Dinas ketenagakerjaan serta (BLK) unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang merupakan BLK yang dimiliki pemerintah daerah.

Sedangkan pihak Kemendiknas melaksanakan kegiatan program desa vokasi, aksara kewirausahaan, kewirausahaan masyarakat untuk mencapai tujuan strategis tersedia dan terjangkaunya program pendidikan kecakapan hidup bagi warga di daerah terpencil. Disamping itu, penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup oleh masyarakat melalui lembaga PKBM atau Balai Belajar Bersama (B3). Terdapat 80 persen PKBM Bernomor Induk Lembaga pada akhir tahun 2014.

Tindak lanjut program pembelajaran dari pendidikan kecakapan hidup dilakukan kegiatan pameran expo yang bertujuan menyebarluaskan produk-produk unggulan keterampilan. Sasaran program pendidikan kecakapan hidup adalah semua angkatan kerja terutama yang tinggal di pedesaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran di daerah-daerah pedesaan, dan menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan produktif.

3. Penutup

Komitmen MEA yang direalisasikan pada akhir tahun 2015 memberi peluang meningkatkan akses di bidang ekonomi bagi Indonesia. Namun pada sisi lain komitmen MEA menjadi tantangan, karena kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan Indonesia masih rendah, terutama SDM yang tinggal di pedesaan ditinjau dari tingkat pendidikan dan kemampuan daya saing. Berdasarkan kondisi tersebut, program pendidikan non formal dengan pelatihan pendidikan kecakapan hidup menjadi alternatife solusi yang strategis untuk peningkatan kualitas ketenagakerjaan Indonesia dalam rangka menyongsong MEA.

Daftar Pustaka

Association of Southeast ASIAN Nations (2008). *Asean Economic Community Blueprint*. Jakarta: Asean Secretariat.

Bagus, Prasetyo, 2014. Ketenagaan Indonesia Menghadapi MEA. *Jurnal Online Rechts Vinding*.

 ISBN 978-602-14314-8-1

Dapat diunduh di http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/

Santoso, W. et.al (2008). Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012*: Integrasi ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional*. Jakarta: Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Rencana Strategis Pendidikan Nasional tahun 2010-2014.